



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN MIMIKA

TAHUN 2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	10
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	13
2.1 Gambaran Umum Daerah.....	13
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	46
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	69
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	78
2.2 Gambaran Keuangan Daerah.....	154
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	154
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	19
2.2.3 Kerangka Pendanaan.....	25
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	31
2.3.1 Permasalahan Pembangunan.....	31
2.3.2 Isu Strategis	53
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	103
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	104
3.1.1 Visi.....	104
3.1.2 Misi	106
3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mimika 2025 – 2029	107
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum.....	115
3.2.1 Strategi.....	115
3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan.....	121
3.6 Program Pembangunan Daerah	135
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	174

4.1 Program Perangkat Daerah	174
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	208
BAB V PENUTUP.....	223

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2025...	14
Tabel 2 Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Kecamatan	15
Tabel 3 Daya Dukung Air dan Ambang Batas Penduduk Indikatif Kabupaten Mimika	37
Tabel 4 Status Daya Dukung Pangan Indikatif Kabupaten Mimika	39
Tabel 5 Indeks Risiko Bencana Indonesia Kabupaten Mimika	43
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin Tahun 2024.....	44
Tabel 7 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)	46
Tabel 8 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)	48
Tabel 9 Jumlah Penduduk Usia Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Mimika Tahun 2024	52
Tabel 10 Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting	61
Tabel 11 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.....	62
Tabel 12 Indikator Perlindungan Sosial yang Adaptif	63
Tabel 13 Indeks Pendidikan	77
Tabel 14 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pendidikan	83
Tabel 15 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kesehatan	86
Tabel 16 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93
Tabel 17 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	95
Tabel 18 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	97
Tabel 19 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Sosial	100
Tabel 20 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	102
Tabel 21 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan ...	105
Tabel 22 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Ketahanan Pangan	107
Tabel 23 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup.....	110
Tabel 24 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan.	113

Tabel 25 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	115
Tabel 26 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Perhubungan.....	116
Tabel 27 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	118
Tabel 28 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	120
Tabel 29 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal	122
Tabel 30 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga...	124
Tabel 31 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Statistik.....	127
Tabel 32 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Persandian	128
Tabel 33 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan	129
Tabel 34 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan	131
Tabel 35 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kearsipan	132
Tabel 36 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	134
Tabel 37 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pariwisata.....	137
Tabel 38 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Urusan Pertanian dan Peternakan.....	139
Tabel 39 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	142
Tabel 40 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Perencanaan.....	144
Tabel 41 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Keuangan	147
Tabel 42 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149
Tabel 43 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pengawasan.....	152
Tabel 44 Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024	1
Tabel 45 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.....	3
Tabel 46 Proporsi sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024	5
Tabel 47 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Mimika	7
Tabel 48 proporsi belanja daerah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.....	9
Tabel 49 Pembiayaan Daerah Kabupaten Mimika 2020-2024.....	11
Tabel 50 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Mimika 2020-2024 (dalam Juta)	15

Tabel 51 Rasio keuangan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.....	17
Tabel 52 Belanja Barang dan Jasa serta Pegawai Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024	21
Tabel 53 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mimika di Tahun 2020- 2024.....	23
Tabel 54 Rincian Pembiayaan Untuk Menutupi Defisit.....	23
Tabel 55 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2020 - 2024.....	24
Tabel 56 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2030	26
Tabel 57 Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah.....	33
Tabel 58 Telaah RTRW Kabupaten Mimika	82
Tabel 59 Penyandingan Asta Cita, Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua Tengah dengan Isu Strategis RPJMD Mimika.....	100
Tabel 60 Tujuan, Sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.....	108
Tabel 61 Strategi	119
Tabel 62 Arah Kebijakan.....	123
Tabel 63 Penahapan Pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2026-2030	132
Tabel 64 Singkronisasi Program Strategis Kepala Daerah dengan Program Berdasarkan Kepmendagri No.900.1-2850 Tahun 2025.....	137
Tabel 65 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika ...	139
Tabel 66 Program Penunjang Pembangunan Daerah.....	165
Tabel 67 Program dan Pagu Anggaran Kabupaten Mimika 2026-2030 ...	175
Tabel 68 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mimika 2025- 2030.....	209
Tabel 69 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Mimika 2025- 2030.....	215

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
Gambar 2 Peta Wilayah Kabupaten Mimika	14
Gambar 3 Peta Topografi Kabupaten Mimika	16
Gambar 4 Kontribusi PDRB Kabupaten Mimika terhadap Nasional (ADHB)	17
Gambar 5 Kontribusi PDRB Kabupaten Mimika terhadap Nasional (ADHK)	18
Gambar 6 Peta Rencana Kawasan Perkebunan	26
Gambar 7 Peta Rencana Kawasan Perikanan Tangkap.....	29
Gambar 8 Peta Rencana Kawasan Pertambangan	32
Gambar 9 Peta Rencana Kawasan Pariwisata.....	35
Gambar 10 Indeks Ketahanan Pangan.....	40
Gambar 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	42
Gambar 12 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika	45
Gambar 13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika 2020-2024	49
Gambar 14 Laju Inflasi Kabupaten Mimika Tahun 2024	51
Gambar 15 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024	53
Gambar 16 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika	55
Gambar 17 Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.....	57
Gambar 18 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	59
Gambar 19 Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten di Papua Tengah Tahun 2024	66
Gambar 20 Capaian Indeks Pembangunan Gender	68
Gambar 21 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69
Gambar 22 Indeks Inovasi Tahun 2023-2024	74
Gambar 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023-2024	76
Gambar 24 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023-2024.....	81
Gambar 25 Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.....	2
Gambar 26 Belanja Kabupaten Mimika	9

Gambar 27 Perkembangan SILPA Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 .	13
Gambar 28 proporsi belanja daerah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024	20
Gambar 29 Proses Pencapaian Visi Kabupaten Mimika 2025-2029	105

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang terstruktur, mulai dari perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek, yang saling berkaitan dalam substansi dan tujuan. Perencanaan yang baik menjadi arah bagi pencapaian cita-cita pembangunan, sekaligus pedoman strategi dan metode pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan, dari pusat hingga daerah, dan menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahannya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya yang sistematis dan terencana oleh seluruh komponen daerah untuk mengubah kondisi yang belum optimal menjadi lebih baik melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan juga dipahami sebagai suatu proses yang berkesinambungan, yang mencakup pengambilan keputusan atau pilihan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu di masa mendatang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menetapkan empat pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Pendekatan teknokratik, menggunakan metode ilmiah dan kerangka berpikir rasional untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan.

3. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yang mengintegrasikan perencanaan dari tingkat desa hingga nasional.
4. Pelaksanaan sistematis dan konsisten, menggabungkan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta top-down dan bottom-up, dengan dasar kajian ilmiah, bukti fisik, data, dan informasi kondisi existing daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029. RPJMD disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2025–2030, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dilantik pada tanggal 27 Maret 2025, dan RPJMD ini ditetapkan 6 (enam) bulan setelah pelantikan melalui Peraturan Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029 dilakukan secara teknokratik, partisipatif, politis, serta melalui pendekatan top-down dan bottom-up, serta dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029 memiliki nilai strategis yang sangat penting. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pembangunan, tetapi juga sebagai kontrak politik dan sosial antara Bupati dan Wakil Bupati dengan masyarakat, karena menjadi penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rencana pembangunan lima tahunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, RPJMD merupakan dokumen legal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga mengikat seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. RPJMD juga menjadi instrumen utama untuk mengintegrasikan RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Provinsi, serta menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan (RKPD). Dengan demikian, RPJMD berperan sebagai alat pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan, sekaligus mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan daerah.

Secara substansi, RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029 memuat:

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah, mencakup profil wilayah, demografi, potensi sumber daya, kondisi sosial-ekonomi, serta capaian pembangunan daerah sebelumnya.
2. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, meliputi perkembangan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta proyeksi kapasitas fiskal lima tahun ke depan.
3. Analisis Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, yang memuat identifikasi permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis yang dihadapi daerah. Analisis dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi objektif daerah, capaian pembangunan sebelumnya, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Permasalahan pembangunan mencakup berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik, yang perlu ditangani secara sistematis. Dari permasalahan tersebut kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah selama periode RPJMD 2025–2029.
4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah, sebagai arah pembangunan lima tahunan yang terukur.
5. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, yang menjadi langkah-langkah prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan.
6. Indikasi Program Pembangunan Daerah, yang memuat daftar program prioritas OPD beserta target kinerja dan indikasi pendanaan.

Dengan penyusunan berbasis data dan analisis yang komprehensif, RPJMD ini diharapkan mampu menjadi instrumen utama pembangunan daerah yang konsisten, adaptif, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Mimika, sekaligus berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,

- Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6804);
18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 6042);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

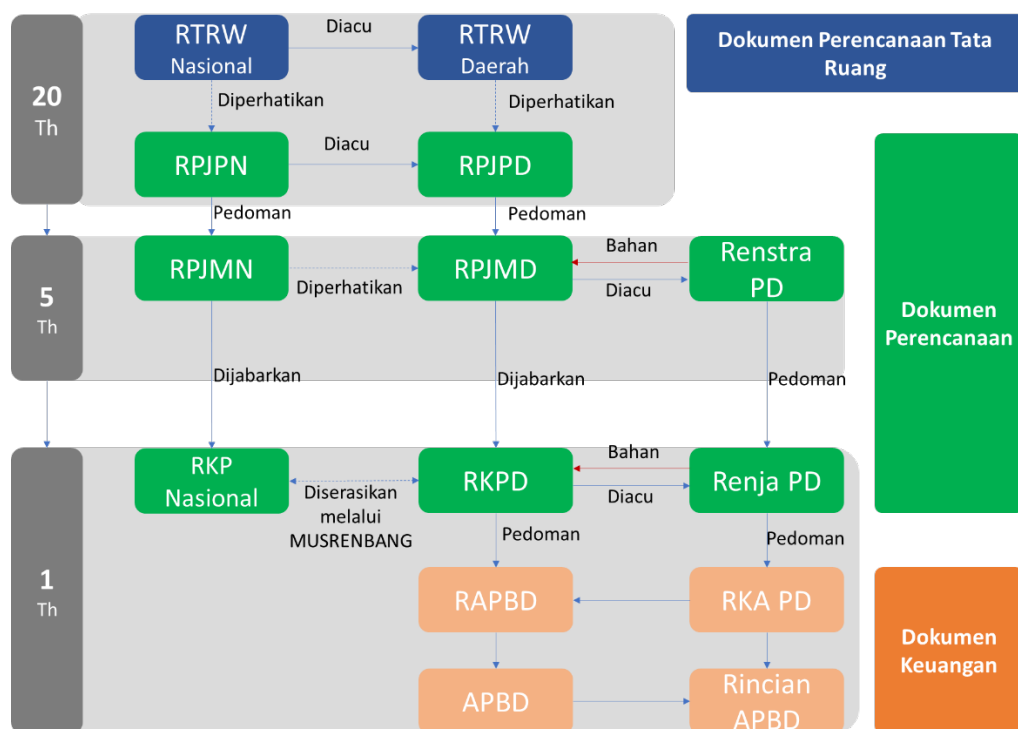
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
32. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
33. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 259);
36. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana

- Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
37. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 49. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 50. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Sinergisitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2025-2029 ini adalah untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terarah, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah Kabupaten Mimika.

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029 ini adalah:

1. Sebagai bahan untuk penyelarasan substansi arah kebijakan pembangunan daerah 2025-2029 dengan Visi, Misi dan Program dari Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Sebagai bahan untuk penyelarasan arah kebijakan keuangan daerah 2025-2029 dengan Visi, Misi dan Program dari Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Mimika periode perencanaan Pembangunan Daerah 2025 - 2029.
4. Melaksanakan Amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pasal 201 dan ayat 7

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sistematika RPJMD Kabupaten Mimika, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi daerah secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan dan menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah terkait dengan kinerja keuangan masa lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terukur. Setiap sasaran dilengkapi indikator dan target capaian, yang menjadi dasar penyusunan program perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi program dan kegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD. Disajikan pula capaian kinerja pemerintah daerah melalui indikator utama dan kunci, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pembangunan.

BAB V PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah ini merupakan penjelasan mengenai gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Dimana ini menunjukkan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1 Gambaran Umum Daerah

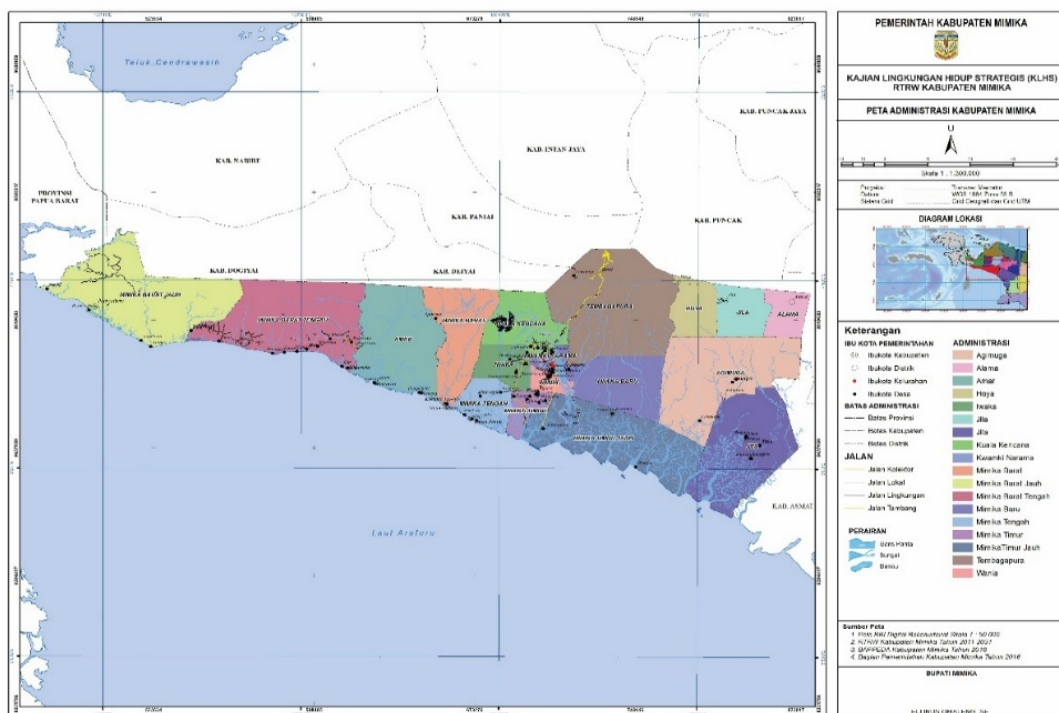
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis

1. Posisi Strategis Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Papua. Secara geografis Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31' - 138°31' Bujur Timur dan 4°60' - 5°18' Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Mimika memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Puncak
2. Sebelah selatan : Laut Arafura
3. Sebelah timur : Kabupaten Nduga dan Asmat
4. Sebelah barat : Provinsi Papua Barat



Gambar 2 Peta Wilayah Kabupaten Mimika
Sumber : RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31'138°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki 18 Distrik. Distrik-distrik tersebut yaitu Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Jita, Agimuga, Jila, Alama, Hoya dan Tembagapura.

Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2025

Distrik	Luas (Km2)	Persentase
1. Agimuga	2.198,56	10,00
2. Amar	1.801,50	8,19
3. Alama	365,92	1,66
4. Hoya	563,78	2,56
5. Iwaka	492,73	2,24
6. Jila	622,83	2,83
7. Jita	1.962,33	8,92

Distrik	Luas (Km2)	Persentase
8. Kuala Kencana	860,74	3,91
9. Kwamki Narama	12,86	0,06
10. Mimika Barat	1.187,85	5,40
11. Mimika Barat Jauh	2.485,89	11,30
12. Mimika Barat Tengah	2.292,46	10,42
13. Mimika Baru	1.509,48	6,86
14. Mimika Tengah	526,67	2,39
15. Mimika Timur	290,48	1,32
16. Mimika Timur Jauh	2.035,36	9,25
17. Tembagapura	2.586,86	11,76
18. Wania	197,32	0,90
Mimika	21.693,51	100,00

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel diatas bisa, maka luas wilayah Distrik Kwamki Narama merupakan Distrik dengan luas wilayah terkecil, yaitu 12,89 Km² atau 0,06% dari total wilayah Kabupaten Mimika. Sedangkan Distrik dengan luas wilayah terbesar adalah distrik Tembagapura dengan luas wilayah 2.586,86 Km² atau 11,76% dari total wilayah Kabupaten Mimika, jauh lebih luas dari Distrik Kwamki Narama.

Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, Hoya, Alama dan Jila. Distrik-distrik selain ketiga Distrik tersebut merupakan Distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah yaitu: Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana, Distrik Tembagapura dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, dan Jita merupakan sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.

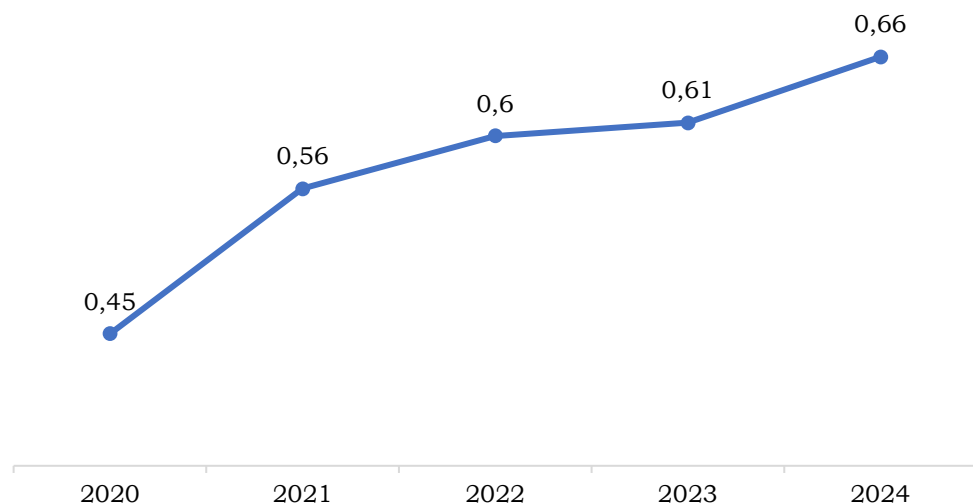
Tabel 2 Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Kecamatan

No	Distrik	Ibu Kota Distrik	Tinggi (mdpl)
1	Agimuga	Kiliarma	500
2	Amar	Amar	4
3	Alama	Alama	2800

kontribusi PDRB yang dihasilkan. Penjelasan difokuskan pada bagaimana perekonomian Mimika, yang didominasi oleh sektor unggulan, memberikan sumbangan berarti terhadap PDB nasional dan menempatkan Mimika sebagai salah satu daerah dengan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

a. Kontribusi PDRB Kabupaten Mimika terhadap PDRB Nasional (ADKB)

Kontribusi PDRB Kabupaten Mimika atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan besarnya peran daerah ini dalam menopang perekonomian nasional. Melalui pendekatan ADHB, kontribusi yang dihitung menggambarkan nilai nominal perekonomian Mimika dalam setiap tahunnya, sehingga terlihat jelas seberapa besar sumbangan yang diberikan dibandingkan total PDB Indonesia. Data dalam lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa kontribusi Mimika terus meningkat, mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin signifikan bagi pembangunan nasional. Perkembangan kontribusi tersebut disajikan dalam grafik berikut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren tahun 2020–2024.



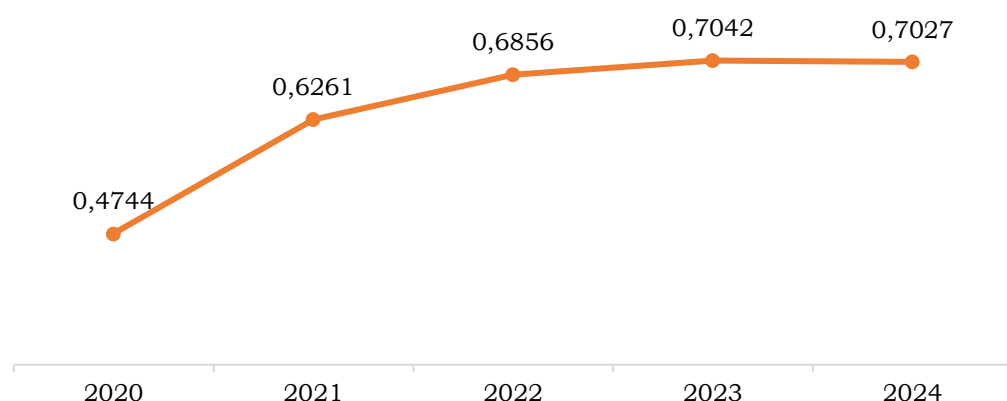
Gambar 4 Kontribusi PDRB Kabupaten Mimika terhadap Nasional (ADHB)

Sumber: Hasil Olah Data BPS

Kontribusi PDRB Kabupaten Mimika atas dasar harga berlaku (ADHB) terhadap PDB nasional menunjukkan tren yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 kontribusi Mimika tercatat sekitar 0,45%, kemudian naik menjadi 0,56% pada 2021. Tahun 2022 kontribusi meningkat lagi menjadi 0,60%, dan pada 2023 mencapai 0,61%. Untuk tahun 2024, kontribusinya diperkirakan mencapai 0,66%. Kenaikan bertahap ini menunjukkan bahwa secara nominal, peran Mimika dalam perekonomian nasional semakin besar.

b. Kontribusi PDRB Kabupaten Mimika terhadap PDRB Nasional (ADHK)

Selain berdasarkan harga berlaku, kontribusi PDRB Kabupaten Mimika juga dapat dilihat melalui pendekatan harga konstan (ADHK) yang mencerminkan nilai riil perekonomian setelah menghilangkan pengaruh inflasi. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pertumbuhan ekonomi riil dan daya dorong Mimika terhadap perekonomian nasional. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi riil Mimika terhadap PDB nasional menunjukkan tren yang relatif meningkat dan stabil, yang menegaskan peran strategis daerah ini dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan kontribusi tersebut ditampilkan dalam grafik berikut, yang menggambarkan tren kontribusi Mimika terhadap PDB nasional periode 2020–2024.



Gambar 5 Kontribusi PDRB Kabupaten Mimika terhadap Nasional (ADHK)

Sumber: Hasil Olah Data BPS

Jika dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), kontribusi Mimika juga cenderung meningkat. Pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 0,47%, naik menjadi 0,63% pada 2021, kemudian 0,69% pada 2022. Tahun 2023 kontribusinya mencapai 0,70% dan tetap stabil di kisaran 0,70% pada 2024. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan riil ekonomi Mimika relatif lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional, sehingga kontribusinya terhadap output riil Indonesia semakin kuat.

Secara umum, kontribusi Kabupaten Mimika terhadap perekonomian nasional menunjukkan tren peningkatan baik berdasarkan PDRB ADHB maupun ADHK. Peningkatan ini menandakan bahwa Mimika memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor unggulan yang dimilikinya. Ke depan, strategi yang perlu ditempuh adalah memperkuat basis ekonomi lokal dengan diversifikasi sektor, mendorong hilirisasi sumber daya alam, serta memastikan pertumbuhan yang inklusif agar manfaat kontribusi ekonomi daerah tidak hanya dirasakan secara makro, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika secara langsung.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua Tengah yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah, baik yang berada di daratan, pesisir, maupun laut. Keberagaman potensi alam tersebut menjadikan Mimika memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah maupun kontribusi terhadap perekonomian nasional. Sumber daya alam yang dimiliki tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan yang telah lama menjadi motor penggerak ekonomi daerah, tetapi juga meliputi potensi kehutanan, perikanan, pertanian, serta sumber daya hayati lainnya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam di Mimika memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Di satu sisi, sektor-sektor tersebut mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan

masyarakat. Namun di sisi lain, pengelolaan yang tidak terencana dan tidak memperhatikan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengurangi keberlanjutan pemanfaatannya. Oleh karena itu, pengembangan potensi sumber daya alam di Kabupaten Mimika ke depan perlu diarahkan pada strategi yang seimbang, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memastikan kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

1. Potensi Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Mimika merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai penopang pembangunan daerah. Keberagaman kondisi geografis, mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan, memberikan peluang bagi pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian yang dapat disesuaikan dengan karakteristik lahan dan iklim setempat. Potensi ini menjadikan pertanian sebagai sektor strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung diversifikasi ekonomi di luar sektor pertambangan.

Selain berfungsi sebagai penyedia pangan, sektor pertanian juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas basis ekonomi lokal. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini mampu mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, serta mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan pertanian di Mimika perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian, pemanfaatan teknologi modern, dan penguatan kelembagaan petani.

a. Potensi Tanaman Pangan

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Mimika tidak hanya terletak pada kekayaan tambang yang telah lama menjadi sektor unggulan, tetapi juga mencakup ketersediaan lahan yang luas untuk mendukung sektor pertanian. Berdasarkan kriteria pengembangan, pertanian tanaman pangan di Kabupaten Mimika direncanakan tersebar di beberapa distrik, yaitu Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana,

Mimika Barat Jauh, Mimika Barat, Amar, Iwaka, Wania, Tembagapura, Mimika Barat Tengah, Mimika Tengah, dan Mimika Timur Jauh dengan total luas mencapai 20.375,62 hektar.

Luas lahan tersebut merupakan salah satu modal utama dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam non-tambang di Mimika, sekaligus membuka peluang diversifikasi ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang optimal, sektor pertanian tanaman pangan dapat menjadi pendorong kemandirian pangan lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengembangan pertanian berbasis potensi lahan ini akan berkontribusi dalam menjaga keseimbangan struktur ekonomi daerah agar tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif semata, melainkan juga mengembangkan sektor produktif yang berkelanjutan.

Kawasan pertanian tanaman pangan dibedakan atas pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Kawasan tanaman pangan lahan basah merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pertanian tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya diperoleh secara alamiah maupun secara teknis. Kriteria penentuan kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan yang meliputi:

- 1) Ketinggian < 1.000 meter;
- 2) Kelerengan < 40%;
- 3) Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm; dan
- 4) Curah hujan antara 1500 – 4000 mm pertahun.

Kriteria kawasan peruntukan pertanian lahan basah meliputi:

- 1) Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah;
- 2) Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah mampu memberikan manfaat:
 - a) Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - b) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c) Meningkatkan fungsi lindung;

- d) Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;
 - e) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f) Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - g) Menciptakan kesempatan kerja;
 - h) Meningkatkan ekspor; dan
 - i) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Sesuai untuk pengembangan pertanian. Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman padi ladang dan palawija. Kriteria kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang tidak mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan dan memiliki :
- a) Ketinggian < 1000 m dan Kelerengan < 40%;
 - b) Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm; dan
 - c) Curah hujan antara 1500 – 4000 mm pertahun.

Adapun kriteria kawasan peruntukan pertanian lahan kering meliputi:

1. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan kering.
2. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan kering mampu memberikan manfaat :
 - a. Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Meningkatkan fungsi lindung;
 - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - g. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan ekspor; dan
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kriteria di atas, maka rencana pengembangan pertanian tanaman pangan terdapat di Kabupaten Mimika terdapat di

Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Tembagapura, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Tengah dan Distrik Mimika Timur Jauh dengan luas 20.375,62 Ha.

b. Potensi Hortikultura

Pertanian hortikultura di Kabupaten Mimika memiliki prospek pengembangan yang cukup besar seiring dengan kondisi geografis dan iklim yang mendukung. Keberagaman lahan di wilayah pesisir, dataran rendah, hingga kawasan pegunungan membuka peluang untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, serta biofarmaka. Potensi ini tidak hanya berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat lokal, tetapi juga berpeluang menjadi komoditas unggulan yang dapat dipasarkan ke wilayah lain di Papua maupun ke luar daerah.

Pengembangan kawasan pertanian hortikultura memiliki kriteria yang sama dengan pengembangan kawasan tanaman pangan lahan kering. Adapun rencana kawasan pengembangan pertanian hortikultura di Kabupaten Mimika yang terdapat di Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Tembagapura, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Tengah dan Distrik Mimika Timur Jauh.

Pengembangan hortikultura di Mimika memiliki nilai strategis karena selain dapat meningkatkan ketahanan pangan, juga mampu mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat. Dengan dukungan teknologi budidaya, akses permodalan, serta sistem pemasaran yang terintegrasi, sektor hortikultura berpotensi memberikan nilai tambah yang signifikan, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat kontribusi pertanian dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

c. Potensi Perkebunan

Sektor perkebunan di Kabupaten Mimika memiliki prospek pengembangan yang cukup besar seiring dengan ketersediaan lahan yang luas. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan peruntukan perkebunan di Mimika mencapai 83.043,34 hektar yang tersebar di berbagai distrik. Luasan ini merupakan modal penting untuk mendorong diversifikasi ekonomi daerah, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Kondisi iklim tropis dan kesuburan tanah di beberapa wilayah membuka peluang bagi pengembangan berbagai komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis, seperti kelapa, kakao, kopi, kelapa sawit, dan tanaman lainnya. Selain berfungsi sebagai penyedia bahan baku industri, pengembangan subsektor ini juga berperan dalam meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi lokal.

Ke depan, pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Mimika perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengolahan hasil untuk menghasilkan nilai tambah. Strategi ini akan memperluas akses pasar, memperkuat daya saing produk perkebunan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Dengan tata kelola yang berkelanjutan, perkebunan dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Mimika selain pertambangan dan pertanian. Kawasan perkebunan ini dipergunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek.

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan pada:

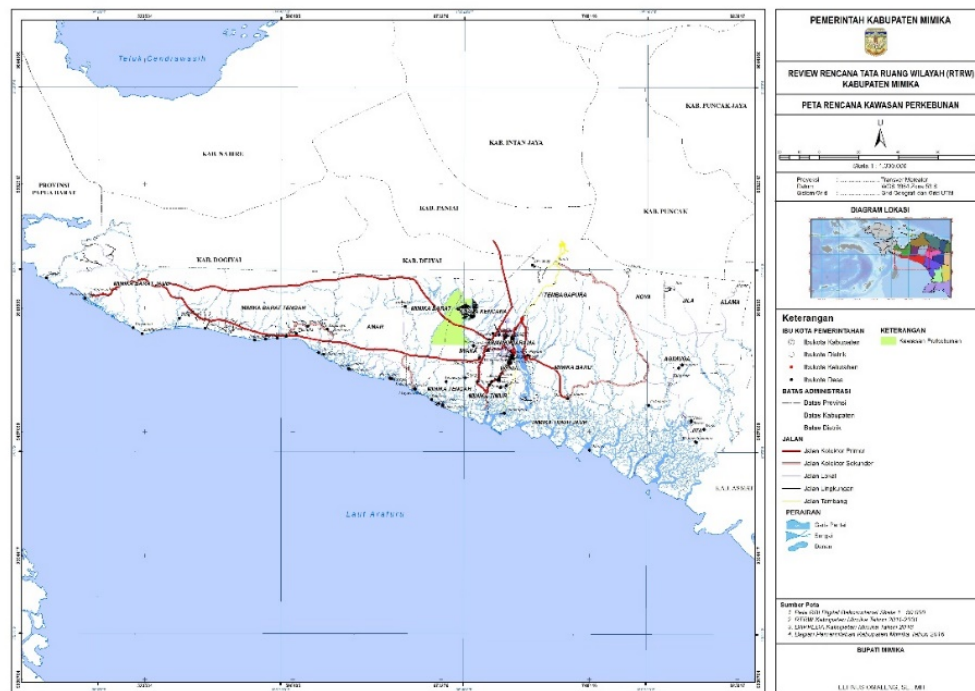
- a. Area lahan tegalan, semak/belukar atau alang-alang dengan kemiringan lahan 15 - 40% sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga kawasan lindung;
- b. Meningkatkan perekonomian penduduk disekitar kawasan penyangga hutan lindung melalui pengembangan agroforestry yang sudah ada dengan jenis komoditas yang komersial dan memiliki keterkaitan dengan industri serta dapat memantapkan fungsi kawasan lindung;
- c. Meningkatkan kualitas dan produktivitas perkebunan dalam mendukung pertumbuhan agroindustri.

- d. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan pada kawasan yang mempunyai kelerengan lebih dari 25% perlu dilakukan dengan land covering untuk mencegah erosi. Sedangkan pembukaan lahan perkebunan pada daerah rawa perlu dibuat drainase untuk mengeringkannya dan tetap menyisakan sebagian wilayahnya tetap berupa rawa untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah;
- e. Pengawasan dan pengendalian pembukaan lahan perkebunan baru sehingga tidak terjadi overlap dengan kegiatan lainnya;
- f. Perbaikan sistem pemasaran hasil produksi perkebunan.
- g. Pembinaan dan penyuluhan terpadu terutama untuk perkebunan rakyat dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan pengelolaan dan penanganan pasca panen.

Arahan kawasan pengembangan perkebunan di Kabupaten Mimika terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit, terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Iwaka, Distrik Kuala Kencana dan Distrik Mimika Barat;
- b. Kawasan peruntukan perkebunan Kakao, terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Iwaka dan Distrik Kuala Kencana;
- c. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh dan Distrik Mimika Barat; dan
- d. Kawasan peruntukan perkebunan buah-buahan terdapat di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Distrik Iwaka, Distrik Mimika Barat jauh dan Distrik Mimika Barat.

Adapun luasan keseluruhan kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Mimika adalah 83.043,34 ha:



Gambar 6 Peta Rencana Kawasan Perkebunan

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019 – 2039

2. Potensi Peternakan

Subsektor peternakan di Kabupaten Mimika juga memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi daerah. Kondisi geografis dengan ketersediaan lahan yang luas, padang rumput alami, serta sumber daya pakan dari hasil pertanian menjadi modal dasar dalam pengembangan peternakan. Selain itu, kebutuhan protein hewani yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk membuka peluang pasar yang menjanjikan bagi usaha peternakan lokal. Jenis ternak yang berpotensi dikembangkan di Mimika antara lain sapi potong, kambing, babi, ayam kampung, serta unggas lainnya. Beberapa di antaranya bahkan sudah menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat setempat, sehingga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang kuat. Jika dikelola dengan baik, subsektor ini dapat berkontribusi tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga sebagai komoditas yang dipasarkan ke wilayah sekitar.

Pengembangan peternakan di Mimika ke depan perlu diarahkan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui penerapan teknologi budidaya modern, penguatan sistem kesehatan hewan, serta

dukungan kelembagaan dan akses permodalan bagi peternak. Di samping itu, pembangunan fasilitas pengolahan hasil peternakan akan menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan strategi tersebut, subsektor peternakan dapat menjadi salah satu penopang ketahanan pangan hewani dan motor pertumbuhan ekonomi masyarakat Mimika.

Kabupaten Mimika memiliki potensi pengembangbiakan ternak besar, ternak kecil, dan juga ternak unggas. Ternak besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar. Hewan yang digolongkan ternak besar, yaitu kuda, kerbau, dan sapi. Ternak kecil adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil. Hewan yang digolongkan ternak kecil, yaitu babi, kambing, domba, dan kelinci. Ternak unggas adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung. Hewan yang digolongkan ke dalam ternak unggas, yaitu ayam, itik (bebek), angsa, dan burung puyuh. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Agimuga, Distrik Jita, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Baru, Distrik Kwamki Narama, Distrik Hoya, Distrik Alama, Distrik Jila Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat dan Distrik Amar.

3. Potensi Perikanan

Kabupaten Mimika memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Letaknya yang berada di pesisir selatan Papua dengan garis pantai yang luas serta perairan laut yang kaya menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu andalan ekonomi daerah. Berbagai jenis ikan ekonomis penting, seperti layang, kembung, bawal hitam, hingga udang dan kepiting bakau, banyak ditemukan di perairan Mimika dan telah menjadi komoditas unggulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal maupun pasar di luar daerah. Kehadiran Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mimika semakin memperkuat posisi Mimika sebagai pusat produksi dan distribusi hasil laut di kawasan timur Indonesia. Infrastruktur seperti PPI Paomako, cold storage, dan fasilitas pengolahan ikan membuka peluang

bagi nelayan lokal untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Bahkan, sebagian hasil perikanan dari Mimika sudah mampu masuk ke pasar antar-daerah hingga ekspor, khususnya untuk komoditas udang.

Selain potensi perikanan tangkap, peluang pengembangan budidaya juga cukup besar, terutama untuk komoditas bernilai tinggi seperti udang, kepiting bakau, dan ikan air tawar yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir maupun perairan sungai. Dukungan lahan, ekosistem mangrove, dan iklim tropis sangat mendukung usaha budidaya yang berkelanjutan. Dengan potensi tersebut, sektor perikanan di Mimika tidak hanya memiliki peran penting dalam menopang ketahanan pangan dan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Ke depan, pengembangan perikanan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, dan hilirisasi produk agar memberikan nilai tambah yang lebih tinggi serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya masyarakat pesisir dan Orang Asli Papua (OAP).

Tabel XX Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Tahun	Produksi Perikanan (Ton)
2020	62.996,00
2021	56.626,16
2022	56.633,61
2023	54.570,36
2024	50.222,21

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika

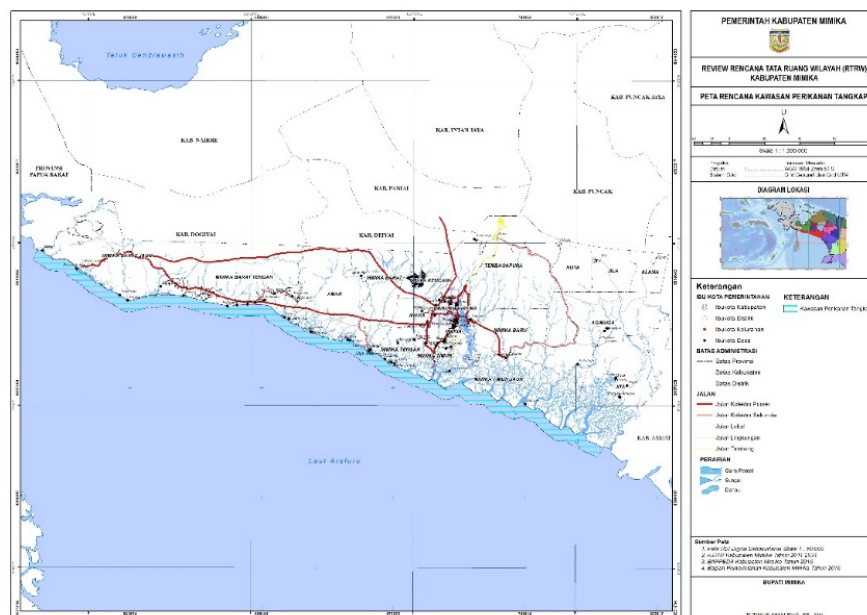
Meskipun data menunjukkan bahwa total produksi perikanan Kabupaten Mimika pada periode 2020–2024 mengalami tren menurun dari 62.996 ton pada tahun 2020 menjadi 50.222 ton pada tahun 2024, hal ini tidak berarti berkurangnya potensi sumber daya perikanan yang dimiliki. Penurunan produksi lebih mencerminkan adanya tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada, seperti keterbatasan armada, teknologi, infrastruktur pendukung, serta faktor ekologi perairan. Di sisi lain, potensi perikanan Mimika tetap sangat besar, baik dari segi perikanan tangkap di laut maupun perikanan budidaya di pesisir, muara, dan perairan darat. Kekayaan jenis ikan

ekonomis, keberadaan udang dan kepiting bernilai tinggi, serta dukungan ekosistem mangrove dan perairan yang luas menjadi modal strategis bagi peningkatan produksi di masa mendatang. Kehadiran SKPT Mimika dan PPI Paomako juga memperlihatkan bahwa infrastruktur dasar untuk menopang sektor ini sudah tersedia dan dapat terus dioptimalkan.

Dengan demikian, meskipun realisasi produksi beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan, potensi perikanan Mimika masih jauh lebih besar dibandingkan capaian aktual. Strategi pengembangan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui modernisasi alat tangkap, penguatan budidaya, pemberdayaan nelayan, serta hilirisasi hasil perikanan agar memberikan nilai tambah. Dengan langkah tersebut, sektor perikanan dapat kembali menunjukkan kinerja yang selaras dengan potensi besar yang dimiliki, sekaligus memperkuat kontribusi Mimika terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Mimika pada umumnya terpecah di beberapa wilayah distrik. Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Mimika, terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Barat Jauh;



Gambar 7 Peta Rencana Kawasan Perikanan Tangkap
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019 – 2039

- b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdiri atas:
 - 1) Budidaya perikanan air payau (bukan tambak) dikembangkan di Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Jita.
 - 2) Budidaya perikanan air tawar di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Distrik Iwaka, Distrik Wania dan Distrik Mimika Timur; dan
 - 3) Budidaya perikanan air laut di Distrik Mimika Barat Jauh.
- c. Kawasan pengolahan hasil perikanan, untuk pengolahan ikan terdapat di Potowaiburu di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur dan Distrik Mimika Timur Jauh.

4. Potensi Pertambangan

Kabupaten Mimika dikenal luas sebagai salah satu daerah dengan potensi pertambangan terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Keberadaan tambang tembaga, emas, dan perak di wilayah Tembagapura telah menjadikan Mimika sebagai pusat kegiatan pertambangan berskala internasional. Potensi ini tidak hanya tercermin dari volume produksi mineral yang tinggi, tetapi juga dari nilai ekonominya yang signifikan dalam menopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah maupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Selain komoditas utama berupa tembaga dan emas yang dikelola oleh perusahaan berskala besar, Mimika juga menyimpan potensi sumber daya mineral lain yang dapat dikembangkan di masa depan. Keberadaan cadangan pasir, kerikil, dan bahan galian lainnya di berbagai distrik membuka peluang untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Potensi energi, seperti batu bara dan mineral ikutan, juga berpeluang untuk diteliti lebih lanjut sebagai bagian dari strategi diversifikasi sektor pertambangan.

Namun, besarnya potensi pertambangan Mimika juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Kegiatan pertambangan berskala besar berpotensi menimbulkan

degradasi ekosistem apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, strategi ke depan harus menekankan pada keseimbangan antara eksploitasi sumber daya mineral dengan upaya konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola yang transparan. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor pertambangan akan terus menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Kabupaten Mimika, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan sektor-sektor lain melalui skema hilirisasi, peningkatan pendapatan daerah, dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.

Arahan lokasi pengembangan kawasan pertambangan/bahan galian pada lokasilokasi yang terdapat potensi bahan tambang/galian dan mempunyai potensi cadangan yang menguntungkan untuk dieksploitasi. Pengembangan Kawasan pertambangan di Kabupaten Mimika, adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya ada pendelinasian kawasan pertambangan dengan jelas;
- b. Kegiatan eksploitasi pertambangan harus dilakukan studi AMDAL;
- c. Kawasan pertambangan yang sudah ada tetap dipertahankan dan dioptimalkan produksinya serta memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
- d. Pengeluaran izin lokasi kegiatan pertambangan baru harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang berlaku.

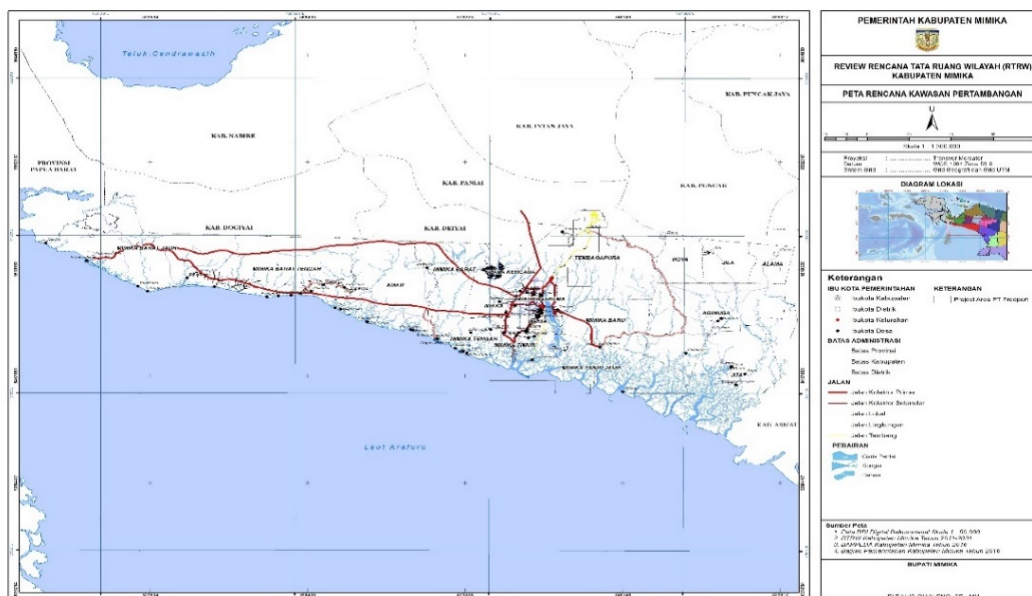
Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara

Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Mimika, terdiri atas:

- 1) Kawasan pertambangan emas, terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jila, Distrik Hoya, Distrik Alama, Distrik Amar dan Distrik Tembagapura.
- 2) Kawasan pertambangan tembaga terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jila, Distrik Amar, dan Distrik Tembagapura.
- 3) Kawasan pertambangan bebatuan (galian c) terdapat di Sungai Iwaka Distrik Kuala Kencana dan Distrik Iwaka serta kali merah di Distrik Iwaka.

- 4) Kawasan pertambangan pemanfaatan pasir sisa tambang (Tailling) disalurkan melalui hulu sungai Aghawagon dan Otomona kemudian diendapkan di daerah ModADA yang melewati Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Tembagapura dan Distrik Wania dengan luas 23.607,82 Ha
 - 5) Kawasan pertambangan batubara terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Amar, Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura dan Distrik Jila.
- b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kawasan pantai selatan Kabupaten Mimika.



Gambar 8 Peta Rencana Kawasan Pertambangan
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019 – 2039

5. Kawasan Pariwisata

Selain kaya akan sumber daya alam berupa tambang, perikanan, dan pertanian, Kabupaten Mimika juga menyimpan potensi besar di sektor pariwisata. Keunikan geografis, kekayaan budaya, serta keindahan alamnya menjadikan Mimika sebagai salah satu destinasi potensial di Papua. Dari kawasan pesisir, sungai, hingga pegunungan, setiap wilayah menyuguhkan daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan sebagai aset pariwisata berkelanjutan. Di wilayah pesisir, Mimika memiliki pantai-pantai yang indah, hutan mangrove, dan ekosistem laut yang kaya yang

berpotensi untuk wisata bahari dan ekowisata. Sementara itu, di bagian hulu terdapat kawasan pegunungan dengan panorama alam menawan, termasuk akses menuju kawasan Carstensz Pyramid yang merupakan salah satu puncak tertinggi di dunia dan menjadi daya tarik wisata minat khusus kelas internasional.

Selain pesona alam, Mimika juga memiliki keragaman budaya dari berbagai suku yang mendiami wilayah ini. Tradisi, seni, serta kearifan lokal masyarakat menjadi bagian penting dari daya tarik pariwisata budaya. Festival-festival daerah, kerajinan tangan, hingga kuliner khas merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Potensi pariwisata ini memberikan peluang besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Namun demikian, pengembangan pariwisata Mimika perlu diarahkan pada prinsip berkelanjutan, dengan mengutamakan pelestarian lingkungan, pelibatan aktif masyarakat lokal, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Dengan langkah tersebut, sektor pariwisata tidak hanya mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga sarana memperkuat identitas daerah serta memperluas kontribusi Mimika dalam jaringan destinasi wisata Papua dan nasional.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Objek wisata di Kabupaten Mimika meliputi objek wisata alam, wisata budaya, maupun objek wisata buatan. Untuk pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Mimika, maka beberapa obyek wisata yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:

- 1) Wisata alam pulau Bidadari dan pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh,
- 2) Wisata alam pantai Keakwa dan pantai Kampus Biru di Distrik Mimika Tengah,
- 3) Wisata Alam Pantai Kawar di Distrik Amar,
- 4) Wisata Alam Pantai Mikapi di Distrik Mimika Barat Tengah,
- 5) Wisata Alam Pantai Ipaya di Distrik Amar,
- 6) Wisata alam kali Mayon di Distrik Kuala Kencana,

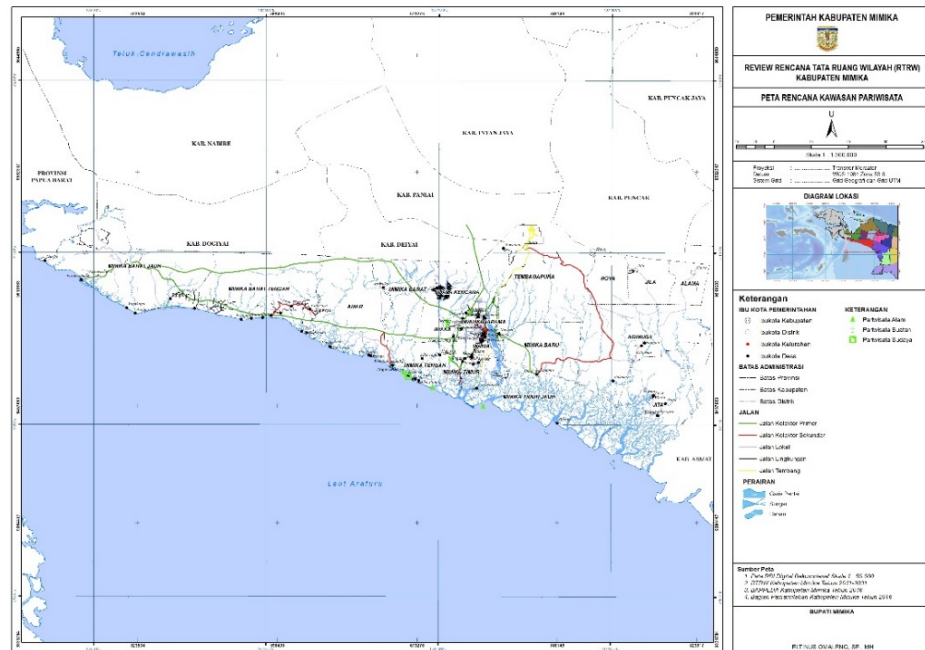
- 7) Wisata Alam kali Iwaka di Distrik Iwaka,
- 8) Wisata Alam kali Kiura di Distrik Mimika Barat,
- 9) Wisata alam gunung Taman Nasional Lorentz di Distrik Jila, Distrik Agimuga dan Distrik Tembagapura,
- 10) Wisata alam ekowisata hutan mangrove (bakau) Keakwa di Distrik Mimika Tengah,
- 11) Wisata Alam Ekowisata Mangrove Perikanan di Distrik Mimika Timur,
- 12) Wisata alam gunung puncak Cartentz di Distrik Tembagapura, dan
- 13) Wisata alam berburu di kampung Pigapu Distrik Mimika Timur.

b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:

- 1) Wisata Budaya peninggalan perang dunia II di pantai Kekwa Distrik Mimika Tengah,
- 2) Wisata Budaya Taman Mapurupuwau kampung Mware di Distrik Mimika Timur,
- 3) Wisata Budaya Tugu Eme Neme di pusat Kota Timika Distrik Mimika Baru,
- 4) Wisata Budaya Festival Kamoro Kakuru di Pusat Kota Timika Distrik Mimika Baru, dan
- 5) Wisata Budaya Kota Tua Kokonao Distrik Mimika Barat.

c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:

- 1) Taman alun-alun dan Padang Golf Rimba Irian di Distrik Kuala Kencana;
- 2) Kolam Renang Kuala Kencana di Distrik Kuala Kencana
- 3) Waterboom Karang Senang di Distrik Kuala Kencana;
- 4) Wisata Air Pelangi di Distrik Wania;
- 5) Taman Rekreasi kolam pemancingan di Distrik Mimika Baru; dan Taman Wisata Religi Kota Timika Distrik Mimika Baru



Gambar 9 Peta Rencana Kawasan Pariwisata
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019 – 2039

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Air

Daya dukung air merupakan analisis perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan standar kebutuhan hidup layak, yaitu 800 m³ perkapita per tahun, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023. Selain itu, ketersediaan air dihitung dengan menggunakan data debit air utama dari Kementerian PUPR dan nilai indeks jasa ekosistem penyedia air bersih Kabupaten Mimika.

Perhitungan daya dukung air hanya menghasilkan nilai kuantitatif dan belum mempertimbangkan kualitas air. Dalam model perhitungan ini, nilai daya dukung yang dihasilkan bersifat indikatif dan merupakan hasil agregasi dari setiap nilai daya dukung air dalam grid spasial yang dianalisis. Selain itu, perhitungan ini hanya memperhitungkan debit air permukaan, tanpa mempertimbangkan pemanfaatan air hujan dan air tanah. Hasil analisis mengenai daya dukung air di Kabupaten Mimika memiliki implikasi yang penting dalam menjaga keseimbangan antara

pasokan air dan kebutuhan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pola penggunaan dan distribusi air di wilayah ini, tindakan yang sesuai dapat diambil untuk mengatasi potensi kekurangan air, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan memastikan ketahanan pasokan air yang berkelanjutan di masa depan. Di tengah perubahan iklim yang dinamis dan tingginya laju urbanisasi, manajemen air yang cerdas menjadi kunci untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan Kabupaten Mimika yang berkelanjutan.

Ketersediaan air di Kabupaten Mimika dianalisis berdasarkan Aliran Debit dari Wilayah Aliran Sungai (WAS) serta perhitungan grid spasial dari jasa ekosistem penyediaan air. Dari hasil analisis tersebut, terungkap bahwa total ketersediaan air di Kabupaten Mimika mencapai 70.096.750.420 m³/tahun. Distrik Mimika Timur Jauh memperlihatkan ketersediaan air tertinggi, mencapai 14.887.673.963 m³/tahun. Selanjutnya, Distrik Jita memiliki ketersediaan air sekitar 11.870.158.879 m³/tahun, diikuti oleh Distrik Tembagapura dengan ketersediaan air mencapai 6.521.440.870 m³/tahun. Namun, Distrik Kwamki Narama dan Distrik Alama menunjukkan ketersediaan air terendah, bahkan mencapai 0 m³/tahun.

Analisis ini memberikan pemahaman mendalam tentang distribusi ketersediaan air di berbagai distrik di Kabupaten Mimika. Distrik-distrik dengan ketersediaan air yang tinggi seperti Mimika Timur Jauh dan Jita dapat dianggap sebagai sumber daya air yang potensial untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, perlu perhatian khusus terhadap distrik-distrik dengan ketersediaan air rendah, seperti Kwamki Narama dan Alama, yang mungkin memerlukan strategi pengelolaan air yang lebih inovatif untuk memenuhi kebutuhan lokal dan mencegah potensi krisis air di masa depan.

Implikasi dari analisis ketersediaan air ini adalah pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan adaptif di Kabupaten Mimika. Dengan memahami kondisi ketersediaan air di setiap distrik, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengoptimalkan penggunaan air, mengelola risiko kekurangan air, dan menjaga ketahanan air di seluruh wilayah kabupaten. Dalam konteks

perubahan iklim dan pertumbuhan populasi yang dinamis, manajemen air yang efektif akan menjadi kunci untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan ekosistem alam Kabupaten Mimika.

Tabel 3 Daya Dukung Air dan Ambang Batas Penduduk Indikatif Kabupaten Mimika

Distrik	Jumlah Penduduk (Grid 900x900)	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air Total (m3/tahun)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Selisih Daya Dukung Air (m3/tahun)	Status Daya Dukung Air
AGIMUGA	1.388	5.738.554.550	1.110.002	7.173.193	5.737.444.548	Belum Terlampaui
ALAMA	2.765	0	2.211.987	0	-2.211.987	Terlampaui
AMAR	3.530	5.076.931.850	2.823.969	6.346.165	5.074.107.881	Belum Terlampaui
HOYA	1.798	266.448.598	1.438.121	333.061	265.010.478	Belum Terlampaui
IWAKA	11.756	715.157.739	19.456.713	881.383	695.701.026	Belum Terlampaui
JILA	2.257	12.544.777	1.805.655	15.681	10.739.122	Belum Terlampaui
JITA	2.513	11.870.158.879	2.010.061	14.837.699	11.868.148.819	Belum Terlampaui
KUALA KENCANA	34.746	2.453.715.083	151.118.774	2.912.991	2.302.596.308	Belum Terlampaui
KWAMKI NARAMA	14.816	0	11.873.431	-26	-11.873.431	Terlampaui
MIMIKA BARAT	3.766	3.488.339.252	23.929.483	4.334.278	3.464.409.769	Belum Terlampaui
MIMIKA BARAT JAUH	4.168	5.444.215.637	3.334.496	6.805.270	5.440.881.140	Belum Terlampaui
MIMIKA BARAT TENGAH	4.635	6.051.170.726	4.707.031	7.562.714	6.046.463.695	Belum Terlampaui
MIMIKA BARU	175.855	3.580.680.086	345.404.457	4.219.949	3.235.275.629	Belum Terlampaui
MIMIKA TENGAH	6.506	2.164.863.879	5.204.518	2.706.080	2.159.659.361	Belum Terlampaui
MIMIKA TIMUR	15.019	1.296.110.604	12.993.294	1.618.916	1.283.117.309	Belum Terlampaui
MIMIKA TIMUR JAUH	5.064	14.887.673.963	4.051.289	18.609.592	14.883.622.674	Belum Terlampaui
TEMBAGAPURA	14.371	6.521.440.870	11.497.162	8.151.801	6.509.943.707	Belum Terlampaui
WANIA	90.436	528.743.927	1.761.376.454	-1.450.354	-1.232.632.527	Terlampaui
Jumlah	395.388	70.096.750.420	2.366.346.899	85.058.393	67.730.403.521	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029

Secara keseluruhan, status daya dukung air di Kabupaten Mimika masih tergolong dalam kategori "Belum Terlampaui", menurut hasil analisis indikatif yang telah dilakukan. Meskipun demikian, terdapat selisih yang signifikan antara total ketersediaan air dan total kebutuhan air, yang mencapai 67.730.403.521 m³/tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa wilayah yang menghadapi potensi kekurangan air, secara keseluruhan Kabupaten Mimika masih memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan penduduk sesuai dengan batasan ketersediaan air yang telah dihitung. Wilayah yang tergolong dalam status daya dukung terlampaui memiliki potensi untuk bergantung pada wilayah lain yang masih dalam status belum terlampaui dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih.

Oleh karena itu, menjaga wilayah yang masih dalam kategori belum terlampaui tersebut menjadi sangat penting. Wilayah-wilayah ini perlu diperhatikan dalam menjaga fungsi alamnya sebagai lahan penyedia air bersih karena memiliki peran yang vital dalam menyediakan air bersih bagi wilayah sekitarnya. Dengan melindungi keberlangsungan fungsi

alaminya, wilayah tersebut dapat terus memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di sekitarnya maupun di wilayah terdekat yang mengalami kekurangan air. Ini menekankan pentingnya strategi pengelolaan air yang berkelanjutan dan mitigasi risiko untuk memastikan ketahanan air yang berkelanjutan di Kabupaten Mimika.

2. Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Daya dukung pangan dianalisis untuk mengetahui status daya dukung pangan, daya dukung dikatakan telah melampaui ambang batas jika kebutuhan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan yang dapat diberikan suatu wilayah. Ketersediaan pangan di Kabupaten Mimika dianalisis berdasarkan data produksi pangan. Ketersediaan pangan diukur dengan konversi kilogram kalori dari produksi tanaman pangan Kabupaten Mimika.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Mimika dianalisis berdasarkan produksi pangan yang didistribusikan ke dalam sistem grid dengan pertimbangan penutupan lahan. Berdasarkan hasil analisis, ketersediaan pangan total di Kabupaten Mimika mencapai 4.895.934.813 kkal/tahun. Distrik Tembagapura dan Distrik Wania mempunyai ketersediaan pangan paling tinggi, dengan ketersediaan pangan masing-masing sebesar 899.253.333 kkal/tahun dan 836.342.606 kkal/tahun. Sedangkan, Distrik Amar dan Distrik Mimika Barat Jauh memiliki ketersediaan pangan paling rendah mencapai 0 kkal/tahun.

Pola distribusi ketersediaan pangan di berbagai distrik di Kabupaten Mimika bergantung pada pola penutupan lahan di masing-masing distrik tersebut. Distrik dengan ketersediaan pangan yang tinggi yaitu Distrik Tembagapura dan Wania merupakan lokasi potensial untuk mendukung peningkatan produksi pangan. Sedangkan, Distrik dengan ketersediaan pangan rendah perlu menjadi perhatian, melalui strategi pemenuhan ketersediaan pangan yang inovatif dan pengembangan potensi pangan lokal.

Tabel 4 Status Daya Dukung Pangan Indikatif Kabupaten Mimika

Distrik	Jumlah Penduduk (Grid 900x900)	Ketersediaan Pangan (kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)	Selisih Daya Dukung Pangan (kkal/tahun)	Status Daya Dukung Pangan
AGIMUGA	1.388	62.910.727	1.063.520.560	-1.000.609.833	Terlampaui
ALAMA	2.765	11.101.893	2.119.360.325	-2.108.258.432	Terlampaui
AMAR	3.530	-	2.705.715.318	-2.705.715.318	Terlampaui
HOYA	1.798	118.420.192	1.377.899.393	-1.259.479.201	Terlampaui
IWAKA	11.756	669.814.211	9.011.345.266	-8.341.531.055	Terlampaui
JILA	2.257	162.827.764	1.730.042.872	-1.567.215.108	Terlampaui
JITA	2.513	59.210.096	1.925.889.453	-1.866.679.357	Terlampaui
KUALA KENCANA	34.746	817.839.451	26.632.583.139	-25.814.743.688	Terlampaui
KWAMKI NARAMA	14.816	96.216.406	11.356.466.430	-11.260.250.024	Terlampaui
MIMIKA BARAT	3.766	48.108.203	2.886.578.507	-2.838.470.304	Terlampaui
MIMIKA BARAT JAUH	4.168	-	3.194.864.442	-3.194.864.442	Terlampaui
MIMIKA BARAT TENGAH	4.635	62.910.727	3.552.554.311	-3.489.643.584	Terlampaui
MIMIKA BARU	175.855	766.030.617	134.792.699.641	-134.026.669.024	Terlampaui
MIMIKA TENGAH	6.506	14.802.524	4.986.578.364	-4.971.775.840	Terlampaui
MIMIKA TIMUR	15.019	203.534.705	11.512.305.185	-11.308.770.480	Terlampaui
MIMIKA TIMUR JAUH	5.064	66.611.358	3.881.641.443	-3.815.030.085	Terlampaui
TEMBAGAPURA	14.371	899.253.333	11.015.718.768	-10.116.465.435	Terlampaui
WANIA	90.436	836.342.606	69.319.506.577	-68.483.163.971	Terlampaui
Jumlah	395.388	4.895.934.813	303.065.269.993	-298.169.335.180	Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029

Analisis daya dukung pangan di Kabupaten Mimika memperlihatkan kondisi status daya dukung pangan terlampaui di setiap distrik, dengan selisih total antara ketersediaan dan kebutuhan mencapai -298.169.335.180 kkal/tahun. Hal ini menjadi perhatian terkait kerawanan pangan, yang dapat berdampak negatif pada kekurangan angka kecukupan gizi. Wilayah yang memiliki status daya dukung pangan terlampaui memiliki potensi untuk bergantung pada wilayah lain dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan melalui peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, manajemen stok, dan optimalisasi distribusi antar distrik (dalam dan luar wilayah Kabupaten Mimika).

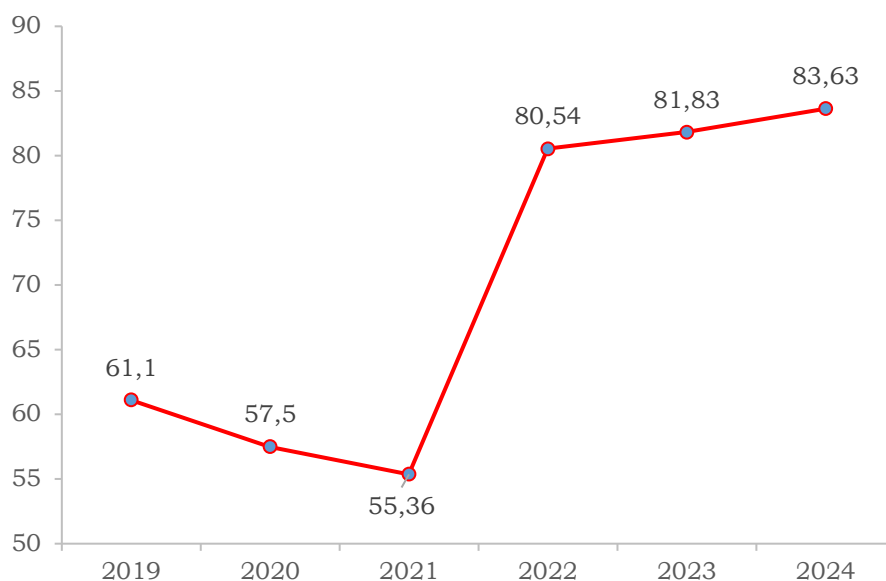
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu wilayah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan. Pengukuran IKP biasanya mencakup tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan (availability),

akses pangan (access), dan pemanfaatan pangan (utilization), yang secara bersama-sama mencerminkan ketahanan pangan di tingkat daerah.

Nilai IKP dinyatakan dalam skala 0 hingga 100, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang lebih baik. Pemantauan IKP secara berkala berperan penting untuk mengidentifikasi potensi kerawanan pangan, mengevaluasi efektivitas program ketahanan pangan, serta merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat sasaran. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, IKP menjadi indikator strategis karena berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan ke-2 (mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan). Dengan demikian, pencapaian IKP yang optimal diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.



Gambar 10 Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan data tahun 2019–2024, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika menunjukkan tren yang dinamis dengan kecenderungan peningkatan signifikan pada periode akhir. Pada tahun 2019, nilai indeks tercatat sebesar 61,10, kemudian mengalami penurunan berturut-turut menjadi 57,50 pada tahun 2020 dan 55,36 pada tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan

serius dalam menjaga ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di daerah. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang sangat signifikan, di mana nilai indeks meningkat menjadi 80,54. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh membaiknya rantai pasok pangan pasca-pandemi COVID-19, penguatan program ketahanan pangan daerah, serta intervensi pemerintah dalam mendukung produksi dan distribusi pangan.

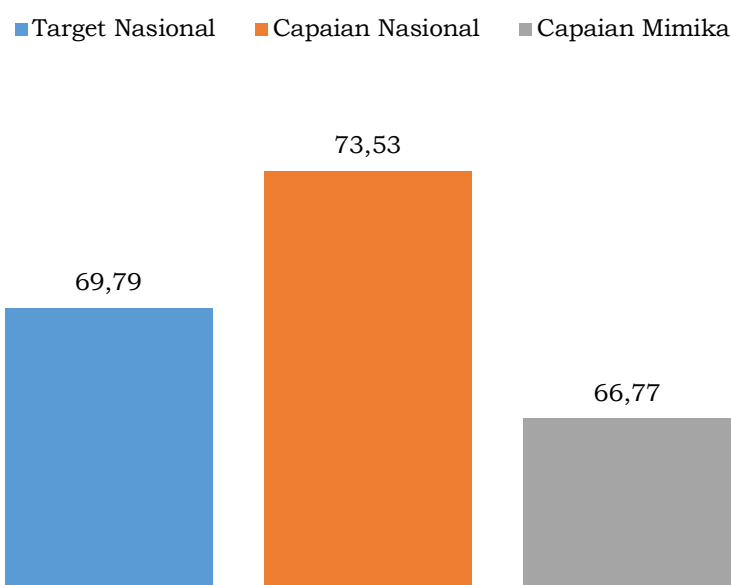
Kinerja positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 81,83, dan kembali meningkat menjadi 83,63 pada tahun 2024. Tren kenaikan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya perbaikan di sektor pangan telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas dan ketersediaan pangan di Kabupaten Mimika. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga konsistensi kinerja ini, terutama melalui penguatan produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, peningkatan infrastruktur distribusi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, pencapaian indeks ketahanan pangan yang tinggi dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan dan pemeliharaan kualitas lingkungan suatu wilayah. Indeks ini disusun berdasarkan tiga parameter utama, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Masing-masing parameter merepresentasikan kondisi faktual kualitas udara, kualitas air permukaan, serta keberlanjutan tutupan lahan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. IKLH digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program pembangunan mampu mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi angkanya, semakin baik kondisi lingkungan hidup di wilayah tersebut.

Pemantauan IKLH secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan, mengukur efektivitas program pengelolaan lingkungan, dan merumuskan strategi perbaikan yang terarah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, IKLH menjadi indikator kinerja yang strategis karena berhubungan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim) dan tujuan ke-15 (menjaga ekosistem daratan). Oleh karena itu, pencapaian IKLH yang optimal diharapkan dapat mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.



Gambar 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Sumber: BPS

Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mimika tercatat sebesar 66,77. Angka ini berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 69,79 dan juga di bawah capaian nasional yang mencapai 73,53. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Mimika masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kualitas udara, kualitas air, maupun tutupan lahan.

Perbedaan yang cukup signifikan antara capaian Mimika dengan capaian nasional mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif

dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Hal ini mencakup pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan IKLH menjadi salah satu indikator penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, program-program strategis yang berorientasi pada perbaikan kualitas lingkungan perlu menjadi prioritas, agar selaras dengan target pembangunan nasional sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Mimika merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik hidrometeorologi maupun geologi, termasuk banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Selain itu, perubahan iklim memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat, memengaruhi sektor pertanian, perikanan, permukiman, dan infrastruktur.

Tabel 5 Indeks Risiko Bencana Indonesia Kabupaten Mimika

Tahun	Nilai IRBI
2020	138,80
2021	138,80
2022	138,80
2023	138,80

Sumber: inaRISK

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Mimika dari tahun 2020 hingga 2023, nilai IRBI daerah ini tercatat stagnan di angka 138,80 yang masuk dalam kategori “sedang”. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika memiliki tingkat kerawanan bencana yang memerlukan perhatian dan mitigasi, namun tidak berada pada level yang sangat tinggi. Stagnasi nilai IRBI selama empat tahun terakhir menandakan bahwa meskipun ada berbagai upaya mitigasi, kapasitas adaptasi dan kesiapsiagaan bencana di daerah ini belum mengalami peningkatan signifikan.

Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Mimika, meliputi: penguatan

kapasitas peringatan dini, penyusunan rencana tanggap darurat yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan strategi ini, daerah dapat menurunkan risiko bencana, melindungi masyarakat rentan, dan menjaga keberlanjutan sosial-ekonomi serta ekosistem lokal.

2.1.1.7 Demografi

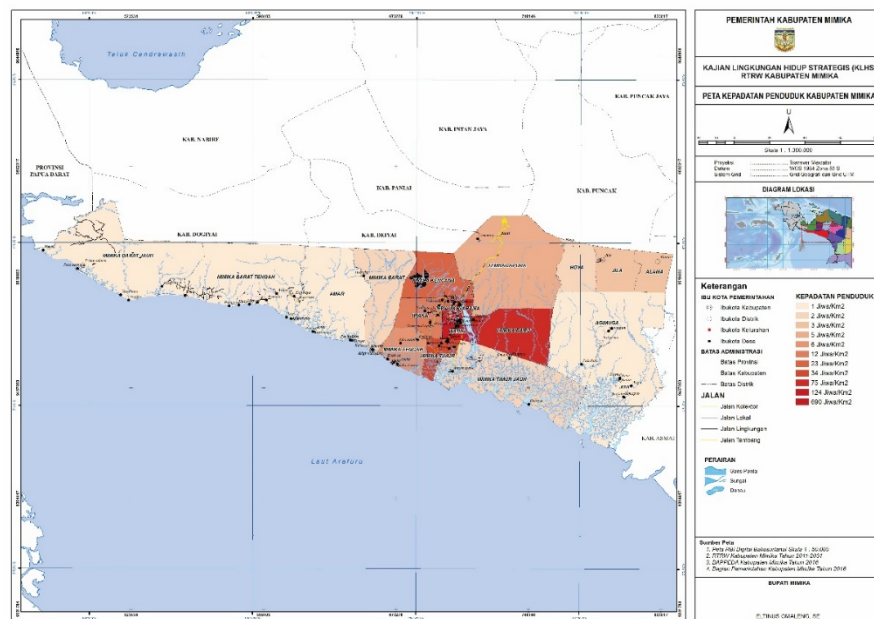
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin Tahun 2024

Distrik	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Agimuga	736	627	1.363
Amar	1.364	1.264	2.628
Alama	1.442	1.261	2.703
Hoya	808	771	1.579
Iwaka	5.817	5.404	11.221
Jila	1.102	975	2.077
Jita	1.130	1.044	2.174
Kuala Kencana	16.600	14.969	31.569
Kwamki Narama	7.130	6.800	13.930
Mimika Barat	1.527	1.389	2.916
Mimika Barat Jauh	1.477	1.320	2.797
Mimika Barat Tengah	1.756	1.590	3.346
Mimika Baru	76.746	67.716	144.462
Mimika Tengah	2.740	2.543	5.283
Mimika Timur	6.133	5.634	11.767
Mimika Timur Jauh	2.254	2.118	4.372
Tembagapura	5.258	5.086	10.344
Wania	33.736	30.412	64.148
Kabupaten Mimika	167.756	150.923	318.679

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Mimika tahun terbaru tercatat sebanyak 318.679 jiwa, terdiri dari 167.756 laki-laki dan 150.923 perempuan. Distribusi penduduk tidak merata antar distrik, dengan konsentrasi terbesar berada di Distrik Mimika Baru yang mencapai 144.462 jiwa (76.746 laki-laki dan 67.716 perempuan), serta Distrik Wania dengan 64.148 jiwa (33.736 laki-laki dan 30.412 perempuan). Kedua distrik ini merupakan pusat pertumbuhan utama dengan kontribusi gabungan lebih dari 65% terhadap total populasi kabupaten.

Distrik Kuala Kencana juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 31.569 jiwa, diikuti oleh Distrik Kwamki Narama (13.930 jiwa), Mimika Timur (11.767 jiwa), Iwaka (11.221 jiwa), dan Tembagapura (10.344 jiwa). Sementara itu, beberapa distrik seperti Agimuga (1.363 jiwa), Hoya (1.579 jiwa), dan Mimika Barat Jauh (2.797 jiwa) memiliki jumlah penduduk relatif kecil. Secara umum, penduduk laki-laki cenderung lebih banyak dibanding perempuan di hampir semua distrik, termasuk di distrik-distrik dengan jumlah penduduk besar seperti Mimika Baru, Wania, dan Kuala Kencana.



Gambar 12 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (present or current land use). Tutupan lahan yang menggambarkan konstruksi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan. Konstruksi tersebut seluruhnya tampak secara langsung dari citra penginderaan jauh. Tiga kelas data secara umum yang tercakup dalam penutup lahan; struktur fisik yang dibangun oleh manusia, fenomena biotik seperti vegetasi alami, tanah pertanian dan kehidupan binatang, dan tipe pembangunan. Secara umum penggunaan

lahan di Kabupaten Mimika didominasi oleh hutan primer dengan luas 12.076,76 Km² dan hutan sekunder 1.114,47 Km². Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Mimika dengan adanya usulan reklamasi yang memanfaatkan lahan hutan mangrove dengan luas 8.377,64 Ha. Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Mimika sesuai dengan peruntukannya yakni terdiri dari perumahan dan kawasan permukiman, bangunan umum, rawa, kebun, tambang, hutan, pertanian dan lain-lain.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu daerah dan menjadi dasar dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Mimika, PDRB tidak hanya mencerminkan kapasitas produksi daerah di berbagai sektor, tetapi juga menjadi gambaran tentang distribusi hasil pembangunan ekonomi yang berdampak langsung pada taraf hidup masyarakat. Sebagai daerah yang memiliki kontribusi signifikan dari sektor tambang dan industri pengolahan, PDRB Mimika memainkan peran strategis dalam mendukung perekonomian regional maupun nasional.

Analisis PDRB dalam RPJMD Kabupaten Mimika berfokus pada pertumbuhan ekonomi, struktur sektor unggulan, serta distribusi PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan. Data ini memberikan pemahaman komprehensif tentang potensi ekonomi daerah, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan memaksimalkan potensi sektor unggulan dan mengatasi kesenjangan antar-sektor, Kabupaten Mimika diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sesuai dengan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 7 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.482.986,9	1.523.195,9	1.557.908,7	1.657.312,9	1.654.168,8

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
B	Pertambangan dan Penggalian	50.702.707,1	81.896.726,7	96.190.021,5	111.810.973,5	130.210.492,0
C	Industri Pengolahan	134.047,4	136.663,9	138.197,1	142.128,8	147.235,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.100,9	14.128,5	15.898,2	17.108,4	18.323,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.115,9	7.362,0	7.568,5	7.601,4	7.330,0
F	Konstruksi	2.686.446,7	2.803.202,5	3.056.806,2	3.152.874,6	3.266.726,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.268.224,7	2.405.650,4	2.544.022,3	2.857.526,8	3.106.553,0
H	Transportasi dan Pergudangan	793.460,9	963.760,0	1.215.410,0	1.414.427,0	1.703.275,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232.870,4	237.309,0	248.491,3	261.622,4	276.967,9
J	Informasi dan Komunikasi	1.649.482,3	1.764.333,6	1.841.706,1	1.861.460,5	1.914.510,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	369.445,1	380.794,1	433.625,2	513.135,0	569.343,1
L	Real Estate	664.079,4	677.653,2	727.110,1	742.440,4	819.885,6
M,N	Jasa Perusahaan	387.632,8	396.123,7	407.556,6	425.855,4	451.304,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.409.900,6	1.410.864,3	1.408.219,4	1.360.294,6	1.459.720,2
P	Jasa Pendidikan	164.015,8	162.375,4	167.409,0	169.147,4	176.834,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.969,2	198.324,3	199.324,3	199.291,2	218.437,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	235.540,7	237.708,1	248.536,0	279.724,3	296.477,9
PDRB TOTAL		63.397.036,7	95.216.352,2	110.407.810,4	126.872.924,7	146.297.585,8

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2025

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling

penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 8 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.176.756,5	1.181.167,5	1.189.783,7	1.232.810,9	1.189.312,4
B	Pertambangan dan Penggalian	41.737.919	60.161.230,0	70.450.482,5	76.488.982,3	80.410.277,1
C	Industri Pengolahan	101.013,2	101.701,2	102.092,2	101.767,5	101.732,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.019,5	9.554,0	10.300,5	10.692,3	10.848,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.305,1	6.421,7	6.542,3	6.517,5	6.381,5
F	Konstruksi	1.814.964,5	1.851.989,8	1.960.516,4	1.994.917,2	2.007.854,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.560.655,2	1.629.741,9	1764.024,0	1.778.760,9	1.810.617,6
H	Transportasi dan Pergudangan	519.645,8	604.037,0	683.819,9	740.622,7	825.305,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	164.190,6	165.137,0	168.516,3	169.514,3	173.226,1
J	Informasi dan Komunikasi	1.270.485,5	1.334.263,9	1.398.562,9	1.408.280,9	1.442.871,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	294.907,1	298.583,1	318.499,9	343.798,7	379.467,4
L	Real Estate	460.690,7	461.704,3	493.469,5	500.382,3	539.700,1
M,N	Jasa Perusahaan	303.581,0	305.736,5	307.955,0	321.426,9	331.514,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.061.001,2	1.064.966,8	1.062.602,5	1.063.234,5	1.081.006,3
P	Jasa Pendidikan	130.372,2	130.541,7	132.143,9	141.755,4	145.635,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.022,8	139.036,8	139.982,3	139.489,9	144.672,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	171.555,6	173.099,6	178.309,9	182.540,8	191.122,4
PDRB TOTAL		50.922.905,3	69.618.912,8	80.277.603,6	86.625.494,9	90.791.544,8

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2025

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika dihitung dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010.



Gambar 13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan selama periode 2019–2023, terutama akibat pengaruh sektor tambang yang dominan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencatat penurunan tajam sebesar -38,47%, yang disebabkan oleh faktor produksi di sektor tambang. Namun, pada tahun 2020, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan positif sebesar 11,55%, meskipun masih berada dalam masa pandemi COVID-19.

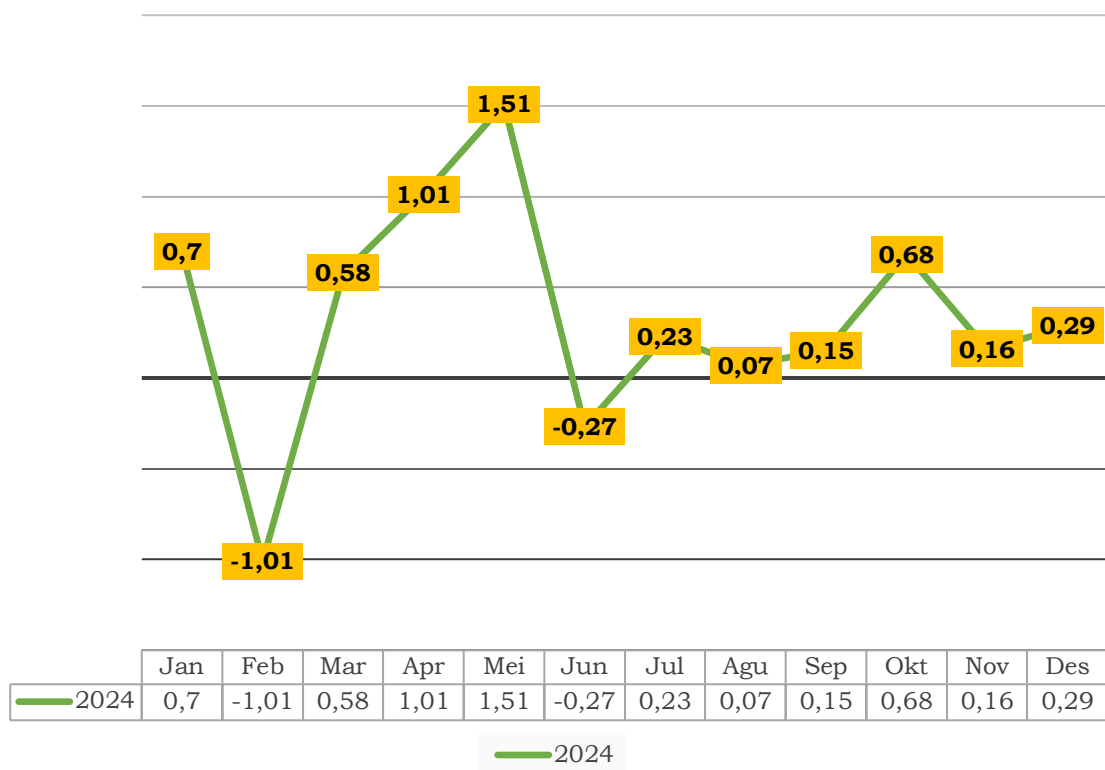
Pemulihan ekonomi berlanjut pada tahun 2021 dengan pertumbuhan yang sangat tinggi, mencapai 36,85%. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas di sektor tambang, didukung oleh kenaikan harga komoditas tambang di pasar global. Meski pertumbuhan melambat pada tahun 2022 (15,31%) dan 2023 (7,9%), angka ini tetap mencerminkan stabilitas dan

kontribusi sektor tambang sebagai motor utama ekonomi Kabupaten Mimika. Tren ini menunjukkan bahwa sektor tambang menjadi penopang utama ekonomi daerah, meskipun terdapat tantangan untuk menjaga keberlanjutan dan diversifikasi ekonomi dalam jangka panjang.

C. Inflasi

Berdasarkan Gambar 23, laju inflasi di Kabupaten Mimika selama tahun 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dari bulan ke bulan. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan capaian sebesar 1,51%, disusul oleh April sebesar 1,01% dan Januari sebesar 0,7%. Lonjakan inflasi pada bulan Mei ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi masyarakat menjelang dan pasca periode Hari Raya, serta potensi kenaikan harga bahan pokok yang bersifat musiman. Namun, di tengah fluktuasi tersebut, terdapat penurunan yang cukup tajam pada bulan Februari dengan angka inflasi -1,01%, yang mencerminkan terjadinya deflasi. Deflasi ini bisa terjadi akibat menurunnya permintaan konsumen pasca libur panjang atau adanya penurunan harga pada kelompok komoditas tertentu seperti bahan makanan. Hal serupa terjadi juga pada bulan Juni yang mengalami deflasi sebesar -0,27%, kemungkinan akibat koreksi harga setelah lonjakan bulan sebelumnya.

Secara umum, tren inflasi dari bulan Juli hingga Desember cenderung lebih stabil, dengan laju inflasi yang relatif rendah dan tidak melebihi angka 0,7%. Kenaikan moderat terlihat pada bulan Oktober sebesar 0,68%, yang bisa jadi berkaitan dengan kebutuhan menjelang akhir tahun atau adanya gangguan distribusi barang. Dari sisi analisis, fluktuasi ini menunjukkan bahwa struktur harga dan permintaan di Kabupaten Mimika masih sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan mungkin juga pasokan yang belum stabil. Pemerintah daerah perlu memperhatikan upaya stabilisasi harga, terutama menjelang momen-momen strategis seperti hari besar keagamaan dan akhir tahun. Penguatan sektor distribusi dan pengendalian harga komoditas pokok menjadi kunci penting untuk menghindari inflasi yang tidak terkendali maupun deflasi yang berisiko menekan aktivitas ekonomi lokal.



Gambar 14 Laju Inflasi Kabupaten Mimika Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2025

D. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah, mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Mimika, aspek ini menjadi fokus strategis untuk mengidentifikasi dinamika angkatan kerja, tingkat partisipasi kerja, struktur lapangan pekerjaan, hingga tantangan terkait pengangguran. Analisis aspek ketenagakerjaan memberikan gambaran tentang distribusi tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan, serta kontribusi masing-masing kelompok terhadap produktivitas daerah.

Data ketenagakerjaan juga menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang responsif dan inklusif untuk mengatasi kesenjangan gender, mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kondisi ketenagakerjaan tidak hanya penting untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Mimika, tetapi juga untuk memastikan tercapainya

visi pembangunan daerah yang berbasis kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Tabel 9 Jumlah Penduduk Usia Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Mimika Tahun 2024

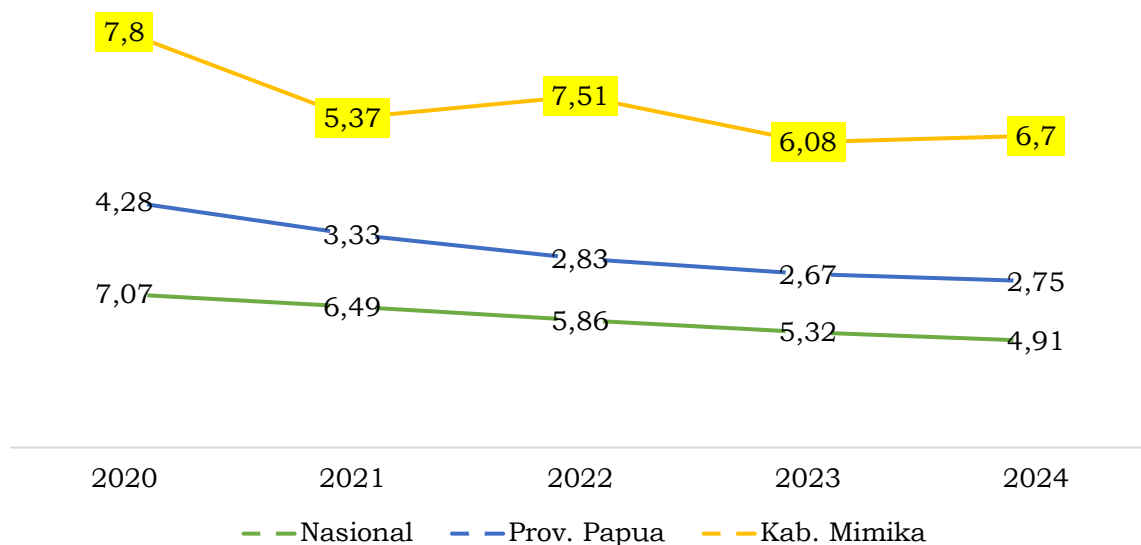
Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	106.569	46.525	153.094
1. Bekerja	100.971	41.865	142.836
2. Pengangguran terbuka	5.598	4.660	10.258
Bukan Angkatan Kerja	18.017	51.672	69.688
1. Sekolah	7.845	7.885	15.730
2. Mengurus Rumah Tangga	4.597	41.984	46.581
3. Lainnya	5.575	1.803	7.378
Total	124.586	98.197	299.701

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan Tabel 10 Jumlah Penduduk Usia Kerja berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika Tahun 2024, jumlah total penduduk usia kerja tercatat sebanyak 299.701 jiwa, yang terdiri atas 124.586 laki-laki dan 98.197 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 153.094 jiwa termasuk dalam kategori angkatan kerja, sedangkan 69.688 jiwa tergolong dalam bukan angkatan kerja. Di dalam kelompok angkatan kerja, sebagian besar penduduk bekerja, yaitu sebanyak 142.836 jiwa, yang terdiri atas 100.971 laki-laki dan 41.865 perempuan. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10.258 jiwa, dengan komposisi 5.598 laki-laki dan 4.660 perempuan. Sementara itu, dari kelompok bukan angkatan kerja, sebagian besar di antaranya adalah perempuan yang mengurus rumah tangga, yakni sebanyak 41.984 jiwa, jauh melebihi laki-laki dalam kategori yang sama, yaitu 4.597 jiwa. Sisanya terdiri dari mereka yang masih sekolah (16.730 jiwa) dan melakukan aktivitas lainnya (7.378 jiwa).

Data ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Mimika cukup tinggi, yaitu sekitar 51% dari total penduduk usia kerja. Namun, terdapat ketimpangan gender yang cukup mencolok dalam hal partisipasi kerja, di mana laki-laki mendominasi angkatan kerja (sekitar 69,6%), sementara perempuan masih banyak berada di luar

angkatan kerja (hanya 30,4% dari angkatan kerja). Ketimpangan ini sebagian besar disebabkan oleh peran domestik perempuan yang masih sangat dominan, terlihat dari jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga mencapai hampir 42 ribu jiwa. Rasio pengangguran terbuka juga menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun angka absolutnya sedikit lebih tinggi pada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap lapangan kerja masih perlu diperluas, khususnya bagi perempuan yang ingin berpartisipasi dalam dunia kerja. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran penting bagi perencanaan kebijakan ketenagakerjaan dan pemberdayaan perempuan di Mimika, dengan fokus pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja, penyediaan layanan dukungan rumah tangga, serta penguatan keterampilan kerja bagi pencari kerja.



Gambar 15 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Sumber: Bada Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 23 yang memperlihatkan perbandingan tingkat pengangguran terbuka antara nasional, Provinsi Papua, dan Kabupaten Mimika selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Kabupaten Mimika mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dibandingkan dua wilayah

lainnya. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka di Mimika tercatat sebagai yang tertinggi, yakni sebesar 7,8%, jauh di atas tingkat nasional sebesar 7,07% dan Provinsi Papua sebesar 4,28%. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2021 di Mimika hingga mencapai 5,37%, namun kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,51%, mencerminkan adanya instabilitas di pasar kerja daerah yang kemungkinan dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu seperti pertambangan dan jasa informal.

Pada tahun 2023, angka pengangguran terbuka di Mimika kembali menurun menjadi 6,08%, sebelum sedikit naik menjadi 6,7% pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di tingkat nasional menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun, dari 7,07% di tahun 2020 menjadi 4,91% di tahun 2024. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Papua, yang terus menunjukkan penurunan stabil dari 4,28% di tahun 2020 menjadi 2,75% di tahun 2024.

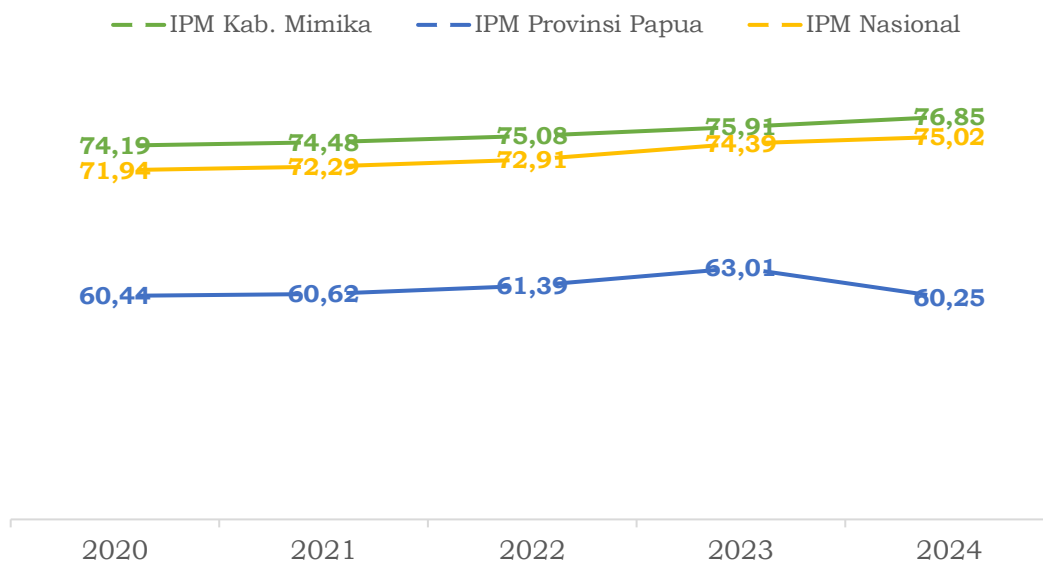
Tren ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Mimika telah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun, stabilitas pasar tenaga kerja masih menjadi tantangan tersendiri. Dibandingkan nasional dan provinsi, fluktuasi angka pengangguran di Mimika menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan, khususnya dalam mendorong diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif di berbagai sektor.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Mimika, IPM menjadi tolok ukur strategis untuk menilai keberhasilan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Analisis IPM memberikan gambaran tentang capaian pembangunan manusia di Kabupaten Mimika, termasuk perkembangan setiap dimensinya serta kesenjangan yang mungkin terjadi antar kelompok masyarakat. Melalui kajian ini, Pemerintah Daerah dapat merumuskan kebijakan yang

lebih tepat sasaran untuk mempercepat peningkatan IPM. Dengan demikian, upaya pembangunan daerah tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut kondisi perbandingan IPM antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.



Gambar 16 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2020–2024, IPM Kabupaten Mimika menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2020, IPM Mimika tercatat sebesar 74,19, lalu meningkat menjadi 74,48 pada 2021, 75,08 pada 2022, 75,91 pada 2023, dan mencapai 76,85 pada 2024. Kenaikan total sebesar 2,66 poin dalam lima tahun menggambarkan perbaikan simultan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat di Kabupaten Mimika. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program yang telah dijalankan—mulai dari peningkatan layanan kesehatan dasar, perluasan akses pendidikan, hingga program-program pemberdayaan ekonomi lokal.

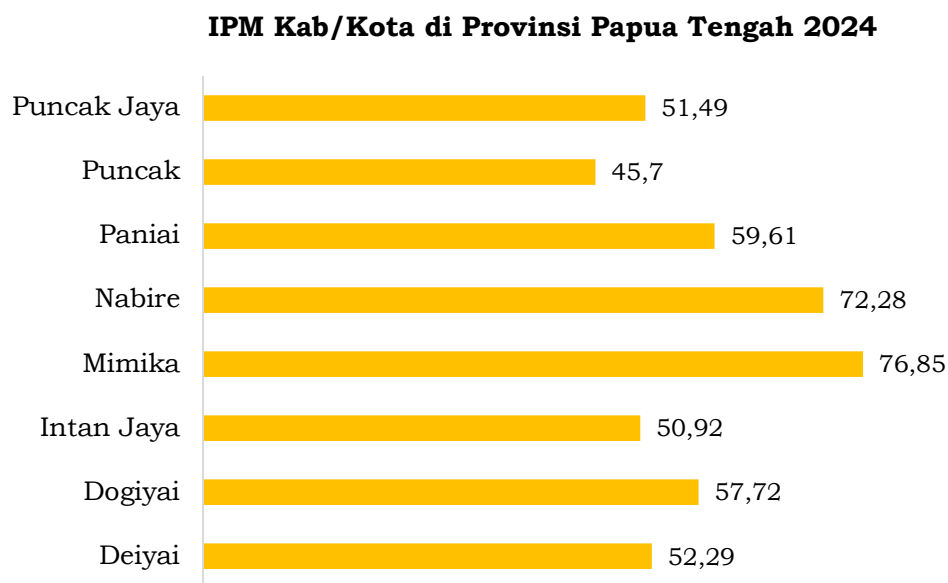
Dibandingkan dengan tingkat Provinsi Papua, IPM Mimika berada pada level yang jauh lebih tinggi. Selama periode 2020–2023, IPM Provinsi Papua bergerak dari 60,44 (2020) naik tipis ke 63,01 (2023), sebelum turun kembali

menjadi 60,25 pada 2024. Selisih lebih dari 15 poin antara Mimika dan rata-rata provinsi menegaskan bahwa Kabupaten Mimika telah mampu melampaui kinerja provinsi dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Hal ini mengindikasikan kebutuhan provinsi untuk meniru praktik terbaik (best practices) di Mimika, seperti penguatan layanan pendidikan vokasi dan peningkatan jejaring akses kesehatan di daerah terpencil. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Kabupaten Mimika juga selalu berada di atas angka nasional. IPM nasional meningkat dari 71,94 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024. Kenaikan sebesar 3,08 poin ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan di Mimika (2,66 poin), namun angka absolut IPM Mimika tetap unggul. Keunggulan ini menegaskan posisi Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah berprestasi dalam konteks pembangunan manusia, sekaligus menunjukkan bahwa meski tumbuh lebih cepat, Indonesia secara keseluruhan masih menyusul capaian IPM Mimika.

Secara komprehensif, data IPM ini menjadi landasan kuat bagi sub-bab Fokus Kesejahteraan Masyarakat dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029. Keberlanjutan peningkatan IPM memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, penyedia layanan pendidikan dan kesehatan, serta sektor swasta dan masyarakat. Program-program ke depan sebaiknya lebih menitikberatkan pada:

1. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, melalui pengembangan sekolah menengah kejuruan dan program belajar sepanjang hayat;
2. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk telemedicine dan posyandu terpadu di wilayah perdesaan;
3. Penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga, dengan memfasilitasi modal usaha mikro dan pelatihan keterampilan.

Dengan strategi-strategi tersebut, Kabupaten Mimika diharapkan bukan hanya mempertahankan capaian IPM yang lebih tinggi dari provinsi maupun nasional, tetapi juga semakin mendekat pada standar pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 17 Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Sumber : BPS Kabupaten Mimika, 2025

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Tengah menunjukkan disparitas yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Kabupaten Mimika menempati posisi tertinggi dengan capaian IPM sebesar 76,85, diikuti oleh Nabire yang mencapai 72,28. Angka-angka ini mencerminkan keberhasilan kedua daerah—yang lebih mudah diakses secara geografis—dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas akses pendidikan, dan menguatkan ekonomi lokal. Sementara itu, kabupaten pegunungan dan terpencil masih menghadapi tantangan besar: Puncak mencatat IPM terendah sebesar 45,70, disusul Puncak Jaya (51,49), Intan Jaya (50,92), dan Deiyai (52,29). Keterbatasan infrastruktur transportasi, kurangnya tenaga pendidik dan kesehatan, serta hambatan kultural menjadi faktor utama penyebab rendahnya capaian IPM di wilayah-wilayah tersebut.

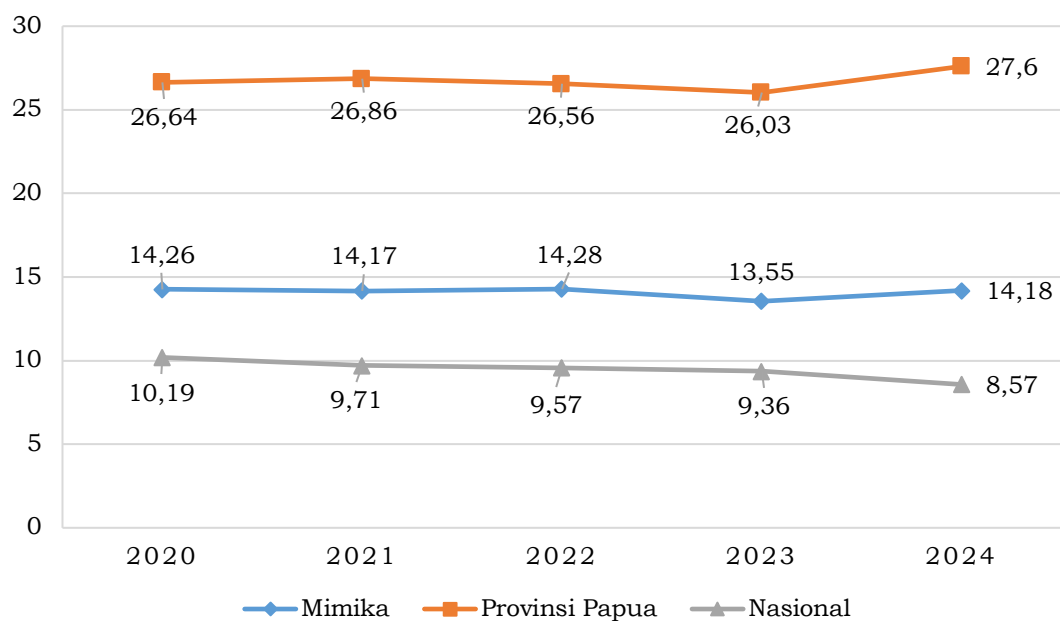
Di tengah kondisi tersebut, kabupaten menengah seperti Paniai (59,61) dan Dogiyai (57,72) menempati posisi yang relatif moderat. Meskipun masih tertinggal dibandingkan Mimika dan Nabire, kedua kabupaten ini menunjukkan potensi peningkatan melalui intervensi terfokus—misalnya peningkatan kualitas tenaga guru, optimalisasi posyandu, dan perbaikan akses jalan desa. Angka-angka ini menandakan adanya peluang bagi

pemerintah daerah untuk memacu percepatan pembangunan manusia dengan memadukan pendekatan peningkatan kapasitas lokal dan transfer teknologi sederhana.

F. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam konteks Kabupaten Mimika, permasalahan kemiskinan tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup aspek keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk potensi meningkatnya ketimpangan sosial dan keterbatasan mobilitas ekonomi.

Melalui analisis aspek kemiskinan, RPJMD Kabupaten Mimika bertujuan untuk memahami tren angka kemiskinan, distribusi geografis masyarakat miskin, serta faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di wilayah ini. Data dan informasi yang komprehensif mengenai tingkat kemiskinan akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam merumuskan kebijakan strategis yang lebih terarah untuk mengurangi kemiskinan. Fokus pembangunan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan kebutuhan dasar yang lebih inklusif, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.



Gambar 18 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada periode 2020–2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan secara nasional memperlihatkan pola yang berbeda. Secara nasional, proporsi penduduk miskin terus menurun dari 10,19 % pada 2020 menjadi 8,57 % pada 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pengentasan kemiskinan di tingkat pusat, termasuk perluasan bantuan sosial, peningkatan akses layanan dasar, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Di Provinsi Papua, tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi dibandingkan nasional dan justru menunjukkan kecenderungan naik pada akhir periode. Angka kemiskinan bergerak dari 26,64 % pada 2020, sempat turun sedikit di 2022–2023 menjadi 26,03 %, lalu melonjak ke 27,60 % pada 2024. Kenaikan terakhir ini mengindikasikan tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta fluktuasi harga komoditas lokal yang belum sepenuhnya teratasi meski berbagai intervensi telah dijalankan.

Kabupaten Mimika berada di antara kedua ekstrem tersebut, dengan tingkat kemiskinan yang relatif stabil di kisaran 14 %. Setelah menurun tipis dari 14,26 % (2020) ke 14,17 % (2021), angka ini sempat naik ke 14,28 %

pada 2022, turun menjadi 13,55 % pada 2023, sebelum kembali naik ke 14,18 % pada 2024. Friksi pada angka kemiskinan Mimika kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika aktivitas pertambangan dan konstruksi, yang menyediakan lapangan kerja temporer namun rentan terhadap siklus ekonomi komoditas. Secara keseluruhan, data ini menegaskan pentingnya strategi yang disesuaikan untuk setiap wilayah. Di tingkat nasional, keberlanjutan program pengurangan kemiskinan perlu dipertahankan. Di Papua, penanganan harus fokus pada peningkatan akses infrastruktur dan diversifikasi ekonomi. Sementara itu, di Mimika, perlu diupayakan stabilisasi lapangan kerja berkualitas dan pemberdayaan usaha mikro-kecil yang berkelanjutan, agar penurunan kemiskinan tidak hanya bersifat fluktuatif tetapi juga permanen.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika. Konsep Kesehatan Untuk Semua menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang merata, peningkatan kualitas hidup, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan secara efektif. Indikator kesehatan yang menjadi fokus dalam perencanaan daerah antara lain usia harapan hidup dan prevalensi stunting. Usia harapan hidup mencerminkan kualitas layanan kesehatan dan kondisi lingkungan hidup yang mendukung kehidupan sehat. Di Kabupaten Mimika, upaya peningkatan usia harapan hidup terus dilakukan melalui perbaikan akses pelayanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, dan promotif-preventif kesehatan masyarakat.

Selain itu, prevalensi stunting menjadi perhatian penting, karena mencerminkan kondisi gizi dan kesehatan anak yang berdampak jangka panjang pada pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas generasi muda. Penanganan stunting memerlukan intervensi multisektoral, termasuk pemenuhan gizi seimbang, akses air bersih dan sanitasi, serta edukasi kesehatan bagi keluarga. Dengan fokus pada indikator-indikator ini, Kabupaten Mimika berkomitmen untuk mewujudkan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta membangun masyarakat yang produktif dan tangguh secara sosial dan ekonomi.

Tabel 10 Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting

Tahun	Usia Harapan Hidup	Prevalensi Stunting
2022	72,5	7,62
2023	72,83	10,11
2024	73,06	10,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika terus menunjukkan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemenuhan akses layanan kesehatan, intervensi gizi, dan program promotif-preventif. Berdasarkan data terbaru, usia harapan hidup (UHH) di Mimika mengalami peningkatan dari 72,5 tahun pada 2022 menjadi 72,83 tahun pada 2023, dan 73,06 tahun pada 2024. Kenaikan bertahap ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menurunkan risiko penyakit.

Di sisi lain, prevalensi stunting pada anak mengalami fluktuasi, yaitu 7,62% pada 2022, meningkat menjadi 10,11% pada 2023, dan 10,91% pada 2024. Meskipun peningkatan UHH menunjukkan kemajuan layanan kesehatan, tingginya angka stunting menandakan masih adanya tantangan dalam pemenuhan gizi anak dan kesehatan keluarga. Hal ini menekankan perlunya intervensi multisektoral yang lebih terintegrasi, termasuk edukasi gizi, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta penguatan program pemberdayaan keluarga untuk menurunkan stunting. Dengan capaian ini, Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, memastikan kesehatan untuk semua, dan membangun generasi yang sehat, produktif, dan tangguh secara sosial-ekonomi.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika. Upaya menuju pendidikan berkualitas yang merata menekankan akses pendidikan yang inklusif, peningkatan mutu proses belajar-mengajar, dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga wilayah terpencil. Indikator yang digunakan untuk memantau kualitas pendidikan antara lain Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

RLS mencerminkan rata-rata lama pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk, yang menjadi salah satu tolok ukur pencapaian pendidikan formal di masyarakat. Sedangkan HLS menunjukkan estimasi lama sekolah yang diharapkan dapat ditempuh anak-anak di usia sekolah, yang mencerminkan harapan masyarakat dan pemerintah terhadap capaian pendidikan di masa depan. Dengan fokus pada kedua indikator ini, Kabupaten Mimika berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan lebih lama, serta membangun generasi yang lebih cerdas, kompeten, dan siap bersaing di tingkat lokal maupun nasional.

Tabel 11 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
2020	10,17	12,40
2021	10,18	12,69
2022	10,18	12,69
2023	10,47	12,96
2024	10,72	13,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas pembangunan manusia di Kabupaten Mimika, dengan tujuan memastikan setiap anak dan remaja memperoleh akses pendidikan yang merata dan bermutu. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk memantau capaian pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, RLS di Kabupaten Mimika meningkat dari 10,17 tahun pada 2020 menjadi 10,72 tahun pada 2024, menunjukkan bahwa rata-rata penduduk menempuh pendidikan lebih lama seiring berjalannya waktu. Sementara itu, HLS juga mengalami peningkatan dari 12,40 tahun pada 2020 menjadi 13,16 tahun pada 2024, menandakan adanya harapan dan peluang bagi anak-anak di Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Kenaikan kedua indikator ini mencerminkan kemajuan dalam pemerataan akses pendidikan serta upaya peningkatan mutu proses belajar-mengajar di sekolah. Dengan demikian, Kabupaten Mimika terus mendorong pendidikan yang inklusif,

berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga mampu membentuk generasi yang cerdas, kompeten, dan siap bersaing secara lokal maupun nasional.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi. Kabupaten Mimika terus mengembangkan sistem perlindungan sosial yang adaptif, artinya mampu menyesuaikan program dan kebijakan dengan perubahan kondisi masyarakat, dinamika ekonomi, dan situasi darurat, termasuk bencana atau pandemi. Pendekatan adaptif ini mencakup berbagai strategi, seperti: penyesuaian skema bantuan sosial berdasarkan tingkat kerentanan masyarakat; pemanfaatan data digital untuk identifikasi penerima manfaat yang lebih tepat sasaran; serta penguatan kapasitas lembaga dan aparat desa/kelurahan dalam menyalurkan bantuan secara cepat dan efisien. Dengan demikian, perlindungan sosial tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, mampu mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan atau kerentanan yang lebih berat.

Penerapan perlindungan sosial yang adaptif di Kabupaten Mimika diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan bahwa setiap warga, terutama yang berada pada kelompok rentan, memperoleh dukungan yang memadai untuk hidup layak dan produktif.

Tabel 12 Indikator Perlindungan Sosial yang Adaptif

Tahun	Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Persentase Orang atau Kelompok yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi sosial
2020	30	30	30
2021	35	35	35
2022	40	40	40
2023	65	65	45
2024	39	40	30

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mimika

Berdasarkan data capaian dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan dalam penyaluran bantuan sosial dan pelayanan sosial

di Kabupaten Mimika. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar meningkat dari 30% pada 2020 menjadi puncaknya 65% pada 2023, sebelum kembali menurun menjadi 39% pada 2024. Hal yang sama terlihat pada persentase PMKS yang tertangani, yang meningkat dari 30% pada 2020 menjadi 65% pada 2023, lalu stabil di 40% pada 2024. Sementara itu, persentase orang atau kelompok yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial menunjukkan fluktuasi, dari 30% pada 2020 menjadi 45% pada 2023, kemudian kembali ke 30% pada 2024.

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam beberapa tahun, masih diperlukan strategi yang lebih konsisten dan adaptif untuk memastikan perlindungan sosial dapat menjangkau seluruh kelompok rentan secara merata dan berkelanjutan. Pendekatan adaptif ini meliputi pemanfaatan data terkini untuk penyaluran bantuan tepat sasaran, penguatan kapasitas lembaga terkait, serta intervensi multisektoral yang mampu menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan sosial Kabupaten Mimika tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kabupaten Mimika memiliki keberagaman agama dan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas sosial masyarakatnya. Pembangunan yang berlandaskan agama maslahat menekankan pada penerapan nilai-nilai keagamaan yang mendorong kebaikan bersama, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat spiritualitas masyarakat, tetapi juga menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan produktif.

Selain itu, pembangunan budaya yang maju menjadi salah satu fokus untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya lokal, sekaligus meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Upaya ini meliputi pelestarian tradisi, seni, bahasa, adat istiadat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, baik di tingkat lokal maupun nasional. Melalui pendidikan, pemberdayaan generasi muda, serta dukungan fasilitas budaya, Kabupaten Mimika mendorong masyarakat untuk

menginternalisasi nilai-nilai budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya toleransi, identitas, dan kreativitas lokal. Dengan mengintegrasikan nilai agama dan budaya dalam pembangunan, Kabupaten Mimika berupaya menciptakan masyarakat yang berkepribadian matang, harmonis, dan maju secara sosial, spiritual, serta budaya, sehingga tercapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian nilai-nilai lokal.

Kabupaten Mimika terus mendorong pembangunan yang berlandaskan agama, maslahat, dan budaya yang maju, dengan fokus pada peningkatan toleransi, kerukunan, serta pelestarian kekayaan budaya lokal. Nilai-nilai keagamaan dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kebaikan bersama dan keharmonisan antarumat beragama, sementara pelestarian budaya menjadi upaya penting dalam menjaga identitas dan kreativitas lokal. Berdasarkan data capaian tahun 2024, **persentase cagar budaya yang dilestarikan mencapai 45%**, menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap pelestarian warisan budaya daerah. Sementara itu, **tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan tercatat sebesar 40%**, mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam mewujudkan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan harmonis. Capaian ini menegaskan bahwa Kabupaten Mimika tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya. Dengan sinergi antara pelestarian budaya dan peningkatan partisipasi masyarakat, daerah ini berupaya menciptakan masyarakat yang berkepribadian matang, harmonis, dan kreatif, sekaligus menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan kelestarian nilai-nilai lokal.

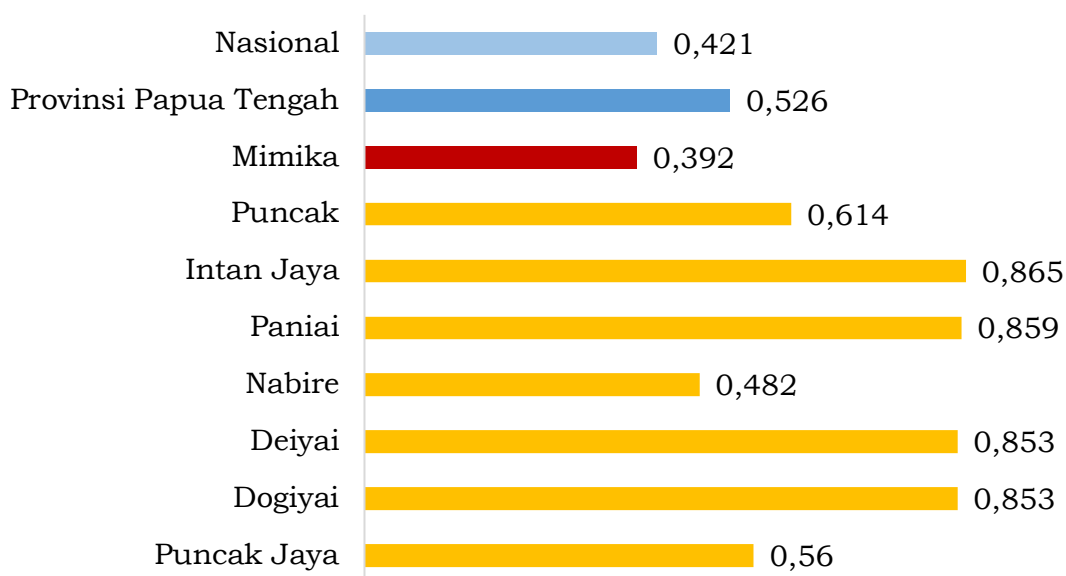
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG memberikan gambaran sejauh mana perempuan mengalami keterbatasan

akses, partisipasi, dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan dibandingkan laki-laki. Nilai indeks yang mendekati nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, sedangkan nilai yang mendekati satu menandakan ketimpangan yang tinggi.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, pengukuran IKG menjadi penting untuk menilai keberhasilan kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta tujuan kelima *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, analisis IKG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai dasar perumusan strategi pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.



Gambar 19 Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten di Papua Tengah Tahun 2024

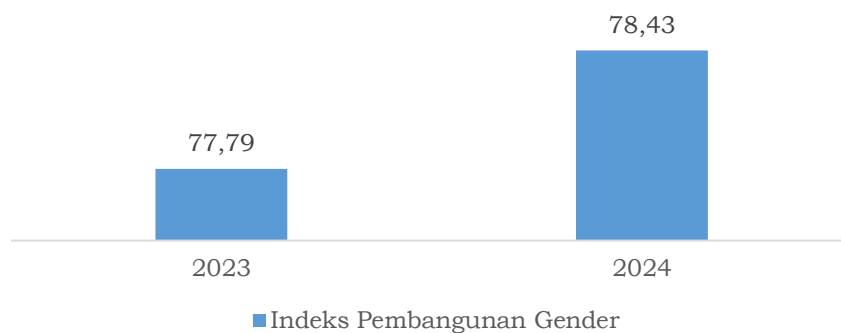
Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika mencatat nilai 0,392, yang merupakan angka terendah di seluruh provinsi. Capaian ini lebih baik dibandingkan rata-rata nasional (0,421) dan secara signifikan lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Papua Tengah (0,526). Nilai tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di

Mimika relatif kecil, menandakan adanya kemajuan dalam penerapan prinsip kesetaraan gender di berbagai aspek pembangunan daerah. Posisi ini menempatkan Mimika sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengurangan ketimpangan gender di Papua Tengah, jauh melampaui daerah-daerah lain seperti Intan Jaya (0,865), Paniai (0,859), Deiyai (0,853), dan Dogiyai (0,853) yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi. Bahkan dibandingkan Nabire (0,482) yang juga berada di bawah rata-rata provinsi, Mimika tetap menunjukkan selisih yang cukup besar dalam capaian positifnya.

Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan di Kabupaten Mimika relatif berhasil menciptakan akses, partisipasi, dan kontrol yang lebih seimbang bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, tantangan kesetaraan gender tetap perlu menjadi perhatian, agar pencapaian ini tidak hanya dipertahankan tetapi juga ditingkatkan, sehingga Mimika dapat menjadi contoh praktik pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di tingkat provinsi maupun nasional.

2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh laki-laki dan perempuan. IPG pada dasarnya merupakan penyesuaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhatikan kesenjangan gender dalam tiga dimensi dasar pembangunan: kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pendapatan per kapita yang disesuaikan). Semakin tinggi nilai IPG, maka semakin kecil kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah.



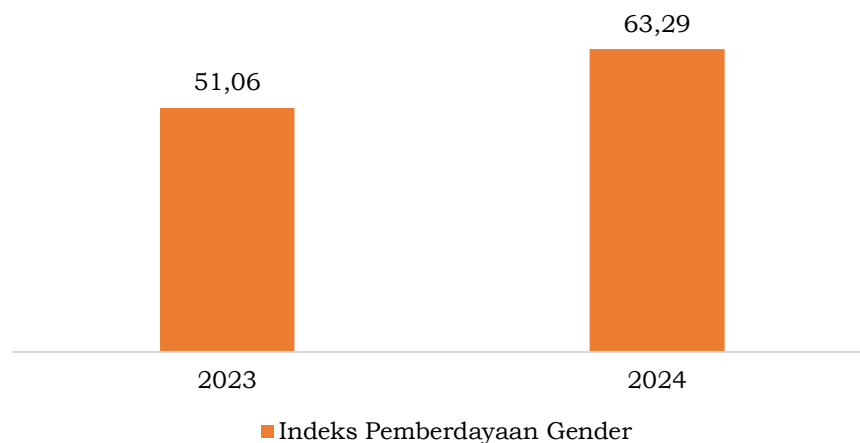
Gambar 20 Capaian Indeks Pembangunan Gender

Sumber: BPS, 2025

Capaian IPG Kabupaten Mimika menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, IPG Kabupaten Mimika tercatat sebesar **77,79**, kemudian meningkat menjadi **78,43** pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi. Secara garis besar, capaian IPG Kabupaten Mimika dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan peningkatan nilai dari 77,79 menjadi 78,43. Walaupun peningkatannya relatif moderat, hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Mimika semakin mengecil. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan melalui kebijakan dan program yang responsif gender agar kesetaraan pembangunan dapat lebih optimal, serta nilai IPG Mimika dapat mendekati bahkan melampaui capaian rata-rata provinsi maupun nasional.

3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. IDG menekankan pada aspek partisipasi dan peluang, terutama keterwakilan perempuan dalam parlemen, peran perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi maupun manajer, serta kontribusi perempuan dalam angkatan kerja. Nilai IDG yang lebih tinggi menunjukkan semakin besar peluang dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, baik dalam ranah publik maupun ekonomi.



Gambar 21 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sumber: BPS, 2025

Pada tahun 2023, capaian IDG Kabupaten Mimika tercatat sebesar **51,06**. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan masih berada pada kategori menengah dengan ruang perbaikan yang cukup besar. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang signifikan, di mana nilai IDG meningkat menjadi **63,29**. Peningkatan tajam ini mencerminkan adanya kemajuan yang berarti dalam pemberdayaan perempuan, baik dari segi keterlibatan dalam dunia kerja maupun peningkatan representasi dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Secara umum, capaian IDG Kabupaten Mimika dalam dua tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang sangat positif. Lompatan dari 51,06 pada tahun 2023 menjadi 63,29 pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa perempuan di Mimika semakin diberdayakan dan memiliki peran yang lebih besar dalam ranah ekonomi maupun politik. Ke depan, konsistensi peningkatan ini perlu dijaga melalui kebijakan afirmatif, peningkatan kapasitas SDM perempuan, serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan sekaligus kebutuhan mendesak bagi daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Mimika. Transformasi menuju ekonomi hijau menjadi salah satu strategi utama untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi,

pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur capaian pembangunan berkelanjutan tersebut, pemerintah menggunakan Indeks Ekonomi Hijau (IEH) sebagai instrumen evaluasi. Indeks Ekonomi Hijau dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pembangunan. Tidak hanya menilai pertumbuhan ekonomi, IEH juga memperhitungkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengelolaan lingkungan, penciptaan lapangan kerja hijau, serta aspek sosial yang mendukung keberlanjutan. Dengan demikian, IEH menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana pembangunan daerah sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, penerapan IEH sangat relevan. Mimika merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor pertambangan, namun sekaligus menghadapi tantangan serius terkait degradasi lingkungan, ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif, serta ketimpangan sosial. Oleh karena itu, IEH dapat menjadi dasar penting untuk menilai apakah pembangunan yang berjalan mampu menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, hingga saat ini, data Indeks Ekonomi Hijau yang spesifik untuk Kabupaten Mimika belum tersedia. **Data yang ada masih berupa agregasi tingkat provinsi, yaitu Provinsi Papua, dengan nilai 58,15 pada tahun 2021 menurut data resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).** Nilai ini mencerminkan posisi Papua secara keseluruhan dalam pelaksanaan pembangunan hijau, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di Mimika secara khusus.

Meskipun demikian, data IEH Papua dapat dijadikan rujukan awal untuk memahami tren dan posisi pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia, termasuk Mimika. Selanjutnya, diperlukan upaya pengumpulan dan pengolahan data pada level kabupaten agar capaian pembangunan dapat dipantau lebih akurat serta digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya dalam dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Mimika. Sebagai langkah awal, beberapa strategi umum dan strategis yang dapat ditempuh Kabupaten Mimika antara lain:

1. Integrasi ekonomi hijau ke dalam perencanaan daerah dengan memastikan IEH menjadi bagian dari indikator kinerja pembangunan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
2. Diversifikasi ekonomi daerah dengan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan memperkuat sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
3. Penguatan tata kelola lingkungan melalui konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan limbah terpadu.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi hijau.
5. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, masyarakat adat, dan lembaga akademik untuk mendukung inovasi serta implementasi ekonomi hijau.
6. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam produksi dan pengelolaan sumber daya, baik di sektor industri, energi, maupun pertanian.

Dengan integrasi Indeks Ekonomi Hijau dalam perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan strategi tersebut, Kabupaten Mimika diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan komitmen global terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

2.1.3.2 Indeks Ekonomi Biru

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada daratan, tetapi juga pada pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan perairan secara bijak. Dalam konteks inilah, konsep ekonomi biru menjadi penting. Ekonomi biru menekankan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta perlindungan ekosistem laut sebagai modal pembangunan jangka panjang. Untuk mengukur capaian pembangunan berbasis kelautan yang berkelanjutan, digunakan instrumen Indeks Ekonomi Biru (IEB). Indeks ini memberikan gambaran sejauh mana

pembangunan daerah mampu menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi sektor kelautan dengan kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, penerapan IEB menjadi sangat relevan mengingat wilayah ini memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta potensi ekosistem pesisir dan laut yang mendukung ekonomi masyarakat. Namun, Mimika juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur perikanan, pencemaran lingkungan, dan belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan. Hingga saat ini, data Indeks Ekonomi Biru yang spesifik untuk Kabupaten Mimika belum tersedia. Data yang ada masih berupa agregasi tingkat provinsi, yaitu Provinsi Papua, dengan nilai 34,27 pada tahun 2022 dan 29,68 pada tahun 2023, berdasarkan data resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nilai tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian IEB Papua dalam satu tahun terakhir, yang dapat menjadi sinyal perlunya perhatian lebih terhadap tata kelola sektor kelautan dan perikanan di wilayah Papua, termasuk Mimika. Meskipun angka ini belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi Kabupaten Mimika, IEB Papua tetap dapat dijadikan referensi awal untuk mengukur posisi daerah dalam pembangunan ekonomi biru. Selanjutnya, penguatan data pada level kabupaten menjadi sangat penting agar Mimika dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi lokalnya.

Sebagai langkah awal, beberapa strategi umum dan strategis yang dapat ditempuh Kabupaten Mimika dalam mendukung penguatan ekonomi biru antara lain:

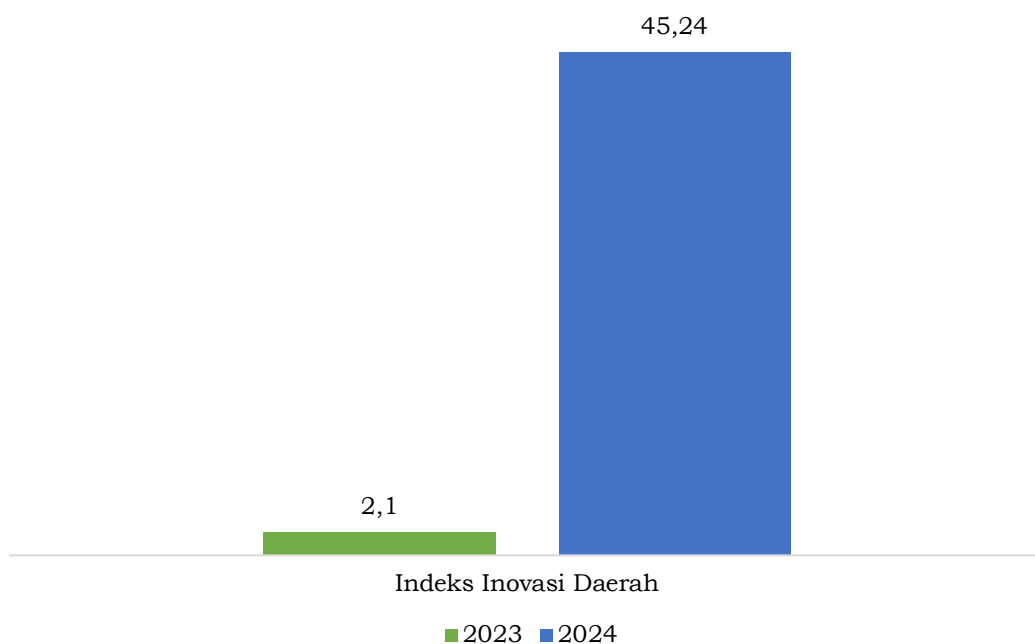
1. Integrasi ekonomi biru ke dalam perencanaan daerah, dengan memastikan sektor kelautan dan perikanan tercermin dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
2. Pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan nelayan lokal.
3. Penguatan infrastruktur kelautan dan perikanan, seperti pelabuhan perikanan, cold storage, pasar ikan modern, serta jaringan logistik yang efisien.

4. Peningkatan kapasitas SDM pesisir, melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan usaha berbasis laut.
5. Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, seperti mangrove, terumbu karang, dan estuari, untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang.
6. Kolaborasi multipihak dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat adat dalam mendorong inovasi serta pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan.

Dengan menjadikan Indeks Ekonomi Biru sebagai salah satu instrumen perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Mimika diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanannya secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-14: *Life Below Water*.

2.1.3.3 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, inovasi tidak hanya berarti penciptaan hal-hal baru, tetapi juga perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengembangkan dan menerapkan inovasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indeks Inovasi Daerah (IID) atau dikenal juga sebagai Indeks Daerah Inovatif (IDI). Indeks ini menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja inovasi daerah, sekaligus sebagai dasar pembinaan dan pemberian apresiasi oleh pemerintah pusat kepada daerah yang berhasil melakukan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Gambar 22 Indeks Inovasi Tahun 2023-2024

Dalam konteks Kabupaten Mimika, capaian Indeks Inovasi Daerah mengalami lonjakan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. **Berdasarkan data resmi Kemendagri, nilai IID Kabupaten Mimika yaitu 2,10 pada tahun 2023, yang dikategorikan sebagai Kurang Inovatif, dan 45,24 pada tahun 2024, yang meningkat pesat hingga masuk kategori Sangat Inovatif.** Peningkatan yang cukup tajam ini menunjukkan adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengembangkan inovasi, baik di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun pemberdayaan masyarakat. Transformasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Mimika mulai mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat kapasitas aparatur, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam inovasi daerah. Meski capaian ini membanggakan, konsistensi dan keberlanjutan tetap menjadi tantangan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek atau sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Beberapa strategi umum dan strategis yang dapat ditempuh Kabupaten Mimika untuk menjaga dan memperkuat capaian Indeks Inovasi Daerah antara lain:

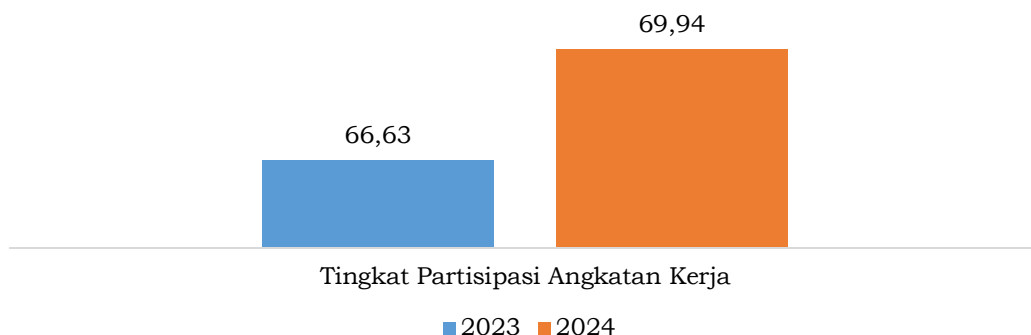
1. Mengintegrasikan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan menjadikan inovasi sebagai salah satu instrumen utama dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
2. Mendorong budaya inovasi di lingkungan birokrasi, melalui penghargaan, kompetisi internal, serta pelatihan bagi aparatur.
3. Mengembangkan ekosistem inovasi berbasis teknologi informasi, seperti layanan digital pemerintahan, aplikasi publik, dan sistem data terintegrasi.
4. Meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, untuk menghasilkan inovasi yang relevan dan aplikatif.
5. Memonitor dan mengevaluasi dampak inovasi, sehingga setiap program atau layanan baru benar-benar memberikan nilai tambah bagi efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Mengutamakan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan, agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Dengan capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mimika tahun 2024 sebesar 45,24 (Sangat Inovatif), diharapkan pemerintah daerah dapat terus menjaga momentum positif ini. Konsistensi, keberlanjutan, dan replikasi inovasi akan menjadi kunci agar Mimika tidak hanya unggul dalam angka indeks, tetapi juga dalam kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.1.3.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau investasi, tetapi juga dari sejauh mana penduduk usia kerja berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Salah satu indikator penting untuk mengukur hal tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mencerminkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. Indikator ini penting karena menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pasar tenaga kerja, serta memberikan gambaran awal mengenai kapasitas ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, TPAK menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. **Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), capaian TPAK Kabupaten Mimika adalah 66,63 persen pada tahun 2023 dan 69,94 persen pada tahun 2024.** Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam keterlibatan masyarakat usia produktif dalam pasar kerja di Mimika. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya lapangan kerja baru, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi lowongan pekerjaan, serta membaiknya iklim investasi di daerah. Meski demikian, peningkatan TPAK belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan masyarakat, karena kualitas pekerjaan yang tersedia juga harus menjadi perhatian. Masalah seperti tingginya tingkat pengangguran terbuka, ketidakcocokan keterampilan (skill mismatch), dan dominasi sektor informal masih mungkin terjadi walaupun angka partisipasi meningkat.



Gambar 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023-2024

Untuk memperkuat capaian TPAK sekaligus meningkatkan kualitas angkatan kerja, beberapa strategi umum dan strategis yang dapat ditempuh Kabupaten Mimika antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, agar angkatan kerja memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar.
2. Mendorong diversifikasi ekonomi daerah, sehingga lebih banyak lapangan kerja tercipta di luar sektor pertambangan.
3. Memperkuat akses informasi pasar kerja, melalui digitalisasi layanan ketenagakerjaan dan pusat informasi karir daerah.
4. Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta dan industri, terutama dalam penyediaan program magang, pelatihan, dan penyerapan tenaga kerja lokal.

5. Mendorong kewirausahaan dan ekonomi kreatif, sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja baru berbasis potensi lokal.
6. Menjamin kesetaraan kesempatan kerja, terutama bagi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan meningkatnya TPAK Kabupaten Mimika dari 66,63 persen pada 2023 menjadi 69,94 persen pada 2024 (BPS, 2024), diharapkan daerah ini dapat terus memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal ini akan mendukung pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.1.3.5 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur daya saing daerah, karena mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikan. Indeks ini dihitung berdasarkan dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menggambarkan peluang lama pendidikan anak usia sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menunjukkan capaian pendidikan rata-rata penduduk dewasa. Semakin tinggi capaian kedua indikator tersebut, semakin besar potensi suatu daerah dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan, produktif, dan kompetitif di pasar kerja maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, capaian indeks pendidikan menjadi perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 13 Indeks Pendidikan

Kabupaten/Kota	HLS	Indeks HLS	RLS	Indeks RLS	Indeks Pendidikan
Mimika	13,16	0,731	10,63	0,709	71,97
Dogiyai	10,63	0,591	4,8	0,32	45,56
Deiyai	9,86	0,548	3,13	0,209	37,83
Nabire	12,82	0,712	10,32	0,688	70
Paniai	10,54	0,585	4,29	0,286	43,56
Intan Jaya	7,7	0,428	3,43	0,229	32,86
Puncak	5,6	0,311	2,22	0,148	22,96
Puncak Jaya	7,53	0,418	4,92	0,328	37,31

Sumber: BPS Provinsi Papua Tengah 2024 (diolah)

Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Mimika mencatat Harapan Lama Sekolah sebesar 13,16 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 10,63 tahun (gabungan laki-laki dan perempuan). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Indeks Pendidikan Mimika mencapai 71,97, menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Papua Tengah. Capaian ini menempatkan Mimika sedikit di atas Kabupaten Nabire yang memiliki indeks 70,00, sekaligus jauh melampaui kabupaten lain di wilayah Papua Tengah seperti Dogiyai (45,56), Paniai (43,56), Deiyai (37,83), Intan Jaya (32,86), Puncak Jaya (37,31), dan Puncak (22,96).

Tingginya HLS di Mimika menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun di daerah ini berpeluang menempuh pendidikan hingga jenjang SMA bahkan perguruan tinggi, sementara RLS yang sudah melampaui 10 tahun mengindikasikan sebagian besar penduduk dewasa telah mengenyam pendidikan menengah atas. Kondisi ini merefleksikan keberhasilan program pembangunan pendidikan di Mimika dalam memperluas akses sekolah dan menekan angka putus sekolah.

Dengan capaian tersebut, Mimika tidak hanya menjadi daerah dengan kualitas pendidikan terbaik di Papua Tengah, tetapi juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan pendidikan yang dapat menarik migrasi pelajar, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Namun demikian, tantangan masih ada, mengingat indeks pendidikan Mimika belum mencapai standar nasional yang berada di kisaran 75–80, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, pemerataan fasilitas pendidikan, dan penguatan kompetensi tenaga pendidik.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan salah satu instrumen evaluasi nasional yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di daerah berjalan sesuai prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini disusun berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aspek kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik.

Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik pula capaian reformasi birokrasi di suatu daerah.

Bagi Kabupaten Mimika, keberadaan IRB memiliki arti strategis. Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam dan memiliki dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Birokrasi yang profesional, transparan, dan responsif diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal sekaligus mendukung tercapainya pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. **Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mimika tahun 2023 tercatat sebesar 32,62. Menurut kategori penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai ini termasuk dalam predikat “C”.** Artinya, pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Kabupaten Mimika masih berada pada tahap awal, dengan banyak aspek yang perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola pemerintahan belum berjalan optimal dan memerlukan langkah penguatan secara menyeluruh.

Nilai 32,62 tersebut menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Mimika. Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Kelembagaan yang belum sepenuhnya efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan.
2. Tata laksana birokrasi yang masih memiliki hambatan dalam hal koordinasi lintas perangkat daerah.
3. Akuntabilitas kinerja yang belum terukur dengan baik.
4. Kualitas pelayanan publik yang masih bervariasi dan belum sepenuhnya berbasis digital.

Untuk mendorong percepatan pencapaian reformasi birokrasi yang lebih terintegrasi, Mimika perlu menempuh sejumlah langkah strategis, di antaranya:

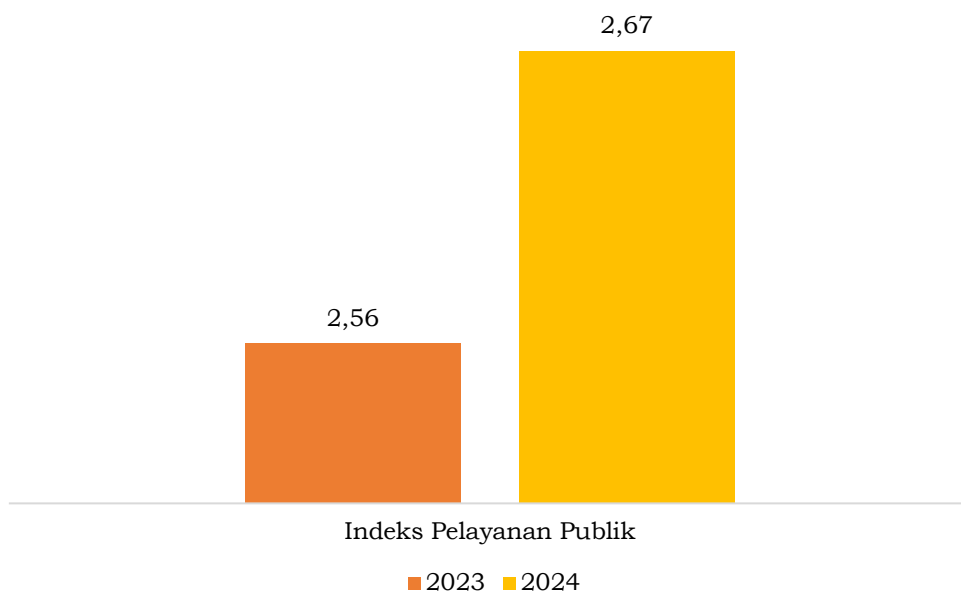
1. Penguatan sistem kelembagaan, termasuk penyederhanaan struktur organisasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Digitalisasi pelayanan publik, melalui pengembangan aplikasi layanan berbasis elektronik yang mudah diakses dan transparan.

3. Peningkatan kapasitas aparatur, terutama melalui pelatihan berbasis kompetensi agar SDM birokrasi lebih profesional.
4. Penguatan sistem pengawasan internal, guna mencegah praktik maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaporan berbasis hasil (outcome).
6. Pelibatan masyarakat, sebagai bentuk kontrol publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dengan nilai 32,62 (predikat “C”), Kabupaten Mimika diharapkan dapat menjadikan hasil ini sebagai momentum refleksi sekaligus dorongan untuk melakukan lompatan perbaikan birokrasi. Apabila strategi penguatan dapat dijalankan secara konsisten, maka kualitas reformasi birokrasi Mimika akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik, kualitas pelayanan masyarakat, serta daya saing daerah secara keseluruhan.

2.1.4.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Indeks Pelayanan Publik, yang menilai enam aspek utama, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Indeks ini menjadi salah satu tolok ukur akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas birokrasi agar semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan publik.



Gambar 24 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023-2024

Di Kabupaten Mimika, nilai Indeks Pelayanan Publik menunjukkan adanya peningkatan meskipun masih relatif rendah dibandingkan dengan standar pelayanan yang diharapkan. **Pada tahun 2023, capaian IPP tercatat sebesar 2,56, kemudian mengalami kenaikan menjadi 2,67 pada tahun 2024.** Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek-aspek pelayanan, meskipun secara umum masih memerlukan upaya lebih intensif terutama dalam hal peningkatan profesionalisme aparatur, ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta penguatan sistem informasi pelayanan publik. Dengan demikian, tren kenaikan IPP di Mimika dapat dijadikan dasar untuk terus mendorong reformasi pelayanan publik yang lebih inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.4.3 Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mengukur kualitas kehidupan berdemokrasi di suatu daerah. Indeks ini disusun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga-lembaga demokrasi. Dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur, indeks ini mampu memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dijalankan, termasuk dalam hal

partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan ruang publik, serta kinerja institusi demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, Indeks Demokrasi dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi pemerintah, masyarakat sipil, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menilai sejauh mana proses demokratis berlangsung dengan baik serta di mana masih diperlukan penguatan.

Secara nasional, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif yang mencerminkan dinamika politik dan sosial di berbagai wilayah. Peningkatan indeks di sejumlah daerah menunjukkan adanya komitmen dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, namun di sisi lain masih terdapat tantangan berupa praktik intoleransi, rendahnya partisipasi politik, serta lemahnya kelembagaan demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks inilah, pencapaian Indeks Demokrasi di tingkat kabupaten menjadi sangat penting sebagai gambaran kondisi faktual dari penyelenggaraan demokrasi di daerah.

Untuk Kabupaten Mimika, **capaian Indeks Demokrasi pada tahun 2024 adalah sebesar 79,67**. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Mimika berada pada kategori baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam aspek partisipasi publik yang lebih luas dan konsolidasi kelembagaan demokrasi lokal. Pencapaian ini sekaligus merefleksikan adanya upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi yang inklusif, mendorong kebebasan berpendapat, serta memperkuat peran lembaga politik dan organisasi masyarakat sipil. Dengan capaian tersebut, Mimika diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas demokrasi melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

2.1.4.4 Fokus Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Pada urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencerminkan capaian pembangunan pendidikan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu layanan pendidikan, serta menjamin pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan pedalaman. Capaian indikator kinerja pendidikan juga menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai acuan perumusan strategi pembangunan pendidikan pada periode perencanaan berikutnya agar selaras dengan target RPJMD, kebijakan nasional, dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Mimika, sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pendidikan

No	Indikator	Realiasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.40 Tahun	12.69 Tahun	12.69 Tahun	12.96 Tahun	13.16 Tahun
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10.17 tahun	10.18 Tahun	10.18 Tahun	10.47 Tahun	10.72 Tahun
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	98.65%	95.56%	99.35%	102.8%	97.72%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs	86.04%	96.89%	91.65%	67.48%	101%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	77.09%	76.70%	95.48%	99.51%	77.51%
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	57.37%	61.86%	85.02%	62.15%	62.91%
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1.06%	0.6%	0.96%	4.28%	1.08%

No	Indikator	Realiasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.72%	0.01%	0.53%	2.52%	0.57%
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98.83%	98.15%	98.46%	99.89%	99.89%
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.46%	97.85%	98.18%	99.5%	99.54%
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104.80%	92.84%	98.94%	95%	112.4%
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	123%	92.94%	98.59%	98.59%	114.2%
13	APK PAUD (laki-laki dan perempuan) (%)	58.80%	52.92%	48.47%	49.50%	98.70%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam pada indikator-indikator utama yang mencerminkan akses, partisipasi, keberlanjutan, dan kualitas layanan pendidikan. Dari sisi pendidikan dasar dan menengah, indikator *Harapan Lama Sekolah (HLS)* menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten, dari 12,40 tahun pada 2020 menjadi 13,16 tahun pada 2024, yang mengindikasikan semakin terbukanya peluang masyarakat untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sejalan dengan itu, *Rata-rata Lama Sekolah (RLS)* juga mengalami peningkatan bertahap dari 10,17 tahun pada 2020 menjadi 10,72 tahun pada 2024, mencerminkan adanya perbaikan capaian pendidikan aktual penduduk usia sekolah.

Pada indikator partisipasi pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI relatif tinggi dan stabil meskipun berfluktuasi, dengan capaian di atas 95 persen pada seluruh tahun pengamatan. Sementara itu, APK SMP/MTs menunjukkan variasi yang lebih besar, dengan capaian tertinggi

pada 2024 yang mencapai 101 persen, mengindikasikan adanya perluasan akses pendidikan menengah pertama, termasuk partisipasi siswa di luar kelompok usia standar. Untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM), baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs, masih terlihat fluktuasi dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan sesuai usia masih menjadi tantangan, khususnya pada jenjang SMP/MTs.

Dari sisi keberlanjutan pendidikan, indikator Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs secara umum masih berada pada tingkat yang relatif rendah, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun tertentu, terutama pada 2023. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan putus sekolah melalui intervensi yang lebih terarah, terutama pada kelompok rentan dan wilayah dengan keterbatasan akses. Di sisi lain, indikator Angka Kelulusan (AL) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan cenderung stabil, dengan persentase kelulusan mendekati 100 persen pada seluruh tahun pengamatan, yang mencerminkan kinerja satuan pendidikan dalam memastikan penyelesaian studi peserta didik.

Indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs juga menunjukkan capaian yang relatif baik, meskipun mengalami fluktuasi antar tahun. Pada 2024, capaian AM meningkat signifikan hingga di atas 100 persen, yang mengindikasikan meningkatnya transisi peserta didik dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah pertama. Secara keseluruhan, capaian indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Mimika telah menunjukkan kemajuan pada aspek akses dan kelulusan, namun masih memerlukan penguatan kebijakan pada aspek pemerataan partisipasi pendidikan dan keberlanjutan sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah pertama.

B. Kesehatan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencerminkan capaian pembangunan sektor kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerataan akses layanan kesehatan, serta mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas dan

tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan promotif dan preventif, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Capaian indikator kinerja pada urusan kesehatan juga menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan dan program pembangunan kesehatan, sekaligus sebagai acuan dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sektor kesehatan pada periode perencanaan selanjutnya agar selaras dengan target RPJMD, kebijakan nasional, dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mimika, sebagai berikut.

Tabel 15 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kesehatan

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,2	72,36	72,5	72,83	73,06
2	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar (%)	81,8	96,05	100	95,49	68,55
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar (%)	60,7	66,35	60,7	76,72	70,96
4	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (%)	66,9	71,11	59,4	90,73	76,39
5	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar(%)	24,8	19,1	83,8	49,61	80,83
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (%)	27,3	1,27	94,8	15,69	34,11
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (%)	96,9	23,79	30,7	18,09	32,68
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%)	97,7	61,88	99,1	67,23	82,57
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	98,3	42,28	94,6	63,56	83,36
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus(%)	45,6	16,51	94,4	45	62,29
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (%)	68,1	60,34	21,6	32,05	42,78
12	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB (%)	47	48	110	108	92

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (%)	38,2	58,14	106	104	93,37
14	Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH	4,39	2,89	3,92	5,39	10,41
15	Prevalensi wasting (%)	7,17	6,11	3,74	4,81	4,7
16	Prevalensi stunting (%)	19,9	14,5	7,62	10,11	10,91
17	Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%)	45,9	46	42,4	58,25	59,03
18	Cakupan pelayanan balita (D/S) (%)	14,9	39,04	40,3	45,69	47,16
20	Prevalensi anak gizi buruk (%)	2,15	1,59	0,64	0,85	0,81
21	Cakupan bayi dapat Vitamin A (%)	22,9	50,33	64,4	53,19	66,67
22	Cakupan balita dapat Vitamin A (%)	29,7	59,18	72,5	71,66	72,64
23	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T)/ANC Terpadu (%)	81,8	51,5	48,6	63,09	68,55
24	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)		66,3	48,6	78,15	106,2
25	Persentase Cakupan K1 (%)	81,1	96	98,9	82,93	89,58
26	Persentase Cakupan K4 (%)	44	51,5	48,6	63,09	68,55
27	Persentase KB Aktif (%)	98,2	21	31,6	22,36	24,39
28	Persentase Cakupan KF 1 (%)	57,1	62,8	91,6	73,18	94,22
29	Persentase Cakupan KF 3 (%)	50,6	56,9	80,8	62,38	47,49
30	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (%)	56	61,4	91,6	67,98	96,05
31	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	60,6	66,3	91,6	78,15	70,96

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
32	Persentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (%)	5	21,7	19,5	121,39	117,6
33	Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%)	100	100	100	100	100
35	Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (%)	50	21,7	107	78,73	117,6
38	Angka penemuan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu	2	3	38	356	70
39	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	100	100	100	100	100
40	Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100
41	Persentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)	50	61	67,7	66,87	31,57
42	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji	100	100	100	100	100
43	Persentase desa/ kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)	20	20,7	31,8	27,5	20
44	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	63,9	64,8	79,5	75	68
45	Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)	49,8	36,1	56,7	48,8	49,4
47	Case Fatality Rate DBD	0	0	0	0,002	8E-04

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
48	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)	75	76	76	76	48
49	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)	30	58	82	38	6
50	Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate/ CDR)	77	89	111	144	71
51	Insiden TB per 100.000 penduduk	471	539	715	916	714
52	Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	86	88	92	85	90
53	Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)	19	25	20	18	34
54	Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)	84	88	74,1	83,89	83,15
55	Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV	36,6	58,13	106	113,76	93,37
56	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	76	66	63	72	95
57	Persentase penemuan Pneumonia Balita	90	110	122	158,67	176,5
58	Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	N/A	N/A	20,4	5,28	N/A
59	Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0	5,2	12,6	23,09	N/A
60	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM	100	100	100	100	100

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
61	Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Pos	0	10	22	40	50
62	Cakupan Minum Obat Filariasis Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)	18	65	61	76	N/A
68	Cakupan UKS (Upaya Kesehatan Sekolah)	27,3	1,27	94,8	15,69	34,11
69	Persentase desa total coverage PIS PK	N/A	N/A	100	100	100
70	Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	N/A	N/A	N/A	44%	61%
71	Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100
72	Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat	62	25	40	66	73
73	Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	62,3	61,45	52,9	56,1	56,45
74	Angka Kematian Ibu (/ 100.000 Kelahiran)	88	79	84	138,53	138,9
76	Positivity Rate Malaria	44,1	39,24	34,6	30,65	28,16
77	API	386	402,7	481	480,78	488,8
78	IKM Kesehatan	65	58,3	62,5	83,4	75,91
79	Persentase fasilitas kesehatan berfungsi baik	85	85	85	85,5	86,4
80	Nilai SAKIP	CC	CC	CC	CC	B
81	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	4	4	4	5	5

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja urusan kesehatan Kabupaten Mimika periode 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada indikator derajat kesehatan, akses

layanan kesehatan, upaya kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, serta dukungan tata kelola pelayanan kesehatan. Pada indikator Usia Harapan Hidup, capaian menunjukkan peningkatan bertahap dari 71,2 tahun pada 2020 menjadi 73,06 tahun pada 2024, yang menggambarkan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara umum.

Pada indikator pelayanan kesehatan ibu dan anak, capaian menunjukkan fluktuasi. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin mengalami penurunan pada beberapa tahun, namun kembali meningkat pada 2024. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, balita, dan anak usia sekolah juga menunjukkan dinamika capaian dari tahun ke tahun, dengan sebagian indikator mencapai tingkat yang lebih tinggi pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kesehatan remaja dan usia produktif menunjukkan peningkatan pada 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pelayanan kesehatan lanjut usia menunjukkan capaian yang relatif tinggi pada akhir periode pengamatan.

Pada indikator kesehatan masyarakat dan gizi, prevalensi stunting menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun awal, meskipun masih berfluktuasi. Cakupan pemberian ASI eksklusif dan pelayanan gizi balita menunjukkan peningkatan pada beberapa tahun, sementara cakupan vitamin A dan pelayanan kesehatan balita juga menunjukkan capaian yang relatif baik pada akhir periode. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan diabetes melitus menunjukkan peningkatan cakupan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam aspek kesehatan reproduksi dan pelayanan persalinan, persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dan persalinan sesuai standar kesehatan menunjukkan capaian yang tinggi pada sebagian besar tahun pengamatan, meskipun terdapat variasi capaian antar tahun. Cakupan pelayanan antenatal care (ANC) dan pelayanan nifas juga menunjukkan peningkatan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada indikator pengendalian penyakit menular, cakupan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan menunjukkan capaian yang bervariasi, dengan sebagian indikator mencapai tingkat tinggi pada 2022 dan kembali menurun pada 2024. Penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, dan malaria menunjukkan fluktuasi, yang mencerminkan dinamika kasus

dan upaya penanggulangan penyakit menular di daerah. Persentase keberhasilan pengobatan TB dan cakupan layanan HIV juga menunjukkan variasi capaian selama periode pengamatan.

Pada aspek sarana, prasarana, dan tata kelola pelayanan kesehatan, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi menunjukkan peningkatan pada 2024. Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, serta nilai SAKIP urusan kesehatan menunjukkan capaian yang relatif stabil. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan juga menunjukkan peningkatan pada akhir periode pengamatan.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja urusan kesehatan Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang beragam pada berbagai aspek pelayanan kesehatan. Data tersebut menggambarkan adanya peningkatan pada beberapa indikator utama kesehatan masyarakat, disertai dengan fluktuasi capaian pada indikator tertentu yang mencerminkan dinamika pelaksanaan program kesehatan di daerah.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencerminkan capaian pembangunan infrastruktur dasar dan penataan ruang wilayah dalam mendukung konektivitas, pelayanan dasar, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, sumber daya air, sanitasi, permukiman, serta efektivitas pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan rencana tata ruang. Capaian indikator kinerja pada urusan ini juga menjadi dasar evaluasi atas efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur, sekaligus sebagai acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang pada periode perencanaan selanjutnya agar selaras dengan target RPJMD, kebijakan nasional, dan kebutuhan pembangunan wilayah Kabupaten Mimika, sebagai berikut.

Tabel 16 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	80.3%	119%	184%	184%	82,13%
2	Persentase Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	83.6%	85%	254%	144%	91,54%
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	60%	100%	88.5%	210%	95.57%
4	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh akses sanitasi	N/A	100%	122%	102%	97.60%
5	Persentase Pelaksanaan penataan ruangan	30%	45%	40%	57%	61.65%
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025

Capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Mimika pada periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan pada aspek konektivitas wilayah, pengendalian risiko bencana, pemenuhan layanan dasar, serta kualitas pelayanan publik. Pada indikator persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota, capaian kinerja menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan perbaikan kondisi jaringan jalan dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta keterhubungan antarwilayah pelayanan.

Pada aspek pengendalian banjir dan ketahanan permukiman, persentase kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir menunjukkan peningkatan yang berarti hingga mencapai lebih dari 90 persen pada 2024. Capaian ini mengindikasikan meningkatnya efektivitas pembangunan dan fungsi infrastruktur pengendalian banjir dalam mengurangi risiko genangan dan dampak bencana hidrometeorologi pada kawasan permukiman.

Dari sisi pemenuhan layanan dasar, persentase rumah tangga dengan akses air bersih menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada 2024, yaitu mendekati 100 persen, yang menggambarkan keberhasilan pemerintah

daerah dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi layak juga mengalami peningkatan dan mencapai tingkat yang tinggi, yang mencerminkan perbaikan kualitas lingkungan permukiman dan dukungan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pada aspek tata ruang, persentase pelaksanaan penataan ruang menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai lebih dari 60 persen pada 2024. Hal ini mencerminkan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang serta peningkatan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Sementara itu, indikator kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menunjukkan capaian optimal dan stabil, dengan persentase 100 persen sepanjang periode pengamatan, yang mengindikasikan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, capaian indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa kinerja urusan PUPR Kabupaten Mimika telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, ketahanan wilayah, serta pelayanan publik. Namun demikian, keberlanjutan upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan penguatan penataan ruang tetap diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan wilayah yang dinamis dan beragam.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencerminkan capaian pembangunan dalam penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta pemenuhan pelayanan dasar yang berkelanjutan dan berkeadilan. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam mengurangi kawasan kumuh, meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni, serta memperkuat prasarana, sarana, dan utilitas permukiman guna mendukung kualitas hidup masyarakat. Capaian indikator kinerja pada urusan ini juga menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan dan program pembangunan perumahan dan permukiman, sekaligus sebagai acuan dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada periode

perencanaan selanjutnya agar selaras dengan target RPJMD, kebijakan nasional, dan kebutuhan wilayah Kabupaten Mimika, sebagai berikut.

Tabel 17 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyediaan Rumah layak Huni	65,63	90	41,15	99,90	75,66
2	Persentase Rumah yang mendapatkan energi listrik	100	N/A	100	100	N/A
3	Persentase Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	100	N/A	3,6	N/A	N/A
4	Persentase PSU yang dipelihara ditangani	100	N/A	100	100	100
5	Persentase Permukiman yang mendapatkan dilengkapi PSU/PJU	100	N/A	66,67	100	128,57
6	Penyediaan PSU	66,7	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Persentase Perencanaan masalah tanah	N/A	100	100	100	44,44
7	Persentase Perencanaan Pengadaan Tanah	100	75	60	90,91	70
8	Persentase Korban Bencana yang ditangani	N/A	66,7	N/A	N/A	57

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mimika periode 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan dinamika yang beragam pada masing-masing indikator. Pada indikator persentase penyediaan rumah layak huni, realisasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan capaian sebesar 65,63 persen pada 2020, meningkat menjadi 90 persen pada 2021, menurun pada 2022, kemudian meningkat signifikan pada 2023, dan berada pada level 75,66 persen pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan rumah layak huni telah dilaksanakan, namun belum berlangsung secara konsisten setiap tahun. Indikator persentase rumah yang mendapatkan energi listrik menunjukkan capaian penuh pada 2020, 2022, dan 2023, sementara pada 2021 dan 2024 tidak tercatat realisasi. Pola serupa juga terlihat pada indikator persentase rehabilitasi rumah tidak layak huni, di mana realisasi hanya tercatat pada 2020 dan 2022, sedangkan pada tahun-tahun lainnya tidak terdapat capaian. Hal ini menggambarkan bahwa

pelaksanaan rehabilitasi rumah belum dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun.

Pada indikator persentase PSU yang dipelihara dan ditangani, capaian kinerja menunjukkan peningkatan pada 2022 dan kembali mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024, yang mengindikasikan adanya aktivitas pemeliharaan PSU pada periode tersebut. Sementara itu, indikator persentase permukiman yang mendapatkan dan dilengkapi PSU/PJU menunjukkan capaian yang tinggi pada sebagian besar tahun pengamatan dan bahkan melampaui 100 persen pada 2024, yang menunjukkan perluasan cakupan pelayanan PSU pada kawasan permukiman.

Untuk indikator penyediaan PSU, realisasi hanya tercatat pada 2020 sebesar 66,7 persen dan tidak menunjukkan capaian pada tahun-tahun berikutnya. Dari sisi urusan pertanahan, indikator persentase perencanaan penanganan masalah tanah menunjukkan capaian penuh pada 2021 hingga 2023, namun menurun pada 2024. Indikator persentase perencanaan pengadaan tanah menunjukkan fluktuasi sepanjang periode pengamatan, dengan capaian tertinggi pada 2020 dan penurunan pada tahun-tahun selanjutnya. Pada indikator persentase korban bencana yang ditangani, realisasi hanya tercatat pada 2021 dan 2024, yang menunjukkan bahwa penanganan korban bencana dilakukan secara situasional sesuai kejadian pada tahun berjalan. Sementara itu, indikator persentase kawasan kumuh yang ditangani tidak menunjukkan realisasi selama periode 2020–2024. Dari aspek tata kelola, nilai SAKIP urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berada pada kategori CC secara konsisten selama periode pengamatan.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencerminkan capaian pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat, serta penanganan gangguan ketenteraman dan

ketertiban umum. Capaian indikator kinerja pada urusan ini menjadi dasar evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sekaligus sebagai acuan dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada periode perencanaan selanjutnya agar selaras dengan target RPJMD, kebijakan nasional, dan kebutuhan wilayah Kabupaten Mimika, sebagai berikut.

Tabel 18 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	187	N/A	N/A	151	142
2	Jumlah perkara yang masuk dan diputus Pengadilan	187	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah rohaniawan/tokoh agama yang aktif	96	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Peserta yang Mengikuti pembinaan Wawasan kebangsaan	N/A	111 orang	140 orang	150 orang	175 orang
5	Persentase organisasi Kemasyarakatan yang aktif dibina	N/A	70%	85%	80%	90%
6	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	N/A	35%	45%	45%	40%
7	Persentase pemilih yang Menggunakan hak pilih dalam pemilu	N/A	91%	100%	100%	97,03%
8	Persentase fasilitasi Kewaspadaan Nasional	N/A	33%	30%	25%	20%
19	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	80%	80%	80%	80%	80%
10	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	75%	75%	75%	75%	75%
11	Response time mencapai lokasi kejadian	75%	75%	75%	75%	75%
12	Tingkat kepuasan pengguna layanan	4	4	4	5	5
13	Presentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
14	Response time mecapaian Lokasi kejadian kebakaran (15 menit)	50%	N/A	100%	100%	100%
15	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	311.010	311.010	765	310	143.991

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
16	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	60	765	170	392	N/A
17	Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Peraturan Daerah	100	100	100	100	100
18	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan gangguan trantibum Peraturan Daerah yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
19	Persentase Penegakan Perda/Perkada Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD, Bakesbangpol, Satpol PP Kabupaten Mimika, 2025

Realisasi kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat selama periode 2020–2024 menunjukkan peran penting pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban sosial, serta perlindungan masyarakat dari risiko bencana dan gangguan ketenteraman umum. Secara umum, kinerja urusan ini relatif stabil dengan capaian yang konsisten pada indikator pelayanan dasar dan penegakan peraturan daerah. Pada aspek ketenteraman dan ketertiban umum, angka kriminalitas dan jumlah perkara yang masuk serta diputus pengadilan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 187 kasus. Di sisi lain, pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dari 111 orang pada tahun 2021 menjadi 175 orang pada tahun 2024. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dibina juga menunjukkan tren meningkat, mencapai 90 persen pada tahun 2024, yang mencerminkan semakin kuatnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi sebesar 45 persen pada tahun 2022–2023, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Sementara itu, partisipasi politik masyarakat tergolong sangat tinggi, tercermin dari persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu yang mencapai 100 persen pada tahun 2022 dan 2023, serta tetap tinggi pada tahun 2024 sebesar 97,03 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat yang kuat dalam kehidupan

demokrasi daerah. Pada aspek kewaspadaan nasional, persentase fasilitasi kewaspadaan nasional menunjukkan tren menurun dari 33 persen pada tahun 2021 menjadi 20 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menjadi perhatian untuk memperkuat deteksi dini dan antisipasi terhadap potensi gangguan stabilitas daerah ke depan.

Dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, capaian kinerja menunjukkan konsistensi yang baik. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana, pencegahan dini, serta penanganan korban bencana alam masing-masing tercapai stabil pada kisaran 75–80 persen sepanjang periode 2020–2024. Response time menuju lokasi kejadian, termasuk kebakaran, juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan capaian 100 persen sejak tahun 2022. Tingkat kepuasan pengguna layanan meningkat dari nilai 4 menjadi 5 pada periode 2023–2024, yang mencerminkan meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terlaksana 100 persen setiap tahun. Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan layanan penyelamatan berfluktuasi, menyesuaikan dengan kondisi kejadian di lapangan, namun tetap menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam perlindungan masyarakat. Pada aspek penegakan peraturan daerah, kinerja menunjukkan capaian sangat optimal. Seluruh indikator terkait penurunan pelanggaran Perda/Perkada, penanganan gangguan ketenteraman umum, serta penegakan Perda/Perkada tercapai 100 persen secara konsisten selama periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan efektivitas fungsi penegakan hukum daerah dalam menjaga ketertiban umum.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan stabilitas dan konsistensi dalam pelayanan dasar, penegakan peraturan, serta perlindungan masyarakat. Ke depan, penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kewaspadaan nasional, serta pemantapan kapasitas penanggulangan bencana menjadi arah kebijakan utama dalam RPJMD periode selanjutnya.

F. Sosial

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab terhadap penanganan dan pelayanan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Mimika. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Sosial

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Kematangan Organisasi	100	100	N/A	100	100
2	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	89	81	N/A	88	100
3	Persentase Orang atau Kelompok yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi sosial	89	64	N/A	75	100
4	Persentase penurunan fakir miskin	85	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlindungi	100	90	N/A	100	100
6	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja urusan bidang sosial Kabupaten Mimika periode 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan dinamika yang cukup beragam pada masing-masing indikator pelayanan sosial. Pada indikator tingkat kematangan organisasi, capaian tercatat sebesar 100 persen pada 2020 dan 2021, tidak tercatat realisasi pada 2022, kemudian kembali mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024. Indikator persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani menunjukkan capaian yang relatif tinggi pada sebagian besar

tahun, yaitu sebesar 89 persen pada 2020, 81 persen pada 2021, menurun pada 2023 menjadi 88 persen, dan meningkat menjadi 100 persen pada 2024, sementara pada 2022 tidak tercatat realisasi.

Pada indikator persentase orang atau kelompok yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial, capaian menunjukkan fluktuasi, dari 89 persen pada 2020 menurun menjadi 64 persen pada 2021, tidak tercatat pada 2022, kemudian meningkat menjadi 75 persen pada 2023 dan mencapai 100 persen pada 2024. Sementara itu, indikator persentase penurunan fakir miskin hanya menunjukkan realisasi pada 2020 sebesar 85 persen dan tidak mencatat capaian pada tahun-tahun berikutnya hingga 2024. Indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terlindungi menunjukkan capaian tinggi pada hampir seluruh periode, dengan realisasi 100 persen pada 2020, 90 persen pada 2021, tidak tercatat pada 2022, serta kembali mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024. Adapun indikator persentase taman makam pahlawan yang terkelola menunjukkan realisasi penuh sebesar 100 persen pada 2021, sementara pada tahun-tahun lainnya tidak tercatat capaian atau tidak tersedia data.

Secara keseluruhan, data capaian indikator kinerja urusan bidang sosial Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi realisasi antar tahun, dengan beberapa indikator mencapai capaian tinggi pada tahun tertentu, serta adanya tahun-tahun tanpa pencatatan realisasi pada sebagian indikator. Hal ini menggambarkan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan sosial di daerah sepanjang periode pengamatan.

2.1.4.5 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang berfokus pada pengelolaan sektor-sektor strategis yang tidak langsung terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, namun memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah secara holistik. Bidang-bidang ini mencakup ketenagakerjaan, transmigrasi, lingkungan hidup, perumahan, kebudayaan, komunikasi dan informatika, serta kepemudaan.

Melalui urusan ini, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing wilayah, serta

memastikan keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur. Dengan pendekatan yang strategis dan berbasis kebutuhan lokal, pelaksanaan urusan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan pembangunan.

A. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah daerah mencakup pengelolaan dan pengembangan sektor ketenagakerjaan serta transmigrasi guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek tenaga kerja, pemerintah daerah bertugas meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, menciptakan peluang kerja, serta menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Selain itu, perlindungan tenaga kerja juga menjadi fokus, termasuk pengawasan hubungan industrial dan penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Semua ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, serta kesejahteraan pekerja di daerah.

Di sisi lain, dalam aspek transmigrasi, pemerintah daerah berperan dalam mengelola kawasan transmigrasi secara terencana dan berkelanjutan, dengan menyediakan infrastruktur dasar, fasilitas sosial, serta dukungan ekonomi bagi transmigran. Pemberdayaan transmigran dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Program transmigrasi juga diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan memperkuat integrasi sosial antara masyarakat lokal dan transmigran, sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tabel 20 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,46	N/A	64,77	68,28	68,72
2	Tingkat Kesempatan Kerja	92,2	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,46	7,7	7,51	5,45	2,48
4	Tingkat ketidakaktifan	36,54	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Rasio penduduk yang bekerja (%)	N/A	N/A	12,98	N/A	N/A
6	Jumlah Penduduk Bekerja	N/A	67.448	N/A	N/A	N/A
7	Jumlah Angkatan Kerja	N/A	102.942	N/A	N/A	N/A
8	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	N/A	18,18	N/A	N/A	N/A
9	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	N/A	2,68	N/A	N/A	N/A
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	N/A	100	N/A	N/A	N/A
11	Jumlah Perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	N/A	33	N/A	N/A	N/A
12	Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	N/A	25	N/A	N/A	N/A
13	Rasio penduduk yang bekerja (%)	N/A	N/A	12,98	68,28	N/A
14	Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%)	N/A	N/A	110	250	N/A
15	Tingkat Pendapatan Masyarakat perkapita	N/A	N/A	N/A	29.181.930	N/A
16	Persentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%)	N/A	N/A	0	8	N/A
17	Jumlah penyalur tenaga kerja	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025*

Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan selama periode 2020–2024 menunjukkan perbaikan signifikan pada kondisi pasar kerja daerah, terutama tercermin dari meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran. Hal ini mengindikasikan semakin membaiknya kesempatan kerja dan efektivitas intervensi pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan tren meningkat, dari 63,46 persen pada tahun 2020 menjadi 68,72 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 8,46 persen pada tahun

2020 menjadi 2,48 persen pada tahun 2024, yang menunjukkan membaiknya daya serap tenaga kerja di daerah.

Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 102.942 orang dengan jumlah penduduk bekerja sebesar 67.448 orang. Tingkat kesempatan kerja pada tahun 2020 telah mencapai 92,2 persen, yang mengindikasikan kondisi pasar kerja yang relatif kondusif. Selain itu, tingkat ketidakaktifan pada tahun 2020 tercatat sebesar 36,54 persen, yang menunjukkan masih adanya potensi tenaga kerja yang belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dalam aspek peningkatan kualitas tenaga kerja, persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap ke dalam lapangan kerja pada tahun 2021 sebesar 18,18 persen. Persentase tenaga kerja terlatih menunjukkan peningkatan yang signifikan pada periode 2022–2023, yang mengindikasikan penguatan program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Namun demikian, kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah, yang menjadi perhatian dalam upaya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja. Dari sisi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, sebanyak 33 perselisihan hubungan industrial berhasil diselesaikan pada tahun 2021, sementara cakupan perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tercatat masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Ketenagakerjaan menunjukkan kemajuan dalam penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran, namun masih memerlukan penguatan pada aspek peningkatan kualitas tenaga kerja, perlindungan sosial, dan penerapan norma ketenagakerjaan. Ke depan, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyaluran tenaga kerja, serta penguatan jaminan sosial dan hubungan industrial menjadi arah kebijakan utama dalam RPJMD periode selanjutnya.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan hak-hak anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Pembangunan di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan pengarusutamaan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak, yang diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender. Untuk kinerja realisasi indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender	100	100	100	100,37	78,43
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	N/A	N/A	N/A	63,29
3	Indeks Ketimpangan Gender	N/A	N/A	N/A	N/A	0,392
4	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	N/A	100	100	99,05	N/A
5	Indeks komposit kesejahteraan anak (%)	N/A	N/A	100	100	N/A
6	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	N/A	N/A	100	89,69	N/A
7	Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	N/A	100	100	100	N/A
8	Persentase penanganan korban KDRT (%)	N/A	28,57	28,57	100	N/A
9	Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)	100	100	100	100	N/A
10	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (MCPR)	100	100	100	N/A	N/A
11	Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	100	66,67	100	N/A	N/A
12	Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)	100	100	100	N/A	N/A
13	NILAI SAKIP	100	100	100	N/A	78,43

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Mimika periode 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan variasi realisasi antar indikator serta perbedaan pencatatan capaian pada setiap tahun. Pada indikator Indeks

Pembangunan Gender (IPG), capaian tercatat stabil pada angka 100 pada periode 2020–2022, meningkat pada 2023, dan berada pada level 78,43 pada 2024. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) baru tercatat realisasinya pada 2024 sebesar 68,29, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia data. Adapun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) hanya tercatat pada 2024 dengan nilai 0,392.

Pada indikator cakupan peserta KB aktif, capaian menunjukkan hasil optimal dengan realisasi 100 persen pada 2021 dan 2022, serta sedikit menurun pada 2023. Indikator indeks komposit kesejahteraan anak tercatat mencapai 100 persen pada 2022 dan 2023. Selanjutnya, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan realisasi pada 2022 dan 2023 dengan capaian di bawah 100 persen, sementara pada tahun lainnya belum tercatat. Dalam aspek perlindungan perempuan dan anak, indikator cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak menunjukkan capaian penuh sebesar 100 persen pada 2021–2023. Indikator persentase penanganan korban KDRT menunjukkan peningkatan dari sekitar 28 persen pada 2021–2022 menjadi 100 persen pada 2023. Selain itu, persentase penanganan korban kekerasan pada anak tercatat konsisten sebesar 100 persen pada periode 2020–2023.

Pada indikator kesehatan reproduksi, persentase pemakaian kontrasepsi modern (MCPR) menunjukkan capaian penuh sebesar 100 persen pada 2020–2022, sementara pada tahun berikutnya tidak tercatat realisasi. Indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD menunjukkan fluktuasi, dengan realisasi 100 persen pada 2020, menurun pada 2021, dan kembali mencapai 100 persen pada 2022. Indikator proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN menunjukkan capaian 100 persen pada periode 2020–2022, sementara pada tahun-tahun selanjutnya tidak tercatat realisasi. Dari aspek tata kelola, nilai SAKIP urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan capaian stabil pada 2020–2022 dan tercatat sebesar 78,43 pada 2024.

Secara keseluruhan, data capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menggambarkan adanya capaian tinggi pada indikator perlindungan dan pelayanan, disertai dengan keterbatasan

ketersediaan data pada beberapa indikator pengukuran kesetaraan dan pemberdayaan gender pada tahun-tahun tertentu.

C. Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok atau primer dalam kehidupan manusia selain sandang dan papan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bab I pasal 1, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 22 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Ketahanan Pangan

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ketersediaan Pangan	Energi 2.805,47 kkal/kapita/ hari Protein 100,29 gram/kapita /hari	2.701 kkal/kap/ hari 104,73 gram/kap /hari	2.546 kkal/kap/ hari 106,1 gram/kap /hari	3.287 kkal/kap/ hari 106.16 gram/kap /hari
2	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat	6.5 Ton	25.5 Ton	63.4 Ton	165 Ton
3	Kualitas Konsumsi Pangan (Skor Pola Pangan Harapan)	N/A	72,55	72,55	77,7
4	Petani/Pengrajin/Pengolahan Pangan yang dibina (diversifikasi pangan lokal)	9 Kelompok	2 Kelompok	N/A	N/A
5	Deteksi Dini (early warning) Daerah Rawan Pangan bergizi, seimbang	Tersedianya Peta Kerawanan dan	N/A	N/A	N/A

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun			
		2021	2022	2023	2024
	dan aman (B2SA) di masyarakat	Kerentanan Pangan			
6	Persentase Ketersediaan Informasi, pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	N/A	18 Komoditas	24 Komoditas	24 Komoditas
7	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	N/A	5 Distrik	5 Distrik	N/A

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2025

. Berdasarkan Capaian kinerja Urusan Pangan selama periode 2021–2024 menunjukkan penguatan ketahanan pangan daerah yang tercermin dari meningkatnya ketersediaan pangan, penguatan cadangan pangan, serta perbaikan kualitas konsumsi masyarakat. Secara umum, kebijakan pangan daerah telah bergerak ke arah pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, aman, dan berkelanjutan. Persentase ketersediaan pangan berdasarkan kecukupan energi dan protein menunjukkan kondisi yang relatif memadai sepanjang periode. Meskipun terjadi penurunan kecukupan energi per kapita pada periode 2021–2023, capaian kembali meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 3.287 kkal/kapita/hari, dengan kecukupan protein yang tetap terjaga di atas 100 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menjaga suplai pangan, terutama pada akhir periode perencanaan.

Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 6,5 ton pada tahun 2021 menjadi 165 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan menghadapi risiko kerawanan pangan, bencana, dan fluktuasi pasokan. Dari sisi kualitas konsumsi pangan, skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan perbaikan, dari 72,55 pada tahun 2022–2023 menjadi 77,7 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan semakin beragam dan seimbang pola konsumsi pangan masyarakat, meskipun masih memerlukan penguatan diversifikasi pangan lokal secara berkelanjutan.

Pembinaan pelaku pangan lokal melalui diversifikasi pangan tercatat pada awal periode, meskipun belum berlanjut secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, upaya deteksi dini daerah rawan pangan telah dilakukan melalui penyediaan peta kerawanan dan kerentanan pangan, yang menjadi dasar perumusan kebijakan intervensi pangan daerah. Pada aspek tata kelola pangan, ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan strategis mengalami peningkatan, dengan cakupan komoditas yang dipantau bertambah menjadi 24 komoditas pada tahun 2023–2024. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan telah menjangkau lima distrik, yang mendukung perlindungan konsumen dan keamanan pangan di daerah.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Pangan menunjukkan penguatan signifikan pada aspek ketersediaan dan cadangan pangan serta perbaikan kualitas konsumsi. Ke depan, penguatan diversifikasi pangan lokal, konsistensi pembinaan pelaku pangan, serta perluasan pengawasan keamanan pangan menjadi arah kebijakan utama dalam RPJMD periode selanjutnya guna mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

D. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Mimika. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran air dan udara, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum lingkungan, serta dengan mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup pada periode sebelumnya menjadi dasar evaluasi dan perencanaan program pada RPJMD Kabupaten

Mimika Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup ke depan.ekonomi masyarakat.

Tabel 23 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	N/A	N/A	N/A	82,12
2	Presentase penurunan beban pencemaran	57,14	N/A	N/A	N/A	50
3	Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%)	N/A	N/A	N/A	58,65	N/A
4	Presentase pengelolaan persampahan	85,44	N/A	N/A	N/A	66,77
5	Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%)	N/A	N/A	56,34	49,4	N/A
6	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	N/A	20	N/A	N/A	N/A
7	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	N/A	5	N/A	N/A	N/A
8	Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	N/A	10	N/A	N/A	N/A
9	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	N/A	2	N/A	N/A	N/A
10	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang	N/A	N/A	100	50,58	N/A
11	Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	N/A	N/A	93.33	N/A	N/A
12	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	N/A	N/A	53.4	N/A	N/A
13	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	96.11	N/A	N/A

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Realisasi kinerja Urusan Lingkungan Hidup selama periode 2020–2024 menunjukkan upaya penguatan kualitas lingkungan yang mulai terukur pada akhir periode perencanaan, meskipun capaian indikator masih belum merata pada seluruh aspek pengelolaan lingkungan. Fokus kebijakan diarahkan pada pengendalian pencemaran, pengelolaan persampahan, serta

pemantauan kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercatat sebesar 82,12, yang menunjukkan kondisi lingkungan hidup daerah berada pada kategori baik. Capaian ini menjadi indikator komposit penting yang mencerminkan hasil dari berbagai intervensi pengelolaan lingkungan, khususnya pada aspek kualitas air, udara, dan pengendalian pencemaran.

Upaya pengendalian pencemaran menunjukkan hasil yang relatif baik, meskipun berfluktuasi. Persentase penurunan beban pencemaran tercatat sebesar 57,14 persen pada tahun 2020 dan 50 persen pada tahun 2024. Sementara itu, indikator penurunan jumlah indikasi pelanggaran lingkungan mengalami penurunan dari 56,34 persen pada tahun 2022 menjadi 49,4 persen pada tahun 2023, yang menunjukkan masih perlunya penguatan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan. Pada aspek pengelolaan persampahan, kinerja menunjukkan tantangan yang cukup besar. Persentase pengelolaan persampahan menurun dari 85,44 persen pada tahun 2020 menjadi 66,77 persen pada tahun 2024, sementara layanan penanganan persampahan perkotaan pada tahun 2023 baru mencapai 58,65 persen. Kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan cakupan layanan dan penguatan sistem pengelolaan sampah perkotaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Dalam pemantauan kualitas lingkungan, cakupan pemantauan kualitas air dan udara masih terbatas, masing-masing mencakup 20 lokasi pemantauan air dan 5 lokasi pemantauan udara pada tahun 2021. Meskipun demikian, indeks kualitas air dan udara pada tahun 2022 menunjukkan capaian yang relatif baik, dengan Indeks Kualitas Air sebesar 53,4 dan Indeks Kualitas Udara sebesar 96,11. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan relatif terjaga, meskipun cakupan pemantauan masih perlu diperluas. Aspek kepatuhan dan penegakan hukum lingkungan menunjukkan hasil yang beragam. Tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan masih rendah, sementara persentase usaha dan kegiatan yang memenuhi peraturan bidang lingkungan menurun dari 100 persen pada tahun 2022 menjadi 50,58 persen pada tahun 2023. Di sisi lain, persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 mencapai 93,33 persen, yang menunjukkan responsivitas pemerintah daerah terhadap pengaduan lingkungan masyarakat. Pengembangan kawasan ekowisata dan

jasa lingkungan masih berada pada tahap awal, dengan cakupan dua kawasan yang dikembangkan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan potensi yang masih dapat dioptimalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Lingkungan Hidup menunjukkan capaian positif pada kualitas lingkungan secara umum, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan persampahan, perluasan pemantauan kualitas lingkungan, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Ke depan, penguatan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta perluasan layanan persampahan menjadi arah kebijakan utama dalam RPJMD periode selanjutnya.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar penduduk serta penyediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir. Pelaksanaan urusan ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi kependudukan, memberikan kepastian hukum atas peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil, serta mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data. Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan pada peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, peningkatan kualitas dan keandalan data kependudukan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan sistem pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode sebelumnya menjadi dasar evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan program pada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang selanjutnya menjadi bahan perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah di bidang kependudukan.

Tabel 24 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Penduduk yang Memiliki KTP (%)	N/A	68,04	78,10%	71,68%	N/A
2	Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	N/A	74,44	79%	99%	N/A
3	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Usia 0 - 16 Tahun	N/A	N/A	N/A	48,45%	N/A
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0 - 18 Tahun	N/A	N/A	N/A	90%	N/A
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	113,35%
6	Persentase Kepemilikan dokume kependudukan dan pencatatan sipil	N/A	N/A	N/A	N/A	98,16%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika, 2025

Capaian cakupan penduduk yang memiliki KTP menunjukkan peningkatan dari 68,04% pada 2020 menjadi 78,10% pada 2021, namun sedikit menurun menjadi 71,68% pada 2022. Penurunan ini perlu dicermati sebagai indikator perlunya peningkatan sosialisasi dan pelayanan pencetakan KTP, terutama bagi penduduk usia wajib KTP yang baru. Untuk cakupan keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK), realisasi menunjukkan tren positif dan stabil. Capaian meningkat dari 74,44% pada 2020, menjadi 79% di 2021, dan mencapai 90% pada 2022. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam layanan pencatatan kependudukan dasar serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KK.

Sementara itu, cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada usia 0–16 tahun tercatat 48,45% pada 2023, menunjukkan bahwa hampir separuh anak-anak telah memiliki KIA. Meskipun demikian, angka ini masih perlu ditingkatkan agar lebih mendekati target nasional universal child registration. Dalam hal pencatatan kelahiran, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–18 tahun tercapai sebesar 100% pada 2023, yang merupakan capaian maksimal dan sangat penting untuk menjamin hak sipil anak di masa depan. Dari sisi pelayanan, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan tercatat 113,35%, menandakan tingginya tingkat penerimaan dan kepuasan masyarakat

terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan sistem layanan publik yang responsif dan adaptif.

Selain itu, persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara umum juga menunjukkan angka yang sangat baik, yakni 98,16% pada 2024, mencerminkan efektivitas pelayanan dan pencapaian hampir universal dalam dokumen identitas dasar penduduk. Secara keseluruhan, kinerja urusan administrasi kependudukan Kabupaten Mimika selama lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya dalam cakupan dokumen kependudukan dasar dan peningkatan kepuasan masyarakat. Ke depan, upaya perlu difokuskan pada peningkatan cakupan KTP dan KIA agar dapat mencakup seluruh kelompok usia wajib, serta mempertahankan kualitas layanan yang sudah mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan urusan pemerintahan yang berperan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa melalui penguatan kapasitas kelembagaan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi desa secara berkelanjutan.

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada periode sebelumnya menjadi dasar evaluasi dalam perumusan kebijakan dan program pada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai kinerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang selanjutnya menjadi bahan perencanaan kebijakan untuk mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 25 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	48%
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota Bamsukam yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	N/A	N/A	39%
5	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
7	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	N/A	N/A	N/A	N/A	40%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mimika, 2024

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Mimika periode 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator baru tercatat realisasinya pada tahun 2024. Pada indikator Indeks Desa, realisasi kinerja pada 2024 tercatat sebesar 48 persen, yang menggambarkan kondisi tingkat perkembangan desa berdasarkan indikator komposit yang digunakan. Indikator persentase fasilitasi penataan desa dan persentase fasilitasi kerja sama desa masing-masing menunjukkan capaian sebesar 40 persen dan 20 persen pada 2024, sementara pada tahun-tahun sebelumnya belum tercatat realisasi.

Pada aspek penguatan kapasitas aparatur dan tata kelola desa, indikator persentase aparatur desa dan anggota Bamuskam yang ditingkatkan kapasitasnya menunjukkan capaian sebesar 39 persen pada 2024. Indikator persentase fasilitasi tata kelola desa serta persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga masyarakat desa masing-masing mencatat capaian sebesar 40 persen pada tahun yang sama. Selain itu, indikator persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat juga menunjukkan realisasi sebesar 40 persen pada 2024.

Secara keseluruhan, data capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Mimika selama periode

2020–2024 menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator terkonsentrasi pada tahun 2024, dengan capaian yang bervariasi antar indikator. Hal ini menggambarkan pelaksanaan program pemberdayaan dan pembinaan desa yang mulai terukur pada akhir periode pengamatan, sementara pada tahun-tahun sebelumnya belum terdapat pencatatan capaian kinerja pada sebagian besar indikator.

G. Perhubungan

Urusan Perhubungan merupakan urusan pemerintahan yang berperan penting dalam mendukung mobilitas orang dan barang serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Mimika. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi guna menunjang pembangunan wilayah dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, penyelenggaraan urusan Perhubungan diarahkan pada peningkatan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, serta penguatan sarana dan prasarana perhubungan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pengembangan jaringan transportasi, peningkatan manajemen dan pengawasan transportasi, serta sinergi antar moda transportasi. Capaian kinerja urusan Perhubungan pada periode sebelumnya menjadi dasar evaluasi dalam perumusan kebijakan dan program pada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai kinerja pelayanan perhubungan, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perencanaan kebijakan guna meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan keselamatan transportasi di Kabupaten Mimika.

Tabel 26 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Perhubungan

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Angkutan Penumpang Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	350 unit
2	Persentase Penumpang Angkutan Yang Dapat Dilayani	N/A	N/A	N/A	N/A	91.97
3	Rasio Trayek	N/A	N/A	N/A	N/A	24
4	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Angkutan umum	N/A	N/A	N/A	N/A	2.1240 orang

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah Kendaraan Wajib Uji (KBWU)	N/A	N/A	N/A	N/A	6.0674 orang
6	Ketersediaan Halte Pada Jalur Trayek Angkutan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	15 buah
7	Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Rambu	N/A	N/A	N/A	N/A	500 buah
8	Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Marka	N/A	N/A	N/A	N/A	9.500

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja urusan perhubungan Kabupaten Mimika periode 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja sebagian besar tercatat pada tahun 2024. Pada indikator jumlah angkutan penumpang umum, realisasi tercatat sebesar 350 unit pada 2024, sementara pada tahun-tahun sebelumnya belum tercatat realisasi. Indikator persentase penumpang angkutan yang dapat dilayani menunjukkan capaian sebesar 91,97 persen pada 2024, yang menggambarkan tingkat layanan angkutan umum kepada masyarakat.

Pada indikator rasio trayek, capaian tercatat sebesar 24 pada 2024, yang menunjukkan jumlah atau perbandingan trayek angkutan umum yang tersedia pada tahun tersebut. Indikator jumlah kendaraan wajib uji angkutan umum dan jumlah kendaraan wajib uji (KBWU) masing-masing menunjukkan realisasi sebesar 2.124 orang dan 6.074 orang pada 2024, yang mencerminkan pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan bermotor. Selain itu, indikator ketersediaan halte pada jalur trayek angkutan umum menunjukkan capaian sebanyak 15 buah pada 2024.

Pada aspek prasarana pendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas, indikator ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan rambu tercatat sebesar 500 buah pada 2024. Sementara itu, indikator ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan marka menunjukkan capaian sebesar 9.500 pada tahun yang sama. Secara keseluruhan, data capaian indikator kinerja urusan perhubungan Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa pengukuran dan pencatatan capaian kinerja indikator perhubungan mulai terakumulasi pada akhir periode pengamatan, dengan capaian yang berfokus pada penyediaan layanan angkutan umum, pengujian kendaraan, serta penyediaan prasarana keselamatan lalu lintas.

H. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan urusan pemerintahan yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan urusan ini diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan informasi, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika difokuskan pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta penguatan tata kelola sistem informasi pemerintahan daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pengembangan jaringan komunikasi, peningkatan keamanan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan pengambilan keputusan. Capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika pada periode sebelumnya menjadi dasar evaluasi dalam perumusan kebijakan dan program pada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perencanaan kebijakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis digital.

Tabel 27 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%)	N/A	N/A	5	15	N/A
2	Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah (%)	N/A	N/A	200	13,488	N/A
3	Tingkat Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	N/A	N/A	N/A	N/A	93,4
4	Tingkat pengelolaan aplikasi informatika	N/A	N/A	N/A	N/A	84
5	Tingkat penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	N/A	N/A	N/A	N/A	85,9

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2025

Selama periode 2021–2023, terdapat peningkatan bertahap dalam hal digitalisasi perangkat daerah, khususnya ditunjukkan oleh persentase

perangkat daerah yang memiliki website. Capaian meningkat dari 5% pada 2021 menjadi 15% pada 2023, menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi telah dimulai, perlu percepatan dalam adopsi website sebagai sarana pelayanan dan komunikasi publik antar instansi pemerintah daerah. Salah satu capaian paling signifikan tercermin pada persentase peningkatan kunjungan website pemerintah daerah, yang melonjak drastis dari 200% pada 2022 menjadi 13.488% pada 2023. Lompatan ini mengindikasikan keberhasilan dalam menarik atensi publik melalui kanal digital, baik karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi daring maupun karena perbaikan desain, konten, atau integrasi sistem digital yang lebih ramah pengguna.

Pada tahun 2024, pengelolaan sistem informasi dan keamanan digital mulai mendapat perhatian yang lebih serius. Tingkat pengelolaan informasi dan komunikasi publik tercapai sebesar 93,4%, menandakan peningkatan signifikan dalam penyampaian informasi resmi kepada masyarakat. Di sisi lain, tingkat pengelolaan aplikasi informatika mencapai 84%, menunjukkan upaya optimalisasi sistem informasi untuk mendukung layanan internal dan eksternal pemerintah. Sementara itu, tingkat penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terealisasi sebesar 85,9%, mencerminkan adanya perhatian pada aspek keamanan data dan perlindungan informasi strategis pemerintah daerah. Secara keseluruhan, kinerja bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Mimika memperlihatkan kemajuan penting dalam hal peningkatan keterjangkauan informasi publik, optimalisasi kunjungan daring, serta penguatan sistem keamanan informasi. Meskipun persentase perangkat daerah yang memiliki website masih tergolong rendah, pencapaian pada indikator lainnya menjadi pondasi penting bagi akselerasi transformasi digital pemerintahan daerah di tahun-tahun mendatang.

I. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) di pemerintah daerah mencakup pengelolaan dan pengembangan sektor koperasi serta UKM sebagai bagian dari perekonomian lokal. Tugas utamanya adalah meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi dan UKM melalui pemberian fasilitas, dukungan pembiayaan, pelatihan, serta akses pasar.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan dan memperkuat jaringan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, sektor koperasi dan UKM juga difasilitasi untuk mengakses teknologi dan inovasi agar dapat berkembang di era digital.

Tabel 28 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kot	5	6	7	8	9
2	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	47	97	147	197	247
3	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	47	97	147	197	247
4	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60	70	80	90	100
5	Persentase fasilitasi sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60	70	80	90	100
6	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60	70	80	90	100
7	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	47	97	147	197	247
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	47	97	147	197	247
9	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	47	97	147	197	247
10	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	47	97	147	197	247

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	47	97	147	197	247
12	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	47	97	147	197	247
13	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	47	97	147	197	247
14	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	47	97	147	197	247
15	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampinga	47	97	147	197	247

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah Kabupaten Mimika periode 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada sebagian besar indikator pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Pada indikator persentase fasilitasi permodalan simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, capaian meningkat bertahap dari 5 persen pada 2020 menjadi 9 persen pada 2024. Sementara itu, indikator persentase koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan simpan pinjam menunjukkan peningkatan signifikan dari 47 persen pada 2020 menjadi 247 persen pada 2024, yang menggambarkan semakin luasnya jangkauan dukungan permodalan bagi koperasi.

Indikator persentase koperasi yang mengikuti pelatihan juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 60 persen pada 2020 menjadi 100 persen pada 2024. Pola peningkatan yang sama terlihat pada indikator koperasi yang terdaftar dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) serta koperasi yang difasilitasi dalam pendirian dan pengembangan kelembagaan, yang masing-masing meningkat secara bertahap hingga mencapai 100 persen pada 2024.

Pada indikator yang berkaitan dengan usaha mikro, seperti usaha mikro yang mendapatkan dukungan fasilitasi, usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan, serta usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan kelembagaan, capaian menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 47 persen pada 2020 menjadi 247 persen pada 2024.

Indikator rasio pertumbuhan usaha mikro dan usaha mikro yang tercatat dalam sistem OSS dan SIDA juga mengikuti pola peningkatan yang sama, yang mencerminkan bertambahnya jumlah usaha mikro yang terdata dan mendapatkan dukungan program pemerintah daerah.

Selain itu, indikator usaha mikro yang mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pameran menunjukkan peningkatan capaian secara konsisten hingga 2024. Secara keseluruhan, data capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang berkelanjutan pada hampir seluruh indikator, yang menggambarkan penguatan peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro secara bertahap dan terukur.

J. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal di Kabupaten Mimika berfokus pada upaya menarik dan mengelola investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Mimika, yang kaya akan sumber daya alam, berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyediakan kemudahan perizinan, penyederhanaan prosedur investasi, dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kabupaten Mimika aktif mempromosikan potensi sektor-sektor yang dapat menjadi peluang investasi, seperti sektor pertambangan, pariwisata, dan industri lokal lainnya, dengan tujuan meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan juga dilakukan untuk memastikan bahwa investasi yang masuk dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Berikut data realisasi kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Mimika.

Tabel 29 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Izin Usaha yang diterbitkan	N/A	100%	34%	N/A	N/A
2	Pelayanan Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi	N/A	0,47%	10%	86.6%	N/A
3	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	N/A	7,00%	88%	60%	N/A

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Kenaikan Nilai Realisasi PMA	N/A	7,00%		70%	N/A
5	Nilai Investasi Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	78%
6	Nilai Sakip Dinas PMPTSP	N/A	N/A	N/A	N/A	52%
7	Nilai Survei Kepuasan masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	100,6%

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mimika, 2025

Indikator izin usaha yang diterbitkan menunjukkan penurunan signifikan selama periode 2020–2022. Pada 2020, capaian mencapai 100%, namun menurun drastis menjadi 34% pada 2021, dan bahkan tidak ada penerbitan izin (0%) pada 2022. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam proses perizinan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan pusat, kendala sistem, atau transisi regulasi OSS (Online Single Submission). Sebaliknya, kinerja pelayanan penanaman modal dan perlindungan investasi justru mengalami peningkatan tajam. Capaian awal pada 2020 hanya 0,47%, meningkat menjadi 10% pada 2021, dan melonjak hingga 86,6% pada 2023. Hal ini mencerminkan upaya perbaikan dalam pelayanan investasi, baik dari sisi kecepatan layanan, transparansi prosedur, maupun responsivitas terhadap investor.

Dari sisi realisasi investasi, kenaikan nilai realisasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) tercatat meningkat signifikan menjadi 88% pada 2021, sebelum menurun menjadi 60% pada 2022, menunjukkan bahwa investasi domestik mengalami dinamika yang cukup besar antar tahun. Sementara itu, kenaikan nilai realisasi PMA (Penanaman Modal Asing) pada 2023 mencapai 70%, yang mencerminkan meningkatnya daya tarik Kabupaten Mimika bagi investor asing.

Capaian nilai investasi daerah pada 2023 tercatat sebesar 78%, yang memberikan gambaran umum mengenai kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, nilai SAKIP Dinas DPMPTSP tercatat 52%, menunjukkan perlunya penguatan akuntabilitas kinerja instansi, baik dalam aspek perencanaan, pelaporan, maupun evaluasi program. Terakhir, nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP mencapai 100,6% pada tahun 2024, mencerminkan tingkat kepercayaan dan kepuasan yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan dan investasi.

K. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Mimika bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi generasi muda melalui pembinaan, pemberdayaan, serta peningkatan kualitas kehidupan pemuda di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk menyediakan fasilitas dan program yang mendukung minat dan bakat olahraga, termasuk melalui pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Selain itu, program kepemudaan di Kabupaten Mimika fokus pada peningkatan keterampilan dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pembinaan karakter dan kepemimpinan juga menjadi bagian penting dalam mencetak generasi muda yang produktif dan berdaya saing. Melalui kegiatan olahraga, Kabupaten Mimika juga berupaya mempererat hubungan antar masyarakat serta mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memastikan bahwa pemuda Kabupaten Mimika dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan daerah. Berikut kondisi realisasi kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Mimika, menunjukkan upaya nyata yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung dan mengembangkan potensi pemuda serta meningkatkan kualitas olahraga di daerah tersebut.

Tabel 30 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	30%	60%	67%	73%	77%
2	Cakupan pembinaan atlet muda	N/A	N/A	N/A	25%	28%
3	Jumlah organisasi kepemudaan	N/A	8	10	10	8
4	Presentasi pemenuhan administrasi perkantoran sarana, prasarana, serta dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan	32,50 %	35,50 %	37,50 %	37,50 %	42,50 %
5	Persentase Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang Dikembangkan	55%	60%	65%	70,00 %	75,00 %
6	Persentase Kapasitas Kepramukaan yang Dikembangkan	70%	75%	80%	85,00 %	90,00 %

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang Dikembangkan	50%	90%	92%	90,00 %	90,00 %
8	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program	N/A	8	10	8	8
10	Jumlah pemuda kader kewirausahaan	N/A	N/A	100	120	120
11	Cakupan pembinaan olahraga (%)	N/A	N/A	25%	33%	33%
12	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	N/A	N/A	25%	25%	25%
13	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	N/A	N/A	N/A	25%	28%
14	Jumlah atlet berprestasi (orang)	N/A	40	42	60	80

Sumber: Disparbudpora Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Mimika periode 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan pada sebagian besar indikator pengembangan organisasi, kapasitas kepemudaan, serta pembinaan olahraga. Pada indikator persentase organisasi pemuda yang aktif, capaian meningkat secara bertahap dari 30 persen pada 2020 menjadi 77 persen pada 2024. Indikator cakupan pembinaan atlet mulai tercatat pada 2022 dan menunjukkan peningkatan dari 25 persen menjadi 28 persen pada 2024. Sementara itu, jumlah organisasi kepemudaan menunjukkan fluktuasi ringan dengan jumlah tercatat sebanyak 8–10 organisasi selama periode pengamatan.

Pada indikator tata kelola organisasi, persentase pemenuhan administrasi sarana prasarana serta dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja menunjukkan peningkatan dari 32,50 persen pada 2020 menjadi 42,50 persen pada 2024. Indikator persentase kapasitas daya saing kepemudaan yang dikembangkan juga meningkat dari 55 persen pada 2020 menjadi 75 persen pada 2024. Sejalan dengan itu, persentase kapasitas kepemudaan yang dikembangkan meningkat dari 70 persen pada 2020 menjadi 90 persen pada 2024.

Dalam aspek pengembangan olahraga, indikator persentase kapasitas daya saing keolahragaan yang dikembangkan menunjukkan peningkatan signifikan dari 50 persen pada 2020 menjadi 90 persen pada 2024. Indikator persentase administrasi perkantoran tercatat stabil dan optimal sebesar 100 persen sepanjang periode pengamatan.

Pada indikator output kegiatan, jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program menunjukkan capaian yang relatif stabil pada kisaran 8–10 orang per tahun. Indikator jumlah pemuda kader kewirausahaan tercatat meningkat dari 100 orang pada 2022 menjadi 120 orang pada 2023 dan 2024. Selain itu, cakupan pembinaan olahraga dan cakupan pelatihan kepemudaan menunjukkan capaian yang relatif meningkat sejak 2022. Adapun jumlah atlet berprestasi menunjukkan peningkatan dari 40 orang pada 2021 menjadi 80 orang pada 2024.

Secara keseluruhan, data capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan bertahap pada indikator penguatan organisasi kepemudaan, pengembangan kapasitas pemuda, serta pembinaan olahraga, yang mencerminkan dinamika pelaksanaan program kepemudaan dan olahraga di daerah.

L. Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Mimika berfokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebaran data statistik yang diperlukan untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi program dan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika berperan dalam menyediakan data yang akurat dan relevan mengenai berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, demografi, dan lainnya, yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Selain itu, urusan statistik juga mencakup penyelenggaraan sensus dan survei di tingkat daerah, seperti Sensus Penduduk, Survei Ekonomi, dan lainnya. Dengan data statistik yang tepat, Kabupaten Mimika dapat merancang program pembangunan yang lebih efektif dan terarah, serta memantau perkembangan dan pencapaian kinerja pembangunan. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait

lainnya dalam menjaga kualitas dan keandalan data statistik di wilayahnya. Berikut kondisi realisasi kinerja urusan statistik di Kabupaten Mimika, yang mencerminkan sejauh mana pengelolaan data statistik dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah.

Tabel 31 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Statistik

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan ketersediaan data	N/A	1	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	N/A	1	N/A	N/A	N/A
3	Tersedianya Single Data Kabupaten	N/A	N/A	N/A	10	N/A
4	Tersedianya Buku Mimika dalam Angka	N/A	N/A	100	N/A	N/A
5	Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Mimika	N/A	N/A	100	N/A	N/A
6	Tingkat penyelenggaraan statistik sektoral	N/A	N/A	N/A	N/A	95,8

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2025

Capaian awal pada indikator cakupan ketersediaan data tercatat sebesar 1 pada tahun 2020 dan 2021, yang mencerminkan upaya dasar dalam penyediaan data pembangunan daerah. Pada tahun 2021, telah tersedia 1 dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas, menunjukkan inisiatif awal dalam penguatan data analitik sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan. Indikator tersedianya Single Data Kabupaten mulai tercatat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing 0, namun meningkat menjadi 10 pada 2024. Ini menandakan adanya kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem data tunggal sebagai bagian dari integrasi data sektoral di tingkat kabupaten.

Sementara itu, publikasi statistik seperti Buku Mimika dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Mimika menunjukkan konsistensi pada tahun 2021, di mana keduanya telah direalisasikan 100%, namun belum ada data kelanjutan pada tahun-tahun setelahnya. Pada aspek kelembagaan dan tata kelola statistik, tingkat penyelenggaraan statistik sektoral menunjukkan capaian yang baik dengan nilai 100% pada 2023, dan sedikit menurun menjadi 95,8% pada 2024. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun pelaksanaan statistik sektoral telah berjalan optimal, masih terdapat ruang peningkatan dalam hal koordinasi, kualitas data, dan ketepatan waktu

pelaporan. Secara keseluruhan, kinerja bidang statistik Kabupaten Mimika menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam hal penguatan data dasar, penyusunan dokumen analisis, dan peningkatan ketersediaan publikasi serta penyelenggaraan statistik sektoral. Ke depan, percepatan digitalisasi data dan penguatan koordinasi lintas OPD sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan responsif.

M. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Mimika berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan informasi yang bersifat rahasia atau penting dalam rangka mendukung keamanan dan kelancaran administrasi pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Mimika bertanggung jawab dalam memastikan bahwa sistem persandian berjalan dengan baik, melalui penerapan teknologi enkripsi dan pengamanan komunikasi yang tepat untuk melindungi data penting yang dikelola oleh instansi pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait kebijakan, perencanaan, serta kegiatan pemerintahan yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

Selain itu, urusan persandian juga mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani masalah keamanan informasi dan pengelolaan sandi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan sistem persandian yang baik, diharapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat dapat dikelola secara aman dan efektif, sehingga mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang dapat merugikan pihak tertentu. Berikut kondisi realisasi kinerja urusan persandian di Kabupaten Mimika, yang mencerminkan sejauh mana upaya pengamanan dan pengelolaan informasi penting dilakukan untuk mendukung keamanan dan kelancaran administrasi pemerintahan daerah.

Tabel 32 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Persandian

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	N/A	38	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah sandiman (orang)	N/A	N/A	N/A	3	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, 2024

Realisasi kinerja urusan persandian di Kabupaten Mimika menunjukkan beberapa pencapaian dalam pengelolaan keamanan informasi. Pada tahun 2021, persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah tercatat sebesar 38%, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mulai menerapkan sistem pengamanan informasi melalui enkripsi dan sandi. Namun, jumlah sandiman (orang) yang terlatih dan diberi kewenangan dalam mengelola sistem persandian baru tercatat 3 orang pada tahun 2023, sementara sebelumnya tidak ada data pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika telah mulai meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang persandian, namun masih perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk memperluas penerapan sistem persandian di seluruh perangkat daerah guna memastikan keamanan informasi yang lebih optimal.

N. Kebudayaan

Urusan kebudayaan di Kabupaten Mimika berfokus pada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya untuk melestarikan tradisi, seni, dan adat istiadat masyarakat, serta mempromosikan kebudayaan lokal melalui berbagai kegiatan, seperti festival budaya, pelatihan seni, dan dokumentasi warisan budaya. Dengan memadukan kebudayaan dalam pembangunan, Kabupaten Mimika berusaha menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada, sambil mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkenalkan budaya mereka ke tingkat yang lebih luas. erikut kondisi realisasi kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Mimika, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

Tabel 33 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pengembangan Kebudayaan yang Ditingkatkan	25%	35%	45%	55%	60%

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional Ditingkatkan	25%	35%	45%	50%	55%
3	Persentase Event Seni Budaya yang Dikelola	20%	25%	35%	40%	60%
4	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
6	Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%)	30%	50%	65%	70%	80%

Sumber: Disparbudpora Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Mimika periode 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan pada sebagian besar indikator pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Pada indikator persentase pengembangan kebudayaan yang ditingkatkan, capaian meningkat secara bertahap dari 25 persen pada 2020 menjadi 60 persen pada 2024. Pola peningkatan yang serupa juga terlihat pada indikator persentase pengembangan kesenian tradisional yang ditingkatkan, yang naik dari 25 persen pada 2020 menjadi 55 persen pada 2024.

Indikator persentase event seni budaya yang dikelola menunjukkan peningkatan dari 20 persen pada 2020 menjadi 60 persen pada 2024, yang menggambarkan semakin banyaknya kegiatan seni dan budaya yang diselenggarakan dan dikelola secara terstruktur. Sementara itu, indikator persentase pemenuhan administrasi perkantoran tercatat stabil dan optimal sebesar 100 persen pada seluruh periode pengamatan, yang mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan administrasi urusan kebudayaan. Pada indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan, realisasi baru tercatat pada 2024 sebesar 45 persen, sementara pada tahun-tahun sebelumnya belum terdapat pencatatan capaian. Adapun indikator persentase kelompok seni yang terbina menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 30 persen pada 2020 menjadi 80 persen pada 2024, yang mencerminkan penguatan pembinaan terhadap pelaku dan komunitas seni budaya di daerah.

Secara keseluruhan, data capaian indikator kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan bertahap pada indikator pengembangan kebudayaan, kesenian tradisional, dan pembinaan kelompok seni, disertai dengan

konsistensi pemenuhan administrasi dan mulai terukurnya upaya pelestarian cagar budaya pada akhir periode pengamatan.

O. Perpustakaan

Urusan perpustakaan di Kabupaten Mimika berfokus pada pengembangan dan peningkatan layanan perpustakaan untuk mendukung pendidikan dan literasi di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya memperluas akses informasi melalui layanan perpustakaan, termasuk dengan mengoptimalkan perpustakaan keliling yang dapat menjangkau wilayah yang lebih terpencil. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas layanan perpustakaan agar masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan literasi, pembinaan minat baca, dan penyediaan bahan bacaan yang relevan bagi masyarakat menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan tingkat literasi di Kabupaten Mimika. Berikut kondisi realisasi kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Mimika, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki akses dan kualitas layanan perpustakaan untuk masyarakat.

Tabel 34 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	N/A	27,78	N/A	N/A	N/A
2	Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	N/A	N/A	N/A	50	108
4	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	N/A	N/A	N/A	N/A	51,04
5	Pembinaan perpustakaan	N/A	N/A	N/A	N/A	98,45

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mimika, 2025

Pada tahun 2021, cakupan pelayanan perpustakaan keliling tercatat sebesar 27,78%, yang mencerminkan upaya awal untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang jauh dari fasilitas perpustakaan tetap. Namun, persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan pada tahun yang sama tercatat 0%, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas pustaka agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan

menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 50 orang pada 2023 menjadi 108 orang pada 2024, menandakan tumbuhnya minat masyarakat terhadap akses informasi dan literasi, kemungkinan dipengaruhi oleh kegiatan promosi atau peningkatan kualitas koleksi dan layanan.

Dalam hal dukungan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota berada pada angka 51,04% di tahun 2024, menunjukkan bahwa fungsi perpustakaan sebagai bagian dari sistem pendukung tata kelola informasi publik mulai diakui dan diperkuat. Selain itu, indikator pembinaan perpustakaan menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 98,45% pada tahun 2024, yang mencerminkan komitmen Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melakukan pembinaan terhadap unit-unit perpustakaan di wilayah Kabupaten Mimika, baik dalam aspek manajemen, koleksi, maupun layanan.

P. Kearsipan

Urusan kearsipan di Kabupaten Mimika berfokus pada pengelolaan dan penyimpanan arsip yang efisien dan aman untuk mendukung kelancaran administrasi pemerintahan. Mengingat tantangan geografis dan aksesibilitas wilayah, Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya mengembangkan sistem kearsipan yang dapat mempermudah pengelolaan dokumen penting baik dalam bentuk fisik maupun digital. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsip yang dihasilkan oleh setiap perangkat daerah tersimpan dengan baik, mudah diakses, dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan agar dapat mengelola arsip sesuai dengan standar yang berlaku, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Berikut kondisi realisasi kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Mimika, yang mencerminkan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan sistem pengelolaan arsip dalam rangka mendukung kelancaran pemerintahan daerah.

Tabel 35 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kearsipan

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku	N/A	N/A	30	15	N/A
3	Persentase Aparatur yang melaksanakan pengelolaan kearsipan (%)	N/A	N/A	70	65	N/A
4	Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	N/A	N/A	N/A	N/A	100
5	Pengolahan arsip	N/A	N/A	N/A	N/A	99,79
6	Perlindungan dan penyelamatan arsip	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mimika, 2025

Capaian awal pada indikator peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan tercatat 0% pada 2021, menandakan belum adanya upaya penyelamatan arsip pada tahun tersebut. Namun demikian, upaya pengelolaan arsip mulai terlihat pada indikator lain, seperti jumlah OPD, SMP, dan desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku, yaitu sebanyak 30 unit pada 2022 dan 15 unit pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan perlunya konsistensi dalam penerapan sistem pengelolaan arsip di seluruh perangkat daerah dan institusi pendidikan.

Persentase aparatur yang melaksanakan pengelolaan kearsipan juga mengalami penurunan dari 70% pada 2021 menjadi 65% pada 2022, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan komitmen SDM dalam menjalankan fungsi kearsipan secara profesional. Sementara itu, tiga indikator penting lainnya menunjukkan capaian maksimal pada tahun 2024. Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, perlindungan dan penyelamatan arsip, serta pengolahan arsip masing-masing tercapai 100%, 100%, dan 99,79%, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam aspek pelestarian dokumen penting dan penguatan sistem kearsipan secara teknis dan substantif.

2.1.4.6 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Mimika mencerminkan capaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan

perikanan secara berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha kelautan dan perikanan. Capaian indikator kinerja pada urusan ini menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan, sekaligus sebagai acuan dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada periode perencanaan selanjutnya agar selaras dengan target RPJMD, kebijakan nasional, dan potensi wilayah Kabupaten Mimika, sebagai berikut.

Tabel 36 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	86	127,56	135,01	236,36	235,21
2	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	62,910.00	56,498.60	56,498.60	54,334.00	49,987.00
3	Peningkatan produksi ikan olahan (ton)	174.90	681.70	1,431.56	1,782.77	1,800.10
4	Persentase pemasaran hasil perikanan	45.44	42.36	33.08	30.75	35.00
5	Jumlah rumah tangga nelayan ang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	10,532	10,532	10,986	11,016	11,168
6	Jumlah tempat pelelangan ikan yang operasional	N/A	1	1	1	1
7	Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan (izin usaha)	N/A	1	1	1	8
8	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (orang)	210	148	337	502	260
9	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi (ekor)	3,719,098	6,192,258	6,403,900	7,601,000	5,699,353

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (ton)	62,996.00	56,626.16	56,633.61	54,570.36	50,222.21

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika, 2025

Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika pembangunan sektor yang dipengaruhi oleh penurunan perikanan tangkap dan penguatan subsektor budidaya serta pengolahan hasil perikanan. Kondisi ini mencerminkan proses transformasi struktur produksi perikanan menuju arah yang lebih berkelanjutan. Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan signifikan, dari 86,00 ton pada tahun 2020 menjadi 235,21 ton pada tahun 2024, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan upaya pengembangan budidaya sebagai alternatif sumber produksi perikanan daerah. Sebaliknya, produksi perikanan tangkap terus mengalami penurunan dari 62.910,00 ton pada tahun 2020 menjadi 49.987,00 ton pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya keterbatasan sumber daya dan perlunya pengelolaan perikanan tangkap secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, produksi ikan olahan meningkat sangat pesat, dari 174,90 ton pada tahun 2020 menjadi 1.800,10 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan berkembangnya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor perikanan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kinerja pemasaran hasil perikanan yang cenderung menurun hingga tahun 2023 dan baru menunjukkan perbaikan pada tahun 2024, sehingga penguatan sistem pemasaran masih menjadi kebutuhan utama.

Dari sisi sosial ekonomi, jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha meningkat dari 10.532 rumah tangga pada tahun 2020 menjadi 11.168 rumah tangga pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan meningkatnya ketahanan ekonomi nelayan melalui pengembangan usaha alternatif. Dukungan tata kelola dan sarana pendukung juga menunjukkan perbaikan, ditandai dengan operasionalnya

tempat pelelangan ikan sejak tahun 2021 serta meningkatnya penerbitan izin usaha perikanan budidaya pada tahun 2024.

Sementara itu, kapasitas produksi benih dan kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan menunjukkan fluktuasi, namun secara umum mendukung penguatan subsektor budidaya. Secara keseluruhan, total produksi perikanan Kabupaten Mimika menurun dari 62.996,00 ton pada tahun 2020 menjadi 50.222,21 ton pada tahun 2024, terutama akibat penurunan produksi perikanan tangkap. Oleh karena itu, penguatan perikanan budidaya, hilirisasi, pemasaran, serta pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan menjadi arah kebijakan utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan daerah ke depan.

B. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu aspek penunjang pembangunan daerah yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan citra dan daya tarik daerah. Pengembangan pariwisata juga berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal dan penguatan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis potensi wilayah. Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, pengembangan pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata, penguatan promosi dan pemasaran pariwisata, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pembinaan pelaku usaha pariwisata, serta peningkatan peran masyarakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Capaian kinerja pariwisata pada periode sebelumnya menjadi dasar evaluasi dalam perumusan kebijakan dan program pengembangan pariwisata pada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai kinerja pembangunan pariwisata, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perencanaan kebijakan untuk mendorong pariwisata sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Tabel 37 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pariwisata

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase kunjungan wisatawan mancanegara	625	587	772	649	494
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	2.693	167.523	173.506	144.605	143.579
3	Presentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Ditingkatkan	N/A	75%	77%	78,00%	79,00%
4	Persentase Pemasaran Pariwisata yang Ditingkatkan	25%	40%	N/A	87,00%	90,00%
5	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	N/A	70%	75%	N/A	80,00%
6	PAD Sektor Wisata (Rp. Ribu)	N/A	N/A	110.891.124.133	83.242.940.081	27.983.208.647
7	Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa) Nusantara dan Mancanegara	3.318	168.101	174.278	145.254	144.073

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2025

Capaian kinerja sektor pariwisata Kabupaten selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika pemulihan dan penyesuaian pascapandemi, dengan fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan serta peningkatan kualitas pengelolaan destinasi dan pemasaran pariwisata. Secara umum, kinerja pariwisata mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021–2022, kemudian cenderung menurun dan stabil pada periode 2023–2024. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat tajam dari 2.693 kunjungan pada tahun 2020 menjadi 173.506 kunjungan pada tahun 2022, sebelum menurun menjadi 143.579 kunjungan pada tahun 2024. Pola yang sama juga terlihat pada total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, yang mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 174.278 jiwa, kemudian menurun dan relatif stabil pada tahun 2023–2024. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara cenderung fluktuatif dan menurun pada akhir periode, dari 772 kunjungan pada tahun 2022 menjadi 494 kunjungan pada tahun 2024, yang menunjukkan perlunya penguatan promosi dan aksesibilitas wisata skala nasional maupun internasional.

Di sisi kualitas destinasi, persentase daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan menunjukkan tren meningkat secara konsisten sejak tahun 2021, dari 75 persen menjadi 79 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana, prasarana, dan daya saing destinasi wisata. Peningkatan ini didukung oleh kinerja pemasaran pariwisata yang mengalami lonjakan signifikan, dari 40 persen pada tahun 2021 menjadi 90 persen pada tahun 2024, meskipun sempat tidak tercatat pada tahun 2022. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif juga menunjukkan tren positif, dengan capaian meningkat dari 70 persen pada tahun 2021 menjadi 80 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya integrasi pariwisata dengan sektor ekonomi kreatif sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun demikian, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor wisata menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir, dari Rp110,89 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp27,98 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah kunjungan dan kualitas destinasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kontribusi fiskal, sehingga optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi pariwisata masih menjadi tantangan utama.

Secara keseluruhan, pembangunan sektor pariwisata Kabupaten menunjukkan kemajuan pada aspek kualitas destinasi, pemasaran, dan pengembangan ekonomi kreatif, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas jumlah kunjungan serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, penguatan daya tarik unggulan, peningkatan lama tinggal wisatawan, serta integrasi promosi, investasi, dan tata kelola pariwisata menjadi arah kebijakan utama dalam RPJMD periode selanjutnya.

C. Pertanian dan Peternakan

Urusan Pertanian dan Peternakan merupakan urusan pemerintahan yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Penyelenggaraan urusan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian dan

peternakan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, penyelenggaraan urusan Pertanian dan Peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan, pengembangan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian petani dan peternak. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembinaan, penyediaan sarana produksi, pengendalian hama dan penyakit, serta penguatan kelembagaan dan akses pasar.

Capaian kinerja urusan Pertanian dan Peternakan pada periode sebelumnya menjadi dasar evaluasi dalam perumusan kebijakan dan program pada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai kinerja pembangunan sektor pertanian dan peternakan, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perencanaan kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.berikut:

Tabel 38 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Urusan Pertanian dan Peternakan

No	Indikator Kinerja Kunci	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1,52	0,90	1,59	1,91	2,11
2	Persentase peningkatan produktivitas ternak	11	11	12	10	12
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	103,13	100	50,54	14,57	39,77
4	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	4	17
5	Persentase peningkatan populasi ternak	12	15	16	16	17
6	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	N/A	N/A	15	70	N/A
7	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	N/A	39	6
8	Persentase peternak yang memanfaatkan teknologi dalam beternak	30	35	40	46	52

No	Indikator Kinerja Kunci	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	N/A	N/A	70	150
10	Indeks Penanaman	N/A	N/A	15	6	N/A
11	Persentase Benih/bibit unggul yang tersedia	11,07	102,22	110	100	148
12	Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun	97,78	104,26	112,24	100	100
13	Persentase Lembaga Penyuluh Pertanian yang Aktif dan Dibina	137,50	135,71	133,33	100	102,04
14	Persentase kelompok ternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan	10	10	11	11	12

Sumber: Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2025

Capaian kinerja Urusan Pertanian dan Peternakan selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama pada peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani dan peternak, serta pemanfaatan teknologi. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong sektor pertanian dan peternakan sebagai penopang ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Produktivitas pertanian per hektar per tahun menunjukkan tren meningkat, dari 1,52 pada tahun 2020 menjadi 2,11 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam praktik budidaya, pemanfaatan sarana produksi, serta dukungan program pembinaan kepada petani. Sementara itu, produktivitas dan populasi ternak juga menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan persentase peningkatan populasi ternak mencapai 17 persen pada tahun 2024 dan peningkatan produktivitas ternak relatif stabil pada kisaran 10–12 persen.

Namun demikian, kinerja realisasi pupuk menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah mencapai lebih dari 100 persen pada tahun 2020–2021, realisasi pupuk menurun tajam pada tahun 2022–2023 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam distribusi dan pemanfaatan pupuk yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Dari sisi dukungan infrastruktur dan sarana prasarana, rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani

mulai terealisasi pada tahun 2023 dan meningkat signifikan pada tahun 2024. Selain itu, pembangunan prasarana pertanian secara umum telah mencapai target 100 persen pada tahun 2023–2024. Ketersediaan benih dan bibit unggul juga menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan persentase mencapai 148 persen pada tahun 2024, yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian dan peternakan menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya meningkat pada periode akhir, demikian pula cakupan pembinaan kelompok tani. Persentase peternak yang memanfaatkan teknologi dalam beternak juga terus meningkat dari 30 persen pada tahun 2020 menjadi 52 persen pada tahun 2024, yang menunjukkan mulai berkembangnya adopsi inovasi dan teknologi di sektor peternakan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Pertanian dan Peternakan menunjukkan arah yang positif dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan peternak. Ke depan, penguatan stabilitas distribusi sarana produksi, peningkatan kualitas pembinaan dan kelembagaan, serta percepatan adopsi teknologi pertanian dan peternakan menjadi fokus utama dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029

D. Perdagangan dan Perindustrian

Urusan Perdagangan dan Perindustrian merupakan urusan pemerintahan yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan aktivitas perdagangan dan pengembangan sektor industri. Penyelenggaraan urusan ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, memperkuat daya saing produk lokal, serta mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, penyelenggaraan urusan Perdagangan dan Perindustrian difokuskan pada penguatan sistem perdagangan, peningkatan perlindungan konsumen, stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta pengembangan industri kecil dan menengah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembinaan pelaku usaha, peningkatan kualitas sarana perdagangan, serta fasilitasi akses

pasar dan perizinan usaha. Capaian kinerja urusan Perdagangan dan Perindustrian pada periode sebelumnya menjadi dasar evaluasi dalam perumusan kebijakan dan program pada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai kinerja sektor perdagangan dan perindustrian, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perencanaan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 39 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jumlah Hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	N/A	N/A	N/A	1 Dok	1 DOk
2	Kontribusi sektor perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	N/A	N/A	N/A	90	95
3	Persentase Kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB	N/A	N/A	N/A	71.12	71.12
4	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	N/A	N/A	N/A	21.3	21.3
5	Persentase Komoditas perdagangan yang diawasi peredaranya	N/A	N/A	N/A	90	95
6	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	N/A	N/A	N/A	1.65	2
7	Persentase produk lokal yang menjadi unggulan daerah	N/A	N/A	N/A	80	85
8	Rasio ketersediaan pasar tradsional	N/A	N/A	N/A	82	85
9	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	N/A	N/A	N/A	72.5	72.5
10	Cakupan Unit Usaha Sentra Industri	N/A	N/A	N/A	10	15
11	Persentase pertumbuhan industry	N/A	N/A	N/A	75	75

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Mimika periode 2020–2024, capaian kinerja sebagian besar mulai tercatat pada tahun 2023 dan 2024. Pada indikator persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, realisasi tercatat berupa dokumen pada 2023 dan 2024. Indikator kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB menunjukkan peningkatan dari 90 persen pada 2023 menjadi 95 persen pada 2024. Sementara itu, persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tercatat stabil sebesar 71,12 persen pada 2023 dan 2024, dan persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB juga tercatat stabil pada angka 21,3 persen pada periode yang sama.

Pada indikator persentase komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya, capaian menunjukkan peningkatan dari 90 persen pada 2023 menjadi 95 persen pada 2024. Indikator pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten menunjukkan peningkatan dari 1,65 pada 2023 menjadi 2 pada 2024. Selanjutnya, indikator persentase produk lokal yang menjadi unggulan daerah menunjukkan peningkatan dari 80 persen pada 2023 menjadi 85 persen pada 2024.

Dalam aspek sarana perdagangan, indikator rasio ketersediaan pasar tradisional tercatat meningkat dari 82 pada 2023 menjadi 85 pada 2024. Indikator persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku menunjukkan capaian stabil sebesar 72,5 persen pada 2023 dan 2024. Selain itu, indikator cakupan unit usaha sentra industri menunjukkan peningkatan dari 10 unit pada 2023 menjadi 15 unit pada 2024. Adapun indikator persentase pertumbuhan industri tercatat stabil sebesar 75 persen pada 2023 dan 2024.

Secara keseluruhan, data capaian indikator kinerja urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa pencatatan dan pengukuran kinerja indikator lebih terfokus pada akhir periode pengamatan, dengan capaian yang menunjukkan peningkatan pada kontribusi sektor perdagangan, pengawasan komoditas, penguatan produk lokal, serta pertumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah di daerah.

2.1.4.7 Fokus Aspek Penunjang

A. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan merupakan aspek penunjang yang memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan diarahkan untuk menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mimika. Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan, peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas proses perencanaan partisipatif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja, pemanfaatan data dan informasi pembangunan, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Capaian kinerja perencanaan pembangunan pada periode sebelumnya menjadi dasar evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tabel 40 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Perencanaan

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun		
		2021	2022	2023
1	Perda RPJMD Atau Perubahannya	N/A	Ada	Ada
2	Persentase Konsistensi Program RPJMD Terhadap RKPD (%)	N/A	81,25	84,25
3	Persentase Konsistensi Program RKPD Terhadap APBD (%)	N/A	89	99,206
4	Tingkat Keselarasan Renja PD Terhadap RPJMD	N/A	86,83	100
5	Tingkat Keselarasan Renstra PD Terhadap RPJMD	N/A	100	70,21
6	Tingkat capaian realisasi program program Otsus yang direncanakan	90	N/A	N/A
7	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	208	N/A	N/A
8	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	76	N/A	N/A

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun		
		2021	2022	2023
9	Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	100	N/A	N/A
10	Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	95	N/A	N/A
11	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat	N/A	N/A
12	Evaluasi RPJMD Kabupaten	100	N/A	N/A
13	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	94,12	N/A	N/A
14	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	100	N/A	N/A
15	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	100	N/A	N/A
16	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	5	N/A	N/A
17	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	62,5	N/A	N/A
18	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	2	N/A	N/A
19	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	0	N/A	N/A
20	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0	N/A	N/A

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 2025

Realisasi kinerja Urusan Bidang Perencanaan pada periode 2021–2023 menunjukkan penguatan fungsi perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek legalitas dokumen perencanaan, konsistensi antar dokumen, serta keselarasan perencanaan lintas perangkat daerah. Pada tahun 2022–2023 telah tersedia Perda RPJMD atau perubahannya, yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Tingkat konsistensi perencanaan menunjukkan tren peningkatan. Persentase konsistensi program RPJMD terhadap RKPD meningkat dari 81,25 persen pada tahun 2022 menjadi 84,25 persen pada tahun 2023, sementara konsistensi program RKPD terhadap APBD meningkat signifikan dari 89 persen menjadi 99,21 persen. Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya integrasi perencanaan dan penganggaran daerah. Keselarasan

dokumen perencanaan perangkat daerah juga menunjukkan kinerja yang baik, ditandai dengan tingkat keselarasan Renja PD terhadap RPJMD yang mencapai 100 persen pada tahun 2023, meskipun keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD mengalami penurunan menjadi 70,21 persen dan memerlukan penguatan ke depan.

Pada aspek proses perencanaan partisipatif dan pengendalian, cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten, keterwakilan pemangku kepentingan dalam Musrenbang Provinsi Papua, serta ketepatan waktu penyusunan RKPD Provinsi Papua telah tercapai dengan baik pada tahun 2021. Selain itu, evaluasi RPJMD Kabupaten dan ketersediaan analisis data capaian kinerja program dan kegiatan juga menunjukkan capaian tinggi, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan kajian. Dari sisi substansi pembangunan, capaian sasaran pembangunan bidang ekonomi tercatat optimal, sementara capaian bidang sosial budaya dan fisik prasarana masih menunjukkan variasi dan memerlukan penguatan kebijakan lintas sektor. Di sisi lain, indikator terkait perencanaan tata ruang mandatoris serta implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh belum menunjukkan capaian, yang menjadi catatan penting dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Bidang Perencanaan telah menunjukkan kemajuan dalam konsistensi, keselarasan, dan tata kelola perencanaan pembangunan. Ke depan, penguatan sinkronisasi Renstra perangkat daerah, percepatan penyusunan dokumen tata ruang, serta implementasi perencanaan wilayah strategis menjadi fokus utama untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

B. Keuangan

Bidang keuangan Kabupaten Mimika merupakan elemen vital dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Keuangan daerah ini dikelola melalui berbagai sumber pendapatan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari sektor pertambangan mengingat keberadaan perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui dokumen

perencanaan APBD, yang mengalokasikan belanja untuk sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta didukung oleh penerapan sistem digitalisasi seperti e-Budgeting.

Selain itu, Kabupaten Mimika juga mengelola dana desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Meski memiliki potensi pendapatan yang besar, pengelolaan keuangan menghadapi tantangan, seperti memastikan alokasi dana yang efektif dan berkelanjutan di tengah fluktuasi pendapatan dari sektor tambang. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan tepat sasaran, keuangan daerah Kabupaten Mimika diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Tabel 41 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Keuangan

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	65	50	70	71	70
2	Rasio kemandirian keuangan daerah	13	13	15	18	6.69
3	Prosentase OPD yang menerapkan anggaran kinerja	55	60	60	90	85
4	Prosentase data aset yang akurat	60	40	65	80	100
5	Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	45	50	55	60	100
6	Nilai SAKIP BPSDA	C	C	C	CC	C
7	Tingkat Kematangan Organisasi	33	25	37	35	35
8	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD	13	6	4	4	5
9	Nilai Sakip	N/A	N/A	N/A	N/A	CC
10	Jumlah Realisasi PAD	109	107	101	105	110
11	Jumlah Obyek Pajak Baru	30.438	24.227	25.618	27.127	28.892

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kabupaten Mimika, 2025

Realisasi kinerja Urusan Bidang Keuangan Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan perbaikan tata kelola internal, peningkatan akurasi pengelolaan aset, serta tantangan berkelanjutan dalam penguatan kemandirian fiskal daerah. Secara umum, kinerja keuangan daerah mengalami fluktuasi, namun menunjukkan arah perbaikan pada aspek

manajerial dan akuntabilitas. Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan peningkatan dibandingkan awal periode, meskipun berfluktuasi dari nilai 65 pada tahun 2020, menurun pada tahun 2021, kemudian meningkat dan relatif stabil pada kisaran 70–71 pada tahun 2022–2024. Kondisi ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam perbaikan tata kelola birokrasi, meskipun konsistensi implementasi reformasi masih perlu diperkuat. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan anggaran berbasis kinerja oleh perangkat daerah meningkat signifikan, dari 55 persen pada tahun 2020 menjadi 85 persen pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin kuatnya orientasi kinerja dalam pengelolaan anggaran.

Dalam pengelolaan aset daerah, kinerja menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Persentase data aset yang akurat meningkat dari 60 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2024, demikian pula pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan yang mencapai 100 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan penataan aset daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah. Namun demikian, rasio kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah dan berfluktuasi, dengan penurunan tajam pada tahun 2024 menjadi 6,69 persen. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, yang berada pada kisaran 4–5 persen dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dan perlunya strategi intensifikasi serta ekstensifikasi PAD yang lebih kuat.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, nilai SAKIP menunjukkan perbaikan dengan capaian CC pada tahun 2024, baik pada tingkat perangkat daerah maupun secara umum. Meskipun demikian, tingkat kematangan organisasi masih berada pada level menengah dan relatif stagnan, yang mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen internal. Realisasi PAD secara nominal menunjukkan tren relatif stabil dan meningkat pada akhir periode, dari 109 pada tahun 2020 menjadi 110 pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan jumlah objek pajak baru yang terus bertambah setiap tahun. Peningkatan basis pajak ini menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah ke depan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Bidang Keuangan menunjukkan kemajuan pada aspek tata kelola, pengelolaan aset, dan akuntabilitas, namun masih menghadapi tantangan utama pada peningkatan kemandirian fiskal dan kontribusi PAD terhadap APBD. Oleh karena itu, penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi aset, serta strategi peningkatan PAD yang berkelanjutan menjadi arah kebijakan utama dalam RPJMD periode selanjutnya..

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya aparatur, merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Dengan terbitnya Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya ASN yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Dalam mencapai pemerintahan yang bersih, dan akuntabel diperlukan sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi unggul. Berikut adalah indikator kinerja. Berikut adalah indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika:

Tabel 42 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	92,23%	94,00%	99,09%	91,86%	n/a
2	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	n/a	75,5	99,16%	89,58	80,3
3	Persentase ASN yang dibina dan dikembangkan	n/a	n/a	n/a	n/a	73
4	Tingkat Kematangan Organisasi	n/a	n/a	n/a	84,42	88,91
5	Persentase mutasi dan promosi ASN Persentase pengembangan kompetensi ASN	75,53%	99,16%	n/a	n/a	n/a
6	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	98,06%	98,25%	96,43%	n/a	n/a

NO	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	97,33%	97,00%	96,68%	n/a	n/a
8	Persentase pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	97,82%	98,00%	1,30%	n/a	n/a

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan Realisasi kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan upaya berkelanjutan dalam penguatan tata kelola manajemen aparatur sipil negara, khususnya pada aspek pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta penguatan kelembagaan organisasi. Secara umum, kinerja kepegawaian memperlihatkan capaian yang relatif tinggi pada awal periode dan mulai bergeser pada penguatan kualitas aparatur dan organisasi di akhir periode. Persentase pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN menunjukkan capaian tinggi dan stabil hingga tahun 2023, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 99,09 persen. Hal ini mencerminkan semakin tertibnya administrasi kepegawaian dan sistem informasi ASN, meskipun pada tahun 2024 indikator ini tidak tercatat. Sejalan dengan itu, pelaksanaan mutasi dan promosi ASN yang dikaitkan dengan pengembangan kompetensi juga menunjukkan capaian sangat tinggi pada periode awal, mencapai 99,16 persen pada tahun 2021.

Dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi meningkat signifikan hingga mencapai 99,16 persen pada tahun 2022, sebelum mengalami penurunan menjadi 80,3 persen pada tahun 2024. Sementara itu, indikator ASN yang dibina dan dikembangkan mulai tercatat pada tahun 2024 dengan capaian 73 persen, yang menunjukkan adanya penguatan kebijakan pembinaan ASN secara lebih terarah pada akhir periode. Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur menunjukkan capaian sangat tinggi dan konsisten hingga tahun 2022, berada di atas 96 persen. Demikian pula dengan sertifikasi serta pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN yang menunjukkan capaian stabil di atas 96

persen pada periode 2020–2022. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem merit dan profesionalisme ASN.

Dari sisi kelembagaan, tingkat kematangan organisasi menunjukkan peningkatan yang positif, dari 84,42 pada tahun 2023 menjadi 88,91 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan semakin baiknya kapasitas organisasi perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif. Secara keseluruhan, kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Mimika menunjukkan fondasi manajemen ASN yang cukup kuat, dengan capaian tinggi pada aspek administrasi dan pengembangan kompetensi, serta peningkatan kematangan organisasi pada akhir periode. Ke depan, penguatan keberlanjutan pengembangan kompetensi ASN, konsistensi penilaian kinerja, serta optimalisasi sistem merit menjadi arah kebijakan utama dalam RPJMD periode selanjutnya. lebih berkelanjutan.

D. Pengawasan

Pengawasan di Kabupaten Mimika berperan penting dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan anggaran, pelaksanaan proyek pembangunan, hingga pelayanan publik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Kabupaten Mimika menjadi lembaga utama yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap kinerja perangkat daerah. Pengawasan ini dilakukan melalui audit, monitoring, dan evaluasi, terutama pada pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada pelaksanaan Dana Desa, yang sering menjadi perhatian karena penggunaannya langsung menyentuh masyarakat. Untuk memperkuat pengawasan, Kabupaten Mimika mulai menerapkan sistem berbasis teknologi, seperti *e-Government* dan *e-Monitoring*, guna memastikan data yang transparan dan mudah diakses. Dengan pengawasan yang efektif, pemerintah Kabupaten Mimika dapat meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan efisiensi penggunaan

anggaran, dan mempercepat realisasi pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 43 Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pengawasan

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	N/A	N/A	2	N/A
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	N/A	N/A	N/A	2	N/A
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase PD yang Mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	N/A	N/A	6	NA	8
5	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Internal (APIP)	31,3	31,33	28,34	28,34	36
6	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Eksternal (BPK)	73	75,22	76,97	72,40	75
7	Persentase Pengaduan Yang Tertangani	NA	NA	100	100	100
8	Level Kapabilitas APIP	2	2	1	2	3
9	Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	NA	NA	NA	2,717	2,820
10	Persentase Capaian MCP KPK	26	37	33	58	55,01
11	Persentase APIP Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) di Bidang Pengawasan	3	76	96	98	96
12	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Mimika oleh Inspektorat Kabupaten Mimika	N/A	N/A	B	B	B
13	Survei Penilaian Integritas (SPI)	N/A	N/A	N/A	N/A	59,6

Sumber : Inspektorat Kabupaten Mimika, 2025

kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Mimika selama periode 2020–2024 menunjukkan penguatan bertahap pada aspek akuntabilitas, pengendalian internal, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan percepatan peningkatan capaian. Secara umum, fungsi pengawasan telah berjalan dan memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Pada aspek akuntabilitas keuangan, Pemerintah Kabupaten Mimika secara konsisten memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama periode 2020–2024. Capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang andal serta efektivitas

pengawasan dalam mendukung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Mimika berada pada kategori B sejak tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan kinerja pengawasan internal yang cukup baik dan stabil.

Penguatan sistem pengendalian internal dan kapabilitas pengawasan menunjukkan perkembangan bertahap. Tingkat maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP masing-masing berada pada level 2 pada tahun 2023, sementara level kapabilitas APIP meningkat signifikan hingga mencapai level 3 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kapasitas dan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting partner bagi perangkat daerah. Dari sisi tindak lanjut hasil pengawasan, persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal (APIP) masih berfluktuasi dan relatif rendah, meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 36 persen. Sementara itu, tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal (BPK) relatif lebih baik dan stabil, berada pada kisaran 72–77 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal secara lebih optimal.

Pada aspek pengendalian integritas dan pengaduan masyarakat, persentase pengaduan yang tertangani telah mencapai 100 persen sejak tahun 2022 hingga 2024. Selain itu, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK menunjukkan peningkatan signifikan dari 26 persen pada tahun 2020 menjadi 55,01 persen pada tahun 2024, meskipun masih terdapat fluktuasi. Capaian ini menunjukkan perbaikan upaya pencegahan korupsi yang perlu terus diperkuat. Dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan juga menunjukkan hasil positif. Persentase APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan meningkat signifikan dari 3 persen pada tahun 2020 menjadi 96 persen pada tahun 2024. Peningkatan kompetensi ini menjadi modal penting dalam mendukung profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun demikian, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2024 berada pada angka 59,6, yang menunjukkan bahwa penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi masih memerlukan perhatian serius. Selain itu, persentase perangkat daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal B masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Pengawasan menunjukkan kemajuan dalam akuntabilitas, kapasitas APIP, dan penanganan pengaduan, namun masih memerlukan penguatan pada penerapan SPIP, tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal, serta peningkatan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Ke depan, penguatan peran APIP, konsistensi penerapan SPIP berbasis risiko, dan peningkatan budaya integritas menjadi arah kebijakan utama dalam RPJMD periode selanjutnya.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran Keuangan daerah disusun dengan menganalisis capaian kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan memberikan proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode mendatang. Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Berdasar peraturan yang mendasarinya, pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan periode sebelumnya (2020-2024) pada Pemerintah Kabupaten Mimika perlu dianalisis, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Seluruh kegiatan Pemerintah Daerah akan terlaksana dengan baik apabila beriringan dengan kinerja keuangan daerah yang baik. Keuangan

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berikut Kinerja keuangan Kabupaten Mimika periode tahun 2020-2024:

Tabel 44 Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN	2.386.412.362.207,65	4.439.348.123.143,97	5.392.024.388.604,61	6.052.245.325.315,01	5.853.612.287.372,16
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	311.454.665.783,63	891.287.354.365,97	1.099.652.898.560,61	1.776.128.494.907,01	540.013.157.161,16
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	211.697.592.314,84	299.577.143.161,00	248.956.199.560,00	271.629.265.500,00	296.151.848.202,89
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	19.078.095.443,00	18.667.489.165,00	17.888.062.614,00	15.035.621.493,02	11.007.959.486,00
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.013.389.061,00	468.143.036.947,00	740.269.148.244,00	1.349.497.685.371,00	0
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.665.588.964,79	104.899.685.092,97	92.539.488.142,61	139.965.922.542,99	232.853.349.472,27
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.934.884.394.531,02	3.514.312.466.210,00	4.292.371.490.044,00	4.272.016.079.031,00	3.732.925.600.013,00
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.586.710.302.469,00	3.030.912.011.121,00	3.886.402.367.404,00	3.851.851.068.204,00	3.553.696.362.575,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.586.710.302.469,00	3.030.912.011.121,00	3.886.402.367.404,00	3.851.851.068.204,00	3.553.696.362.575,00
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	235.983.107.559,02	182.377.286.558,00	284.194.378.000,00	284.962.279.000,00	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	31.309.836.559,02	31.309.836.558,00	140.375.334.000,00	154.356.998.000,00	264.631.525.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	204.673.271.000,00				0
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah (DID)			11.448.929.000		0
1.2.2.5	Dana Desa		151.067.450.000,00	132.370.115.000	130.605.281.000	133.026.669.000,00
01.02.03	Transfer Pemerintah Provinsi	112.190.984.503,00	301.023.168.531,00	121.774.744.640,00	135.202.731.827,00	
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	112.190.984.503,00	295.023.168.531,00	121.774.744.640,00	135.202.731.827,00	179.229.237.438,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan		6.000.000.000,00			0
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	140.073.301.893,00	33.748.302.568,00	0	4.100.751.377,00	1.580.673.494.198,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	33.073.301.893,00				
01.03.03	Pendapatan Lainnya	107.000.000.000,00	33.748.302.568,00		4.100.751.377,00	1.553.842.462.198,00
2	BELANJA	2.996.881.705.597,21	3.551.551.786.623,25	4.425.055.865.198,47	6.115.768.340.628,52	6.390.856.847.648,00
02.01	BELANJA OPERASI	2.126.218.467.365,48	2.396.863.134.798,44	3.022.261.762.011,31	4.063.568.267.333,81	3.928.832.545.874,23
02.01.01	Belanja Pegawai	1.006.646.825.585,00	770.487.654.236,00	747.243.310.858,00	837.149.871.071,00	1.124.151.331.027,00
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	669.060.933.681,48	1.103.178.739.046,44	1.588.052.968.849,31	2.275.727.220.549,73	2.331.287.023.495,23
02.01.03	Belanja Bunga	1.917.738.667,00	16.458.333.338,00	0		0

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
02.01.04	Belanja Subsidi					
02.01.05	Belanja Hibah	137.815.914.400,00	110.093.678.300,00	271.831.050.881,00	514.202.920.916,08	470.969.526.352,00
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.697.316.000,00	41.996.211.878,00	36.355.360.155,00	22.644.124.600,00	2.424.665.000,00
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan	309.079.739.032,00	354.648.518.000,00	378.779.071.268,00	413.844.130.197,00	368.943.955.928,00
02.02	BELANJA MODAL	644.300.812.510,73	1.154.330.591.961,81	1.401.226.231.187,16	2.051.475.073.294,71	2.057.539.603.965,77
02.02.01	Belanja Tanah	73.755.265.497,00	31.412.129.284,00	55.855.464.057,00	182.385.477.543,00	7.007.200.000,00
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	98.281.294.944,00	86.489.903.534,00	118.704.601.533,00	196.544.239.798,70	134.503.381.994,01
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	218.062.093.098,73	420.382.852.074,00	630.738.878.426,84	674.852.548.898,25	869.979.288.843,76
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	212.475.167.171,00	613.223.614.575,81	581.241.643.877,32	993.679.561.054,76	1.040.629.849.878,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	41.726.991.800,00	2.822.092.494,00	14.685.643.293,00	4.013.246.000,00	1.117.907.000,00
02.03	BELANJA TAK TERDUGA	226.362.425.721,00	358.059.863,00	1.567.872.000,00	725.000.000,00	7.126.938.000,00
02.03.01	Belanja Tak Terduga	226.362.425.721,00	358.059.863,00	1.567.872.000,00	725.000.000,00	7.126.938.000,00
	Surplus/Defisit	-610.469.343.389,56	887.796.336.520,72	966.968.523.406,14	-63.523.015.313,51	-537.244.560.275,84
3	PEMBIAYAAN					
03.01	PENERIMAAN DAERAH	505.751.156.783,41	45.118.065.112,85	319.761.744.197,57	1.282.730.434.624,71	667.660.302.110,36
03.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	355.751.156.783,41	45.118.065.112,85	319.761.744.197,57	1.282.730.434.624,71	667.660.302.110,36
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	150.000.000.000,00				
03.02	PENGELUARAN DAERAH		613.152.657.436,00	4.000.000.000,00	6.400.000.000,00	5.000.000.000,00
03.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			4.000.000.000,00	6.400.000.000,00	5.000.000.000,00
03.02.02	Pembayaran Pokok Utang		613.152.657.436,00			
	PEMBIAYAAN NETTO	505.751.156.783,41	-568.034.592.323,15	315.761.744.197,57	1.276.330.434.624,71	528.958.647.964,52
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-104.718.186.606,15	932.914.401.633,57	1.286.730.267.603,71	1.219.207.419.311,20	130.415.741.834,52

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada sub pembahasan ini diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Seluruhnya merupakan bagian dari kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika. Berikut kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika:

A. Pendapatan

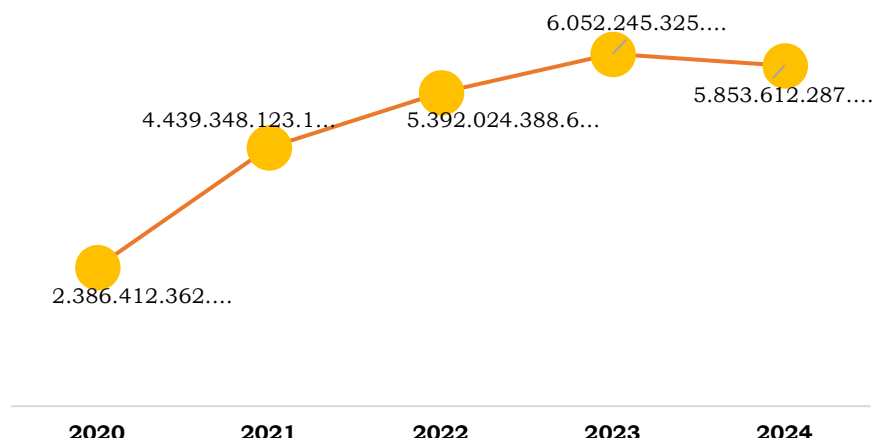
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Realisasi pendapatan Kabupaten Mimika secara lebih rinci dapat dilihat pada dibawah ini. Prosentase rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan diasumsikan dihasilkan berdasarkan perhitungan total dari selisih anggaran setiap tahun dibagi tahun dasar dikalikan 100%. Setelah pemaparan tabel tersebut nantinya akan dipaparkan komponen komponen pendapatan daerah Kabupaten Mimika yang menjadi perhatian anggaran pendapatan, sehingga dapat dianalisis perencanaan keuangan kedepanya.

Selama periode lima tahun terakhir, pendapatan daerah Kabupaten Mimika menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2,39 triliun, kemudian mengalami lonjakan hampir dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi Rp4,44 triliun. Kenaikan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian sebesar Rp5,39 triliun, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp6,05 triliun. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp5,85 triliun.

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan tahunan selama periode 2020 hingga 2024, pendapatan daerah Kabupaten Mimika tumbuh sebesar 25,6% per tahun. Angka ini menunjukkan laju pertumbuhan fiskal yang tergolong tinggi dan mencerminkan pengelolaan pendapatan yang cukup progresif. Meskipun pada

tahun terakhir (2024) terjadi sedikit kontraksi, secara keseluruhan tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika memiliki kapasitas fiskal yang terus berkembang. Penurunan tahun 2024 tetap harus menjadi perhatian agar strategi penguatan pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pusat tetap adaptif dan berkelanjutan.

Berikut grafik pendapatan daerah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024:



Gambar 25 Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Dari jumlah pendapatan daerah diatas, penyumbang pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer. Berikut rincian pendapatan daerah Kabupaten Mimika 2020-2024:

Tabel 45 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN	2.386.412.362.207,65	4.439.348.123.143,97	5.392.024.388.604,61	6.052.245.325.315,01	5.853.612.287.372,16
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	311.454.665.783,63	891.287.354.365,97	1.099.652.898.560,61	1.776.128.494.907,01	540.013.157.161,16
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	211.697.592.314,84	299.577.143.161,00	248.956.199.560,00	271.629.265.500,00	296.151.848.202,89
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.078.095.443,00	18.667.489.165,00	17.888.062.614,00	15.035.621.493,02	11.007.959.486,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.013.389.061,00	468.143.036.947,00	740.269.148.244,00	1.349.497.685.371,00	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.665.588.964,79	104.899.685.092,97	92.539.488.142,61	139.965.922.542,99	232.853.349.472,27
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.934.884.394.531,02	3.514.312.466.210,00	4.292.371.490.044,00	4.272.016.079.031,00	3.732.925.600.013,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.586.710.302.469,00	3.030.912.011.121,00	3.886.402.367.404,00	3.851.851.068.204,00	3.553.696.362.575,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.586.710.302.469,00	3.030.912.011.121,00	3.886.402.367.404,00	3.851.851.068.204,00	3.553.696.362.575,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	235.983.107.559,02	182.377.286.558,00	284.194.378.000,00	284.962.279.000,00	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	31.309.836.559,02	31.309.836.558,00	140.375.334.000,00	154.356.998.000,00	264.631.525.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	204.673.271.000,00				0
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah (DID)			11.448.929.000		0
1.2.2.5	Dana Desa		151.067.450.000,00	132.370.115.000	130.605.281.000	133.026.669.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	112.190.984.503,00	301.023.168.531,00	121.774.744.640,00	135.202.731.827,00	
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	112.190.984.503,00	295.023.168.531,00	121.774.744.640,00	135.202.731.827,00	179.229.237.438,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan		6.000.000.000,00			0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	140.073.301.893,00	33.748.302.568,00	0	4.100.751.377,00	1.580.673.494.198,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	33.073.301.893,00				
1.3.3	Pendapatan Lainnya	107.000.000.000,00	33.748.302.568,00		4.100.751.377,00	1.553.842.462.198,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2020 hingga 2024, pendapatan daerah Kabupaten Mimika mengalami tren pertumbuhan yang cukup signifikan. Pendapatan total meningkat dari Rp2,39 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp5,85 triliun pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 24,7 persen. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang terus berkembang, meskipun pada tahun 2024 terdapat sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam strategi pengelolaan pendapatan agar pertumbuhan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi cukup tajam. Dari Rp311 miliar pada 2020, PAD meningkat pesat hingga Rp1,77 triliun pada 2023, sebelum turun drastis menjadi Rp540 miliar di tahun 2024. Rata-rata pertumbuhannya sekitar 14,7 persen per tahun, namun penurunan tajam pada tahun terakhir perlu mendapat perhatian khusus, terutama karena nihilnya kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sebaliknya, pendapatan transfer tetap menjadi tulang punggung pendapatan daerah dengan pertumbuhan rata-rata 18,3 persen per tahun, mencerminkan ketergantungan tinggi pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan lonjakan luar biasa, khususnya pada tahun 2024 yang mencapai Rp1,58 triliun menandai pertumbuhan rata-rata hingga 87,5 persen per tahun yang kemungkinan besar bersifat insidental dan perlu dikaji lebih lanjut untuk menjamin keberlanjutannya.

Kontribusi sumber pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir masih didominasi oleh pendapatan transfer. Berikut tingkat kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Mimika dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 46 Proporsi sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	13,05	20,08	20,39	29,35	9,22
2	Pendapatan Transfer	81,08	79,16	79,61	70,59	63,77
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5,87	0,76	0,00	0,07	27,01

Selama periode 2020 hingga 2024, struktur pendapatan Kabupaten Mimika didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Pada tahun 2020, proporsi pendapatan transfer mencapai 81,06% dari total pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 13,05% dan lain-lain pendapatan sebesar 5,87%. Pola ini relatif konsisten hingga tahun 2022, di mana pendapatan transfer tetap mendominasi di atas 79%, dan PAD menunjukkan peningkatan bertahap, mencapai 20,39%. Namun, lain-lain pendapatan yang sah hampir tidak memberikan kontribusi berarti di tahun 2022, bahkan sempat tercatat nihil.

Situasi berubah pada tahun 2023 dan 2024. Pada 2023, PAD mencatat proporsi tertinggi sepanjang periode lima tahun, yakni sebesar 29,35%, didorong oleh pendapatan signifikan dari pengelolaan kekayaan daerah. Sebaliknya, proporsi transfer turun menjadi 70,58%. Fenomena yang mencolok terjadi pada tahun 2024, ketika kontribusi PAD anjlok tajam menjadi hanya 9,22%, sedangkan proporsi pendapatan transfer juga menurun menjadi 63,77%. Sebagai gantinya, lain-lain pendapatan yang sah melonjak drastis hingga 27,01%, menandakan adanya sumber pendapatan luar biasa yang bersifat insidental. Komposisi ini menunjukkan dinamika struktur pendapatan daerah yang sangat bergantung pada transfer, namun juga rentan terhadap fluktuasi pada komponen PAD dan pendapatan lain yang tak rutin.

B. Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. BELANJA OPERASI

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Subsidi
- e. Belanja Hibah
- f. Belanja Bantuan Sosial
- g. Belanja Bantuan Keuangan

2. BELANJA MODAL

- a. Belanja Tanah
- b. Belanja Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Bangunan dan Gedung
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya

3. BELANJA TAK TERDUGA

- a. Belanja Tak Terduga

Berikut rincian belanja daerah Kabupaten Mimika dari tahun 2020 sampai dengan 2024:

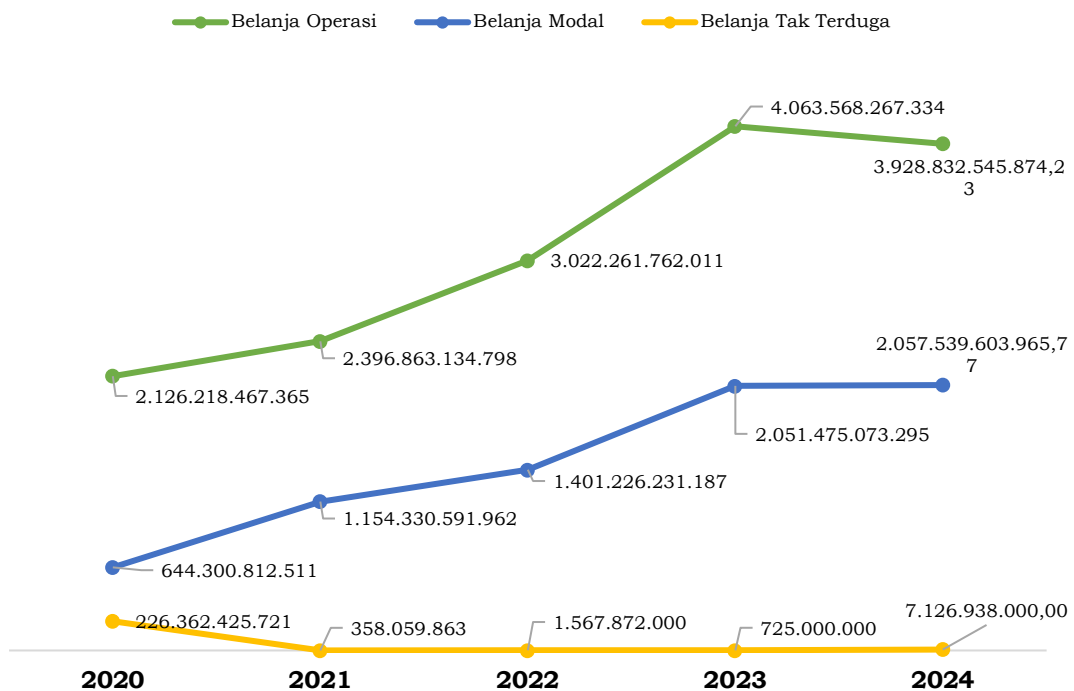
Tabel 47 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Mimika

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	BELANJA	2.996.881.705.597,21	3.551.551.786.623,25	4.425.055.865.198,47	6.115.768.340.628,52	6.390.856.847.648,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.126.218.467.365,48	2.396.863.134.798,44	3.022.261.762.011,31	4.063.568.267.333,81	3.928.832.545.874,23
2.1.1	Belanja Pegawai	1.006.646.825.585,00	770.487.654.236,00	747.243.310.858,00	837.149.871.071,00	1.124.151.331.027,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	669.060.933.681,48	1.103.178.739.046,44	1.588.052.968.849,31	2.275.727.220.549,73	2.331.287.023.495,23
2.1.3	Belanja Bunga	1.917.738.667,00	16.458.333.338,00	0		0
2.1.4	Belanja Subsidi					
2.1.5	Belanja Hibah	137.815.914.400,00	110.093.678.300,00	271.831.050.881,00	514.202.920.916,08	470.969.526.352,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.697.316.000,00	41.996.211.878,00	36.355.360.155,00	22.644.124.600,00	2.424.665.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	309.079.739.032,00	354.648.518.000,00	378.779.071.268,00	413.844.130.197,00	368.943.955.928,00
2.2	BELANJA MODAL	644.300.812.510,73	1.154.330.591.961,81	1.401.226.231.187,16	2.051.475.073.294,71	2.057.539.603.965,77
2.2.1	Belanja Tanah	73.755.265.497,00	31.412.129.284,00	55.855.464.057,00	182.385.477.543,00	7.007.200.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	98.281.294.944,00	86.489.903.534,00	118.704.601.533,00	196.544.239.798,70	134.503.381.994,01
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	218.062.093.098,73	420.382.852.074,00	630.738.878.426,84	674.852.548.898,25	869.979.288.843,76
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	212.475.167.171,00	613.223.614.575,81	581.241.643.877,32	993.679.561.054,76	1.040.629.849.878,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	41.726.991.800,00	2.822.092.494,00	14.685.643.293,00	4.013.246.000,00	1.117.907.000,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	226.362.425.721,00	358.059.863,00	1.567.872.000,00	725.000.000,00	7.126.938.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	226.362.425.721,00	358.059.863,00	1.567.872.000,00	725.000.000,00	7.126.938.000,00
	Surplus/Defisit	-610.469.343.389,56	887.796.336.520,72		-63.523.015.313,51	537.244.560.275,84

Selama periode lima tahun terakhir, total belanja daerah Kabupaten Mimika terus mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada dua komponen utama: belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi tumbuh dari sekitar Rp2,13 triliun pada 2020 menjadi Rp4,06 triliun pada 2023, sebelum sedikit menurun menjadi Rp3,93 triliun pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja operasi selama periode tersebut menunjukkan tren naik, mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai dan operasional layanan publik.

Sementara itu, belanja modal yang merefleksikan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset fisik—juga meningkat tajam dari Rp644 miliar pada 2020 menjadi lebih dari Rp2 triliun pada 2024. Lonjakan ini mengindikasikan fokus Pemkab Mimika pada pembangunan sarana dan prasarana. Adapun belanja tak terduga relatif kecil dan fluktuatif, namun menunjukkan kenaikan mencolok pada 2024 menjadi Rp7,13 miliar setelah sempat turun drastis di tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, alokasi belanja mencerminkan kecenderungan belanja yang ekspansif dengan prioritas pada kebutuhan operasional dan pembangunan fisik daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2020 sampai dengan 2024 belanja paling besar berada di belanja operasi. Berikut perkembangan belanja di Kabupaten Mimika dari tahun 2020 sampai dengan 2024:



Gambar 26 Belanja Kabupaten Mimika

Sedangkan proporsi belanja dari masing-masing untuk belanja langsung dan tidak langsung terhadap belanja daerah Kabupaten Mimika mempunyai proporsi yang berbeda-beda. Berikut proporsi belanja daerah di tahun 2020-2024:

Tabel 48 proporsi belanja daerah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024

Uraian	Proporsi				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA					
BELANJA OPERASI	80,84	91,13	114,91	66,44	61,47
Belanja Pegawai	53,45	40,91	39,68	20,60	17,59
Belanja Barang dan Jasa	35,52	58,57	84,32	56,00	36,49
Belanja Bunga	0,10	0,87	0,00		0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00		
Belanja Hibah	7,32	5,85	14,43	12,65	7,37
Belanja Bantuan Sosial	0,09	2,23	1,93	0,56	0,04
Belanja Bantuan Keuangan	16,41	18,83	20,11	10,18	5,77
BELANJA MODAL	24,50	43,89	53,28	33,54	32,20
Belanja Tanah	9,98	4,25	7,56	8,89	0,11
Belanja Peralatan dan Mesin	13,29	11,70	16,06	9,58	2,10
Belanja Bangunan dan Gedung	29,50	56,87	85,32	32,90	13,62

Uraian	Proporsi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	28,74	82,95	78,63	48,44	16,29
Belanja Aset Tetap Lainnya	5,64	0,38	1,99	0,20	0,02
BELANJA TAK TERDUGA	8,61	0,01	0,06	0,01	0,11
Belanja Tak Terduga	100,00	100,00	100,00	100	

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun–tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan PD. Berikut rincian pembiayaan Kabupaten Mimika pada tahun 2020 sampai dengan 2024:

Tabel 49 Pembiayaan Daerah Kabupaten Mimika 2020-2024

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	505.751.156.783,41	45.118.065.112,85	319.761.744.197,57	1.282.730.434.624,71	667.660.302.110,36
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	355.751.156.783,41	45.118.065.112,85	319.761.744.197,57	1.282.730.434.624,71	667.660.302.110,36
Pencairan Dana Cadangan	150.000.000.000,00				
PENGELUARAN DAERAH		613.152.657.436,00	4.000.000.000,00	6.400.000.000,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			4.000.000.000,00	6.400.000.000,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		613.152.657.436,00			
PEMBIAYAAN NETTO	505.751.156.783,41	-568.034.592.323,15	315.761.744.197,57	1.276.330.434.624,71	528.958.647.964,52

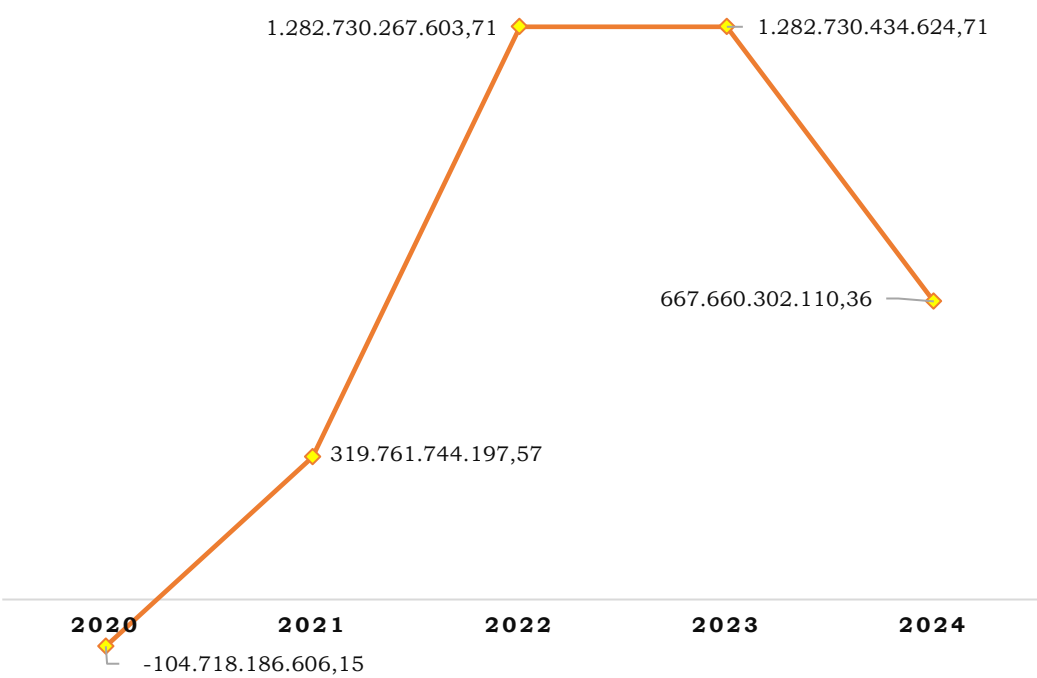
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Mimika menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, total penerimaan pembiayaan mencapai Rp505,75 miliar yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp355,75 miliar dan pencairan dana cadangan sebesar Rp150 miliar. Sementara itu, pada tahun 2021, penerimaan pembiayaan menurun drastis menjadi hanya Rp45,12 miliar, yang seluruhnya berasal dari SiLPA. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, terjadi lonjakan tajam, terutama pada 2023 yang mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,28 triliun, tahun 2024 SiLPA sebesar Rp528 Miliar. Peningkatan ini sebagian besar disumbang oleh pemanfaatan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan daerah juga bervariasi, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp613,15 miliar untuk pembayaran pokok utang. Sementara tahun-tahun berikutnya pengeluaran pembiayaan tercatat relatif kecil, berkisar antara Rp4 hingga Rp6,4 miliar, yang seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Secara keseluruhan, pembiayaan netto selama lima tahun terakhir positif, kecuali pada tahun 2021 yang mencatat pembiayaan netto negatif sebesar Rp568,03 miliar akibat tingginya pembayaran utang, yang tidak diimbangi oleh penerimaan pembiayaan pada tahun tersebut.

Sedangkan tren SiLPA menunjukkan fluktuasi signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, SiLPA justru mencatatkan angka negatif sebesar Rp -104,72 miliar, yang menandakan bahwa pengeluaran melebihi pendapatan dan pembiayaan yang tersedia (defisit riil). Namun, mulai tahun 2021, kondisi ini membaik drastis dengan SiLPA sebesar Rp319,76 miliar, mencerminkan adanya kelebihan anggaran yang belum terpakai.

Peningkatan yang sangat besar terjadi pada tahun 2022 dan 2023, di mana SiLPA mencapai Rp1,28 triliun, memperlihatkan tingginya akumulasi anggaran yang tidak terserap secara optimal dalam pelaksanaan program/kegiatan daerah. Meski begitu, pada tahun 2024, SiLPA menurun menjadi Rp667,66 miliar, yang bisa mengindikasikan penyerapan anggaran yang lebih baik atau

pengurangan alokasi dana yang tidak terserap. Berikut perkembangan SILPA Kabupaten Mimika:



Gambar 27 Perkembangan SILPA Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

2.2.1.2 Neraca Daerah

Salah satu aspek dalam mendeskripsikan kinerja keuangan masa lalu adalah pertumbuhan neraca daerah. Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Utang, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Kesehatan keuangan suatu pemerintah daerah dapat diindikasikan dengan sehatnya neraca daerah. Berikut merupakan neraca keuangan daerah Kabupaten Mimika 2020-2024.

Tabel 50 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Mimika 2020-2024 (dalam Juta)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR					
1.1.1	Kas di Kas Daerah	1.210,09	238.458,51	1.202.208,50	1.125.028,97	602.212,66
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	20,07	0	0	0,00	9,52
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.113,93	72,64	270,45	4.445,85	396,75
1.1.4	Kas di BLUD	38.743,24	81.244,15	80.048,70	80.657,97	55.197,00
1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	630,99	100,1	0,17	1.146,02	0,00
1.1.6	Kas di Bendahara BOS	563,68	409,95	202,61	121,77	315,9
1.1.7	Kas Lainnya	0	0	0		3.262,65
1.1.8	Setara Kas	0	0	0		0,00
1.1.9	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	1.185,15	0,00
1.1.10	Piutang Pendapatan	633.113,84	94.933,09	112.238,36	190.495,70	
1.1.11	Piutang Lainnya				125,65	125,64
1.1.12	Penyisihan Piutang	-45.715,17	-11.962,45	-23.601,81	-43.254,09	-45.058,30
1.1.13	Beban Dibayar Dimuka	620,47	765,62	363,7	0,00	0,00
1.1.14	Persediaan	44.295,95	33.297,88	97.135,97	295.702,88	92.263,17
	JUMLAH ASET LANCAR	437.319,49	437.319,49	1.468.866,65	1.655.655,86	844.328,70
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG					
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen				73.287,51	
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0	0		0
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0	0	0		0
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0	0		0
1.2.1.4	Dana Bergulir	0	0	0		0
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0	0	0		0

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0		
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen				73.287,51	
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen				10.400,00	
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	76.730,00	76.730,00	77.287,51		88.130
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya					
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	76.730,00	76.730,00	77.287,51	10.400,00	88.130
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	76.730,00	76.730,00	77.287,51	83.687,51	88.130
1.3	ASET TETAP					
1.3.1	Tanah	501.455,58	542.049,03	615.253,41	786.223,96	889.367,64
1.3.2	Peralatan dan Mesin	928.675,72	1.016.262,40	1.162.702,73	1.373.658,72	1.494.629,65
1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.252.990,71	2.485.928,27	2.712.893,19	3.014.040,54	3.977.701,43
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.933.897,15	3.323.978,64	3.644.308,48	4.033.057,40	5.511.648,10
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	35.941,90	40.065,34	40.971,59	43.209,08	125,89
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.083.226,21	1.247.253,02	2.006.507,76	2.819.834,16	2.062.257,03
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-2.343.154,10	-2.697.353,69	-3.120.519,00	-3.540.151,84	-4.010.702,86
	JUMLAH ASET TETAP	5.393.033,17	5.958.183,00	7.062.118,16	8.529.872,02	10.050,79
1.4	DANA CADANGAN					
1.4.1	Dana Cadangan	0	0	0	0	0
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	0
1.5	ASET LAINNYA					
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	0	0	0	0	0
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	1.063.316,09	595.265,17	0
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	9.012,11	10.702,00	14.961,09	15.866,33	22.771,92
1.5.4	Akumulasi Amortisasi	-4.211,77	-5.882,31	-7.262,31	-7.262,31	-10.373,65
1.5.5	Aset Lain-lain	146.297,16	146.297,16	147.344,57	85.910,04	147.256,27
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-78.113,79	-78.113,79	-78.113,79	-16.679,26	-59.893,05
	JUMLAH ASET LAINNYA	72.983,71	73.003,06	1.140.245,65	673.099,96	112.090,11
	JUMLAH ASET	6.220.343,95	6.545.235,55	9.748.517,97	10.942.315,35	11.095.344,46

Berdasarkan tabel di atas dilakukan analisis neraca daerah dengan tujuan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika. Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/eleman laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah

1. Rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*).
2. Rasio solvabilitas, rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. rasio solvabilitas terdiri dari Rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal.

Rasio keuangan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 51 Rasio keuangan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

No	Analisis Rasio Keuangan		Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Likuiditas	Rasio Lancar	0,4	5,19	9,31	12,54	16,56
		Rasio Cepat	0,36	4,8	8,7	10,23	14,76
2.	Rasio Solvabilitas	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	17,77%	1,29%	1,62%	1,17%	0,46%
		Rasio Hutang Terhadap Modal	21,61%	1,30%	1,64%	1,18%	0,46%

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa:

1. Rasio Lancar:

Perkembangan rasio lancar Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan tren yang sangat positif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio lancar hanya berada di angka 0,40, yang berarti setiap Rp1 kewajiban jangka pendek hanya dijamin oleh Rp0,40 aset lancar. Kondisi ini mencerminkan likuiditas yang sangat

rendah dan risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek yang cukup tinggi. Namun, kondisi ini membaik drastis di tahun 2021, dengan rasio naik menjadi 5,19 seiring dengan perbaikan pengelolaan aset lancar dan turunnya beban kewajiban. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan rasio sebesar 9,31, lalu naik lagi pada 2023 menjadi 12,54. Puncaknya terjadi di tahun 2024, saat rasio lancar mencapai 16,56 yang menunjukkan kapasitas yang sangat kuat dalam menutup kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Secara keseluruhan, rasio ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan kas dan piutang daerah, serta semakin terjaganya kestabilan fiskal.

2. Rasio Cepat

Rasio cepat yang tidak memperhitungkan persediaan juga memperlihatkan tren positif yang selaras dengan rasio lancar. Pada tahun 2020, rasio cepat hanya mencapai 0,36, menunjukkan bahwa aset paling likuid belum mampu menutupi kewajiban jangka pendek. Namun demikian, perbaikan mulai terlihat pada tahun 2021 saat rasio meningkat menjadi 4,80, sejalan dengan peningkatan kas dan penurunan persediaan yang cukup besar. Tahun 2022 mencatat kenaikan lebih lanjut hingga 8,70, yang mengindikasikan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan aset lancar non-persediaan. Pada tahun 2023, quick ratio meningkat lagi menjadi 10,23 dan akhirnya mencapai 14,76 pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan bahwa ketergantungan pada persediaan semakin kecil, dan kemampuan likuiditas jangka pendek Pemkab Mimika menjadi sangat andal. Peningkatan rasio cepat ini juga mencerminkan penguatan kontrol terhadap arus kas dan efisiensi belanja berbasis kas.

3. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Struktur pendanaan Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan transformasi yang sangat sehat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, proporsi total aset yang dibiayai oleh utang berada di angka 17,77%, yang relatif tinggi dan menunjukkan ketergantungan terhadap pembiayaan melalui kewajiban. Namun, pada tahun 2021 rasio ini turun drastis menjadi 1,29%,

menandakan pergeseran menuju pembiayaan yang lebih bertumpu pada aset sendiri. Tren ini tetap terjaga di tahun 2022 dengan rasio sebesar 1,62%, kemudian kembali menurun menjadi 1,17% pada 2023 dan mencapai titik terendah sebesar 0,46% di tahun 2024. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa sebagian besar aset daerah telah dibiayai dari modal sendiri, dengan peran kewajiban yang sangat minimal. Hal ini mencerminkan kekuatan fiskal dan kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan daerah yang berkelanjutan.

4. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap ekuitas atau modal menunjukkan penurunan tajam dalam beban kewajiban relatif terhadap kekayaan bersih daerah. Di tahun 2020, rasio ini berada di angka 21,61%, yang berarti hampir seperempat dari modal pemerintah ditopang oleh kewajiban. Ini menandakan tekanan pembiayaan yang cukup tinggi. Namun demikian, sejak tahun 2021, rasio ini mulai menurun drastis menjadi 1,30% seiring dengan meningkatnya nilai ekuitas dan berkurangnya utang. Tahun 2022 mencatat rasio sebesar 1,64%, masih tergolong sangat rendah dan aman. Kemudian rasio ini turun kembali menjadi 1,18% pada 2023 dan menyentuh angka terendah 0,46% di tahun 2024. Penurunan bertahap ini menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah semakin sehat, risiko fiskal yang ditanggung oleh pemerintah menjadi sangat kecil, dan kapasitas pembiayaan mandiri meningkat secara signifikan.

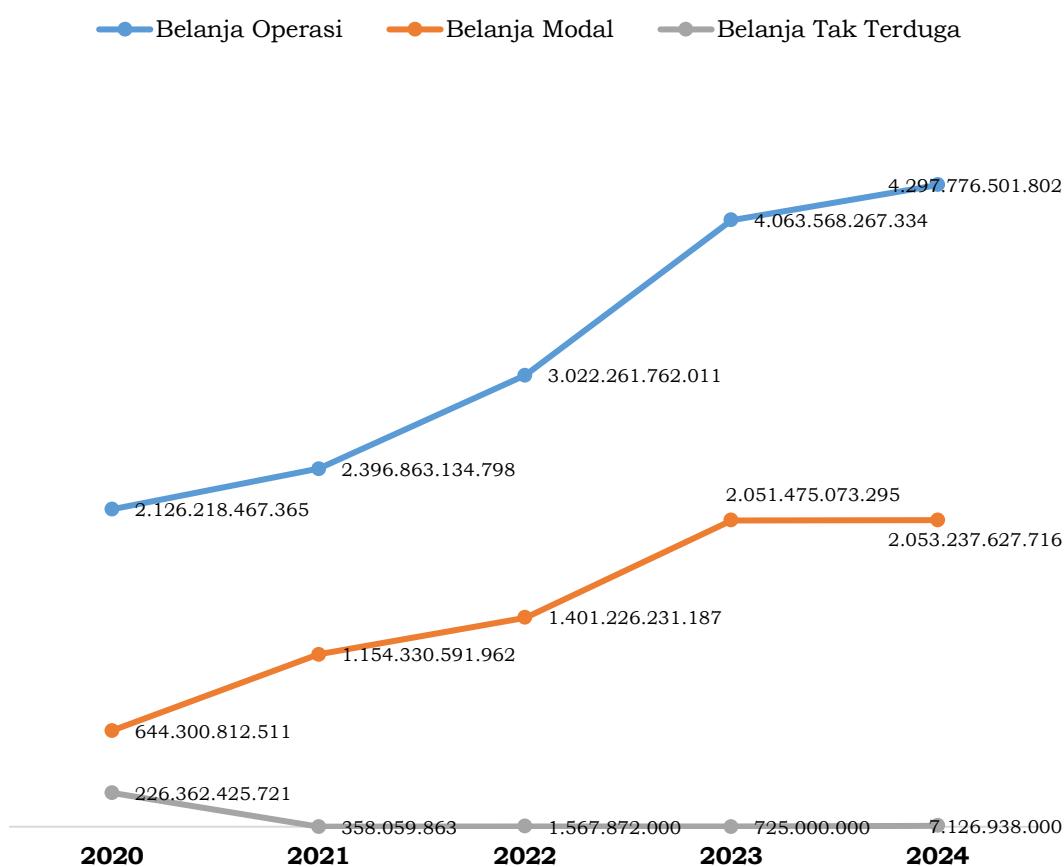
Dengan demikian, meskipun Kabupaten Mimika menunjukkan dinamika tajam pada rasio keuangan selama lima tahun terakhir, kecenderungan perbaikan di tahun-tahun terakhir mengindikasikan adanya upaya serius dalam memperkuat posisi likuiditas dan solvabilitas daerah secara berkelanjutan.

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Daerah, tetapi tetap mengupayakan pencarian sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Mimika dilaksanakan

dengan berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pada penyusunan dokumen perencanaan mulai di tahun-tahun sebelumnya sudah menggunakan pendekatan baru yakni *money follow program*. Penerapan pendekatan tersebut sehingga pengalokasian anggaran didasarkan pada program pembangunan prioritas dan program pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian program prioritas.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran



Gambar 28 proporsi belanja daerah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024

Gambar diatas menjelaskan proporsi belanja daerah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024. Pada periode tersebut setiap tahunnya Kabupaten Mimika lebih banyak mengeluarkan Belanja Daerah untuk Belanja Operasi, dimana belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan. Dari belanja operasi, belanja barang dan jasa serta pegawai menjadi komponen yang memiliki proporsi tertinggi. Berikut belanja untuk kebutuhan barang dan jasa dan pegawai, serta proporsi belanjanya di tahun 2020-2024:

Tabel 52 Belanja Barang dan Jasa serta Pegawai Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Uraian		BELANJA	BELANJA OPERASI	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
Realisasi	2020	2.996.881.705.597,21	2.126.218.467.365,48	1.006.646.825.585,00	669.060.933.681,48
	2021	3.551.551.786.623,25	1.873.666.393.282,44	770.487.654.236,00	1.103.178.739.046,44
	2022	2.335.296.279.707,31	2.335.296.279.707,31	747.243.310.858,00	1.588.052.968.849,31
	2023	6.115.768.340.628,52	4.063.568.267.333,81	837.149.871.071,00	2.275.727.220.549,73
	2024	6.358.141.067.518,00	4.297.776.501.802,23	1.124.151.331.027,00	2.331.287.023.495,23
Proporsi	2020		70,95	33,59	22,33
	2021		52,76	21,69	31,06
	2022		100,00	32,00	68,00
	2023		66,44	13,69	37,21
	2024		67,59	17,68	36,67

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Apabila belanja disandingkan dengan pendapatan, keuangan daerah Kabupaten Mimika di tahun 2024 mengalami defisit anggaran. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukannya pembiayaan

Berikut perbandingan pendapatan dan belanja Kabupaten Mimika di Tahun 2020-2024:

Tabel 53 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mimika di Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	2.386.412.362.207	4.439.348.123.143	5.392.024.388.604	6.052.245.325.315	6.224.439.413.372
BELANJA	2.996.881.705.597	3.551.551.786.623	4.425.055.865.198	6.115.768.340.628	6.358.141.067.518
Surplus/Defisit	-610.469.343.389	887.796.336.520	966.968.523.406	-63.523.015.314	-133.701.654.145

Untuk menutupi defisit di tahun 2024 dilakukannya penutupan melalui pembiayaan penerimaan daerah, berikut rincian pembiayaan untuk menutupi defisit yang terjadi:

Tabel 54 Rincian Pembiayaan Untuk Menutupi Defisit

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	505.751.156.783,41	45.118.065.112,85	319.761.744.197,57	1.282.730.434.624,71	667.660.302.110,36
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	355.751.156.783,41	45.118.065.112,85	319.761.744.197,57	1.282.730.434.624,71	667.660.302.110,36
Pencairan Dana Cadangan	150.000.000.000,00				

Untuk realisasi perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 55 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2020 - 2024

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENGELUARAN DAERAH		613.152.657.436,00	4.000.000.000,00	6.400.000.000,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			4.000.000.000,00	6.400.000.000,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		613.152.657.436,00			
PEMBIAYAAN NETTO	505.751.156.783,41	-568.034.592.323,15	315.761.744.197,57	1.276.330.434.624,71	662.660.302.110,36
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-104.718.186.606,15	319.761.744.197,57	1.282.730.267.603,71	1.212.807.419.311,20	528.958.647.964,52

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Pada sub bab ini dibahas mengenai proyeksi pendapatan, proyeksi belanja, dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Mimika pada tahun 2025 sampai dengan 2029, serta proyeksi perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Yang menjadi dasar untuk penghitungan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Mimika tahun 2025-2029 adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2020-2024. Selain memperhatikan laporan keuangan 5 tahun sebelumnya, perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah juga menjadi pertimbangan dalam perhitungan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Mimika 5 tahun kedepan.

Berikut proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Mimika tahun 2025-2030:

Tabel 56 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Mimika Tahun 2025-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2025	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN DAERAH						
04.01	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	491.125.182.000	504.631.124.505	518.508.480.429	532.767.463.641	547.418.568.891	562.472.579.535
04.01.01	Pajak Daerah	356.840.600.000	366.653.716.500	376.736.693.704	387.096.952.781	397.742.118.982	408.680.027.254
04.01.02	Retribusi Daerah	14.827.782.000	15.235.546.005	15.654.523.520	16.085.022.917	16.527.361.047	16.981.863.476
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000	7.192.500.000	7.390.293.750	7.593.526.828	7.802.348.816	8.016.913.408
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.456.800.000	115.549.362.000	118.726.969.455	121.991.961.115	125.346.740.046	128.793.775.397
04.02	Pendapatan Transfer	3.888.366.312.000	3.980.520.593.594	4.074.858.931.663	4.171.433.088.343	4.270.296.052.537	4.371.502.068.982
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.778.366.312.000	3.867.913.593.594	3.959.583.145.763	4.053.425.266.317	4.149.491.445.129	4.247.834.392.378
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.000.000.000	112.607.000.000	115.275.785.900	118.007.822.026	120.804.607.408	123.667.676.603
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.040.515.185.000	2.088.875.394.885	2.138.381.741.743	2.189.061.389.023	2.240.942.143.942	2.294.052.472.754
04.03.01	Pendapatan Hibah	26.831.068.000	27.466.964.312	28.117.931.366	28.784.326.339	29.466.514.873	30.164.871.276
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.013.684.117.000	2.061.408.430.573	2.110.263.810.377	2.160.277.062.683	2.211.475.629.069	2.263.887.601.478
	Jumlah Pendapatan	6.420.006.679.000	6.574.027.112.984	6.731.749.153.835	6.893.261.941.006	7.058.656.765.370	7.228.027.121.271
5	BELANJA DAERAH						
05.01	Belanja Operasi	3.943.194.084.470	4.039.647.784.272	4.135.316.336.759	4.233.252.233.940	4.333.509.211.885	4.436.142.280.206
05.01.01	Belanja Pegawai	1.564.614.502.222	1.601.695.865.925	1.639.656.057.947	1.678.515.906.520	1.718.296.733.505	1.759.020.366.089
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.322.399.376	2.226.877.540.241	2.279.654.537.945	2.333.682.350.494	2.388.990.622.201	2.445.609.699.947
05.01.05	Belanja Hibah	203.257.182.872	208.074.378.106	213.005.740.867	218.053.976.926	223.221.856.179	228.512.214.170
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	0	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
05.02	Belanja Modal	2.020.136.958.530	2.075.690.724.155	2.132.772.218.407	2.191.423.453.546	2.251.687.598.273	2.313.609.006.862
05.02.01	Belanja Modal Tanah	75.501.754.684	77.578.052.203	79.711.447.976	81.903.511.929	84.155.858.261	86.470.144.000
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.464.331.210	189.537.100.318	194.749.370.577	200.104.978.268	205.607.865.170	211.262.081.462
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	939.225.341.656	965.054.038.552	991.593.024.612	1.018.861.832.789	1.046.880.533.190	1.075.669.747.853
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	817.626.837.200	840.111.575.223	863.214.643.542	886.953.046.239	911.344.255.011	936.406.222.023

No	Uraian	Baseline Tahun 2025	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	430.003.300	441.828.391	453.978.671	466.463.085	479.290.820	492.471.317
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.888.690.480	2.968.129.468	3.049.753.029	3.133.621.237	3.219.795.821	3.308.340.206
05.03	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	20.474.000.000	20.959.233.800	21.455.967.641	21.964.474.074	22.485.032.110
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	20.474.000.000	20.959.233.800	21.455.967.641	21.964.474.074	22.485.032.110
05.04	Belanja Transfer	431.675.636.000	441.906.348.573	452.379.529.034	463.100.923.873	474.076.415.768	485.312.026.822
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	431.675.636.000	441.906.348.573	452.379.529.034	463.100.923.873	474.076.415.768	485.312.026.822
	Jumlah Belanja	6.415.006.679.000	6.577.718.857.000	6.741.427.318.000	6.909.232.579.000	7.081.237.700.000	7.257.548.346.000
	Total Surplus/(Defisit)	5.000.000.000	-3.691.744.016	-9.678.164.166	-15.970.637.994	-22.580.934.630	-29.521.224.729
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
06.01	Penerimaan Pembiayaan						
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	661.277.699.969	661.277.699.969	652.585.955.953	637.907.791.787	616.937.153.793	589.356.219.164
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	661.277.699.969	661.277.699.969	652.585.955.953	637.907.791.787	616.937.153.793	589.356.219.164
06.02	Pengeluaran Pembiayaan						
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	656.277.699.969	656.277.699.969	647.585.955.953	632.907.791.787	611.937.153.793	584.356.219.164
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	661.277.699.969	652.585.955.953	637.907.791.787	616.937.153.793	589.356.219.164	554.834.994.434

Agar proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat tercapai terdapat beberapa kebijakan keuangan daerah yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Pendapatan Daerah

Meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Mimika melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber-sumber pungutan daerah baru yang sesuai dengan kriteria dan regulasi yang telah ditetapkan.
- b. Mengintensifkan dan mengekstensifkan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Membaharui sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Menerapkan kebijakan hukum yang lebih kuat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- e. Menciptakan program pengembangan kapasitas bagi aparat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif.
- f. Mengadopsi teknologi baru untuk memfasilitasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang lebih efisien.
- g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung pertumbuhan penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa.
- h. Menyusun dan mengajukan program-program unggulan yang dapat dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mempromosikan peningkatan sumber dana tersebut.
- i. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- j. Memperbaiki performa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan norma dan regulasi yang ada.
- k. Membentuk kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk menggali potensi pendapatan daerah yang belum dimanfaatkan.

2. Belanja Daerah

Memastikan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Mimika yang efisien melalui langkah berikut:

- a. Menerapkan pendekatan berbasis kinerja dalam pengelolaan belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Mimika.
- b. Mengarahkan belanja berdasarkan konsep "*money follow* program prioritas" untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Mendorong investasi daerah melalui belanja yang terfokus untuk memicu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika.
- d. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memantau dan mengontrol pengeluaran daerah.
- e. Mengadopsi pendekatan anggaran partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses penganggaran untuk memastikan alokasi sumber daya yang lebih adil dan tepat sasaran.
- f. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

3. Pembiayaan Daerah

Mengimplementasikan strategi pembiayaan daerah di Kabupaten Mimika pada periode 2025-2029, meliputi:

- a. Mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan penerimaan pembiayaan netto, yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas keuangan riil Kabupaten Mimika.
- b. Melaksanakan penganggaran yang cermat dan rasional atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyusun perhitungan pembiayaan netto dengan keakuratan tinggi untuk menutupi defisit tanpa menambah beban hutang daerah.
- d. Mengalokasikan pengeluaran pembiayaan, terutama untuk penyertaan modal atau investasi oleh pemerintah daerah, untuk memperkuat permodalan dan kinerja BUMD, serta investasi berupa dana bergulir yang mendukung pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mimika.

- e. Mendorong penerapan prinsip pengelolaan utang yang bertanggung jawab untuk menghindari akumulasi hutang yang tidak terkelola.
- f. Membangun *fond reserve* atau cadangan dana untuk menanggulangi kemungkinan risiko fiskal di masa mendatang.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Secara keseluruhan, berikut adalah rekapitulasi identifikasi permasalahan pokok Pembangunan di Kabupaten Mimika:

1. Kualitas pendidikan yang belum merata di antara wilayah urban dan rural
2. Akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat belum merata
3. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta pemanfaatan tata ruang belum optimal
4. Ketersediaan perumahan layak huni dan penataan kawasan permukiman belum optimal
5. Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan ketahanan politik belum optimal
6. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7. Rendahnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal
8. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat
9. Ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan pangan belum optimal
10. Pengelolaan pertanahan belum optimal
11. Pengelolaan lingkungan hidup belum optimal

12. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum menyeluruh
13. Pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa belum merata
14. Pengendalian penduduk dan layanan keluarga berencana belum optimal
15. Aksesibilitas dan layanan transportasi belum merata, terutama di wilayah terpencil
16. Cakupan dan kualitas layanan komunikasi serta informatika masih perlu ditingkatkan
17. Pengembangan ekonomi lokal berbasis koperasi dan UMKM belum optimal
18. Perekonomian daerah masih bergantung pada sektor pertambangan, investasi di sektor lain belum berkembang optimal
19. Peran serta pemuda dalam pembangunan dan olahraga belum optimal
20. Pengelolaan, analisis, dan penyebaran data statistik daerah belum optimal
21. Belum optimalnya penerapan sistem persandian dan keamanan informasi di Pemda
22. Pelestarian dan promosi budaya lokal belum optimal
23. Rendahnya tingkat literasi masyarakat
24. Pengelolaan arsip daerah belum optimal
25. Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan belum optimal
26. Pengembangan sektor pariwisata belum maksimal
27. Belum optimalnya hasil produksi sektor pertanian dan peternakan
28. Pengembangan perindustrian dan perdagangan belum optimal
29. Perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis data
30. Penelitian dan pengembangan belum optimal dalam mendukung inovasi dan kebijakan berbasis data
31. Tata kelola keuangan daerah masih perlu peningkatan akurasi, konsistensi, dan akuntabilitas
32. Kinerja dan kompetensi ASN belum optimal
33. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal

Permasalahan pokok tersebut kemudian dipetakan lebih lanjut ke dalam masalah dan akar masalah, untuk menunjukkan rincian persoalan yang muncul serta faktor-faktor penyebab yang mendasarinya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas relasi antara isu strategis, masalah sektoral, dan penyebab utama yang harus diatasi melalui kebijakan pembangunan daerah.

Secara rinci, pemetaan masalah pokok, masalah, dan akar masalah Kabupaten Mimika disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 57 Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendidikan		
Kualitas pendidikan yang belum merata di antara wilayah urban dan rural	Kesenjangan sarana prasarana pendidikan antar wilayah	Anggaran pembangunan dan rehabilitasi sekolah di distrik terpencil terbatas
		Distribusi sarana pendidikan terkendala akses transportasi dan kondisi geografis
		Perencanaan pembangunan sekolah belum berbasis peta kebutuhan wilayah
		Pemeliharaan fasilitas sekolah masih lemah
	Kualitas tenaga pendidik belum merata	Guru menumpuk di wilayah kota, sementara di distrik pedalaman sangat minim
		Rendahnya minat guru bertugas di daerah terpencil karena insentif dan fasilitas terbatas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru tidak menjangkau seluruh wilayah
		Keterbatasan guru bidang keahlian tertentu (sains, matematika, bahasa asing)
	Akses pendidikan terbatas di daerah terpencil	Jarak sekolah dengan permukiman masyarakat sangat jauh
		Transportasi umum menuju sekolah tidak tersedia
		Fasilitas sekolah berasrama (boarding school) masih minim
	Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan rendah	Kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan masih rendah
		Kondisi sosial-ekonomi keluarga mendorong anak bekerja membantu rumah tangga/ladang
		Masih ada praktik pernikahan usia dini yang membuat anak putus sekolah
		Minimnya dukungan lembaga adat/keagamaan terhadap wajib belajar
Kesehatan		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat belum merata	Layanan kesehatan dasar di pedalaman belum setara dengan wilayah kota dan area tambang	Puskesmas dan posyandu di beberapa distrik pedalaman masih terbatas
		Distribusi tenaga kesehatan lebih terkonsentrasi di wilayah Kota
		Akses transportasi ke wilayah pegunungan dan pesisir masih sulit
	Kualitas tenaga medis belum merata antar wilayah	Tenaga kesehatan daerah belum merata menjangkau wilayah pedalaman
	Fasilitas kesehatan daerah masih perlu ditingkatkan	Peralatan medis dan obat-obatan di puskesmas belum sepenuhnya lengkap
		Pemeliharaan sarana kesehatan terkendala anggaran operasional
		Pengembangan rumah sakit rujukan daerah berjalan bertahap, belum seimbang dengan kebutuhan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta	Jalan dan jembatan belum terkoneksi baik antar wilayah	Anggaran pembangunan jalan terbatas
		Kondisi geografis dan curah hujan tinggi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pemanfaatan tata ruang belum optimal		mempercepat kerusakan jalan
		Kapasitas kontraktor lokal terbatas
	Akses air bersih dan sanitasi terbatas	Jaringan perpipaan dan instalasi air bersih belum memadai
		Kapasitas pengelolaan PDAM rendah
		Tingginya kehilangan air (non revenue water)
		Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih masih rendah
	Pemanfaatan tata ruang belum sesuai rencana	Pengawasan pemanfaatan ruang lemah
		Masih ada permukiman di kawasan non-peruntukan
		Koordinasi antar OPD terkait tata ruang belum optimal
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Ketersediaan perumahan layak huni dan penataan kawasan permukiman belum optimal	Masih banyak rumah tidak layak huni	Anggaran pembangunan rumah layak huni terbatas
		Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat
		Akses pembiayaan perumahan bagi MBR rendah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kawasan kumuh di perkotaan belum tertangani	Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi cepat
		Penataan kawasan perkotaan belum terintegrasi
		Program penanganan kawasan kumuh terbatas cakupannya
	Akses air minum dan sanitasi belum memadai	Jaringan perpipaan terbatas
		Kualitas sumber air baku menurun
		Kesadaran masyarakat terhadap sanitasi sehat masih rendah
Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan ketahanan politik belum optimal	Pelanggaran ketertiban umum masih sering terjadi	Kesadaran hukum masyarakat rendah
		Kapasitas pengawasan Satpol PP terbatas
		Koordinasi antar instansi penegak ketertiban belum efektif
	Kesiapsiagaan bencana masyarakat rendah	Edukasi dan sosialisasi kebencanaan masih minim
		Partisipasi masyarakat dalam simulasi bencana rendah
		Akses informasi dini bencana terbatas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penanggulangan kebakaran belum cepat dan efektif	Armada dan peralatan Damkar terbatas
		Jumlah pos damkar tidak menjangkau seluruh wilayah
		Personel damkar kurang dan kompetensinya belum merata
	Penyelenggaraan ketahanan politik dan integrasi sosial belum optimal	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan nilai Pancasila
		Potensi konflik sosial akibat keberagaman etnis dan kepentingan belum dikelola dengan baik
		Forum komunikasi antar tokoh masyarakat dan pemerintah belum berjalan optimal
		Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan politik masih lemah
Sosial		
Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi	Rendahnya keterampilan tenaga kerja
		Akses lapangan pekerjaan terbatas
		Dukungan modal usaha kecil masih rendah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan belum optimal	Program perlindungan sosial belum menjangkau semua sasaran
		Data kelompok rentan belum valid dan terbaru
		Koordinasi antar lembaga sosial belum optimal
	Masih terdapat anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia tanpa dukungan memadai	Layanan rehabilitasi sosial terbatas
		Kapasitas panti sosial terbatas
		Dukungan keluarga dan masyarakat masih rendah
Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Rendahnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal	Keterampilan tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan industri	Kurangnya program pelatihan berbasis kompetensi
		Keterbatasan akses masyarakat ke lembaga pelatihan kerja
		Rendahnya kerjasama dunia usaha dengan BLK (Balai Latihan Kerja)
	Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi	Lapangan kerja formal terbatas dibanding pertumbuhan angkatan kerja
		Penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri besar masih rendah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Mobilitas penduduk pendatang tinggi sehingga bersaing dengan tenaga kerja lokal
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat	Kasus KDRT masih sering terjadi	Kesadaran hukum dan perlindungan perempuan rendah
		Norma budaya patriarki masih kuat
		Mekanisme pelaporan dan layanan pengaduan korban KDRT belum efektif
	Perlindungan anak belum optimal	Kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan
		Fasilitas layanan rehabilitasi anak terbatas
		Peran keluarga dalam perlindungan anak masih lemah
Ketahanan Pangan		
Ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan pangan belum optimal	Produksi pangan lokal rendah	Ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah
		Produktivitas pertanian dan perikanan masih rendah
	Distribusi pangan belum merata	Infrastruktur jalan dan transportasi terbatas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pemanfaatan pangan belum sesuai gizi seimbang	Rantai pasok (supply chain) pangan belum efisien
		Kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi sehat masih rendah
		Akses pangan bergizi di wilayah terpencil terbatas
Pertanahan		
Pengelolaan pertanahan belum optimal	Konflik lahan masih terjadi	Tumpang tindih klaim kepemilikan lahan
		Keterbatasan mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa
	Data pertanahan belum lengkap dan mutakhir	Proses sertifikasi tanah berjalan lambat
		Koordinasi antar instansi terkait pertanahan belum optimal
	Pemanfaatan ruang belum tertib	Masih banyak pemanfaatan ruang tidak sesuai RTRW
		Pengawasan dan penegakan aturan pertanahan lemah
Lingkungan Hidup		
Pengelolaan lingkungan hidup belum optimal	Pengendalian pencemaran lingkungan belum efektif	Limbah domestik dan industri tidak dikelola baik
		Kapasitas pengawasan lingkungan terbatas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pengelolaan sampah belum optimal	Fasilitas TPA dan pengangkutan sampah terbatas
		Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rendah
	Pelestarian ekosistem belum optimal	Alih fungsi lahan mengancam keanekaragaman hayati
		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum maksimal
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum menyeluruh	Kepemilikan KTP, KK, dan akta kelahiran belum universal	Kesadaran masyarakat mengurus dokumen kependudukan masih rendah
		Akses layanan administrasi kependudukan di distrik terpencil terbatas
		Teknologi dan jaringan layanan kependudukan belum merata
	Akurasi dan pemutakhiran data kependudukan belum optimal	Sistem integrasi data antar lembaga masih lemah
		Frekuensi updating data belum rutin
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa belum merata	Kapasitas aparatur desa masih rendah	Kompetensi manajerial dan teknis aparatur desa terbatas
		Program peningkatan kapasitas aparatur belum merata
	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah	Kesadaran masyarakat terhadap perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa terbatas
		Peran lembaga adat/keompok lokal dalam pembangunan desa belum optimal
	Potensi lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan	Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, UMKM) masih terbatas
		Akses modal dan pasar bagi pelaku usaha desa rendah
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Pengendalian penduduk dan layanan keluarga berencana belum optimal	Cakupan peserta KB belum merata	Tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB masih rendah
		Persepsi budaya sebagian masyarakat kurang mendukung penggunaan alat kontrasepsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Akses layanan KB di wilayah terpencil terbatas
	Layanan kesehatan reproduksi belum merata	Jumlah tenaga penyuluh dan konselor KB terbatas
		Fasilitas pelayanan KB di puskesmas/posyandu belum lengkap
	Data kependudukan untuk perencanaan program KB belum akurat	Integrasi data antara Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan BKKBN belum optimal
		Pemutakhiran data keluarga tidak dilakukan secara rutin
Perhubungan		
Aksesibilitas dan layanan transportasi belum merata, terutama di wilayah terpencil	Infrastruktur jalan antar distrik belum terkoneksi baik	Kondisi geografis sulit dan curah hujan tinggi mempercepat kerusakan jalan
		Anggaran pembangunan jalan terbatas
		Kapasitas kontraktor lokal masih terbatas
	Transportasi udara dan laut belum terintegrasi dengan baik	Fasilitas pelabuhan dan bandara belum memadai
		Biaya transportasi udara dan laut relatif mahal
		Jadwal layanan transportasi tidak rutin dan terbatas
		Jumlah armada angkutan umum terbatas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Layanan transportasi publik darat belum optimal	Pengelolaan trayek belum efektif
Komunikasi dan Informatika		
Cakupan dan kualitas layanan komunikasi serta informatika masih perlu ditingkatkan	Jaringan telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah	Topografi wilayah menyulitkan pembangunan menara BTS
		Investasi provider di wilayah pedalaman rendah
	Akses internet cepat masih terbatas	Infrastruktur backbone internet belum merata
		Biaya layanan internet relatif mahal
	Literasi digital masyarakat masih rendah	Pemanfaatan TIK untuk pendidikan, usaha, dan layanan publik belum optimal
Koperasi dan UKM		
Pengembangan ekonomi lokal berbasis koperasi dan UMKM belum optimal	Akses permodalan koperasi dan UMKM terbatas	Keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal
		Syarat administrasi pinjaman sulit dipenuhi UMKM
	Kualitas kelembagaan koperasi masih rendah	Manajemen koperasi belum profesional
		Banyak koperasi tidak aktif atau vakum
	Daya saing produk UMKM masih lemah	Kualitas produk, kemasan, dan pemasaran belum memenuhi standar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Akses pasar UMKM terbatas
Penanaman Modal		
Perekonomian daerah masih bergantung pada sektor pertambangan, investasi di sektor lain belum berkembang optimal	Diversifikasi investasi rendah	Promosi potensi investasi di sektor non-tambang belum intensif
		Infrastruktur pendukung investasi (jalan, listrik, air) belum memadai di luar area pertambangan
		Iklim usaha dan regulasi belum sepenuhnya kondusif bagi investor kecil-menengah
	Penyerapan tenaga kerja lokal dari investasi masih terbatas	Keterampilan tenaga kerja lokal tidak sesuai dengan kebutuhan sektor investasi baru
		Perusahaan lebih memilih tenaga kerja dari luar daerah
Kepemudaan dan Olahraga		
Peran serta pemuda dalam pembangunan dan olahraga belum optimal	Keterlibatan pemuda dalam program pembangunan rendah	Fasilitas pengembangan kapasitas pemuda terbatas
		Partisipasi organisasi kepemudaan belum merata
	Pembinaan olahraga belum maksimal	Sarana dan prasarana olahraga masih minim dan tidak merata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pembinaan atlet muda kurang berkesinambungan
		Dukungan anggaran untuk kegiatan olahraga terbatas
Statistik		
Pengelolaan, analisis, dan penyebaran data statistik daerah belum optimal	Data sektoral antar-OPD belum terintegrasi	Koordinasi antar-OPD dalam penyediaan data masih lemah
		Belum tersedia sistem data terpusat yang mudah diakses
	Analisis data statistik belum mendalam	Kapasitas SDM dalam pengolahan dan analisis data terbatas
		Pemanfaatan teknologi analitik masih rendah
	Penyebaran data statistik ke publik masih terbatas	Akses masyarakat terhadap data statistik masih minim
Persandian		
Belum optimalnya penerapan sistem persandian dan keamanan informasi di Pemda	Standarisasi sistem persandian belum seragam di OPD	Regulasi teknis persandian belum lengkap
		SDM pengelola persandian terbatas
	Keamanan informasi pemerintah daerah masih rentan	Infrastruktur keamanan informasi (server, enkripsi) belum memadai
		Literasi keamanan informasi aparatur masih rendah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kebudayaan		
Pelestarian dan promosi budaya lokal belum optimal	Dokumentasi dan revitalisasi budaya lokal belum maksimal	Fasilitas dan anggaran pelestarian budaya terbatas
		Regenerasi pelaku seni dan budaya belum berjalan baik
	Promosi budaya ke tingkat nasional dan internasional masih minim	Kegiatan promosi budaya tidak berkesinambungan
		Pemanfaatan teknologi digital untuk promosi budaya masih rendah
Perpustakaan		
Rendahnya tingkat literasi masyarakat	Minat baca masyarakat masih rendah	Akses masyarakat ke buku dan bahan bacaan terbatas
		Budaya literasi di keluarga dan sekolah belum kuat
	Fasilitas perpustakaan daerah belum memadai	Koleksi buku tidak diperbarui secara rutin
		Perpustakaan keliling di daerah terpencil terbatas
Kearsipan		
Pengelolaan arsip daerah belum optimal	Arsip OPD banyak yang tidak tertata dengan baik	Belum ada standar baku pengelolaan arsip di seluruh OPD
		Kesadaran aparatur akan pentingnya arsip masih rendah
	Digitalisasi arsip masih terbatas	Infrastruktur teknologi pengarsipan belum lengkap

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		SDM pengelola arsip terbatas kompetensinya
Kelautan dan Perikanan		
Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan belum optimal	Produksi perikanan tangkap dan budidaya masih rendah	Sarana prasarana perikanan (pelabuhan, cold storage) terbatas
		Akses modal dan teknologi budidaya rendah
		SDM nelayan masih mengandalkan cara tradisional
	Pemasaran hasil perikanan belum maksimal	Rantai distribusi perikanan belum efisien
		Akses pasar luar daerah dan ekspor masih terbatas
	Perlindungan ekosistem laut belum optimal	Penangkapan ikan ilegal masih terjadi
		Pengawasan kawasan konservasi laut terbatas
Pariwisata		
Pengembangan sektor pariwisata belum maksimal	Sarana prasarana destinasi wisata terbatas	Infrastruktur jalan dan transportasi ke destinasi belum memadai
		Fasilitas pendukung wisata (akomodasi, toilet, signage) kurang
	Promosi pariwisata belum optimal	Strategi pemasaran digital dan media sosial belum dimanfaatkan maksimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam pariwisata rendah	Event budaya dan pariwisata belum berkesinambungan
		SDM pariwisata lokal kurang terlatih
		Dukungan UMKM pariwisata (kuliner, souvenir) masih lemah
Pertanian dan Peternakan		
Belum optimalnya hasil produksi sektor pertanian dan peternakan	Produktivitas pertanian rendah	Penggunaan teknologi pertanian modern masih terbatas
		Akses petani ke pupuk, benih, dan alat pertanian terbatas
		Lahan pertanian sebagian besar belum diolah secara intensif
	Produksi peternakan belum maksimal	Pakan ternak lokal belum mencukupi kebutuhan
		Kesehatan hewan ternak belum terpantau baik
		Akses pasar hasil peternakan masih terbatas
Perindustrian dan Perdagangan		
Pengembangan perindustrian dan perdagangan belum optimal	Skala industri lokal masih kecil	Keterbatasan modal dan teknologi industri kecil-menengah
		SDM industri lokal kurang kompeten

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Infrastruktur kawasan industri belum memadai	Lahan kawasan industri terbatas dan belum tertata
		Akses energi dan logistik industri belum optimal
	Pemasaran produk lokal terbatas	Jaringan distribusi produk antar wilayah belum lancar
		Daya saing produk lokal rendah terhadap produk luar
Perencanaan		
Perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis data	Sinkronisasi perencanaan antar-OPD belum maksimal	Koordinasi perencanaan sektoral lemah
		Perencanaan belum sepenuhnya berbasis data valid
	Kualitas dokumen perencanaan masih bervariasi	Kapasitas SDM perencana daerah belum merata
		Pemanfaatan sistem informasi perencanaan belum optimal
Penelitian dan Pengembangan		
Penelitian dan pengembangan belum optimal dalam mendukung inovasi dan kebijakan berbasis data	Kegiatan penelitian daerah masih terbatas	Anggaran litbang rendah
		Kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga riset belum intensif
	Pemanfaatan hasil penelitian untuk	Mekanisme diseminasi hasil riset ke OPD belum efektif

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kebijakan masih rendah	Budaya kerja berbasis inovasi di pemerintahan masih lemah
Keuangan		
Tata kelola keuangan daerah masih perlu peningkatan akurasi, konsistensi, dan akuntabilitas	Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja	Penyusunan anggaran sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil
		Kualitas SDM pengelola anggaran bervariasi
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan masih perlu diperkuat	Sistem pengawasan internal belum optimal
		Pengendalian belanja daerah masih lemah
	Pengelolaan aset daerah belum tertib	Inventarisasi dan pencatatan aset belum lengkap
		Pemanfaatan aset belum produktif
Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
Kinerja dan kompetensi ASN belum optimal	Kompetensi ASN belum merata antar bidang	Pelatihan dan pengembangan ASN masih terbatas
		Rotasi dan mutasi pegawai belum berbasis kompetensi
	Disiplin dan motivasi kerja sebagian ASN rendah	Budaya kerja birokrasi masih belum profesional
		Sistem reward and punishment belum berjalan konsisten
Pengawasan		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih terbatas	Jumlah auditor dan pengawas internal belum mencukupi
		Kompetensi teknis auditor belum merata
	Tindak lanjut hasil pemeriksaan belum optimal	Komitmen OPD menindaklanjuti rekomendasi masih rendah
		Mekanisme monitoring dan evaluasi belum konsisten
	Pengawasan masyarakat masih lemah	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan rendah
		Akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan terbatas

2.3.2 Isu Strategis

2.3.2.1 Isu Internasional

Isu yang terjadi saat ini adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. G20, yang juga dikenal sebagai grup 20, adalah kumpulan negara yang bertemu untuk membicarakan agenda ekonomi global. Para anggota dari grup ini berkontribusi sekitar 85% dari total output ekonomi dunia dan bertanggung jawab atas 75% dari total perdagangan global. Mereka mewakili dua pertiga dari total populasi dunia. Kelompok ini terdiri dari Uni Eropa dan sejumlah negara besar lainnya, dengan Spanyol yang secara rutin diundang sebagai tamu. Dalam waktu terakhir, topik pembicaraan di forum G20 telah berkembang, mulai dari masalah ekonomi hingga isu-isu seperti perubahan iklim, energi terbarukan, pengampunan utang internasional, dan pajak bagi perusahaan multinasional. Pada tahun 2022, fokus utama G20

adalah pada pengembangan arsitektur kesehatan global, transformasi digital dalam ekonomi, dan pergeseran menuju sumber energi terbarukan.

Sementara itu, Indonesia yang memegang presidensi G20 tahun 2022, telah menetapkan beberapa prioritas kunci, termasuk meningkatkan produktivitas untuk memulihkan ekonomi, membangun kekuatan ekonomi global pasca-pandemi, mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan suasana yang mendukung kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain, serta memimpin upaya global untuk memperdalam solidaritas. Di bawah bendera G20, topik-topik keuangan dan moneter yang menjadi perhatian meliputi koordinasi kebijakan global untuk pemulihan ekonomi, diskusi mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor kesehatan dan ekonomi, pengembangan mata uang digital oleh bank sentral, pembiayaan yang berkelanjutan, digitalisasi sistem pembayaran lintas batas, serta inklusi keuangan dan reformasi perpajakan.

Di sisi lain, topik dalam lintasan non-keuangan dan moneter, atau yang dikenal sebagai "*sherpa track*", meliputi sektor-sektor seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, ketenagakerjaan, pertanian, perdagangan, investasi, industri, dan kesehatan. Ini juga mencakup upaya pemberantasan korupsi, inisiatif lingkungan dan perubahan iklim, serta diplomasi internasional. Lebih lanjut, dalam pertemuan di luar lingkup pemerintah, topik meliputi diskusi bisnis, keterlibatan masyarakat sipil, serikat pekerja, kolaborasi ilmiah, kontribusi dari lembaga pemikiran, urbanisasi, peran wanita dan pemuda, interaksi parlementer, dan peran lembaga audit tinggi. Dalam mencapai komitmen G20, pemimpin dunia sepakat untuk menegakkan norma dan sistem hukum internasional, menanggulangi krisis ekonomi melalui kerjasama kebijakan makroekonomi internasional, mendorong ketahanan pangan dan energi, mendorong inovasi melalui adopsi teknologi digital, dan berupaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan fokus pada perubahan iklim dan penguatan sektor kesehatan.

Beberapa tantangan besar di kancah internasional yang akan mempengaruhi perekonomian antara lain:

1. Transformasi Iptek dalam Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Tranformasi teknologi dalam revolusi industri 4.0 dan telah meningkatkan kecepatan perubahan Iptek, pemanfaatan kecerdasan buatan, pemanfaatan “bigdata”, pemanfaatan internet yang luas serta cetak tiga dimensi semakin meluas dalam berbagai bidang industri, perdagangan dan jasa (terutama riset dan ekonomi digital). Demikian pula dalam tata kehidupan masyarakat diyakini dengan bantuan Iptek akan meningkatkan produktivitas, meningkatnya pemanfaatan telekomunikasi dan efisien dalam proses produksi serta pemanfaatan internet telah mendukung perkembangan sistem kemasyarakatan, sistem kesehatan dan pelayanan publik secara luas. Namun disisi lain, perubahan ini telah mengakibatkan terpangkasnya 60% pekerjaan di seluruh dunia yang digantikan oleh otomatisasi dan pemanfaatan robot/kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI).

Disisi lain, yang perlu mendapat perhatian adalah pemanfaatan Iptek, penggunaan robot, kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan pangan, pemanfaatan energi yang lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini memerlukan dukungan dari pemerintah, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan inovasi dalam masyarakat secara luas.

2. Pergeseran Peran Ekonomi Kawasan Asia – Pasifik Dalam Perekonomian Global

Prospek perekonomian Kawasan Asia – Pasifik sejak sebelum pandemi Covid 19 semakin menguat dan menggeser peran negaranegara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Hal ini diketahui potensi perekonomian Asia-Pasifik dengan 50% transaksi perdagangan dunia dan jumlah penduduk sebanyak 41% penduduk dunia. Pengembangan perekonomian kawasan ini ditandai dengan meningkatnya permintaan pasar domestik, meningkatnya ekspor, kemajuan teknologi dan pemanfaatan internet yang massif dan investasi swasta yang meningkat pesat. Berbagai kerjasama lintas negara di Asia Pasifik telah menjadikan perekonomian dan perdagangan semakin meningkat dari tahun ke tahun, antara lain melalui Trans Pacific Partenership, ASEAN Regional Forum (ARF)

dimotori Tiongkok, East Asia Summit (EAS) dan Expand ASEAN Maritime Forum serta Kepemimpinan Indonesia dalam Forum G-20 menjadikan peran negara kita, semakin diperhitungkan dalam kancah internasional.

3. Pasar Terbuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pasar Bebas ASEAN (Asean Free Trade Association/AFTA) merupakan komitmen bersama 10 negara anggota ASEAN menetapkan pasar tunggal sebagai pasar potensial dengan jumlah penduduk lebih kurang sebanyak 550 juta jiwa (2021) dan terbesar adalah penduduk Indonesia (tahun 2021) dengan jumlah sebanyak 270 juta jiwa. Terdapat lima kebijakan yang tidak dapat dibatasi yaitu: arus barang, arus jasa, modal dan investasi serta tenaga kerja terampil. Perluasan pasar Indonesia khususnya perdagangan antar negara ASEAN, transfer iptek dan ekonomi digital menjadi dampak positif berlakunya pasar bebas. Oleh karena itu, kebutuhan tenaga kerja terampil dan kompetensi keahlian tenaga kerja perlu ditingkatkan agar kita dapat mendapatkan keuntungan pasar bebas ASEAN. Hal ini mengingat lebih dari 50% penduduk ASEAN adalah penduduk negara kita yang sebagian besar (64,7%) kelompok usia produktif.

4. Kemitraan Global Untuk Mencapai Sustainable Development Goal`s/ SDG`s (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) Tahun 2016 – 2030

Stabilitas politik internasional telah mendorong kemitraan global dalam mewujudkan pencapaian SDG`s sebagai agenda global dirumuskan dalam 17 tujuan dan 169 target pembangunan. Pelaksanaannya mendapatkan dukungan sebanyak 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan komitmennya dalam menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesetaraan gender, pelestarian lingkungan serta tata kelola perekonomian dunia yang lebih adil.

5. BRICS Forum

BRICS bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tujuan bersama negara-negara anggotanya. Forum ini menjadi platform strategis bagi para pemimpin dan pejabat dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, serta Indonesia

sebagai anggota baru untuk bertukar pandangan, berbagi pengalaman, dan memperdalam kerja sama lintas kawasan.

Sebagai forum internasional, BRICS memiliki beberapa dimensi penting:

- a. Dimensi ekonomi: BRICS berpotensi mendorong perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi global, sekaligus menciptakan tatanan ekonomi yang lebih seimbang dan inklusif.
- b. Dimensi politik: BRICS memperkuat hubungan bilateral dan multilateral antaranggota, serta memperluas pengaruh politik kolektif di tingkat global.
- c. Dimensi keamanan: BRICS mendukung stabilitas, perdamaian, dan keamanan internasional melalui dialog, kerja sama pembangunan, serta mekanisme penyelesaian konflik.

Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS berkembang menjadi salah satu forum internasional terpenting. Kehadiran Indonesia sebagai anggota baru memberikan makna strategis karena posisi geografis, kekuatan ekonomi, serta peran diplomasi Indonesia sebagai pemimpin kawasan Asia Tenggara. BRICS kini dipandang sebagai inisiatif yang mampu memberikan manfaat luas, baik bagi anggota maupun mitra kerja sama. Melalui agenda-agendanya, BRICS mendukung penguatan infrastruktur, peningkatan perdagangan, arus investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan berkelanjutan di berbagai kawasan dunia.

6. Tarif Trump dan Implikasinya bagi Indonesia

Kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump telah menimbulkan disrupsi besar dalam sistem perdagangan global. WTO mencatat penurunan penerapan prinsip Most-Favored Nation (MFN) dari 80% menjadi 72%, menjadikan era ini sebagai salah satu guncangan terbesar dalam delapan dekade terakhir terhadap aturan perdagangan multilateral. Peningkatan tarif impor AS rata-rata dari 2,5% menjadi 18,6% tidak hanya menekan ekspor Tiongkok, Uni Eropa, dan Vietnam, tetapi juga mendorong pergeseran rantai pasok global ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia, kondisi ini menghadirkan dua sisi dampak. Di satu sisi, peralihan investasi dan produksi dari Tiongkok memberi peluang bagi kawasan industri nasional untuk menarik relokasi pabrik, memperkuat basis manufaktur, dan memperluas pasar ekspor ke Amerika Serikat. Namun, di sisi lain, proteksionisme AS meningkatkan ketidakpastian harga dan pasar bagi komoditas utama Indonesia, termasuk produk tambang dan manufaktur berbasis sumber daya alam yang juga menjadi tulang punggung perekonomian Mimika.

Selain itu, kebijakan tarif AS juga mendorong negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memperkuat solidaritas dalam forum alternatif seperti BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS dipandang strategis sebagai upaya memperluas akses pasar, meningkatkan kerja sama pembiayaan pembangunan, serta memperjuangkan sistem perdagangan internasional yang lebih adil. Dengan demikian, kebijakan tarif global seperti yang diterapkan AS menjadi faktor eksternal penting yang perlu diperhitungkan dalam perumusan RPJMD Mimika, khususnya dalam konteks diversifikasi ekonomi, penguatan daya saing ekspor non-tambang, dan perlunya meningkatkan efisiensi logistik serta konektivitas daerah.

7. Transisi Energi dan Kerja Sama Energi Terbarukan

Transisi energi menjadi salah satu isu utama dalam upaya global mengurangi emisi karbon dan memperlambat laju perubahan iklim. Negara-negara didorong untuk beralih dari energi fosil ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Kerja sama internasional menjadi kunci untuk mempercepat adopsi teknologi baru, mengamankan pendanaan, dan meningkatkan kapasitas negara berkembang. Inisiatif seperti grid energi lintas batas dan investasi dalam teknologi rendah karbon menjadi langkah konkret untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.

8. Keamanan dan Stabilitas Regional Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik menjadi arena strategis yang sangat penting bagi perdagangan global, geopolitik, dan keamanan. Stabilitas kawasan ini menghadapi tantangan besar, termasuk sengketa teritorial di Laut China Selatan, perlombaan militer, dan ancaman non-tradisional

seperti pembajakan dan perubahan iklim. Negara-negara di kawasan dan mitra global mendorong kerja sama melalui aliansi seperti Quad dan AUKUS untuk memperkuat keamanan maritim, dialog diplomatik, dan stabilitas regional. Peningkatan hubungan ekonomi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan perdamaian.

9. Pengembangan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan untuk Memberdayakan UMKM

Revolusi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang melalui platform e-commerce, fintech, dan aplikasi digital lainnya. Namun, akses yang tidak merata terhadap teknologi dan keuangan menjadi tantangan yang harus diatasi. Kerja sama internasional dalam membangun infrastruktur digital, memperkuat literasi teknologi, dan mendukung regulasi fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan. Dengan mengintegrasikan UMKM ke dalam ekonomi digital, negara-negara dapat mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan memperkuat daya saing ekonomi di tingkat global.

10. Kerja Sama dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pandemi COVID-19 menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi krisis kesehatan. Ketersediaan vaksin yang adil, pertukaran teknologi medis, dan pembangunan sistem peringatan dini menjadi fokus utama dalam mencegah pandemi di masa depan. Negara-negara juga bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan global, termasuk melalui penelitian dan pengembangan obat serta penguatan kerja sama dalam pengendalian penyakit menular. Upaya kolektif ini bertujuan menciptakan dunia yang lebih tangguh menghadapi ancaman kesehatan global.

11. Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Perubahan iklim memengaruhi sistem pangan global, mengancam produksi, distribusi, dan aksesibilitas pangan, terutama di negara-negara rentan. Kolaborasi internasional diperlukan untuk mendorong inovasi dalam teknologi pertanian, praktik pertanian berkelanjutan, dan diversifikasi sumber pangan. Langkah-langkah seperti mitigasi risiko bencana iklim, investasi dalam penelitian agrikultur, dan

perlindungan keanekaragaman hayati juga menjadi prioritas utama. Dengan kerja sama global, ketahanan pangan dapat dicapai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

2.3.2.2 Isu Nasional

Akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 utamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong confidence masyarakat dan pulihnya aktivitas ekonomi. Visi Indonesia 2045 menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyusun Visi Indonesia 2045 yaitu Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur untuk meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Keempat pilar untuk mencapai Visi Indonesia Tahun 2045 meliputi:

1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi; serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan Pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan dimaksudkan untuk menopang perwujudan ekonomi Indonesia sebagai salah satu barometer ekonomi baik di kawasan Asia Pasifik maupun dunia. Ekonomi yang kuat akan membantu perwujudan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di Asia Pasifik. Strategi pembangunan ekonomi mencakup berbagai bidang penting antara lain IV-21 infrastruktur, industri, ekonomi kreatif dan digital, investasi dan perdagangan, pariwisata, kemaritiman, pangan, energi,

air, dan lingkungan menuju negara berpendapatan tinggi. Pengelolaan lingkungan hidup beralih pada pendekatan circular economy. Krisis sumber daya dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan circular economy. Circular economy berkontribusi pada terjadinya tindakan closing the loop siklus hidup produk melalui proses daur ulang 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, revalue) yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi lingkungan dan ekonomi. Keterpaduan kegiatan circular economy dalam pengelolaan sumber daya alam akan mendorong kegiatan reinvestasi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

3. Pemerataan pembangunan Pilar pemerataan pembangunan sangat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan mencakup pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan petani, pemerataan daerah, serta pemerataan infrastruktur yang penting bagi pemerataan pembangunan secara menyeluruh.
4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan semakin kokoh dengan kualitas demokrasi yang semakin baik, reformasi kelembagaan dan birokrasi, pembangunan hukum dan anti korupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta kemampuan pertahanan dan keamanan yang tinggi.

Selain adanya empat pilar visi RPJPN, dinamika nasional juga dipengaruhi oleh adanya Asta Cita yang menjadi landasan strategis RPJMN 2025-2029. Delapan misi dalam Asta Cita tersebut menjadi pedoman untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam berbagai aspek pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 menetapkan Asta Cita sebagai delapan misi strategis yang menjadi arah pembangunan nasional untuk menghadapi tantangan domestik maupun global. Asta Cita ini dirancang untuk mendorong kemajuan bangsa yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat, mencakup hal-hal berikut:

- 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Indonesia sebagai negara Pancasila menempatkan nilai-nilai ideologi kebangsaan sebagai landasan utama dalam setiap aspek pembangunan. Penguatan demokrasi yang sehat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengelolaan keberagaman menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Kemandirian bangsa menjadi elemen penting dalam menghadapi dinamika global. Melalui pencapaian swasembada di sektor pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru, Indonesia memperkuat pertahanan keamanan nasional yang tangguh. Upaya ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan daya saing bangsa di kancah internasional.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi prioritas melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, pengembangan kewirausahaan, dan investasi di sektor infrastruktur. Langkah ini tidak hanya mendukung pemerataan pembangunan, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

SDM yang unggul menjadi modal utama dalam mencapai daya saing global. Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan teknologi, layanan kesehatan, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas strategis untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan inklusif.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Pengembangan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Strategi ini memperkuat ekosistem industri yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Strategi pembangunan dari desa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga merata hingga ke pelosok. Pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan infrastruktur desa, dan pengurangan kesenjangan sosial menjadi upaya konkret untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dilakukan melalui reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Pencegahan korupsi, pemberantasan narkoba, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi agenda utama untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berintegritas.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Pembangunan yang selaras dengan lingkungan hidup dan pelestarian budaya menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, penguatan toleransi antarumat beragama menjadi pilar dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur.

2.3.2.3 Isu Provinsi Papua Tengah

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten dengan peran paling strategis di Provinsi Papua Tengah. Dari sisi geografi, Mimika memiliki luas wilayah mencapai lebih dari 18 ribu kilometer persegi dengan karakteristik bentang alam yang beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, hingga kawasan pegunungan. Posisi ini memberikan Mimika potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Namun di sisi lain, kondisi geografis yang kompleks juga menghadirkan tantangan serius dalam hal keterhubungan antarwilayah, pemerataan pembangunan, dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat di seluruh distrik.

Kontribusi Mimika terhadap ekonomi Papua Tengah sangat besar. Perekonomian provinsi ini sebagian besar ditopang oleh kegiatan pertambangan di Mimika, khususnya tambang emas dan tembaga yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Hal ini membuat Mimika menjadi lokomotif utama pembangunan ekonomi, tidak hanya untuk Papua Tengah, tetapi juga bagi Indonesia. Meski demikian, ketergantungan yang terlalu tinggi pada sektor pertambangan menimbulkan risiko kerentanan, baik dari sisi stabilitas fiskal daerah maupun dari aspek keberlanjutan lingkungan.

Kondisi sosial masyarakat Mimika pun sangat dinamis. Timika, sebagai ibu kota kabupaten, telah berkembang menjadi pusat perkotaan yang pesat dan menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai daerah. Perkembangan ini membawa implikasi pada meningkatnya kebutuhan infrastruktur perkotaan, pelayanan publik, serta munculnya masalah sosial baru seperti kepadatan penduduk, ketimpangan, dan konflik sosial. Di sisi lain, masyarakat di distrik-distrik pedalaman dan pesisir masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta sarana transportasi yang memadai.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025–2029, telah dirumuskan visi pembangunan untuk mewujudkan daerah yang maju, berdaya saing, adil, dan berkelanjutan. Visi ini kemudian dijabarkan dalam misi dan prioritas pembangunan yang meliputi penguatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dasar, diversifikasi ekonomi,

pembangunan inklusif berbasis Orang Asli Papua, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Bagi Mimika, visi dan misi ini menjadi landasan penting dalam menyusun dokumen RPJMD kabupaten agar selaras dengan arah kebijakan provinsi.

Telaah ini penting karena Mimika tidak bisa berjalan sendiri dalam pembangunan. Sebagai bagian integral dari Provinsi Papua Tengah, keberhasilan atau kegagalan pembangunan Mimika akan berpengaruh langsung terhadap capaian pembangunan provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, telaah ini berfungsi untuk mengidentifikasi relevansi isu strategis, menyelaraskan prioritas pembangunan, serta merumuskan arah kebijakan yang dapat memperkuat peran Mimika dalam mendukung pencapaian visi Papua Tengah.

Dengan memahami posisi strategis Mimika dalam kerangka pembangunan provinsi, diharapkan RPJMD Kabupaten Mimika dapat disusun secara lebih terarah, realistis, dan sinkron. Hal ini sekaligus menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi masyarakat Mimika, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

1. Isu Strategis Kabupaten Mimika dalam Kerangka Provinsi

Salah satu isu strategis utama yang dihadapi Mimika adalah ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan. Data PDRB menunjukkan bahwa lebih dari separuh perekonomian Mimika disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian. Ketergantungan ini menjadikan Mimika sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, kontribusi besar sektor tambang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua yang tinggal di wilayah pedalaman dan pesisir.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah masalah sosial akibat urbanisasi yang tinggi. Timika sebagai pusat kabupaten berkembang pesat dan menarik arus migrasi yang besar. Pertumbuhan ini di satu sisi membawa peluang, tetapi di sisi lain juga menimbulkan masalah kependudukan, seperti kepadatan, kemacetan, meningkatnya kriminalitas, serta tantangan dalam penyediaan perumahan layak. Sementara itu, distrik-distrik pedalaman masih menghadapi

keterisolasian, akses pendidikan dan kesehatan yang minim, serta rendahnya tingkat kesejahteraan.

Kesehatan masyarakat Mimika juga masih menghadapi tantangan berat. Angka stunting di beberapa distrik masih tinggi, mencerminkan kurangnya akses terhadap gizi dan layanan kesehatan dasar. Selain itu, penyakit menular seperti malaria dan TBC masih menjadi masalah kesehatan utama. Akses terhadap fasilitas kesehatan modern masih terkonsentrasi di Timika, sementara wilayah pedalaman kesulitan mendapatkan layanan yang memadai.

Di bidang pendidikan, masih terdapat kesenjangan kualitas antara sekolah di kota dan di pedalaman. Keterbatasan tenaga pendidik, sarana prasarana yang kurang, serta tingkat partisipasi sekolah yang rendah di beberapa distrik menjadi tantangan yang harus diatasi. Hal ini berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mimika, khususnya bagi masyarakat OAP.

Isu lingkungan juga sangat krusial. Mimika termasuk dalam wilayah dengan tingkat kerawanan banjir, cuaca ekstrem, dan likuifaksi yang tinggi. Aktivitas pertambangan skala besar menimbulkan tekanan tambahan terhadap lingkungan, mulai dari degradasi lahan, pencemaran air, hingga potensi konflik sosial terkait lahan. Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus menjadi perhatian utama agar pembangunan tidak merusak ekosistem yang ada.

Dengan demikian, isu-isu strategis Mimika tidak bisa dilepaskan dari konteks pembangunan provinsi. Isu-isu tersebut harus diintegrasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Mimika agar sejalan dengan arah pembangunan Papua Tengah, sekaligus menjawab kebutuhan spesifik masyarakat lokal.

2. Sinkronisasi Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Mimika

Visi pembangunan Papua Tengah yang ingin mewujudkan daerah “maju, berdaya saing, adil, dan berkelanjutan” dapat diimplementasikan di Mimika melalui berbagai strategi. Pertama, misi penguatan sumber daya manusia sejalan dengan kebutuhan Mimika untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, terutama bagi OAP di distrik pedalaman. Program-program peningkatan IPM harus diarahkan

agar Mimika mampu menjadi pusat pendidikan dan kesehatan unggulan di provinsi.

Kedua, misi pembangunan ekonomi inklusif sangat relevan bagi Mimika yang selama ini terlalu bergantung pada tambang. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan perikanan, perkebunan, UMKM, serta pariwisata perlu dipercepat. Mimika memiliki potensi pesisir yang luas untuk perikanan tangkap dan budidaya, serta potensi agroindustri dari komoditas seperti kakao, kelapa, dan sagu. Hal ini dapat menjadi basis ekonomi alternatif yang berkelanjutan.

Ketiga, misi peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas juga selaras dengan kebutuhan Mimika. Jalan penghubung antar-distrik, pelabuhan laut, dan bandara sangat penting untuk mengurangi keterisolasian wilayah pedalaman. Infrastruktur energi, air bersih, dan sanitasi juga harus diperluas hingga ke kampung-kampung terpencil agar kesenjangan pembangunan antarwilayah bisa dikurangi.

Keempat, pembangunan inklusif berbasis OAP menjadi salah satu prioritas utama provinsi yang juga sangat penting untuk Mimika. Dalam praktiknya, ini berarti memastikan OAP mendapatkan akses pendidikan, lapangan kerja, serta peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi lokal dan perlindungan hak masyarakat adat harus menjadi bagian dari kebijakan kabupaten.

Kelima, tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana ditekankan provinsi juga harus diterapkan di Mimika. Kapasitas birokrasi daerah perlu diperkuat, baik di tingkat kabupaten maupun distrik dan kampung. Transparansi anggaran, pelayanan publik yang cepat dan adil, serta mekanisme pengawasan yang efektif menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Dengan menyelaraskan visi, misi, dan prioritas pembangunan provinsi ke dalam konteks Mimika, maka RPJMD Kabupaten Mimika dapat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya merespons kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan Papua Tengah secara keseluruhan.

3. Rekomendasi Arah Kebijakan untuk RPJMD Mimika

Berdasarkan telaah terhadap RPJMD Provinsi Papua Tengah, terdapat beberapa rekomendasi arah kebijakan untuk RPJMD Kabupaten

Mimika. Pertama, dari aspek ekonomi, Mimika perlu mendorong hilirisasi industri pertambangan serta mengembangkan sektor ekonomi alternatif. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap tambang dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Kedua, dari aspek sosial, Mimika harus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Program pengentasan stunting, pemerataan tenaga kesehatan, serta peningkatan sarana pendidikan di pedalaman menjadi prioritas. Program pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama di bidang industri dan jasa, juga perlu diperluas.

Ketiga, dari aspek infrastruktur, pembangunan harus diarahkan pada peningkatan konektivitas antarwilayah. Jalan penghubung distrik pedalaman, pelabuhan laut, serta infrastruktur energi dan air bersih menjadi kebutuhan mendesak. Infrastruktur digital juga perlu diperkuat untuk mendukung pendidikan dan layanan publik di era modern.

Keempat, dari aspek lingkungan, Mimika perlu menyusun strategi mitigasi bencana yang komprehensif. Pengendalian banjir, pengelolaan risiko likuifaksi, serta rehabilitasi lahan bekas tambang harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan. Selain itu, penerapan prinsip green economy dalam pembangunan harus diintegrasikan ke seluruh sektor.

Kelima, dari aspek tata kelola, Mimika harus memperkuat kapasitas pemerintahan daerah. Penguatan peran distrik dan kampung melalui program otonomi khusus menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan harus ditingkatkan.

Rekomendasi arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika. Dengan demikian, Mimika tidak hanya mampu menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Papua Tengah.

Kabupaten Mimika memiliki peran vital dalam pembangunan Provinsi Papua Tengah. Potensi sumber daya alam yang besar, posisi geografis strategis, serta kontribusi ekonomi yang dominan menjadikan

Mimika sebagai pusat pertumbuhan provinsi. Namun, potensi besar tersebut juga diiringi dengan tantangan yang kompleks, mulai dari ketergantungan ekonomi pada tambang, isu sosial akibat urbanisasi, masalah kesehatan dan pendidikan, hingga kerawanan bencana dan degradasi lingkungan.

RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025–2029 memberikan arah kebijakan yang jelas melalui visi, misi, dan prioritas pembangunan. Telaah ini menunjukkan bahwa visi dan misi provinsi sangat relevan untuk diimplementasikan di Mimika, dengan penekanan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Rekomendasi yang dihasilkan dari telaah ini menegaskan pentingnya Mimika untuk mengembangkan sektor ekonomi alternatif, memperluas akses layanan dasar, memperkuat strategi mitigasi bencana, serta meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah. Mimika harus menjadi contoh pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

Keberhasilan Mimika dalam mengelola pembangunan akan menentukan keberhasilan Papua Tengah dalam mewujudkan visinya sebagai provinsi yang maju, berdaya saing, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinkronisasi RPJMD Mimika dengan RPJMD Provinsi Papua Tengah bukan hanya sebuah kebutuhan administratif, tetapi juga sebuah strategi pembangunan yang esensial. Dengan pendekatan yang selaras dan sinergis, pembangunan Mimika dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pencapaian tujuan pembangunan provinsi, sekaligus memastikan bahwa masyarakat di seluruh pelosok Mimika merasakan manfaat nyata dari pembangunan.

2.3.2.4 Isu Kabupaten Mimika

A. Telaah RPJPD Kabupaten Mimika 2025-2045

RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045 disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap daerah menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun) sebagai pedoman bagi rencana jangka menengah (RPJMD) dan rencana tahunan. Secara hukum, RPJPD berfungsi memberikan arah bagi penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) agar tercipta keterpaduan perencanaan.

RPJPD Mimika 2025–2045 terintegrasi dengan kerangka perencanaan nasional dan provinsi, selaras dengan Visi Indonesia 2045 serta *Visi Papua Tengah 2045*, sekaligus mengadopsi agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 dalam prinsip pembangunannya. Dengan demikian, RPJPD menjadi acuan utama bagi RPJMD; setiap RPJMD Kabupaten Mimika sebagai rencana pembangunan 5 tahunan harus merujuk pada visi, misi, dan target RPJPD agar kesinambungan pembangunan jangka panjang terjaga. Keterkaitan ini ditegaskan dalam dokumen RPJPD, di mana seluruh tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program RPJMD beserta dokumen rencana lain wajib mengacu serta menjaga integrasi lintas sektor, wilayah, dan jenjang pemerintahan sesuai arahan RPJPD. Bahkan, setiap tahap RPJMD dalam kerangka 2025–2045 dianggap satu kesatuan dengan RPJPD, termasuk diantaranya pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD yang harus disusun sejak awal proses demi menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi di setiap rencana lima tahunan.

Ketentuan normatif ini dipayungi pula oleh regulasi teknis seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah termasuk memastikan konsistensi antara RPJPD dan RPJMD serta memperbolehkan perubahan RPJPD apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian mendasar dengan ketentuan atau perubahan lingkungan strategis. Singkatnya, RPJPD 2025–2045 menjadi landasan hukum sekaligus substansial bagi RPJMD Mimika; dokumen RPJMD harus merupakan penjabaran tahap demi tahap dari RPJPD dengan tetap mengacu pada visi dan arah pembangunan jangka panjang yang telah disepakati.

1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Mimika serta Landasan Pembangunan Jangka Panjang

RPJPD Kabupaten Mimika 2025–2045 menetapkan visi jangka panjang daerah, yakni *“Terwujudnya Mimika Bersatu, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”*. Visi ini menggambarkan kondisi ideal Mimika di tahun 2045 (disebut pula *Mimika Unggul 2045*), di mana masyarakat Mimika hidup dalam persatuan, mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang merata, serta memastikan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.

Landasan pembangunan jangka panjang Mimika bertumpu pada nilai-nilai dasar nasional (Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila) yang dijabarkan dalam visi Indonesia Emas 2045, seraya memperhatikan modal dasar dan megatren global seperti perubahan iklim, dinamika demografi, dan perkembangan teknologi. Aspek “berkelanjutan” pada visi Mimika selaras dengan komitmen pencapaian TPB/SDGs, menandakan bahwa pembangunan daerah harus seimbang antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang Mimika sebagai penjabaran arah strategis yang akan ditempuh. Kedelapan misi RPJPD Mimika 2025–2045 itu meliputi:

- 1) Mentransformasikan kehidupan sosial yang unggul;
- 2) Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan pembangunan wilayah yang berdaya saing dan mandiri secara merata;
- 4) Mengaktualkan transformasi tata kelola pemerintahan yang prima, inovatif dan tepercaya;
- 5) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum dengan menjunjung tinggi supremasi hukum;
- 6) Meningkatkan ketahanan sosial-budaya dan ekologi yang berkelanjutan;
- 7) Mengaktualkan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas; serta
- 8) Mengoptimalkan kesinambungan dan keselarasan dalam pembangunan daerah.

Misi-misi tersebut menjadi pilar strategis yang menopang visi jangka panjang, dengan menekankan transformasi di berbagai bidang: pembangunan SDM unggul (mis. pendidikan, kesehatan, sosial), penguatan

ekonomi kerakyatan dan inovasi berbasis SDA, pemerataan pembangunan wilayah (dataran rendah dan pegunungan), perbaikan tata kelola dan layanan publik, penegakan hukum dan keamanan, pelestarian lingkungan dan budaya lokal, penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan agar berkelanjutan. Landasan pikir dari perumusan visi-misi ini juga dipandu oleh misi nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJPD Provinsi Papua Tengah, sehingga visi Mimika 2045 sejalan dengan visi Provinsi (*“Terwujudnya Papua Tengah Adil, Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan”*) maupun agenda pembangunan nasional jangka panjang. Dengan demikian, visi dan misi RPJPD Mimika telah dirumuskan komprehensif sebagai dasar bagi arah pembangunan jangka panjang yang konsisten, berkesinambungan, dan kontekstual dengan tantangan serta potensi daerah hingga tahun 2045.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Jangka Panjang yang Perlu Diturunkan ke RPJMD

RPJPD Mimika 2025–2045 menetapkan tujuan serta sasaran strategis sebagai ukuran keberhasilan pembangunan jangka panjang yang harus dicapai pada tahun 2045. Tujuan dan sasaran ini merupakan penjabaran dari visi-misi, dan menjadi target kinerja utama yang nantinya perlu diturunkan ke dalam RPJMD per periode. Terdapat lima sasaran visi utama 2045 yang tercermin dalam berbagai indikator makro Mimika:

- a) Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tertinggi di Papua: Mimika menargetkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata yang paling tinggi dan stabil se-Papua, dengan PDRB per kapita (termasuk dan tidak termasuk sektor tambang) mencapai level tertinggi di provinsi. Indikatornya antara lain pertumbuhan ekonomi riil dengan tambang ditargetkan tumbuh 10,46% (naik dari baseline 6,15%) dan tanpa tambang tumbuh 7,04% (naik dari 3,91%), serta peningkatan kontribusi ekonomi Mimika terhadap PDRB Provinsi. Pendapatan per kapita Mimika juga diharapkan meningkat signifikan (dengan tambang dari Rp249,58 juta menjadi Rp436,77 juta; tanpa tambang dari Rp30,55 juta menjadi Rp85,54 juta pada 2045) seiring diversifikasi ekonomi daerah.
- b) Menurunnya ketimpangan dan kemiskinan hingga yang terendah di Papua: RPJPD menargetkan penurunan rasio Gini dari 0,349 (tahun

2022) menjadi sekitar 0,205 pada 2045, yang berarti tingkat ketimpangan pendapatan antarpersonal sangat rendah. Demikian pula, tingkat kemiskinan diturunkan drastis dari sekitar 14% menjadi hanya 1,45% pada tahun 2045. Ini akan menjadikan Mimika sebagai acuan nasional dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

- c) Meningkatnya kualitas pembangunan manusia secara optimal: Sasaran ini diwujudkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mimika dari 75,08 menjadi 87,84 pada 2045, mendekati kategori “sangat tinggi”. Selain itu, Indeks Modal Manusia juga ditargetkan naik dari 0,30 menjadi 0,55, mencerminkan SDM Mimika yang lebih sehat, berpendidikan, dan produktif.
- d) Penguatan kapasitas tata kelola dan inovasi daerah: Mimika membidik terwujudnya kepemimpinan dan birokrasi daerah yang tangguh dan inovatif. Indeks Kepemimpinan Daerah diharapkan meningkat dari kategori “rendah” menjadi “tinggi”, sementara Indeks Inovasi Daerah ditargetkan mencapai skor 65 (meningkat signifikan dari baseline 2,10) pada tahun 2045. Hal ini mencerminkan tekad membangun pemerintahan daerah yang kompeten, inovatif, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat jangka panjang.
- e) Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan: Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, sasaran strategis jangka panjang Mimika juga mencakup penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*. Indikatornya adalah tercapainya penurunan intensitas emisi GRK hingga 90% pada 2045, sejalan dengan target nasional dan global dalam mengatasi perubahan iklim.

Seluruh tujuan dan sasaran strategis di atas merupakan panduan kinerja jangka panjang yang harus dijabarkan secara operasional ke dalam RPJMD setiap periode. Artinya, RPJMD 5-tahunan perlu menetapkan target antara (mid-term targets) yang konsisten dengan capaian akhir 2045 tersebut. Misalnya, target peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di RPJMD pertama (2025–2029) harus sejalan dengan trajektori menuju angka yang diharapkan di 2045. Dengan demikian, kesinambungan antara sasaran jangka panjang dan sasaran jangka menengah terjaga. Setiap indikator kinerja utama RPJPD diwajibkan masuk

menjadi indikator dalam RPJMD terkait, sehingga capaian 5-tahunan dapat terukur kontribusinya terhadap pencapaian visi Mimika 2045. Ini memastikan bahwa perencanaan jangka menengah daerah benar-benar merupakan tahapan pencapaian tujuan strategis jangka panjang yang telah ditetapkan.

3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah yang Relevan untuk RPJMD

Dokumen RPJPD Mimika 2025–2045 mengidentifikasi berbagai permasalahan pokok dan isu strategis pembangunan daerah yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD. Permasalahan dan isu ini berperan sebagai tantangan yang harus dijawab oleh kebijakan dan program dalam jangka menengah. Beberapa isu strategis utama yang relevan untuk RPJMD Mimika antara lain:

- 1) Ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih tinggi. Terdapat kesenjangan mencolok antara wilayah perkotaan (terutama di dataran rendah/pesisir) dan wilayah pedalaman/pegunungan dalam hal infrastruktur, akses layanan, dan hasil-hasil pembangunan. RPJPD mencatat bahwa ketimpangan pembangunan antar distrik di Mimika masih sangat tinggi hingga saat ini. Hal ini terlihat dari disparitas akses transportasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antara wilayah pesisir dan pegunungan. Salah satu indikatornya, dominasi kegiatan ekonomi di sekitar kota Timika dan area tambang tidak diimbangi perkembangan ekonomi di distrik terpencil, memicu urbanisasi dan kesenjangan regional.
- 2) Dominasi sektor pertambangan dalam ekonomi daerah. Struktur ekonomi Mimika sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan (PT Freeport), yang menyumbang porsi terbesar PDRB. Dominasi pertambangan ini menyebabkan ketimpangan antarsektor yang ekstrim terukur dengan koefisien variasi struktur ekonomi mencapai 3,35 (tahun 2010–2020), jauh di atas ambang ketimpangan rendah 0,30. Akibatnya, sektor-sektor lain (pertanian, industri pengolahan, jasa) berkembang relatif lambat, dan jika dibiarkan dapat mengancam keberlanjutan ekonomi pasca-tambang. RPJPD menekankan perlunya diversifikasi

ekonomi guna menurunkan ketergantungan pada tambang dan mengurangi kesenjangan sektoral ini.

- 3) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesenjangan layanan dasar. Isu SDM mencakup masih terbatasnya akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja lokal. Tingkat pendidikan pemuda Mimika dinilai masih rendah dan belum merata, terutama di distrik-distrik terpencil. Penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan pun belum seimbang banyak guru dan tenaga medis terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pegunungan kekurangan tenaga profesional. Konsekuensinya, indeks pembangunan manusia Mimika tertahan dan daya saing SDM lokal (khususnya Orang Asli Papua, OAP) masih menjadi tantangan.
- 4) Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah. Wilayah pegunungan dan pesisir Mimika menghadapi kendala akses transportasi yang serius, sehingga layanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur dasar di sana tertinggal. Sulitnya akses (terbatasnya jaringan jalan/transportasi) menyebabkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan tidak optimal menjangkau seluruh komunitas. Masih terdapat distrik yang melakukan pencatatan kependudukan secara manual, banyak penduduk di pedalaman belum terdata dalam sistem administrasi, serta layanan dasar seperti air bersih, listrik, perumahan layak, belum merata.
- 5) Persoalan kependudukan, migrasi, dan sosial. Jumlah penduduk Mimika terus tumbuh setiap tahun, namun tidak diiringi ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Akibatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan cenderung tinggi, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas. Selain itu, Mimika menarik arus migrasi masuk yang besar (tercatat migran seumur hidup 43% dari populasi) sehingga komposisi penduduk berubah. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan pemerataan kesempatan kerja dan pelayanan, hal ini dapat memperlebar ketimpangan pendapatan antara penduduk asli (OAP) dan pendatang, serta memicu sensitivitas sosial. RPJPD bahkan mencatat adanya gejala konflik horizontal (antar kelompok) yang pernah terjadi, sebagian dipicu oleh ketimpangan dan persepsi ketidakadilan.

6) Isu ketahanan lingkungan hidup. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di poin sebelumnya, tantangan pengelolaan lingkungan juga relevan, mengingat aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan serta bencana ekologis. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, Mimika dihadapkan pada isu pengendalian kerusakan lingkungan (hutan, keanekaragaman hayati), adaptasi perubahan iklim (kenaikan curah hujan, ancaman banjir/pelan-pelan), dan tata kelola risiko bencana.

Seluruh permasalahan dan isu strategis di atas menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan prioritas RPJMD. RPJMD harus menitikberatkan upaya untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan sosial, meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan layanan dasar, mendorong diversifikasi ekonomi di luar tambang, membangun infrastruktur hingga ke kawasan terisolir, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan fokus pada isu-isu strategis tersebut, RPJMD dapat lebih efektif menjawab kebutuhan riil daerah dan meletakkan dasar solusi jangka panjang menuju Mimika 2045 yang unggul sesuai visi RPJPD.

4. Arah Kebijakan dan Prioritas Utama dalam RPJPD sebagai Acuan Penyusunan RPJMD

RPJPD Kabupaten Mimika 2025–2045 menetapkan arah kebijakan dan prioritas utama pembangunan daerah yang menjadi panduan bagi RPJMD. Arah kebijakan ini berorientasi pada transformasi menyeluruh di berbagai bidang secara bertahap dan berkelanjutan, sesuai misi yang telah dirumuskan. Secara garis besar, RPJPD Mimika mengusung strategi transformasi yang mencakup: transformasi sosial (pembangunan SDM dan sosial kemasyarakatan yang inklusif), transformasi ekonomi berbasis kerakyatan dan keberlanjutan, transformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif, serta transformasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Beberapa fokus kebijakan utama di antaranya adalah peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih) sejak awal periode, penguatan ekonomi lokal yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan daerah di luar tambang, UMKM dan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur terintegrasi antar wilayah untuk membuka

keterisolasian wilayah pegunungan/pesisir, reformasi birokrasi dan tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik prima, serta pelestarian budaya dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Semua arah kebijakan ini berlandaskan prinsip inklusivitas (tidak meninggalkan kelompok manapun), keberlanjutan (memperhatikan daya dukung lingkungan), dan kearifan lokal.

RPJPD Mimika juga membagi prioritas pembangunan ke dalam empat tahap (*penahapan pembangunan jangka panjang*) yang berkorespondensi dengan periode RPJMD lima tahunan. Masing-masing tahap memiliki tema dan fokus kebijakan tersendiri, yang keseluruhannya menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD pada periodenya:

1. Tahap I (2025–2029) “Pertumbuhan Transformasi”: Merupakan fase awal yang menitikberatkan pada penguatan fondasi pembangunan. Arah kebijakan difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi awal yang ekspansif berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara luas, pembangunan infrastruktur dasar terintegrasi lintas sektor dan wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Pada tahap ini Mimika memulai transformasi dengan mempercepat pembangunan sektor-sektor fundamental dan melakukan pembenahan internal (reformasi birokrasi, penyiapan regulasi daerah, advokasi pembentukan Daerah Otonom Baru/DOB jika diperlukan) untuk memperkuat landasan menuju tahap selanjutnya.
2. Tahap II (2030–2034) “Akselerasi Transformasi”: Merupakan fase percepatan pembangunan. Fokus kebijakan pada periode ini adalah mengakselerasi program-program strategis yang telah dimulai di tahap I serta melakukan lompatan dalam sektor-sektor kunci. RPJPD menggarisbawahi perlunya percepatan pembangunan ekonomi secara sektoral maupun spasial yang dapat menghasilkan efek berganda (multiplier effect) dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah didorong mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar yang berkualitas secara masif, mengoptimalkan penyediaan infrastruktur strategis, serta memodernisasi penyelenggaraan pemerintahan menuju e-government. Prioritas utama tahap II antara lain: industrialisasi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi,

percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (musrenbang partisipatif), serta konsolidasi demokrasi lokal dan stabilitas keamanan daerah. Dengan akselerasi ini, diharapkan pada pertengahan periode RPJPD, Mimika telah mengejar ketertinggalan di berbagai bidang dan siap memasuki tahap berikutnya dengan fondasi yang lebih kuat.

3. Tahap III (2035–2039) “Pemerataan Transformasi”: Tahap ini menekankan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Setelah pertumbuhan dan akselerasi, Mimika fokus memastikan distribusi yang adil dari pembangunan di semua wilayah dan kelompok masyarakat. Arah kebijakan tahap III mencakup upaya lebih lanjut untuk meratakan pembangunan antarwilayah distrik (lowland *vs.* highland) sehingga kesenjangan wilayah menurun signifikan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (semua kelompok termasuk OAP terlibat dan merasakan manfaat ekonomi), serta pemantapan kualitas layanan publik hingga pelosok. Pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan dituntaskan penyebarannya, dan fokus diberikan pada pemberdayaan masyarakat lokal agar mampu mandiri. Intinya, prioritas utama fase ini adalah “*memastikan tidak ada yang tertinggal*” dalam proses transformasi Mimika.
4. Tahap IV (2040–2045) “Perwujudan Transformasi / Mimika Unggul 2045”: Merupakan tahap akhir yang berorientasi pada pencapaian visi Mimika 2045 secara penuh. Kebijakan pada periode ini diarahkan untuk mengkonsolidasikan seluruh capaian sehingga Mimika benar-benar mewujudkan diri sebagai daerah “Bersatu, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan” sesuai visi. Semua indikator target diharapkan telah terpenuhi dengan kualitas yang tinggi. Fokus kebijakan antara lain: memastikan keberlanjutan atas capaian (misal, ekonomi berkelanjutan tertinggi di Papua, kualitas infrastruktur terbaik, tata kelola pemerintahan yang makin mapan), memupuk inovasi daerah yang unggul (Mimika sebagai *benchmark* nasional dalam beberapa bidang seperti penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM), serta memperkuat daya saing Mimika di tingkat regional maupun nasional. Pada tahap ini pula, Mimika diharapkan menjadi model pembangunan

inklusif dan berkelanjutan, dengan teknologi dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Keempat tahapan di atas menunjukkan prioritas utama jangka panjang yang digariskan RPJPD. Bagi penyusunan RPJMD, hal ini berarti setiap RPJMD periode I s.d. IV harus menyesuaikan tema dan fokusnya mengikuti arah kebijakan per tahap tersebut. RPJMD 2025–2029 misalnya, harus memprioritaskan program peningkatan layanan dasar, pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan pembenahan tata kelola (sesuai arahan tahap I). Demikian pula RPJMD tahap II mengacu pada agenda akselerasi (percepatan industrialisasi, pengentasan kemiskinan, modernisasi pelayanan publik, dll.), dan seterusnya. Dengan kata lain, RPJMD berperan menerjemahkan prioritas utama RPJPD ke dalam rencana 5-tahunan yang lebih operasional, tanpa menyimpang dari koridor kebijakan jangka panjang. Mengacu RPJPD, beberapa prioritas unggulan yang harus diacu RPJMD Mimika meliputi: peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan) secara konsisten, pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, pariwisata, industri pengolahan) untuk mengurangi ketergantungan pada tambang, penyediaan infrastruktur dasar hingga ke distrik terpencil, reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang efektif, serta penguatan ketahanan sosial-budaya dan lingkungan hidup dalam setiap program pembangunan. Kesemua arah kebijakan dan prioritas utama ini menjadi rujukan wajib bagi RPJMD agar terjadi kesinambungan perencanaan dan pencapaian target dari level jangka panjang ke jangka menengah.

5. Rekomendasi Utama Penurunan Arah Kebijakan RPJPD ke dalam RPJMD

Agar arah kebijakan RPJPD 2025–2045 dapat diimplementasikan secara efektif melalui RPJMD, dokumen RPJPD memberikan beberapa rekomendasi kunci. Pertama, perlu dipastikan konsistensi tujuan dan indikator antara RPJPD dan RPJMD. Bappeda Kabupaten Mimika berkewajiban menerjemahkan RPJPD ke dalam setiap RPJMD sesuai tahapannya, yang berarti seluruh indikator kinerja utama dalam RPJPD harus diintegrasikan ke dalam RPJMD. Setiap sasaran pokok jangka panjang sebaiknya dijabarkan menjadi sasaran antara lima tahunan yang terukur

dalam RPJMD. Hal ini menjamin RPJMD berkontribusi langsung pada pencapaian target visi 2045.

Kedua, penajaman prioritas dan penganggaran: RPJMD harus memprioritaskan program/kegiatan yang mendukung sasaran RPJPD, didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan baik APBD, APBN, maupun kemitraan swasta secara inovatif, integratif, dan tepat sasaran sangat dianjurkan. Peningkatan kualitas belanja daerah dan fokus pembiayaan pada program prioritas sesuai tahapan pembangunan perlu dilakukan, sehingga tidak ada kekosongan pendanaan untuk target-target penting RPJPD di setiap periodenya. Dengan kata lain, RPJMD harus dirancang dengan pendekatan *money follow program priorities* yang selaras jangka panjang.

Ketiga, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD. Rencana jangka menengah wajib memperhatikan rekomendasi KLHS RPJPD, yakni mengintegrasikan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan inklusif. Secara khusus, KLHS RPJPD Mimika telah mengidentifikasi 5 (lima) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) *Super Prioritas* sebagai *game changer* yang perlu diarusutamakan ke dalam arah kebijakan dan sasaran RPJMD, yaitu: TPB 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja layak), TPB 9 (infrastruktur tangguh dan industrialisasi inovatif), TPB 10 (pengurangan kesenjangan), TPB 11 (kota dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan), serta TPB 15 (perlindungan ekosistem darat). RPJMD disarankan menjabarkan tujuan-tujuan prioritas ini dalam bentuk program konkret misalnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan (TPB 10 dan 11) melalui pembangunan perumahan layak, peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah (TPB 9) untuk mengurangi disparitas, dukungan terhadap ekonomi lokal berkelanjutan (TPB 8) seperti pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan muda, serta penguatan upaya pelestarian lingkungan (TPB 15) dalam setiap proyek pembangunan. Penerapan KLHS untuk RPJMD sejak tahap perencanaan awal hingga evaluasi akhir juga mutlak dilakukan agar keberlanjutan lingkungan hidup benar-benar terjamin dalam pelaksanaan RPJMD.

Keempat, peningkatan partisipasi dan koordinasi pemangku kepentingan. RPJMD hendaknya disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (OPD, masyarakat, akademisi, kelompok adat, perempuan, pemuda, dll.) sehingga aspirasi strategis tertampung dan menumbuhkan rasa memiliki. Komunikasi publik dua arah dalam perencanaan daerah perlu dijalankan secara inklusif dan transparan. Dengan partisipasi aktif, program RPJMD akan lebih tepat sasaran dan didukung oleh masyarakat.

Kelima, penegasan komitmen dan tata kelola implementasi. Pencapaian target jangka panjang melalui RPJMD memerlukan dukungan kepemimpinan daerah yang konsisten setiap periodenya. RPJPD merekomendasikan agar pimpinan daerah (Bupati/Wakil Bupati) menjaga komitmen kuat pada visi Mimika 2045, memastikan kesinambungan kebijakan lintas periode, dan menggerakkan seluruh potensi untuk mencapai sasaran pokok yang telah ditetapkan. Demikian pula, DPRD berperan mengawasi dan mendorong agar RPJMD tetap on-track serta menyosialisasikan RPJPD/RPJMD kepada konstituen. Penguatan mekanisme pengendalian dan evaluasi terpadu antara jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang juga direkomendasikan seperti melalui evaluasi berkala kesesuaian kinerja RPJMD dengan target RPJPD setiap akhir periode RPJMD. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar penyesuaian kebijakan (apabila diperlukan revisi RPJPD di masa mendatang) serta pembelajaran bagi RPJMD periode selanjutnya.

Secara keseluruhan, rekomendasi tersebut menegaskan bahwa RPJMD Mimika harus disusun sejalan sepenuhnya dengan RPJPD 2025–2045. Mulai dari penjabaran visi-misi, penentuan tujuan sasaran antara, pemilihan program prioritas, pengalokasian anggaran, hingga mekanisme pelaksanaan dan evaluasi semuanya perlu merujuk pada kerangka pembangunan jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesinambungan pembangunan Mimika terjaga, sehingga setiap RPJMD berhasil mengantarkan tahapan pencapaian visi Mimika *Bersatu, Maju, Sejahtera, Berkelanjutan* tahun 2045 sebagaimana telah dicanangkan dalam RPJPD.

B. Telaah RTRW Kabupaten Mimika

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Mimika adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang didukung oleh pengembangan sumber daya buatan dan sumber daya manusia, serta tetap berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut:

1. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perkampungan untuk mendukung pengembangan wilayah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan, dengan dukungan sektor pariwisata sebagai sektor pendukung.
3. Pengelolaan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah degradasi lingkungan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing sebagai modal utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara guna menjaga stabilitas wilayah.

Berikut tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Mimika:

Tabel 58 Telaah RTRW Kabupaten Mimika

Tujuan	Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
Mewujudkan Kabupaten Mimika yang Maju, Sejahtera, Mandiri berdasarkan Kearifan Lokal dan sumber daya	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perkampungan untuk mendukung pengembangan wilayah, mengurangi	1. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan

Tujuan	Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
strategis yang Berkelanjutan.	kesenjangan intra-wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.	prasarana pembangkit energi; 3. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana irigasi; 4. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi; 5. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana air bersih; 6. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana air limbah dan persampahan; 7. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana permukiman; 8. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata; 9. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik (tempat pemakaman umum, tempat ibadah, RTH dan pertamanan); 10. Mengembangkan skema kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan dengan kabupaten disekitarnya; dan 11. Mengembangkan skema kerjasama melalui kemitraan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. 12. Mengembangkan kawasan industri; 13. Mengembangkan kawasan pertanian; 14. Mengembangkan sentra kawasan perikanan; 15. Meningkatkan tata kelola sektor kehutanan; 16. Meningkatkan tata kelola sektor pertambangan;

Tujuan	Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
		17. Mendorong pemanfaatan limbah tailing secara berkelanjutan; 18. Mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal; dan 19. Mengembangkan skema kerja sama untuk peningkatan kegiatan perekonomian.
	Pengembangan sektor ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya alam, yaitu: pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata;	1. Mengembangkan kawasan industri; 2. Mengembangkan kawasan pertanian; 3. Mengembangkan sentra kawasan perikanan; 4. Meningkatkan tata kelola sektor kehutanan; 5. Meningkatkan tata kelola sektor pertambangan; 6. Mendorong pemanfaatan limbah tailing secara berkelanjutan; 7. Mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal; dan 8. Mengembangkan skema kerja sama untuk peningkatan kegiatan perekonomian.
	Peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian yang produktif, efektif, efisien, melalui peningkatan inovasi dan teknologi tepat guna berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal serta mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; dan	1. Mengelola dan menjaga kelestarian kawasan lindung seperti hutan lindung, gambut, resapan air, sempadan pantai, sungai dan sempadan sungai, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal berupa hutan adat, kawasan pelestarian alam (KPA), kawasan rawan bencana, dan kawasan ekosistem mangrove; 2. Mengembangkan pola-pola mitigasi bencana, khususnya bencana banjir, longsor, gempa bumi; 3. Pemanfaatan kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana sesuai peraturan perundang-undangan secara harmonis dan berkelanjutan;

Tujuan	Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
		4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesehatan; 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga medis; 6. Mengembangkan pendidikan vokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berorientasi pada sektor sektor ekonomi unggulan daerah; 7. Mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat; 8. Memupuk jiwa nasionalisme untuk menciptakan ketertiban masyarakat; 9. Mengembangkan kerja sama dan mendorong terbentuknya kelembagaan pendidikan tinggi dan penelitian untuk peningkatan kompetensi dan serta pembentukan karakter; 10. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah.
	Penguatan kelembagaan masyarakat adat sampai di tingkat kampung dalam memanfaatkan sumber daya strategis berkelanjutan untuk mendukung kemandirian dan kemampuan berdaya saing.	1. Menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi; 2. Mendorong perkembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi melalui pemberian insentif dan disinsentif; 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 4. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan 5. Meningkatkan pelayanan penunjang kegiatan ekonomi. 6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya lokal;

Tujuan	Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
		7. Menjamin ketahanan pangan dengan mengoptimalkan lahan pangan berkelanjutan; dan 8. Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung inovasi produk unggulan lokal yang berdaya saing.
	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	1. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; 2. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; 3. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan 4. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2021-2041

C. Telaah Grand Desain Kependudukan

Sasaran utama dalam pembangunan kependudukan meliputi tercapainya penduduk tumbuh seimbang, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan terciptanya keluarga yang berkualitas. Untuk mendukung hal ini, disusun berbagai kebijakan yang mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Lima pilar utama menjadi kerangka arah kebijakan:

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengendalian migrasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Fokus kebijakan ini adalah pada perbaikan aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pengurangan kemiskinan, guna menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing di berbagai sektor pembangunan.

3. Pembangunan Keluarga

Pilar ini mengedepankan penguatan ketahanan sosial dan ekonomi keluarga sebagai dasar terbentuknya masyarakat yang harmonis dan mandiri. Pembangunan keluarga juga berorientasi pada nilai-nilai lokal yang mendukung integrasi sosial.

4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Kebijakan ini diarahkan pada pengelolaan migrasi dan distribusi penduduk secara merata untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

5. Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan

Pilar ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi melalui pengembangan Satu Data Kabupaten Mimika (SDKM). Data ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis bukti.

Setelah menetapkan sasaran, arah kebijakan, dan pilar utama pembangunan kependudukan, langkah selanjutnya adalah menyusun roadmap implementasi yang terukur. Roadmap ini menjadi panduan operasional bagi pelaksanaan strategi pembangunan kependudukan Kabupaten Mimika, memastikan setiap langkah kebijakan dapat diwujudkan secara sistematis dan berkelanjutan dalam periode 2025-2045.

Roadmap ini berfungsi sebagai panduan strategis dalam implementasi kebijakan kependudukan yang berfokus pada lima pilar utama: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta pembangunan data dan informasi kependudukan.

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap pada pilar ini mencakup upaya sistematis untuk mengelola jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran dan penurunan angka kematian. Target utama adalah menciptakan pertumbuhan penduduk

yang seimbang dengan daya dukung lingkungan. Strategi yang akan dilakukan mencakup:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk program KB untuk mengurangi angka kelahiran tidak direncanakan.
- b. Menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang baik bagi anak.
- c. Penurunan angka mortalitas melalui peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Roadmap ini menargetkan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Beberapa langkah strategisnya meliputi:

- a. Peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) melalui perluasan akses pendidikan di semua jenjang.
- b. Peningkatan angka harapan hidup dengan memperkuat layanan kesehatan primer, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
- c. Penyediaan pelatihan keterampilan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
- d. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Pembangunan Keluarga

Pilar ini difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga, menciptakan keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri. Roadmap mencakup:

- a. Promosi program keluarga berkualitas dengan memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan keluarga dan pola hidup sehat.
- b. Pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- c. Penyediaan fasilitas penunjang keluarga, seperti pusat kegiatan masyarakat dan layanan konseling keluarga.

4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Pilar ini menargetkan pengelolaan migrasi dan persebaran penduduk untuk menciptakan distribusi yang lebih merata. Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi:

- a. Pengembangan infrastruktur di wilayah pedesaan dan terpencil untuk mengurangi tekanan di daerah perkotaan.
 - b. Penyediaan peluang ekonomi di daerah dengan populasi rendah untuk menarik migrasi ke wilayah tersebut.
 - c. Pengelolaan urbanisasi agar tetap sesuai dengan daya tampung infrastruktur perkotaan.
5. Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan
- Roadmap terakhir difokuskan pada penguatan sistem data kependudukan melalui pengembangan Satu Data Kabupaten Mimika (SDKM). Hal ini mencakup:
- a. Peningkatan kapasitas teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data yang akurat dan terkini.
 - b. Penyediaan pelatihan bagi tenaga kerja pengelola data untuk memastikan kualitas dan keandalan informasi yang tersedia.
 - c. Pengintegrasian data dari berbagai sektor untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti.

D. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Mimika

1. Analisis Muatan Utama KLHS

Daya Dukung dan Tampung Lingkungan. KLHS menunjukkan bahwa ketersediaan air di Mimika relatif besar (sekitar 70,1 miliar m³/tahun) sehingga secara keseluruhan “belum terlampaui”. Namun terdapat *kekurangan kritis* di Distrik Kwamki Narama, Alama, dan Wania, di mana kebutuhan melebihi suplai (misalnya Alama kekurangan 2,2 juta m³/tahun). Sedangkan ketersediaan pangan sangat tidak mencukupi – kebutuhan pangan di setiap distrik jauh melebihi produksi lokal, dengan defisit total 298 miliar kkal/tahun. Artinya, Mimika sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan lokal dan membutuhkan strategi peningkatan produksi serta diversifikasi pangan

Dampak dan Risiko Lingkungan. Produksi sampah domestik di Mimika sangat tinggi (360,8 juta liter/tahun) dengan titik terbesar di Distrik Mimika Baru, Wania, dan Kuala Kencana. Begitu pula lumpur tinja (septik) mencapai 16,6 juta liter/tahun di daerah sama. Tingginya timbulan limbah ini menjadi risiko pencemaran dan kesehatan, mengingat belum ada sistem IPAL komunal di pemukiman. KLHS menekankan perlunya sistem

pengelolaan sampah terpadu (pengurangan, daur ulang) dan pembangunan IPAL/kondominium sanitasi untuk menangani limbah cair.

Layanan Jasa Ekosistem. Alam Mimika menyediakan jasa ekosistem penyediaan yang sangat besar. Kawasan hutan dan lahan produktif mendominasi kategori *sangat tinggi* untuk penyediaan pangan, serat (83% wilayah), bahan bakar (42%), dan sumberdaya genetik (90%). Namun penyediaan air bersih justru hanya kategori *sedang* (37% wilayah), menandakan tantangan kualitas dan ketersediaan. Untuk jasa pengatur, KLHS menemukan cakupan sangat tinggi untuk mitigasi iklim (81% wilayah), pengendalian banjir (62%), pemurnian air (70%), pengolahan limbah (58%), kualitas udara (81%), penyerbukan (88%), dan lain-lain. Dengan luas hutan dan ekosistem alam yang besar, Mimika berperan penting dalam stabilitas iklim, siklus air, dan keragaman hayati. Jasa budaya dan pendukung juga tinggi: estetika alam mendominasi (66% wilayah kategori tinggi), dan layanan pendukung (pembentukan tanah, siklus hara, produksi primer, dukungan keanekaragaman) >80% wilayah kategori *sangat tinggi*. Temuan ini menegaskan kekayaan alam Mimika, sekaligus kebutuhan mengelola sumberdaya secara berkelanjutan (misalnya menjaga kualitas air dan melindungi ekosistem penghasil jasa).

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam. KLHS memeriksa kesesuaian penggunaan lahan dengan fungsi sumberdaya. Hasilnya bervariasi: untuk pangan, kawasan perkebunan memiliki efisiensi tertinggi (72%), sedangkan lahan gambut sangat rendah (28%). Artinya, banyak lahan berpotensi pangan belum dimanfaatkan optimal. Untuk air, pemanfaatan lahan di zona sungai paling efisien (67%), tetapi lahan hutan produksi terbatas rendah efisiensinya. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan perlunya penyesuaian tata ruang: memindahkan kegiatan pertanian ke lahan lebih subur dan melindungi lahan sumber air agar penggunaan sumberdaya alam lebih optimal.

Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim. Analisis bencana hidrometeorologi menunjukkan risiko tinggi. Indeks bahaya banjir Kategori Tinggi menutupi 341.650 ha (mayoritas wilayah berisiko). KLHS mencatat Mimika secara indikatif berisiko tinggi terhadap banjir, sehingga memerlukan perhatian mitigasi (pembangunan drainase, perencanaan tata ruang rawan banjir, sosialisasi kesiapsiagaan). Indeks kerentanan komposit

(SIDIK) menempatkan Mimika pada kategori “*Rentan (Tinggi)*” terhadap perubahan iklim. Faktor ketergantungan pada curah hujan tinggi dan ekosistem rentan membuat adaptasi krusial. Likuifaksi dinilai “Sedang” (705.501 ha), sedangkan kerentanan cuaca ekstrem diperkirakan signifikan. Dengan kata lain, Mimika sangat rentan terhadap banjir, likuifaksi, dan cuaca ekstrem, menuntut strategi adaptasi terpadu berbasis ekosistem.

Keanekaragaman Hayati. Kondisi keanekaragaman di Mimika sangat baik. Kawasan pendukung keanekaragaman hayati dominan kategori *sangat tinggi* (85,83% wilayah). KLHS menyimpulkan Mimika kaya spesies dan habitat, kondisi yang baik bagi keseimbangan ekologi dan kesempatan ekonomi (ekowisata, riset). Temuan ini menegaskan pentingnya pelestarian kawasan hutan (suaka alam, TN Lorentz) dan habitat lain. Area dengan kategori rendah menandakan ancaman degradasi lokal; oleh karena itu perlindungan spesies langka dan restorasi habitat menjadi prioritas.

2. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Dari berbagai analisis di atas, KLHS mengidentifikasi sejumlah isu strategis. Pekerjaan *Eisenhower Matrix* KLHS menyoroti **5 isu Paling Strategis** yang mendesak ditangani dalam RPJMD Mimika 2025–2029:

a. Kualitas Lingkungan Hidup: Pengendalian Degradasi Air dan Limbah untuk Menjamin Keberlanjutan Ekosistem

Isu ini muncul akibat meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam, terutama kualitas air dan lingkungan permukiman. Timbulan sampah dan lumpur tinja di distrik-distrik padat (Mimika Baru, Wania, Kuala Kencana) sangat tinggi, sementara infrastruktur pengolahan limbah masih terbatas. KLHS mencatat degradasi kualitas lingkungan terjadi secara signifikan pada badan air dan wilayah ekosistem kritis, diperparah dengan pencemaran dari aktivitas domestik dan industri. Kondisi ini menuntut langkah strategis dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan perlindungan daerah tangkapan air untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan serta mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas. Isu ini berkaitan langsung dengan TPB 6 (air bersih dan sanitasi), TPB 7 (energi bersih), TPB 11 (kota berkelanjutan), dan TPB 15 (ekosistem daratan).

b. Pangan dan Pertanian: Penguatan Sistem Ketahanan Pangan melalui Pertanian Lokal yang Adaptif dan Berkelanjutan

Isu strategis ini mengacu pada rendahnya kapasitas produksi pangan lokal yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat Mimika. KLHS mencatat bahwa hampir seluruh distrik mengalami defisit ketersediaan pangan, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar sangat tinggi. Lahan potensial belum dimanfaatkan secara optimal, dan efisiensi pertanian masih rendah, terutama di kawasan gambut dan hutan produksi terbatas. Urgensi pengembangan pertanian berkelanjutan menjadi sangat penting, termasuk upaya peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan lokal, dan pemberdayaan petani berbasis kearifan lokal. Langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan kemandirian pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa. Isu ini relevan dengan TPB 2 (tanpa kelaparan) dan TPB 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan).

c. Energi dan Infrastruktur: Pemerataan Akses Energi dan Infrastruktur Dasar yang Ramah Lingkungan dan Rendah Emisi

Masih terdapat banyak wilayah di Mimika, terutama kampung-kampung pedalaman, yang belum mendapatkan akses energi listrik dan air bersih secara layak. Di sisi lain, potensi energi terbarukan seperti mikrohidro dan tenaga surya sangat besar namun belum dimanfaatkan optimal. Sistem transportasi publik dan logistik juga belum ramah lingkungan dan belum mendukung pengurangan emisi karbon. Penyediaan energi bersih, pembangunan infrastruktur air minum, dan penataan transportasi berkelanjutan merupakan strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan tahan terhadap perubahan iklim. Isu ini mendukung pencapaian TPB 7 (energi bersih), TPB 9 (industri dan infrastruktur), serta TPB 11 (permukiman berkelanjutan).

d. Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan: Peningkatan Layanan Dasar yang Inklusif, Berkualitas, dan Responsif terhadap Wilayah Terpencil

Kualitas kesehatan masyarakat dan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Mimika. KLHS menyoroti tingginya prevalensi stunting, gizi buruk, dan penyakit menular seperti

malaria dan TBC, yang berkaitan erat dengan sanitasi buruk dan air bersih yang belum merata. Di sisi lain, kualitas dan pemerataan layanan pendidikan juga belum optimal, terutama bagi masyarakat adat dan penduduk di wilayah sulit dijangkau. Strategi pembangunan harus diarahkan pada penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta program pendidikan kontekstual yang inklusif, menjangkau masyarakat adat, dan berbasis budaya lokal. Isu ini mendukung TPB 3 (kesehatan), TPB 4 (pendidikan), dan TPB 6 (air bersih dan sanitasi).

e. Masalah Sosial dan Ekonomi: Pengurangan Ketimpangan dan Penguatan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal

Isu ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam pencapaian pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan akses terhadap pelayanan publik antara wilayah kota dan kampung menunjukkan adanya kebutuhan untuk menata ulang pendekatan pembangunan ekonomi. KLHS menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat adat, serta peningkatan keterampilan kerja masyarakat produktif. Program pembangunan perlu diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja yang merata, dan memperkuat jaring pengaman sosial. Isu ini beririsan langsung dengan TPB 1 (tanpa kemiskinan), TPB 8 (pekerjaan layak), TPB 10 (pengurangan kesenjangan), dan TPB 16 (institusi yang inklusif).

Kelima isu tersebut saling berkaitan dan mencerminkan tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Mimika dalam mewujudkan visi pembangunan yang berdaya dan berkelanjutan. Oleh karena itu, RPJMD Mimika 2025–2029 harus merespon isu-isu ini melalui rumusan tujuan, sasaran, dan program prioritas yang terukur dan terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Integrasi KLHS ke dalam RPJMD akan memastikan bahwa pembangunan Mimika tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya, termasuk masyarakat adat dan generasi mendatang.

3. Rekomendasi Kebijakan dan Program Pembangunan

Berdasarkan isu di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan dan program yang perlu dimasukkan dalam RPJMD Mimika 2025–2029:

- a. **Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi:** Membangun infrastruktur air minum dan sanitasi layak di seluruh distrik, khususnya di Kwamki Narama, Alama, dan Wania yang kekurangan air. Praktik konservasi DAS dan reboisasi di hulu perlu ditingkatkan untuk menjamin pasokan air jangka panjang. Pembangunan sistem IPAL komunal dan sanitasi permukiman juga prioritas untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan penyakit.
- b. **Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan:** Perluasan lahan pertanian produktif berbasis teknologi (irigasi sederhana, bibit unggul) dan diversifikasi komoditas pangan untuk menutup defisit gizi. Dukungan terhadap petani lokal berupa pendampingan teknologi, perbaikan distribusi dan pasar, serta cadangan pangan daerah sangat penting. Program gerakan tanam, pengembangan perikanan budidaya, dan peternakan desa dapat meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pangan impor.
- c. **Pengelolaan Sampah dan Lingkungan:** Implementasi sistem pengelolaan sampah terpadu (pengurangan, daur ulang, TPA sanitasi) terutama di perkotaan (Mimika Baru, Kuala Kencana, Wania) yang menghasilkan sampah tertinggi. Penguatan regulasi industri agar memasang IPAL dan tidak mencemari air sungai. Penataan zona pemukiman hijau dan ruang terbuka publik, serta kampanye anti-pencemaran industri, mendukung misi infrastruktur hijau.
- d. **Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan:** Memperluas kawasan lindung (hutan produksi terbatas menjadi konservasi) untuk menjaga keanekaragaman hayati yang tinggi. Lakukan restorasi habitat pada area kritis (padang alang, lahan gambut rusak) untuk mendukung siklus hara dan mengurangi risiko kebakaran hutan. Program perlindungan spesies terancam dan pengelolaan kawasan konservasi (termasuk TN Lorentz) wajib diperkuat.
- e. **Adaptasi dan Mitigasi Bencana Iklim:** Membangun prasarana mitigasi banjir seperti drainase dan embung di daerah rawan. Perencanaan tata ruang yang membatasi penggunaan lahan di cekungan sungai kritis.

Sistem peringatan dini banjir dan likuifaksi perlu disosialisasikan di masyarakat. Budaya adaptasi (tanaman tahan banjir, retraining pertanian) harus didorong.

- f. Energi Terbarukan dan Infrastruktur Ramah Lingkungan: Diversifikasi sumber energi (misal mikrohidro, surya skala komunitas) untuk menggantikan BBM fosil serta elektrifikasi pedesaan. Penataan infrastruktur hijau — seperti pembangunan pemukiman sehat (sirkulasi udara, ruang terbuka), dan transportasi publik berbahan bakar bersih mendukung misi infrastruktur berkelanjutan.
- g. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Sosial: Memperkuat program UMKM, wirausaha desa, serta program pelatihan vokasi untuk menciptakan lapangan kerja selaras potensi daerah. Program pro-rakyat (subsidi pangan, akses modal, bantuan sosial) mendukung misi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (pendidikan untuk perempuan, akses keuangan mikro) juga penting untuk pemerataan manfaat pembangunan.
- h. Pemerintahan Terbuka dan Partisipatif: Meningkatkan transparansi pengelolaan SDA (portal data lingkungan, audit lingkungan publik) dan melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan. Kebijakan pengawasan lingkungan yang partisipatif selaras misi tata kelola partisipatif. Penegakan hukum lingkungan dan penyederhanaan izin (memperhatikan arahan PIPPIB KLHK dalam KLHS) dapat direkomendasikan untuk melindungi alam.

E. Isu Strategis Kabupaten Mimika

Berdasarkan tinjauan pada bab 2 terkait gambaran umum daerah, tinjauan keuangan daerah pada bab 3, dan telaah-telaah serta analisis permasalahan maka diperoleh isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Mimika. Adapun isu strategis tersebut disusun dengan memperhatikan 6 poin urgensi, antara lain:

1. Masuk dalam Program Prioritas dan Mendukung visi-misi Kepala Daerah Terpilih;
2. Berdampak Besar Terhadap Pembangunan Daerah;
3. Masuk dalam prioritas pembangunan Provinsi;
4. Masuk dalam prioritas pembangunan Nasional;

5. Masuk Dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) nasional; dan
6. Masuk Dalam indikator SDG's.

Adapun isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Mimika antara lain:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan:
 - a. Meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil.
 - b. Memperbaiki kualitas pendidikan untuk meratakan tingkat pendidikan antar wilayah.
2. Pengembangan Infrastruktur Pendidikan:
 - a. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di seluruh kabupaten.
 - b. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.
3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat:
 - a. Menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai.
 - b. Mencegah dan mengurangi masalah stunting serta penyakit menular dan tidak menular.
4. Pengembangan Ekonomi Lokal:
 - a. Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.
 - b. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk lokal.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
 - b. Memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis geografis dan ekologi distrik.
6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur:
 - a. Memperbaiki infrastruktur dasar di wilayah terpencil.
 - b. Meningkatkan akses transportasi dan komunikasi di seluruh kabupaten.
7. Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan:
 - a. Meningkatkan program kesejahteraan keluarga.
 - b. Memperkuat peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.
8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:
 - a. Mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.

- b. Mengembangkan praktik pertanian, perikanan, dan perkebunan yang berkelanjutan.
9. Penanggulangan Konflik Sosial dan Peningkatan Ketertiban Masyarakat:
- a. Mengurangi tingkat konflik sosial melalui dialog dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat.
10. Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN):
- a. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi ASN.
 - b. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
11. Promosi dan Pengembangan Pariwisata:
- a. Meningkatkan promosi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata yang berkualitas.
 - b. Memperbaiki infrastruktur pariwisata.
12. Pengembangan Teknologi, Inovasi, dan Smart City:
- a. Mendorong percepatan pembangunan Smart City Mimika melalui integrasi SPBE, e-government, dan digitalisasi layanan publik.
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pertanian modern, literasi digital, serta pengelolaan perpustakaan/arsip daerah.
 - c. Memperluas akses komunikasi, internet, dan infrastruktur TIK.
13. Peningkatan Literasi dan Keterampilan Masyarakat:
- a. Meningkatkan literasi masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan.
 - b. Memperbaiki keterampilan dan keahlian masyarakat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
14. Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan:
- a. Melindungi dan mempromosikan budaya lokal.
 - b. Menerapkan kebijakan untuk pelestarian ekosistem lokal dan pengelolaan limbah yang optimal.
15. Peningkatan Keseimbangan Ekonomi dan Pembangunan Berdasarkan Topografi dan Budaya Masyarakat:
- a. Memastikan pembangunan didasarkan pada topografi dan budaya masyarakat setempat.

- b. Mengevaluasi kebijakan pembangunan untuk mencapai keseimbangan ekonomi.
- 16. Peningkatan Ketersediaan Perumahan dan Permukiman Layak
 - a. Menyediakan rumah layak huni dan mengurangi kawasan permukiman kumuh.
 - b. Memastikan akses masyarakat terhadap air bersih dan elektrifikasi.
- 17. Penguatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan kesadaran pentingnya pencatatan sipil.
- 18. Penguatan Ketahanan Sosial dan Penanggulangan PMKS
 - a. Mengurangi jumlah PMKS melalui program penanganan yang lebih efektif.
 - b. Memperluas perlindungan sosial berbasis keluarga dan komunitas.
- 19. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah
 - a. Meningkatkan penyediaan dan distribusi bahan pangan utama.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, perikanan, dan perkebunan.
- 20. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah
 - a. Memperbaiki sistem penyusunan dan pelaporan keuangan daerah.
 - b. Menyinkronkan data keuangan antar perangkat daerah untuk transparansi.

Penyusunan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Mimika memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional melalui Asta Cita, serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah. Hal ini penting agar arah pembangunan di Kabupaten Mimika selaras dengan tujuan pembangunan daerah maupun nasional, sehingga mampu mendorong keterpaduan, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan. Keselarasan tersebut tercermin pada beberapa aspek utama:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Asta Cita menekankan penguatan SDM dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, kesetaraan gender, hingga pemberdayaan pemuda dan disabilitas. Hal ini sejalan dengan Isu Strategis RPJMD Papua Tengah terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta

diakomodasi dalam RPJMD Mimika melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pengembangan infrastruktur pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan literasi serta keterampilan masyarakat.

2. Pengembangan Ekonomi Daerah

Asta Cita menegaskan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, serta pengembangan ekonomi hijau, biru, digital, dan syariah. Papua Tengah menindaklanjuti hal ini dengan isu strategis mengenai pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif, sementara Mimika menerjemahkannya dalam bentuk pengembangan ekonomi lokal, penguatan ketahanan pangan, keseimbangan pembangunan sesuai kondisi topografi dan budaya, hingga hilirisasi berbasis sumber daya alam.

3. Pembangunan Infrastruktur dan Pemerataan

Melanjutkan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu Asta Cita yang selaras dengan fokus Papua Tengah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Mimika mengadopsinya melalui isu peningkatan kualitas infrastruktur, ketersediaan perumahan dan permukiman layak, serta promosi dan pengembangan pariwisata. Dengan demikian, pembangunan fisik diarahkan tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.

4. Stabilitas Keamanan, Tata Kelola, dan Reformasi

Asta Cita menekankan pentingnya memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, serta reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Isu Papua Tengah yang terkait adalah peningkatan stabilitas keamanan daerah. Mimika mengintegrasikannya dalam isu penanggulangan konflik sosial, peningkatan ketertiban masyarakat, peningkatan kualitas ASN, penguatan administrasi kependudukan, serta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

5. Lingkungan, Budaya, dan Keharmonisan Sosial

Asta Cita juga memberi perhatian pada harmonisasi dengan lingkungan, budaya, dan toleransi antarumat beragama. Walaupun Papua Tengah tidak secara eksplisit memasukkannya sebagai isu strategis tersendiri, Mimika menegaskan komitmen tersebut melalui isu pengelolaan sumber

daya alam yang berkelanjutan, pembangunan berwawasan lingkungan, serta keseimbangan pembangunan berbasis budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Isu Strategis RPJMD Kabupaten Mimika telah selaras dengan Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua Tengah, dan juga konsisten dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita. Keselarasan ini akan memperkuat sinergi pembangunan dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Berikut Adalah penyandingan antara Asta Cita, Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua Tengah, dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Mimika:

Tabel 59 Penyandingan Asta Cita, Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua Tengah dengan Isu Strategis RPJMD Mimika

Asta Cita	Isu Strategis RPJMD Papua Tengah	Isu Strategis RPJMD Mimika
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah di Wilayah Papua Tengah	9. Penanggulangan Konflik Sosial dan Peningkatan Ketertiban Masyarakat; 18. Penguatan Ketahanan Sosial dan Penanggulangan PMKS.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang dapat Menyerap Tenaga Kerja	4. Pengembangan Ekonomi Lokal; 15. Peningkatan Keseimbangan Ekonomi dan Pembangunan Berdasarkan Topografi dan Budaya Masyarakat 19. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten	4. Pengembangan Ekonomi Lokal; 6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur; 11. Promosi dan Pengembangan Pariwisata; 16. Peningkatan Ketersediaan

Asta Cita	Isu Strategis RPJMD Papua Tengah	Isu Strategis RPJMD Mimika
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Perumahan dan Permukiman Layak.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan; 2. Pengembangan Infrastruktur Pendidikan; 3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat; 7. Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan; 13. Peningkatan Literasi dan Keterampilan Masyarakat
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang dapat Menyerap Tenaga Kerja	4. Pengembangan Ekonomi Lokal; 8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan; 14. Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang dapat Menyerap Tenaga Kerja; 3. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten	5. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi; 15. Peningkatan Keseimbangan Ekonomi dan Pembangunan Berdasarkan Topografi dan Budaya Masyarakat; 16. Peningkatan Ketersediaan Perumahan dan Permukiman Layak
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah di Wilayah Papua Tengah	10. Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN); 17. Penguatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 20. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah

Asta Cita	Isu Strategis RPJMD Papua Tengah	Isu Strategis RPJMD Mimika
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan; 14. Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan; 15. Peningkatan Keseimbangan Ekonomi dan Pembangunan Berdasarkan Topografi dan Budaya Masyarakat

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi dalam RPJMD merupakan hasil adopsi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan, yang merefleksikan aspirasi politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 adalah penjabaran lima tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045. Sebagai pedoman utama pembangunan jangka panjang, RPJPD menetapkan arah kebijakan strategis yang ingin dicapai dalam periode 20 tahun, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, RPJMD 2025-2029 harus merujuk pada visi dan misi pembangunan jangka panjang (2025-2045) yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD, visi dan misi RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 perlu diselaraskan dengan dinamika isu-isu strategis daerah dan proyeksi kondisi masa depan. Fokus pembangunan pada periode ini diarahkan untuk memperkuat upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, terutama di bidang-bidang strategis seperti pengembangan sumber daya manusia unggul, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbaikan kualitas Kesehatan dan pendidikan, serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Semua ini menjadi dasar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Mimika.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045, pencapaian RPJMD sebelumnya, serta sinergi dengan capaian RPJMN Tahun 2025-2029, visi dan misi RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan tantangan strategis daerah dan dinamika lingkungan pembangunan masa depan.

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 Visi

Adapun rumusan visi pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2025 – 2029 adalah:

**“Terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan,
Terampil, Obyektif dan Berdaya saing menuju : ”GERBANG EMAS”
(Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera)”**

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Mimika 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. **Responsif**, mewujudkan Pelayanan yang memiliki Tanggung Jawab Moral dalam menyelesaikan Tugas dan Tanggung Jawab yang dipercayakan. Dalam konteks ini, akan tertanam “Budaya Malu” bila Gagal menyelesaikan Tugas dan Tanggung Jawab yang diberikan.
2. **Enerjik**, mewujudkan Pelayanan yang memiliki sikap Penuh Semangat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya Pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi kerakyatan serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. **Transparan**, mewujudkan Pelayanan yang memiliki Keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintahan dimana segala Kebijakan Publik yang dijalankan benar-benar terukur (input, output, impact, benefit dan outcome).
4. **Terampil**, mewujudkan Pelayanan yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.
5. **Obyektif**, mewujudkan Pelayanan yang senantiasa Bersikap Netral, Tidak Memiliki Kepentingan Pribadi dan Berimbang dalam mengambil sikap dan keputusan dengan merujuk pada Fakta yang Valid dan Aktual.
6. **Berdaya saing**, mewujudkan Pelayanan yang memiliki semangat dalam membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan

lingkungan fisik yang lebih baik, didukung Sumber Daya Manusia yang Unggul, Profesional, Kompetitif, serta berwawasan ke depan.

Hal yang perlu ditekankan dalam pembangunan Kabupaten Mimika 5 tahun ke depan adalah pentingnya nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam visi yang dirumuskan, khususnya bagaimana proses pencapaian kesejahteraan masyarakat Mimika dapat diwujudkan melalui penguatan sumber daya manusia yang responsif, enerjik, terampil, obyektif, dan berdaya saing. Semua upaya ini diarahkan untuk mendukung visi Kabupaten Mimika, yaitu "Terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Obyektif, dan Berdaya Saing menuju GERBANG EMAS (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera)." Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut melalui gambar berikut:



Gambar 29 Proses Pencapaian Visi Kabupaten Mimika 2025-2029

3.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum tentang langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, ditetapkan 6 (enam) misi untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Keenam misi tersebut dirancang secara strategis untuk memperkuat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029. Adapun 6 (enam) misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi;
2. Mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Mimika melalui peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal serta membuka keterjangkauan publik pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. Mewujudkan keterbukaan informasi pelayanan public dalam mengelola roda pemerintahan yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam Upaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan bagi kepentingan Masyarakat;
4. Mewujudkan Mimika yang sehat dengan transformasi Pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok;
5. Mewujudkan Mimika yang cerdas dengan meningkatkan kualitas Pendidikan sampai ke daerah terpencil dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan manusia;
6. Membuka pusat ekonomi baru dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran dan Pembangunan Mimika.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mimika 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu hingga lima tahun. Penetapan tujuan ini mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah diformulasikan secara terukur, spesifik, realistis, dapat dicapai, dan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, relevansi dengan isu-isu strategis Kabupaten Mimika, serta penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045. Berikut tabel Tujuan, Sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih beserta target kinerja 2025-2030:

Tabel 60 Tujuan, Sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Obyektif dan Berdaya saing menuju : "GERBANG EMAS" (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera)	Meningkatkan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	77,515	78,18	78,845	79,51	80,175	80,84	
			Meningkatnya kompetensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja serta perkembangan teknologi	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,215	70,49	70,765	71,04	71,315	71,59	
			Terwujudnya masyarakat yang inovatif dan produktif melalui pengembangan keterampilan dan pemberdayaan berbasis kreativitas lokal	Persentase industri kreatif terhadap PDRB	1,89	2,01	2,13	2,25	2,37	2,49	
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	19,8	20,574	21,348	22,122	22,896	23,67	
		Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional		Indeks Profesionalitas Aparatur	68,88	71,10	73,33	75,55	77,78	80	
			Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional.	Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan	66	68	70	72	74	76	
			Terwujudnya budaya kerja	Tingkat kepatuhan	58	61	64	67	70	73	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			aparatur yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil	aparatur terhadap standar operasional prosedur (SOP)							
	Mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Mimika melalui peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal serta membuka keterjangkauan publik pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik melalui penguatan birokrasi yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	40,79	44,84	48,89	52,94	56,99	61	
			Terciptanya Kebijakan Pelayanan yang Berkualitas	Persentase Unit Layanan yang Memiliki dan Menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP)	70	80	90	100	100	100	
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah	SAKIP	58,35 (CC)	60,72 (B)	63,09 (B)	65,46 (B)	67,83 (B)	70,2 (BB)	
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				Cakupan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM (%)	35	37,21	39,42	41,63	43,84	45,5	
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Inovasi Daerah	Peringkat Indeks Inovasi Daerah	394	371	348	325	302	279	
				Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	5,7	5,76	5,82	5,88	5,94	6	
				Indeks ekonomi Hijau	77,87	78,44	79,02	79,59	80,17	80,74	
			Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	95.194.934,70	99.859.486,50	104.802.531,10	110.042.657,70	115.599.811,90	121.495.402,30	
				Kontribusi sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian terhadap total PDRB	1,45	1,85	2,24	2,64	3,03	3,43	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (% total penduduk)	0,28	0,336	0,392	0,448	0,504	0,56	
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (% total penduduk)	0,11	0,136	0,162	0,188	0,214	0,24	
			Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal	PDRB per kapita	467.980	490.911	515.211	540.971	568.290	597.273	
	Mewujudkan keterbukaan informasi pelayanan public dalam mengelola roda pemerintahan yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam Upaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan bagi kepentingan Masyarakat	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik		SPBE	2	2,40	2,80	3,20	3,60	4	
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Transformasi Digital	28	29,56	31,13	32,69	34,26	35,82	
				Persentase pemenuhan fasilitas pendukung Smart City (%)	40,94	42,99	45,04	47,08	49,13	51,18	
				Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	61	63	65	67	69	71	
			Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,49 (C)	76,82 (B)	78,15 (B)	79,48 (B)	80,81 (B)	82,14 (B)	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			publik yang responsif, transparan, dan akuntabel	Indeks Pelayanan Publik	2,79 (C)	2,93 (C)	3,08 (B)	3,22 (B)	3,37 (B)	3,51 (B)	
				Tingkat Kepercayaan Publik	60	64	68	72	76	80	
	Mewujudkan Mimika yang sehat dengan transformasi Pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatkn angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta layanan sosial dasar untuk mendukung peningkatan angka harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat		Indeks Kesehatan	82,17	82,63	83,1	83,57	84,03	84,5	
				Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	
			Meningkatnya ketersediaan layanan kesehatan yang inklusif	Usia Harapan Hidup	74,3	74,58	74,86	75,14	75,42	75,7	
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup	Persentase PMKS yang tertangani	45	50	55	60	65	70	
		Meningkatkan kualitas, konektivitas, dan pemerataan infrastruktur dasar serta perumahan dan permukiman layak		Indeks Konektivitas	0,4	0,44	0,48	0,52	0,56	0,6	
				Indeks Kualitas Infrastruktur	56	57	58	59	60	61	
			Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar yang menunjang	Presentase jalan dalam kondisi mantap (%)	37,53	39,23	40,93	42,64	44,34	46,04	
				Rasio Konektivitas	0,60	0,66	0,74	0,82	0,90	0,95	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pelayanan publik dan aktivitas masyarakat di seluruh wilayah	transportasi laut dan udara							
				Cakupan kampung yang berlistrik (%)	55,41	56,28	57,15	58,03	58,90	59,77	
			Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase kepemilikan rumah layak huni (%)	74,2	74,72	75,25	75,77	76,30	76,82	
		Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan		Indeks Pembangunan Masyarakat	3	3,052	3,104	3,156	3,208	3,26	
				Indeks Pembangunan hukum	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	0,32	
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi kehidupan masyarakat	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	40,94	42,99	45,04	47,08	49,13	51,18	
			Mewujudkan Mimika yang cerdas dengan meningkatkan kualitas Pendidikan sampai ke daerah	Indeks Pendidikan	75,3	76,2	77	77,9	78,8	79,7	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	terpencil dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan manusia		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan bagi semua kelompok usia	Harapan Lama Sekolah	14,2	14,28	14,36	14,44	14,52	14,6	
	Membuka pusat ekonomi baru dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran dan Pembangunan Mimika	Mewujudkan pusat ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,85	4,9	4,95	5	5,05	5,1	
				Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	2,26	2,312	2,364	2,416	2,468	2,52	
				Indeks Gini	0,32	0,317	0,313	0,31	0,306	0,303	
				Indeks Ketimpangan Wilayah Williamson (indeks)	1,5	1,386	1,272	1,158	1,044	0,93	
				Proporsi Kota Timika terhadap PDRB Provinsi Papua Tengah (%)	5,12	5,536	5,952	6,368	6,784	7,2	
				Tingkat Inflasi (%)	4,27	4,134	3,998	3,862	3,726	3,59	
				Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	83,12	81,818	80,516	79,214	77,912	76,61	
			Terciptanya peluang usaha baru yang berbasis potensi lokal untuk menurunkan angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	13,466	12,752	12,038	11,324	10,61	9,896	
			Meningkatnya lapangan kerja melalui pengembangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,425	6,15	5,875	5,6	5,325	5,05	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pusat ekonomi baru untuk mengurangi angka pengangguran								

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

3.2.1 Strategi

Strategi pembangunan daerah Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang relevan dengan pembangunan di Kabupaten Mimika. Selain itu, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan dirancang sebagai satu kesatuan kerangka logis yang menjadi fondasi arsitektural pembangunan daerah. Untuk mengoptimalkan penentuan strategi ini, dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

Dalam konteks penjabaran ini, lingkungan internal menggambarkan semua kondisi dan hal yang berada dalam batas wilayah administratif Kabupaten Mimika yang berfungsi sebagai kekuatan atau sebaliknya merupakan kelemahan yang perlu dibenahi agar dapat dikembangkan Misi guna mewujudkan Visi yang dicanangkan. Selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kekuatan

- 1) Tersedianya Sumber Daya Alam berupa Tambang dan Bahan Galian lainnya yang sangat potensial memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah;
- 2) Tersedianya potensi Sumber Daya Perikanan Laut;
- 3) Tersedianya aksesibilitas transportasi pada skala nasional dan internasional melalui Bandara Udara Mozes Kilangin yang didukung oleh Perusahaan Penerbangan;
- 4) Adanya Taman Nasional Lorentz yang berkontribusi pada Daya Tarik Wisata dalam skala lokal, nasional dan internasional;
- 5) Adanya dukungan fasilitas transportasi laut yang relatif lancar;
- 6) Semakin terbukanya aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara pada titik-titik pertumbuhan yang akan dikembangkan;
- 7) Keberadaan perusahaan multinasional PT.Freeport Indonesia dan mitra perusahaan lainnya yang beroperasi di area tambang PT. Freeport Indonesia;
- 8) Kedekatan daerah ini dengan Australia dan Negara-negara di Asia Pasifik yang berpeluang pada pengembangan ekonomi lokal;

- 9) Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi;
- 10) Peningkatan pendapatan yang relatif tinggi yang ditunjukkan oleh Peningkatan PDRB per Kapita tanpa Tambang;
- 11) Tersedianya lembaga keuangan perbankan yang terpusat di Distrik Mimika Baru, baik Bank milik Pemerintah maupun Swasta sebagai salah satu indikator tingginya perputaran ekonomi di Kabupaten Mimika.
- 12) Komitmen Pemda mengembangkan SPBE dan Smart City.
- 13) Adanya dukungan dari YPMAK (Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro) sebagai mitra PT Freeport Indonesia, yang dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah

b. Kelemahan

- 1) Secara umum, kualitas Sumber Daya Manusia belum memenuhi standar yang ditargetkan dalam persaingan global baik dari sisi keterampilan, pengetahuan maupun sikap mental, pola pikir dan etos kerja;
- 2) Munculnya keresahan sebagai akibat dari adanya kesenjangan sosial di masyarakat;
- 3) Masih rendahnya daya beli masyarakat dan sangat rentan pada krisis ekonomi;
- 4) Masih lemahnya pengelolaan dana masyarakat yang sesungguhnya memiliki potensi yang tinggi untuk memacu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika;
- 5) Rendahnya skala usaha tanaman perkebunan dan perdagangan meskipun peluang potensi untuk pengembangan cukup menjanjikan, seperti: Kopi, Kelapa, Kelapa Sawit, Cokelat dan Karet.
- 6) Masih rendahnya kondisi kesehatan masyarakat dan merebaknya berbagai jenis seperti penyakit malaria, infeksi saluran pernafasan akut khususnya penyebaran HIV/AIDS;
- 7) Belum terjangkaunya Sarana Penerangan (Listrik), Sarana Komunikasi, dan Sarana Transportasi Darat ke daerah terpencil;

- 8) Rusaknya lingkungan hidup sebagai dampak negatif dari “tailing” sebagai dampak dari pembangunan dan aktivitas PT. Freeport Indonesia;
- 9) Rawannya kondisi keamanan, kohesi sosial (hubungan antar etnis) dan masalah disintegrasi yang masih rentan sehingga mempengaruhi niat investor untuk berinvestasi;
- 10) Masih lemahnya penegakan supremasi hukum oleh aparat yang mengakibatkan meningkatnya tindakan kriminalitas dan pelanggaran HAM serta kekerasan terhadap perempuan;
- 11) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah akibat dari lemahnya Manajemen Pelayanan Publik dan Pembangunan
- 12) Literasi digital masyarakat masih rendah, sistem data antar-OPD belum terintegrasi.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal adalah semua kondisi atau faktor yang dapat menjadi Peluang atau sebaliknya Ancaman bagi Kabupaten Mimika dalam upaya mengemban Misi yang ingin dijalankan guna mewujudkan Visi yang ingin dicapai.

a. Peluang

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberi sumber dana bagi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah telah memberikan kekuasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat mendorong Kabupaten Mimika untuk lebih cepat membangun;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 5) Adanya kebijakan nasional tentang Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang memungkinkan Kabupaten Mimika berpeluang menjadi pusat pertumbuhan regional di Tanah Papua;
- 6) Adanya peluang digitalisasi layanan publik.

b. Tantangan

- 1) Adanya keterbatasan kewenangan dalam mengelola dan mengeksplorasi hasil laut oleh peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional;
- 2) Adanya kompetisi antar daerah dalam menarik investor;
- 3) Masuknya imigran dari luar Kabupaten Mimika yang cukup tinggi;
- 4) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Mimika dalam mengkritisi kinerja Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Mimika;
- 5) Adanya tindakan yang tidak adil dari Pihak Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat lokal;
- 6) Adanya wacana yang berkembang untuk terpisah dari NKRI sehingga berdampak pada ketentraman masyarakat;
- 7) Adanya tuntutan yang tinggi dari Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus tentang Kinerja Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Publik yang merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah;
- 8) Adanya tuntutan Masyarakat Adat khususnya 2 Suku Lokal dan 5 Suku Kekerabatan yang secara keseluruhan menuntut agar Pemerintahan Kabupaten Mimika benar-benar secara profesional dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat, mematuhi aspirasi mereka dan memperhatikan keanekaragaman Papua yang merupakan tantangan berat bagi Aparat Pemerintahan di Kabupaten Mimika lima taun kedepan.
- 9) Gap digital antar wilayah, potensi resistensi SDM yang belum siap dengan transformasi digital

Strategi pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 disusun dengan berlandaskan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta memperhatikan permasalahan utama, isu-isu strategis, dan

hasil analisis kondisi internal maupun eksternal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dirumuskan sejumlah strategi pembangunan yang relevan untuk menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Strategi-strategi ini menjadi pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan agar berlangsung lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Berikut adalah daftar strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode 2025–2029 yang disandingkan pada setiap sasaran RPJMD:

Tabel 61 Strategi

Sasaran RPJMD	Strategi
Meningkatnya kompetensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja serta perkembangan teknologi	Penguatan pelatihan vokasional berbasis digital yang relevan dengan kebutuhan industri strategis
	Pengembangan pendidikan inklusif dan terjangkau bagi semua kalangan
	Pengembangan fasilitas pendidikan yang dapat diakses semua kelompok usia
Terwujudnya masyarakat yang inovatif dan produktif melalui pengembangan keterampilan dan pemberdayaan berbasis kreativitas lokal	Pengembangan kemitraan pemerintah, universitas, dan industri untuk mendukung inkubasi bisnis dan pusat inovasi
	Pengembangan klaster ekonomi mikro berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan)
	Penguatan koperasi dan usaha bersama masyarakat
Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional	Penguatan pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan kepemimpinan ASN
	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui pelatihan reguler tentang good governance dan anti-korupsi
Terwujudnya budaya kerja aparatur yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil	Penguatan sistem evaluasi kinerja berbasis hasil melalui platform Smart Governance
	Penguatan standardisasi prosedur dan mekanisme pengukuran kualitas pelayanan publik
Terciptanya kebijakan pelayanan yang berkualitas	Penguatan standar prosedur pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat
	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik dalam pelayanan prima dan pengelolaan umpan balik masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Penguatan kapasitas aparatur dalam akuntabilitas dan transparansi kinerja
	Peningkatan keterbukaan data publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Sasaran RPJMD	Strategi
Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi digital terintegrasi
	Pengembangan portal Smart City Mimika sebagai pusat informasi publik
Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan teknis dan akses pasar
	Perluasan akses permodalan dan pendampingan usaha melalui kemitraan strategis
	Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat industri untuk mendorong investasi
Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal	Pengembangan usaha mikro dan koperasi berbasis sumber daya lokal
	Penguatan promosi dan digitalisasi pemasaran produk lokal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik	Optimalisasi implementasi SPBE dalam seluruh proses administrasi pemerintahan daerah
	Integrasi sistem informasi antar-OPD untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data
	Penguatan infrastruktur digital dan keamanan siber untuk menjamin keberlanjutan layanan SPBE
	Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan SPBE melalui pelatihan dan pendampingan teknis
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel	Penguatan digitalisasi layanan publik
	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik dalam responsivitas dan transparansi
Meningkatnya ketersediaan layanan kesehatan yang inklusif	Pengembangan infrastruktur kesehatan dan perluasan akses layanan di wilayah pelosok
	Peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat
	Penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup	Penguatan program pemberdayaan sosial inklusif
	Fasilitasi perlindungan sosial bagi kelompok miskin, disabilitas, lansia, perempuan, dan anak
Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar yang menunjang pelayanan	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, listrik)
	Modernisasi infrastruktur transportasi dan logistik

Sasaran RPJMD	Strategi
publik dan aktivitas masyarakat di seluruh wilayah	
Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat	Pengembangan permukiman layak huni dan ramah lingkungan
	Peningkatan akses utilitas dasar di kawasan permukiman
	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan rehabilitasi kawasan terdampak aktivitas pertambangan
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi kehidupan masyarakat	Peningkatan kapasitas aparat ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
	Penguatan sistem deteksi dini terhadap konflik sosial dan kriminalitas
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal	Penguatan sosialisasi dan insentif partisipasi sekolah
	Penyediaan program beasiswa dan dukungan pendidikan bagi keluarga miskin
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan bagi semua kelompok usia	Penyediaan sarana pendidikan di daerah terpencil
	Pengembangan digitalisasi pembelajaran untuk memperluas akses pendidikan
Terciptanya peluang usaha baru yang berbasis potensi lokal untuk menurunkan angka kemiskinan	Pengembangan usaha mikro berbasis kearifan lokal
	Fasilitasi pendampingan dan akses modal bagi rumah tangga miskin
Meningkatnya lapangan kerja melalui pengembangan pusat ekonomi baru untuk mengurangi angka pengangguran	Pengembangan kawasan industri dan pusat ekonomi daerah
	Peningkatan konektivitas transportasi untuk mendukung investasi

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan bentuk nyata dari upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan daerah berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan tahapan pembangunan selama lima tahun masa

kepemimpinan kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Pada skala yang lebih luas, arah kebijakan ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045, yang mencakup rangkaian tahapan pembangunan selama 20 tahun, dibagi menjadi empat periode lima tahunan. Tahapan dan prioritas yang dirancang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan pada penyelesaian permasalahan dan isu strategis yang relevan di setiap periode. Meskipun fokus program prioritas berbeda pada setiap tahap, keseluruhan program tetap saling terhubung dan konsisten dari satu periode ke periode berikutnya untuk mencapai sasaran lima tahunan RPJMD serta tujuan jangka panjang.

Dalam RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029, penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan menyinergikan berbagai dokumen perencanaan, seperti RPJMN, RPJPD, dan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya, untuk memastikan keselarasan antarprogram pembangunan lintas periode dan tingkatan pemerintahan. Proses penyusunan ini harus berlandaskan pada visi dan misi kepala daerah terpilih, yaitu "Terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Obyektif, dan Berdaya Saing menuju GERBANG EMAS (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera)." Selain itu, seluruh potensi, peluang, tantangan, dan ancaman yang mungkin muncul selama periode pembangunan lima tahun perlu diperhitungkan secara komprehensif. Antisipasi terhadap berbagai kemungkinan, baik peluang positif maupun tantangan negatif, disiapkan secara matang dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan kewilayahan di Kabupaten Mimika.

Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029 harus berdasarkan proyeksi pembangunan yang terencana, evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya, dan kajian strategis untuk menggambarkan profil dan potensi daerah di masa depan. Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, berikut adalah arah kebijakan untuk mendukung setiap sasaran dan strategi pembangunan daerah. Berikut arah kebijakan yang mendukung setiap strategi dan sasaran pembangunan Kabupaten Mimika 2025 – 2029:

Tabel 62 Arah Kebijakan

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kompetensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja serta perkembangan teknologi	Penguatan pelatihan vokasional berbasis digital yang relevan dengan kebutuhan industri strategis	Menyediakan dana subsidi untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor strategis ekonomi lokal
		Memperkuat kolaborasi dengan PT Freeport Indonesia dan YPMK untuk penyediaan beasiswa, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi
	Pengembangan pendidikan inklusif dan terjangkau bagi semua kalangan	Memperluas akses beasiswa dan bantuan biaya pendidikan nonformal/informal bagi kelompok kurang mampu
	Pengembangan fasilitas pendidikan yang dapat diakses semua kelompok usia	Pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan di wilayah terpencil dan sulit dijangkau
Terwujudnya masyarakat yang inovatif dan produktif melalui pengembangan keterampilan dan pemberdayaan berbasis kreativitas lokal	Pengembangan kemitraan pemerintah, universitas, dan industri untuk mendukung inkubasi bisnis dan pusat inovasi	Menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal untuk usaha rintisan dan UMKM yang inovatif, guna mendorong kreativitas dan produktivitas berbasis kreativitas lokal
	Pengembangan klaster ekonomi mikro berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan)	Memberikan fasilitasi kredit lunak dan bantuan teknis untuk klaster ekonomi mikro, mendukung pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan lokal
	Penguatan koperasi dan usaha bersama masyarakat	Memberikan insentif pajak dan bantuan modal untuk koperasi dan usaha bersama yang menggunakan sumber daya lokal, memperkuat ekonomi berbasis masyarakat

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional	Penguatan pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan kepemimpinan ASN	Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur, termasuk beasiswa studi lanjutan dan pelatihan spesialisasi
	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui pelatihan reguler tentang good governance dan anti-korupsi	Menyelenggarakan pelatihan rutin tentang tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pencegahan korupsi bagi aparatur
Terwujudnya budaya kerja aparatur yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil	Penguatan sistem evaluasi kinerja berbasis hasil melalui platform Smart Governance	Mengadopsi teknologi pemerintahan elektronik untuk transparansi dan efisiensi dalam layanan dan tata kelola aparatur sipil
	Penguatan standardisasi prosedur dan mekanisme pengukuran kualitas pelayanan publik	Pembentukan badan pengawas independen untuk audit dan laporan kualitas layanan publik, memastikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan akuntabel
Terciptanya kebijakan pelayanan yang berkualitas	Penguatan standar prosedur pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat	Menetapkan standar pelayanan publik di setiap OPD sesuai kebutuhan masyarakat dan melakukan evaluasi berkala
	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik dalam pelayanan prima dan pengelolaan umpan balik masyarakat	Pengembangan platform online untuk penerimaan dan pengelolaan keluhan serta saran dari masyarakat, memperbaiki pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Penguatan kapasitas aparatur dalam akuntabilitas dan transparansi kinerja	Memperkuat lembaga pengawasan dan memberikan akses publik untuk mengawasi kinerja pemerintah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
	Peningkatan keterbukaan data	Kerjasama dengan penyedia layanan internet

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
	publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	dan telekomunikasi untuk memperluas cakupan dan menurunkan biaya akses, meningkatkan ketersediaan informasi publik
		Pengembangan dashboard data daerah yang dapat diakses publik secara transparan
Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi digital terintegrasi	Mengalokasikan dana anggaran daerah untuk proyek-proyek inovasi yang memperbaiki layanan publik dan ekonomi lokal
	Pengembangan portal Smart City Mimika sebagai pusat informasi publik	Pendirian command center Smart City Mimika untuk mengelola data, informasi, dan layanan publik digital
Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan teknis dan akses pasar	Menyelenggarakan program pelatihan manajemen usaha dan digital marketing bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing
	Perluasan akses permodalan dan pendampingan usaha melalui kemitraan strategis	Optimalisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat melalui dukungan pendanaan YPMAK dan CSR PT Freeport Indonesia
	Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat industri untuk mendorong investasi	Memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan untuk perusahaan yang berinvestasi di zona ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal	Pengembangan usaha mikro dan koperasi berbasis sumber daya lokal	Menerapkan program hibah dan bantuan teknis untuk pengembangan usaha mikro dan kecil, menurunkan angka kemiskinan melalui peluang usaha baru

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
	Penguatan promosi dan digitalisasi pemasaran produk lokal	Fasilitasi promosi produk lokal melalui marketplace digital dan pameran perdagangan tingkat regional maupun nasional
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik	Optimalisasi implementasi SPBE dalam seluruh proses administrasi pemerintahan daerah	Penguatan penerapan SPBE dan integrasi layanan digital sebagai bagian dari Smart City Mimika
	Integrasi sistem informasi antar-OPD untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data	Pengembangan sistem terpadu antar-OPD yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data
	Penguatan infrastruktur digital dan keamanan siber untuk menjamin keberlanjutan layanan SPBE	Penyediaan perangkat teknologi, jaringan, dan sistem keamanan siber untuk menjamin keberlanjutan layanan digital pemerintahan
	Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan SPBE melalui pelatihan dan pendampingan teknis	Pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi bagi aparatur dalam pengelolaan sistem SPBE
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel	Penguatan digitalisasi layanan publik	Pengembangan aplikasi layanan publik terpadu yang mudah diakses masyarakat
	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik dalam responsivitas dan transparansi	Pelatihan customer service dan mekanisme feedback publik bagi petugas pelayanan publik
Meningkatnya ketersediaan layanan kesehatan yang inklusif	Pengembangan infrastruktur kesehatan dan perluasan akses layanan di wilayah pelosok	Memberikan insentif dan pendanaan untuk pembangunan fasilitas kesehatan baru dan perbaikan yang ada

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat	Menyelenggarakan kampanye kesehatan, vaksinasi, dan program pencegahan penyakit endemik
	Penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas	Mendorong kader kesehatan lokal dan posyandu aktif untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup	Penguatan program pemberdayaan sosial inklusif	Memberikan dukungan program pemberdayaan bagi kelompok rentan melalui dana APBD dan CSR
	Fasilitasi perlindungan sosial bagi kelompok miskin, disabilitas, lansia, perempuan, dan anak	Menyediakan bantuan sosial dan layanan perlindungan hukum bagi kelompok miskin, disabilitas, lansia, perempuan, dan anak
Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar yang menunjang pelayanan publik dan aktivitas masyarakat di seluruh wilayah	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, listrik)	Menyediakan dana dari anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk proyek infrastruktur strategis
	Modernisasi infrastruktur transportasi dan logistik	Memfasilitasi kerjasama dengan investor swasta untuk pendanaan dan operasi infrastruktur, mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik
Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat	Pengembangan permukiman layak huni dan ramah lingkungan	Memberikan fasilitasi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	Peningkatan akses utilitas dasar di kawasan permukiman	Penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi di kawasan permukiman
	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan rehabilitasi kawasan terdampak	Program rehabilitasi lingkungan terdampak tailing bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dan mitra lainnya

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
	aktivitas pertambangan	
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi kehidupan masyarakat	Peningkatan kapasitas aparat ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Penguatan kapasitas Linmas, Satpol PP, dan aparat perlindungan masyarakat melalui pelatihan dan sarana operasional
	Penguatan sistem deteksi dini terhadap konflik sosial dan kriminalitas	Pengembangan sistem deteksi dini berbasis komunitas dan adat untuk mencegah konflik sosial dan kriminalitas
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal	Penguatan sosialisasi dan insentif partisipasi sekolah	Meningkatkan anggaran pendidikan dan menyediakan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu
	Penyediaan program beasiswa dan dukungan pendidikan bagi keluarga miskin	Menyediakan bantuan pendidikan berupa beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi keluarga miskin
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan bagi semua kelompok usia	Penyediaan sarana pendidikan di daerah terpencil	Menyediakan dana untuk renovasi dan perluasan sekolah, serta pelatihan guru
	Pengembangan digitalisasi pembelajaran untuk memperluas akses pendidikan	Pengembangan platform pembelajaran daring dan penyediaan perangkat TIK di sekolah
Terciptanya peluang usaha baru yang berbasis potensi lokal untuk menurunkan angka kemiskinan	Pengembangan usaha mikro berbasis kearifan lokal	Menerapkan program hibah dan bantuan teknis untuk pengembangan usaha mikro dan kecil, menurunkan angka kemiskinan melalui peluang usaha baru
	Fasilitasi pendampingan dan akses modal bagi rumah tangga miskin	Memberikan pendampingan usaha dan akses kredit mikro bagi rumah tangga miskin
Meningkatnya lapangan kerja melalui pengembangan pusat ekonomi baru untuk	Pengembangan kawasan industri dan pusat ekonomi daerah	Memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan untuk perusahaan yang berinvestasi di zona

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
mengurangi angka pengangguran		ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
	Peningkatan konektivitas transportasi untuk mendukung investasi	Peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung mobilitas barang dan tenaga kerja

Berdasarkan tabel di atas maka arah kebijakan Kabupaten Mimika pada periode 2025 – 2029 dapat adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dana subsidi untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor strategis ekonomi lokal
2. Memperkuat kolaborasi dengan PT Freeport Indonesia dan YPMAK untuk penyediaan beasiswa, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi
3. Memperluas akses beasiswa dan bantuan biaya pendidikan nonformal/informal bagi kelompok kurang mampu
4. Pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan di wilayah terpencil dan sulit dijangkau
5. Menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal untuk usaha rintisan dan UMKM yang inovatif, guna mendorong kreativitas dan produktivitas berbasis kreativitas lokal
6. Memberikan fasilitasi kredit lunak dan bantuan teknis untuk klaster ekonomi mikro, mendukung pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan lokal
7. Memberikan insentif pajak dan bantuan modal untuk koperasi dan usaha bersama yang menggunakan sumber daya lokal, memperkuat ekonomi berbasis masyarakat
8. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur, termasuk beasiswa studi lanjutan dan pelatihan spesialisasi
9. Menyelenggarakan pelatihan rutin tentang tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pencegahan korupsi bagi aparatur
10. Mengadopsi teknologi pemerintahan elektronik untuk transparansi dan efisiensi dalam layanan dan tata kelola aparatur sipil

11. Pembentukan badan pengawas independen untuk audit dan laporan kualitas layanan publik, memastikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan akuntabel
12. Menetapkan standar pelayanan publik di setiap OPD sesuai kebutuhan masyarakat dan melakukan evaluasi berkala
13. Pengembangan platform online untuk penerimaan dan pengelolaan keluhan serta saran dari masyarakat, memperbaiki pelayanan publik
14. Memperkuat lembaga pengawasan dan memberikan akses publik untuk mengawasi kinerja pemerintah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
15. Kerjasama dengan penyedia layanan internet dan telekomunikasi untuk memperluas cakupan dan menurunkan biaya akses, meningkatkan ketersediaan informasi publik
16. Pengembangan dashboard data daerah yang dapat diakses publik secara transparan
17. Mengalokasikan dana anggaran daerah untuk proyek-proyek inovasi yang memperbaiki layanan publik dan ekonomi lokal
18. Pendirian command center Smart City Mimika untuk mengelola data, informasi, dan layanan publik digital
19. Menyelenggarakan program pelatihan manajemen usaha dan digital marketing bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing
20. Optimalisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat melalui dukungan pendanaan YPMK dan CSR PT Freeport Indonesia
21. Memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan untuk perusahaan yang berinvestasi di zona ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
22. Menerapkan program hibah dan bantuan teknis untuk pengembangan usaha mikro dan kecil, menurunkan angka kemiskinan melalui peluang usaha baru
23. Fasilitasi promosi produk lokal melalui marketplace digital dan pameran perdagangan tingkat regional maupun nasional
24. Penguatan penerapan SPBE dan integrasi layanan digital sebagai bagian dari Smart City Mimika
25. Pengembangan sistem terpadu antar-OPD yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data

26. Penyediaan perangkat teknologi, jaringan, dan sistem keamanan siber untuk menjamin keberlanjutan layanan digital pemerintahan
27. Pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi bagi aparatur dalam pengelolaan sistem SPBE
28. Pengembangan aplikasi layanan publik terpadu yang mudah diakses masyarakat
29. Pelatihan customer service dan mekanisme feedback publik bagi petugas pelayanan publik
30. Memberikan insentif dan pendanaan untuk pembangunan fasilitas kesehatan baru dan perbaikan yang ada
31. Menyelenggarakan kampanye kesehatan, vaksinasi, dan program pencegahan penyakit endemik
32. Mendorong kader kesehatan lokal dan posyandu aktif untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat
33. Memberikan dukungan program pemberdayaan bagi kelompok rentan melalui dana APBD dan CSR
34. Menyediakan bantuan sosial dan layanan perlindungan hukum bagi kelompok miskin, disabilitas, lansia, perempuan, dan anak
35. Menyediakan dana dari anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk proyek infrastruktur strategis
36. Memfasilitasi kerjasama dengan investor swasta untuk pendanaan dan operasi infrastruktur, mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik
37. Memberikan fasilitasi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
38. Penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi di kawasan permukiman
39. Program rehabilitasi lingkungan terdampak tailing bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dan mitra lainnya
40. Penguatan kapasitas Linmas, Satpol PP, dan aparat perlindungan masyarakat melalui pelatihan dan sarana operasional
41. Pengembangan sistem deteksi dini berbasis komunitas dan adat untuk mencegah konflik sosial dan kriminalitas
42. Meningkatkan anggaran pendidikan dan menyediakan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu

43. Menyediakan bantuan pendidikan berupa beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi keluarga miskin
44. Menyediakan dana untuk renovasi dan perluasan sekolah, serta pelatihan guru
45. Pengembangan platform pembelajaran daring dan penyediaan perangkat TIK di sekolah
46. Menerapkan program hibah dan bantuan teknis untuk pengembangan usaha mikro dan kecil
47. Memberikan pendampingan usaha dan akses kredit mikro bagi rumah tangga miskin
48. Memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan untuk perusahaan yang berinvestasi di zona ekonomi baru
49. Peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung mobilitas barang dan tenaga kerja

Berdasarkan 49 arah kebijakan yang telah disusun untuk RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 - 2029, tema pembangunan tahunan atau penahapan pembangunan tahunan RPJMD bisa diarahkan untuk mencerminkan fokus strategis yang memprioritaskan aspek-aspek tertentu dari rencana tersebut setiap tahunnya. Berikut adalah penahapan pembangunan setiap tahun Kabupaten Mimika:

Tabel 63 Penahapan Pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Fondasi Pembangunan melalui Peningkatan SDM, Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, dan Penyediaan Infrastruktur Dasar	Akselerasi Ekonomi Kerakyatan berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik	Pemantapan Hilirisasi dan Diversifikasi Ekonomi Daerah, Penguatan Kawasan Industri dan Infrastruktur Strategis, serta Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemantapan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, serta Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Konsolidasi Daya Saing Daerah melalui Tata Kelola Digital, Ekonomi Berkelanjutan, dan Peningkatan Kualitas Hidup Menuju GERBANG EMAS

Berikut penjelasan penahapan pembangunan setiap tahun:

1. Tahun 2026: Penguatan Fondasi Pembangunan melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, dan Penyediaan Infrastruktur Dasar

Tahun pertama periode RPJMD difokuskan untuk membangun fondasi yang kuat. Prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat, serta pembenahan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar dilakukan secara lebih masif untuk menjamin akses layanan dasar masyarakat di seluruh wilayah. Penekanan tema ini dimaksudkan agar Mimika memiliki pijakan yang kokoh dalam melaksanakan pembangunan pada tahun-tahun selanjutnya. Walaupun porsi terbesar diarahkan pada penguatan fondasi, seluruh urusan pembangunan lain tetap berjalan sesuai perannya masing-masing, sehingga agenda pembangunan tetap berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan.

2. Tahun 2027: Akselerasi Ekonomi Kerakyatan berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik

Memasuki tahun kedua, pembangunan dititikberatkan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Penguatan UMKM, koperasi, dan sektor-sektor produktif masyarakat menjadi fokus utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada saat yang sama, digitalisasi pelayanan publik dipercepat untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Tema ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas layanan publik. Walaupun arah pembangunan tahun ini lebih dominan pada sektor ekonomi rakyat dan digitalisasi, seluruh urusan pembangunan lainnya tetap dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga kesinambungan pembangunan daerah secara menyeluruh tetap terjaga.

3. Tahun 2028: Pemantapan Hilirisasi dan Diversifikasi Ekonomi Daerah, Penguatan Kawasan Industri dan Infrastruktur Strategis, serta Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Tahun ketiga menjadi momentum transformasi ekonomi daerah. Hilirisasi sumber daya alam, diversifikasi ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan penguatan infrastruktur strategis menjadi prioritas utama. Di sisi lain, inovasi tata kelola pemerintahan terus diperdalam untuk mendukung pembangunan berbasis data dan teknologi. Tema ini menekankan pentingnya perubahan struktur ekonomi agar Mimika lebih berdaya saing, tidak hanya bergantung pada satu sektor. Walaupun fokus pembangunan tahun ini terletak pada ekonomi dan tata kelola, urusan pembangunan lainnya tetap dilaksanakan secara paralel sesuai tugas dan fungsinya, sehingga hasil pembangunan tetap merata dan tidak meninggalkan sektor-sektor penting lainnya.

4. Tahun 2029: Pemantapan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, serta Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada tahun keempat, arah pembangunan lebih menonjolkan peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat. Perlindungan sosial, akses layanan dasar yang lebih inklusif, serta terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib menjadi prioritas utama. Tema ini dimaksudkan agar manfaat pembangunan yang sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dirasakan secara lebih nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Walaupun fokus utama ada pada kesejahteraan sosial dan ketenteraman, seluruh urusan pembangunan lain tetap dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga pembangunan Mimika tetap berjalan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan di semua bidang.

5. Tahun 2030: Konsolidasi Daya Saing Daerah melalui Tata Kelola Digital, Ekonomi Berkelanjutan, dan Peningkatan Kualitas Hidup Menuju GERBANG EMAS

Tahun terakhir periode RPJMD diarahkan pada konsolidasi seluruh capaian pembangunan sebelumnya. Tata kelola digital diperkuat, ekonomi diarahkan menuju keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat terus ditingkatkan agar Mimika siap bersaing di tingkat regional maupun nasional. Tema ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa semua hasil pembangunan tidak hanya

terhenti sebagai capaian jangka pendek, tetapi menjadi pondasi jangka panjang menuju visi GERBANG EMAS. Walaupun porsi besar pembangunan tahun ini ada pada konsolidasi daya saing dan keberlanjutan, seluruh urusan pembangunan lain tetap dijalankan, sehingga keberlanjutan pembangunan Mimika tetap utuh dan menyeluruh di akhir periode perencanaan.

3.6 Program Pembangunan Daerah

Program strategis merupakan arah kebijakan prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dengan landasan pertimbangan yang rasional dan terukur. Penetapan program ini didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakannya, ketersediaan sumber pendanaan, serta kompleksitas tantangan yang dihadapi. Selain itu, dukungan politik dari DPRD dan para pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam memastikan program dapat berjalan dengan baik.

Setiap program yang dirumuskan memiliki karakteristik dan tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Ada program yang bersifat fisik atau infrastruktur, ada pula yang menitikberatkan pada aspek sosial, bahkan ada yang sarat dengan dinamika politik. Sebagian program relatif mudah diprediksi keberhasilannya karena hambatan yang dihadapi lebih terbatas, sementara program lainnya lebih sulit diukur keberhasilannya karena dipengaruhi banyak faktor yang kompleks. Dengan kondisi tersebut, pencapaian antarprogram tentu tidak akan sama. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak yang menilai kinerja pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif untuk memberikan penilaian secara objektif, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat kesulitan dan tantangan dari masing-masing program.

Dalam rangka memastikan kesinambungan arah pembangunan daerah, program strategis yang dirumuskan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih perlu diselaraskan dengan kerangka regulasi nasional, khususnya ketentuan yang diatur dalam Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025. Penyelarasan ini penting agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan visi daerah, tetapi juga sesuai dengan standar dan nomenklatur program yang telah ditetapkan

pemerintah pusat. Dengan demikian, program strategis yang bersifat prioritas dapat diimplementasikan secara efektif, terukur, dan mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai bentuk konkrit, berikut disajikan tabel penyandingan antara Program Strategis Kepala Daerah dengan Program Berdasarkan Kepmendagri No.900.1-2850 Tahun 2025:

Tabel 64 Singkronisasi Program Strategis Kepala Daerah dengan Program Berdasarkan Kepmendagri No.900.1-2850 Tahun 2025

No	Program Strategis Kepala Daerah	Program Berdasarkan Kepmendagri No.900.1 - 2850 Tahun 2025
1	Program Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Stakeholders	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; Program Kepegawaian Daerah
2	Program Percepatan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Manajer	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); Program Pengembangan UMKM
3	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan, dan Luar Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
4	Program Pembangunan Pendidikan Tinggi	Program Pengembangan Kurikulum; Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5	Program Peningkatan Gizi Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat; Program Penanganan Kerawanan Pangan
6	Program Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan
7	Program Kebutuhan Dasar Masyarakat (Pangan, Air, BBM, Perumahan, dll.)	Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Kawasan Permukiman; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
8	Program Penataan Kelembagaan dan Infrastruktur Pemerintah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Penyelenggaraan Pengawasan
9	Program Pembinaan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

No	Program Strategis Kepala Daerah	Program Berdasarkan Kepmendagri No.900.1 - 2850 Tahun 2025
10	Program Pengembangan Jaringan Investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
11	Program Pemantapan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Program Penanggulangan Bencana
12	Program Sosialisasi Penegakan Hukum dan HAM	Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
13	Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
14	Program Rehabilitasi Sumber Daya Alam	Program Perencanaan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
16	Program Pemberdayaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program prioritas merupakan instrumen utama yang dipilih secara selektif dan strategis untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Program-program ini disusun dengan mempertimbangkan relevansi langsung terhadap pencapaian target kinerja, keterkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta daya ungkitnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Mimika, program prioritas diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah secara berkesinambungan. Setiap program prioritas dikaitkan langsung dengan sasaran strategis. Berikut program prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD:

Tabel 65 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Visi: Terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Obyektif dan Berdaya saing menuju : "GERBANG EMAS" (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera)					
Meningkatkan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kompetensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja serta perkembangan teknologi	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL/AKAD/AKAN	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Terwujudnya masyarakat yang inovatif dan produktif melalui pengembangan keterampilan dan pemberdayaan berbasis kreativitas lokal	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	Program Pengembangan

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			pariwisata dan ekonomi kreatif		Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang memiliki sarana prasarana pendukung sesuai standar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipromosikan	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL/AKAD/AKAN	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Terwujudnya budaya kerja aparatur yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh PD Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti PD	Program Penyelenggaraan Pengawasan

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Mimika melalui peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal serta membuka keterjangkauan publik pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik melalui penguatan birokrasi yang transparan dan akuntabel			Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Evaluasi LAKIP minimal BB	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	
		Terciptanya Kebijakan Pelayanan yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase pendampingan, asistensi dan konsultasi yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai prosedur	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	
				Persentase penurunan SILPA	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	
			Meningkatnya efektivitas	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh PD	Program Penyelenggaraan Pengawasan

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			pengawasan internal pemerintah daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti PD	
				Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Evaluasi LAKIP minimal BB	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan program/kegiatan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Persentase laporan hasil evaluasi pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu	
		Meningkatnya Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang disajikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan sipervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya inovasi daerah yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Jumlah inovasi daerah yang diimplementasikan/direplikasi oleh perangkat daerah	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Meningkatnya daya saing produk lokal di pasar internasional	Nilai ekspor produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang memiliki sarana prasarana pendukung sesuai standar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipromosikan	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Persentase jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Jumlah Produksi ikan konsumsi (ton/ tahun)	

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Jumlah Produksi benih ikan (ekor/tahun)	
				Persentase peningkatan retribusi benih ikan	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi ikan olahan (ton)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Jumlah pelaku usaha pemasaran/pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (unit/pelaku)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Jumlah produksi tanaman hortikultura	
				Jumlah produksi tanaman perkebunan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana Peternakan	Persentase benih, bibit, dan pakan ternak sesuai standar mutu (%)	
				Jumlah populasi hewan ternak	
			Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana peternakan yang mendukung produktivitas	Persentase peningkatan kapasitas tampung prasarana peternakan terhadap populasi ternak (%)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	
		Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalani Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang memiliki sarana prasarana pendukung sesuai standar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipromosikan	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Persentase jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Jumlah Produksi ikan konsumsi (ton/ tahun)	
				Jumlah Produksi benih ikan (ekor/ tahun)	
				Persentase peningkatan retribusi benih ikan	

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi ikan olahan (ton)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Jumlah pelaku usaha pemasaran/pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (unit/pelaku)	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Meningkatnya daya saing produk lokal di pasar internasional	Nilai ekspor produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Jumlah produksi tanaman hortikultura	
				Jumlah produksi tanaman perkebunan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana Peternakan	Persentase benih, bibit, dan pakan ternak sesuai standar mutu (%)	
				Jumlah populasi hewan ternak	
			Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana peternakan yang mendukung produktivitas	Persentase peningkatan kapasitas tampung prasarana peternakan terhadap populasi ternak (%)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	
Mewujudkan keterbukaan informasi pelayanan public dalam mengelola roda pemerintahan yang berbudaya, mandiri, cerdas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Sistem	Terwujudnya akses informasi publik yang merata, transparan, dan mudah dijangkau	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
dan inovatif dalam Upaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan bagi kepentingan Masyarakat	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik	oleh seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi layanan pemerintahan yang berfungsi dengan baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Cakupan wilayah distrik yang terlayani jaringan telekomunikasi (%)	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	
Mewujudkan Mimika yang sehat dengan transformasi Pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta layanan sosial dasar untuk mendukung peningkatan angka harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan layanan kesehatan yang inklusif		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	
				Prevalensi obesitas >18 tahun	
				Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	
				Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	
				Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	
				Persentase lanjut usia yang mandiri	
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	
				Persentase persalinan di fasyankes	
				Angka kematian neonatal	
				Angka kematian bayi	
				Insiden HIV	
				Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	
				Rasio tenaga medis terhadap populasi (Per 1.000 Penduduk)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Tenaga kesehatan terhadap populasi (Per 1.000 Penduduk)	
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Sediaan Pangan memenuhi syarat
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Kesehatan Dan Makanan Minuman
				Persentase Penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola rumah sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik untuk Mendukung Pelaksanaan Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang mengakses layanan sosial produktif	Program Pemberdayaan Sosial
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAFZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial
			Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga yang mengikuti layanan/edukasi keluarga berperspektif gender dan hak anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komperhensif	Program Perlindungan Khusus Anak

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		
			Tekendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total	Program Pengendalian Penduduk
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peningkatan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta aktif KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Meningkatkan kualitas, konektivitas, dan pemerataan infrastruktur dasar serta perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar yang menunjang pelayanan publik dan aktivitas masyarakat di seluruh wilayah	Meningkatnya aksesibilitas yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses SPAM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Kapasitas Air Baku (m3/detik)	
				Cakupan air bersih perpipaan daerah perkotaan (%)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Human dengan Akses SPALD (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Draniase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Meningkatnya perlindungan masyarakat pada	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		
				Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	
				Persentase Luas Layanan Irigasi Mulikomoditas	
			Meningkatnya bangunan yang tertata	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan kampung	Persentase kampung yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran
			Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP	Program Pengelolaan Penerbangan
		Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat di kawasan kumuh	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan atau direhabilitasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Meningkatnya bangunan yang tertata	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses SPAM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Kapasitas Air Baku (m3/detik)	
				Cakupan air bersih perpipaan daerah perkotaan (%)	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase kaawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang memiliki sistem pengelolaan persampahan yang berfungsi	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Program Pengelolaan Persampahan
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase dokumen lingkungan yang selesai tepat waktu	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter baku mutu air dan udara yang memenuhi standar	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan ketenteraman,	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
	masyarakat secara berkelanjutan	ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi kehidupan masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumiranmas	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Persentase penduduk yang mendapatkan edukasi/simulasi kesiapsiagaan bencana	
			Meningkatnya penanganan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana daerah	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada saat kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Dan Karakter Kebangsaan
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumiranmas	
			Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Mewujudkan Mimika yang cerdas dengan meningkatkan kualitas Pendidikan sampai ke daerah terpencil dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan manusia	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif, dan berkelanjutan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini/RA/Sederajat	Program Pengelolaan Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini/RA/Sederajat	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	
				Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 Sampai Dengan 15 Tahun	
				Perbandingan APS Anak Usia 5-6 Tahun Kuintil Terendah Dengan APS Anak Usia 5-6 Tahun Kuintil Tertinggi	

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Rata-Rata Nilai Literasi Tahun n Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-Rata Nilai Literasi Tahun n-a Semua Peserta Asesmen Nasional	
				Rata-Rata Nilai Literasi Tahun n-1 semua Peserta Asesmen Nasional	
				Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun n semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun n-1 semua Peserta Asesmen Nasional	
				Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun n-1 semua Peserta Asesmen Nasional	
				Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Laki-laki Berdasarkan Asesmen Nasional	
				Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	
				Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik dari Keluarga dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen Nasional	
				Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik dari Keluarga dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen Nasional	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Kecukupan Formasi Guru ASN untuk Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemda Sesuai dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru (PAUD/SD/DMP/Kesetaraan)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Proporsi Lulusan Program Guru Penggerak yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas/Penilik (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Indeks Distribusi Guru (SD/SMP/Kesetaraan)	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	
				Pertumbuhan Pendidik PAUD dengan S1/D-IV	
				Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD	
				Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/Kesetaraan)	
				Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas di Satuan Pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/Kesetaraan)	
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan bagi semua kelompok usia	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APK PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan
				APK SD/MI	
				APK SMP/MTs	
				APK SMA/SMK	
				APM PAUD	
				APM SD/MI	
				APM SMP/MTs	
				APM SMA/SMK	
				APS PAUD	
				APS SD/MI	
				APS SMP/MTs	
				APS SMA/SMK	
				Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	
				Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	
				Prosentase Angka Putus Sekolah PAUD/TK	
				Prosentase Angka Putus Sekolah SD	
				Prosentase Angka Putus Sekolah SMP	
				Prosentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK	
				Angka Kelulusan SD/MI	

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Angka Kelulusan SMP/MTS	
				Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	
				Persentase Sekolah dalam kondisi Baik PAUD/TK	
				Persentase Sekolah dalam kondisi Baik SD	
				Persentase Sekolah dalam kondisi Baik SMP	
				Persentase Sekolah dalam kondisi Baik SMA/SMK	
				Persentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprasi PAUD/TK	
				Persentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprasi SD	
				Persentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprasi SMP	
				Persentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprasi SMA/SMK	
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi Terakreditasi A	
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi Terakreditasi B	
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi Terakreditasi C	
				Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi A	
				Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi B	
				Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi C	
				Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi A	
				Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi B	
				Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi C	
				Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK Terakreditasi A	

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK Terakreditasi B	
				Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK Terakreditasi C	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	
				Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	
				Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	
				Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	
				Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	
				Iklim keamanan SD	
				Iklim keamanan SMP	
				Iklim keamanan SMA	
				Iklim keamanan SMK	
				Iklim kebhinekaan SD	
				Iklim kebhinekaan SMP	
				Iklim kebhinekaan SMA	
				Iklim kebhinekaan SMK	
				Iklim inklusivitas SD	
				Iklim inklusivitas SMP	
				Iklim inklusivitas SMA	
				Iklim inklusivitas SMK	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Program Pengembangan Kurikulum
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	
				Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	
				Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid PAUD/TK	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid SD	
				Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid SMP	
				Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid SMA/SMK	
				Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa PAUD/TK	
				Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa SD	
				Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa SMP	
				Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa SMA/SMK	
				Guru Berkualifikasi PAUD	
				Guru Berkualifikasi SD	
				Guru Berkualifikasi SMP	
				Guru Berkualifikasi SMA/SMK	
				Guru Tersertifikasi PAUD	
				Guru Tersertifikasi SD	
				Guru Tersertifikasi SMP	
				Guru Tersertifikasi SMA/SMK	
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	
Membuka pusat ekonomi baru dalam rangka menurunkan angka	Mewujudkan pusat ekonomi baru untuk meningkatkan	Terciptanya peluang usaha baru yang berbasis potensi lokal	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
kemiskinan, menurunkan angka pengangguran dan Pembangunan Mimika	kesejahteraan masyarakat	untuk menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang memiliki sarana prasarana pendukung sesuai standar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipromosikan	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Persentase jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton/ tahun)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Jumlah Produksi ikan konsumsi (ton/ tahun)	
				Jumlah Produksi benih ikan (ekor/ tahun)	
				Persentase peningkatan retribusi benih ikan	

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi ikan olahan (ton)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Jumlah pelaku usaha pemasaran/pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (unit/pelaku)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Jumlah produksi tanaman hortikultura	
				Jumlah produksi tanaman perkebunan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya penanganan karawanan pangan	Persentase Penurunan Kampung Status Rentan Rawan Pangan (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah UMKM Pengolahan Pangan Lokal	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari terhadap standar kebutuhan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Persentase Modernisasi Pangan Lokal (%)	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	
				Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari terhadap standar kebutuhan	
			Meningkatnya kapasitas, partisipasi,	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani,	Program Pemberdayaan

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			dan kemandirian masyarakat	kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Meningkatnya lapangan kerja melalui pengembangan pusat ekonomi baru untuk mengurangi angka pengangguran	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL/AKAD/AKAN	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Sah	Program Hubungan Industrial
			Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Sah	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			meningkatkan pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Meningkatnya daya saing produk lokal di pasar internasional	Nilai ekspor produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipromosikan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipromosikan	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Persentase jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Jumlah Produksi ikan konsumsi (ton/tahun)	
				Jumlah Produksi benih ikan (ekor/tahun)	
				Persentase peningkatan retribusi benih ikan	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi ikan olahan (ton)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Jumlah pelaku usaha pemasaran/pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (unit/pelaku)	

Selain program prioritas, RPJMD Kabupaten Mimika juga menetapkan sejumlah program penunjang yang berfungsi sebagai pendukung, fasilitator, dan penguat dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Program penunjang memiliki peran penting untuk memastikan terlaksananya program prioritas secara efektif, sekaligus menjamin keberlangsungan sistem tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Program penunjang ini mencakup kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, regulatif, maupun fasilitatif. Berikut program penunjang untuk mendukung program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD:

Tabel 66 Program Penunjang Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Program Penunjang
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kompetensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja serta perkembangan teknologi	Program Hubungan Industrial
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Terwujudnya masyarakat yang inovatif dan produktif melalui	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tujuan	Sasaran	Program Penunjang
	pengembangan keterampilan dan pemberdayaan berbasis kreativitas lokal	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Terwujudnya budaya kerja aparatur yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik melalui penguatan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Terciptanya Kebijakan Pelayanan yang Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tujuan	Sasaran	Program Penunjang
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Meningkatnya Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Tujuan	Sasaran	Program Penunjang
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
		Program Perizinan Usaha Pertanian
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program Penunjang
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik	Terwujudnya akses informasi publik yang merata, transparan, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Program Penunjang
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Penataan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta layanan sosial dasar untuk mendukung peningkatan angka harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan layanan kesehatan yang inklusif	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Meningkatkan kualitas, konektivitas, dan pemerataan infrastruktur dasar serta perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar yang menunjang pelayanan publik dan aktivitas masyarakat di seluruh wilayah	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Program Penunjang
	Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
		Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Program Penetapan Tanah Ulayat
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi kehidupan masyarakat	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Pengelolaan Perbatasan
Meningkatkan akses dan	Meningkatnya partisipasi	Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pengelolaan Arsip

Tujuan	Sasaran	Program Penunjang
kualitas pendidikan yang inklusif, dan berkelanjutan	masyarakat dalam pendidikan formal	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan bagi semua kelompok usia	Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Mewujudkan pusat ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terciptanya peluang usaha baru yang berbasis potensi lokal untuk menurunkan angka kemiskinan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Tujuan	Sasaran	Program Penunjang
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pengelolaan Perbatasan Negara
	Meningkatnya lapangan kerja melalui pengembangan pusat ekonomi baru untuk mengurangi angka pengangguran	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan Pembangunan tahun 2025 s/d 2030. Indikasi rencana program telah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang mendasari dilakukannya perubahan RPJMD ini. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika. Berikut rincian program RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2025-2030:

Tabel 67 Program dan Pagu Anggaran Kabupaten Mimika 2026-2030

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Urusan Pendidikan					980.456.000.000		1.004.858.000.000		1.029.870.000.000		1.055.509.000.000		1.081.789.000.000
01.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	473.276.000.000	100	497.578.000.000	100	500.000.000.000	100	520.000.000.000	100	530.000.000.000
01.01.02	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	62,44	500.000.000.000	69,64	500.000.000.000	76,85	522.290.000.000	84,05	527.709.000.000	91,25	543.769.000.000
			APK SD/MI	98,35		98,57		98,89		99,38		100	
			APK SMP/MTs	79,33		85,18		88,02		90,87		93,72	
			APK SMA/SMK	65,8		68,97		70,14		75,31		80,48	
			APM PAUD	60,61		65,66		70,71		75,77		80,84	
			APM SD/MI	87,01		89,76		91,51		94,27		96,02	
			APM SMP/MTs	49,06		53,14		57,23		61,32		65,41	
			APM SMA/SMK	41,58		45,05		48,51		51,98		55,46	
			APS PAUD	65,82		73,41		81,01		88,6		96,2	
			APS SD/MI	100		100		100		100		100	
			APS SMP/MTs	85,33		95,18		105,02		114,87		115,87	
			APS SMA/SMK	70,80		78,97		87,14		95,31		100	
			Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	112,92		113,14		113,37		113,59		113,81	
			Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	114,68		114,91		115,13		115,36		115,59	
			Prosentase Angka Putus Sekolah PAUD/TK	0		0		0		0		0	
			Prosentase Angka Putus Sekolah SD	1,04		1,02		0,99		0,97		0,95	
			Prosentase Angka Putus Sekolah SMP	0,55		0,54		0,52		0,51		0,5	
			Prosentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,65		0,64		0,63		0,61		0,6	
			Angka Kelulusan SD/MI	100		100		100		100		100	
			Angka Kelulusan SMP/MTS	100		100		100		100		100	
			Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100		100		100		100		100	
			Persentase Sekolah dalam kondisi Baik PAUD/TK	79,43		80,21		80,98		81,76		82,55	
			Persentase Sekolah dalam kondisi Baik SD	98,21		98,41		98,60		98,8		99	
			Persentase Sekolah dalam kondisi Baik SMP	98,97		99,27		99,78		100		100	
			Persentase Sekolah dalam kondisi Baik SMA/SMK	77,55		81,08		84,6		88,13		91,65	
			Presentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprass PAUD/TK	11,13		12,41		13,70		14,98		16,25	
			Presentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprass SD	4,34		4,84		5,34		5,85		6,35	
			Presentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprass SMP	12,32		13,75		15,17		16,59		18,01	
			Presentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprass SMA/SMK	77,56		81,08		84,61		88,14		91,67	
			Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	4,24		4,59		4,94		5,30		5,67	

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Terakreditasi Terakreditasi A										
			Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi Terakreditasi B	46,72		50,61		54,50		58,40		62,3	
			Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi Terakreditasi C	35,04		37,96		40,88		43,80		46,72	
			Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi A	25,21		27,31		29,41		31,52		33,62	
			Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi B	19,99		21,66		23,32		24,99		26,67	
			Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi C	17,39		18,84		20,29		21,74		23,19	
			Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi A	37,2		40,3		43,4		46,5		49,6	
			Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi B	28,96		31,37		33,78		36,2		38,63	
			Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi C	22,75		24,65		26,54		28,44		30,34	
			Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK Terakreditasi A	36,5		39,55		42,59		45,63		42,59	
			Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK Terakreditasi B	34,28		37,14		40		42,86		45,72	
			Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK Terakreditasi C	31,43		34,05		36,67		39,29		41,91	
			Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	75		75,5		80		82		85	
			Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	40,12		43,35		50		55		60	
			Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	95,45		96,5		98,78		100		100	
			Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	30,5		35		36,3		40,5		41,8	
			Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	85,5		87,96		90,2		95		97,24	
			Iklim keamanan SD	60		60,45		63,2		64,28		65,36	
			Iklim keamanan SMP	66		67,23		68		69,3		70,07	
			Iklim keamanan SMA	69		69,5		70,25		70,52		70,79	
			Iklim keamanan SMK	61,85		62		62,35		62,5		62,65	
			Iklim kebhinekaan SD	65,9		66		66,35		68		67,65	
			Iklim kebhinekaan SMP	70		72,5		72,85		73		73,15	
			Iklim kebhinekaan SMA	71		71,65		72,3		72,59		72,88	
			Iklim kebhinekaan SMK	67		67,29		67,85		67,98		68,11	
			Iklim inklusivitas SD	53,75		54,75		55		55,3		55,6	

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Iklim inklusivitas SMP	55		55,65		56		58		60	
			Iklim inklusivitas SMA	57,36		58,36		59,63		60		61,27	
			Iklim inklusivitas SMK	53		54		56		57		58	
01.01.03	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	55,6	280.000.000	59,6	280.000.000	60	280.000.000	60,12	300.000.000	60,24	320.000.000
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	50,15		55		55,6		65,7		66,3	
			Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	65		65,3		68,85		70,35		71,85	
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	63,3		65,13		67		68		70	
			Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	45		50,2		55		60		65	
			Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	43,25		45		48,5		50		51,5	
			Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	58,9		59		60,27		60,3		61,57	
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	58,3		60,19		63		65		67	
01.01.04	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid PAUD/TK	01.15	6.900.000.000	01.15	7.000.000.000	01.15	7.300.000.000	01.15	7.500.000.000	01.15	7.700.000.000
			Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid SD	01.20		01.20		01.20		01.20		01.20	
			Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid SMP	01.20		01.20		01.20		01.20		01.20	
			Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid SMA/SMK	01.20		01.20		01.20		01.20		01.20	
			Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa PAUD/TK	01.15		01.15		01.15		01.15		01.15	
			Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa SD	01.20		01.20		01.20		01.20		01.20	
			Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa SMP	01.20		01.20		01.20		01.20		01.20	
			Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa SMA/SMK	01.20		01.20		01.20		01.20		01.20	
			Guru Berkualifikasi PAUD	70,72		70,86		71		71,14		71,28	
			Guru Berkualifikasi SD	72,67		72,81		72,96		73,1		73,23	
			Guru Berkualifikasi SMP	99,8		100		100		100		100	
			Guru Berkualifikasi SMA/SMK	98,84		100		100		100		100	
			Guru Tersertifikasi PAUD	13,2		14,3		15,4		16,5		17,6	
			Guru Tersertifikasi SD	24,74		26,81		28,87		30,93		32,99	
			Guru Tersertifikasi SMP	29,29		31,73		34,17		36,62		39,08	
			Guru Tersertifikasi SMA/SMK	22,45		24,32		26,19		28,07		29,96	
			Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	80		85,3		90,5		95		100	
Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)					870.405.000.000		892.068.000.000		914.273.000.000		937.034.000.000		960.365.000.000
01.02.01	Meningkatnya dukungan tata	Program Penunjang	LAKIP	CC	450.000.000.000	CC	460.000.000.000	B	470.000.000.000	B	480.000.000.000	BB	490.000.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	kelola penunjang urusan bidang kesehatan	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
01.02.0 2	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	13	410.810.000.000	12	420.533.000.000	11	431.948.000.000	10	440.769.000.000	9	456.910.000.000
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	16		17		18		19		20	
			Prevalensi obesitas >18 tahun	9		8		7		6		5	
			Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	76,71		80		82		85		88,3	
			Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	81		82		83		84		85	
			Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90		90		90		90		90	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	77		79		81		83		85	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	6,9		6,7		6,5		6,3		6,1	
			Persentase persalinan di fasyankes	76,97		82,97		88,97		94,97		100	
			Angka kematian neonatal	9,23		8,63		8,03		7,2		6,6	
			Angka kematian bayi	<10,35		<9,96		9,96		9,96		9,96	
			Insiden HIV	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9	
01.02.0 3	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis terhadap populasi (Per 1.000 Penduduk)	0,22	7.000.000.000	0,23	8.000.000.000	0,23	8.500.000.000	0,23	8.700.000.000	0,23	9.000.000.000
			Tenaga kesehatan terhadap populasi (Per 1.000 Penduduk)	4,94		5,09		5,24		5,39		5,55	
01.02.0 4	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	70	1.150.000.000	75	1.550.000.000	80	1.600.000.000	85	1.800.000.000	90	2.050.000.000
01.02.0 5	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	15	945.000.000	19	1.085.000.000	21	1.225.000.000	23	4.515.000.000	25	1.505.000.000
01.02.0 6	Terakreditasinya fasilitas pelayanan kesehatan dengan status paripurna	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	29,6	500.000.000	41,12	900.000.000	52,5	1.000.000.000	64,4	1.250.000.000	75,5	900.000.000
BLUD Puskesmas Mapurujaya					2.086.000.000		2.138.000.000		2.191.000.000		2.246.000.000		2.302.000.000
01.02.0 1	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	2.086.000.000	B	2.138.000.000	B	2.191.000.000	A	2.246.000.000	A	2.302.000.000
BLUD Puskesmas Wafia					2.167.000.000		2.221.000.000		2.276.000.000		2.333.000.000		2.391.000.000
01.02.0 1	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	2.167.000.000	B	2.221.000.000	B	2.276.000.000	A	2.333.000.000	A	2.391.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Daerah Kabupaten/Kota											
BLUD Puskesmas Timika					6.128.000.000		6.280.000.000		6.437.000.000		6.597.000.000		6.761.000.000
01.02.01	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	6.128.000.000	B	6.280.000.000	B	6.437.000.000	A	6.597.000.000	A	6.761.000.000
BLUD Puskesmas Timika Jaya					3.651.000.000		3.741.000.000		3.835.000.000		3.930.000.000		4.028.000.000
01.02.01	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	3.651.000.000	B	3.741.000.000	B	3.835.000.000	A	3.930.000.000	A	4.028.000.000
BLUD Puskesmas Pasar Sentral					3.911.000.000		4.009.000.000		4.109.000.000		4.211.000.000		4.316.000.000
01.02.01	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	3.911.000.000	B	4.009.000.000	B	4.109.000.000	A	4.211.000.000	A	4.316.000.000
BLUD Puskesmas Wania					3.841.000.000		3.937.000.000		4.035.000.000		4.135.000.000		4.238.000.000
01.02.01	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	3.841.000.000	B	3.937.000.000	B	4.035.000.000	A	4.135.000.000	A	4.238.000.000
BLUD Puskesmas Karang Senang					2.412.000.000		2.472.000.000		2.534.000.000		2.597.000.000		2.661.000.000
01.02.01	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	2.412.000.000	B	2.472.000.000	B	2.534.000.000	A	2.597.000.000	A	2.661.000.000
BLUD Puskesmas Kwamki					4.048.000.000		4.149.000.000		4.252.000.000		4.358.000.000		4.467.000.000
01.02.01	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	4.048.000.000	B	4.149.000.000	B	4.252.000.000	A	4.358.000.000	A	4.467.000.000
BLUD Puskesmas Bhintuka					2.477.000.000		2.539.000.000		2.602.000.000		2.667.000.000		2.733.000.000
01.02.01	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	2.477.000.000	B	2.539.000.000	B	2.602.000.000	A	2.667.000.000	A	2.733.000.000
BLUD Puskesmas Limau Asri					2.975.000.000		3.049.000.000		3.125.000.000		3.203.000.000		3.282.000.000
01.02.01	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	2.975.000.000	B	3.049.000.000	B	3.125.000.000	A	3.203.000.000	A	3.282.000.000
BLUD Puskesmas Ayuka					2.229.000.000		2.285.000.000		2.342.000.000		2.400.000.000		2.460.000.000
01.02.01	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	2.229.000.000	B	2.285.000.000	B	2.342.000.000	A	2.400.000.000	A	2.460.000.000
BLUD Puskesmas Jila					2.412.000.000		2.472.000.000		2.534.000.000		2.597.000.000		2.661.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
01.02.0 1	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	2.412.000.000	B	2.472.000.000	B	2.534.000.000	A	2.597.000.000	A	2.661.000.000
BLUD Puskesmas Potowaiburu					2.197.000.000		2.252.000.000		2.308.000.000		2.365.000.000		2.424.000.000
01.02.0 1	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	2.197.000.000	B	2.252.000.000	B	2.308.000.000	A	2.365.000.000	A	2.424.000.000
BLUD RS Wa Banti					5.215.000.000		5.345.000.000		5.478.000.000		5.614.000.000		5.754.000.000
01.02.0 1	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	5.215.000.000	B	5.345.000.000	B	5.478.000.000	A	5.614.000.000	A	5.754.000.000
BLUD Laboratorium Kesehatan Lingkungan					1.304.000.000		1.336.000.000		1.370.000.000		1.404.000.000		1.439.000.000
01.02.0 1	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	1.304.000.000	B	1.336.000.000	B	1.370.000.000	A	1.404.000.000	A	1.439.000.000
BLUD Public Safety Center (PSC) 119					1.304.000.000		1.336.000.000		1.370.000.000		1.404.000.000		1.439.000.000
01.02.0 1	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	B	1.304.000.000	B	1.336.000.000	B	1.370.000.000	A	1.404.000.000	A	1.439.000.000
RSUD Mimika					354.490.000.000		363.312.000.000		372.355.000.000		381.625.000.000		391.127.000.000
01.02.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola rumah sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik untuk Mendukung Pelaksanaan Program	75	213.729.473.000	80	205.254.840.000	85	204.982.000.000	90	210.207.000.000	95	212.307.000.000
01.02.0 2	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	55	140.260.527.000	57	157.557.160.000	60	166.873.000.000	62	170.818.000.000	65	178.170.000.000
01.02.0 3	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	62	500.000.000	64	500.000.000	65	500.000.000	67	600.000.000	68	650.000.000
RSUD Mimika (BLUD)					143.418.000.000		146.987.000.000		150.645.000.000		154.396.000.000		158.240.000.000
01.02.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola rumah sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik untuk Mendukung Pelaksanaan Program	75	143.418.000.000	80	146.987.000.000	85	150.645.000.000	90	154.396.000.000	95	158.240.000.000
Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang					691.598.000.000		708.811.000.000		726.454.000.000		744.539.000.000		763.077.000.000
01.03.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan	Program Penunjang Urusan	Persentase laporan keuangan & kinerja yang	100	181.195.195.900	100	129.845.195.900	100	105.845.195.900	100	98.795.195.900	100	73.795.195.900

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	tata kelola pemerintahan daerah	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	disampaikan tepat waktu (%)										
01.03.02	Meningkatnya perlindungan masyarakat pada banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	60	125.964.470.066	70	191.800.101.000	80	194.700.101.000	88	193.550.101.000	95	155.050.101.000
			Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	55		65		75		85		90	
			Persentase Luas Layanan Irigasi Mulikomoditas	50		60		70		80		85	
01.03.03	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses SPAM	67	71.550.000.000	73	91.000.000.000	79	84.500.000.000	85	85.300.000.000	90	85.300.000.000
			Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,208		0,216		0,224		0,232		0,24	
			Cakupan air bersih perpipaan daerah perkotaan (%)	1,528		1,806		2,084		2,362		2,64	
01.03.04	Meningkatnya layanan persampahan regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan yang memiliki sistem pengelolaan persampahan yang berfungsi	63	2.468.922.770	68	10.334.985.716	73	47.781.209.279	78	9.594.406.339	83	8.745.471.428
01.03.05	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Human dengan Akses SPALD (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	41	23.150.000.000	49	25.750.000.000	57	26.250.000.000	65	25.750.000.000	70	27.750.000.000
01.03.06	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	46	37.073.747.650	54	40.641.238.676	62	40.141.238.676	70	40.141.238.678	75	41.641.238.676
01.03.08		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dan kawasan permukiman yang tertata sesuai standar teknis dan fungsi ruang	50	4.700.000.000	55	7.200.000.000	60	6.200.000.000	65	7.700.000.000	70	7.700.000.000
01.03.09	Meningkatnya bangunan yang tertata	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	70	10.000.000.000	75	10.000.000.000	80		85		90	10.000.000.000
01.03.10	Meningkatnya aksesibilitas yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	75	217.295.663.614	80	185.459.478.707	85	203.028.759.842	90	266.368.058.080	95	335.724.992.992
01.03.11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat kompetensi	30	2.000.000.000	35	580.000.000	40	1.807.495.301	45	1.140.000.000	50	1.170.000.000
01.03.12	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	66	16.200.000.000	74	16.200.000.001	82	16.200.000.002	90	16.200.000.003	95	16.200.000.004
Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan					156.456.000.000		160.350.000.000		164.341.000.000		168.432.000.000		172.626.000.000
01.04.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	34.000.000.000	100	35.306.000.000	100	36.306.000.000	100	37.306.000.000	100	41.500.000.000
01.04.02	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	4,15	9.720.000.000	9,01	10.000.000.000	10,7	11.491.000.000	13,76	12.491.000.000	27,03	12.491.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
01.04.03	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 Ha yang Ditangani	40	4.550.000.000	55	4.650.000.000	70	4.650.000.000	85	5.650.000.000	100	5.650.000.000
01.04.04	Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat di kawasan kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	0,94	54.962.000.000	1,35	54.962.000.000	1,81	55.962.000.000	2,33	56.962.000.000	4,66	56.962.000.000
01.04.05	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	8,31	35.201.000.000	12,4	35.207.000.000	17,55	35.207.000.000	22,56	35.298.000.000	23,09	35.298.000.000
02.10.03	Meningkatnya Ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	47,44	975.000.000	64,1	1.125.000.000	80,77	1.125.000.000	100	1.125.000.000	100	1.125.000.000
02.10.04	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Tersedianya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikasi yang Dilakukan melalui Mediasi	13,23	1.000.000.000	22,57	1.000.000.000	33,07	1.000.000.000	46,69	1.000.000.000	62,26	1.000.000.000
02.10.05	Meningkatnya Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	8,41	15.000.000.000	14,95	15.000.000.000	29	15.000.000.000	40,19	15.000.000.000	58,88	15.000.000.000
02.10.07	Meningkatnya kepastian hukum dan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase tanah ulayat yang telah memiliki penetapan hukum	20	1.048.000.000	30	1.100.000.000	40	1.100.000.000	50	1.100.000.000	50	1.100.000.000
03.29.05	Meningkatnya kampung/kelurahan yang mendapatkan energi listrik yang bersumber dari EBT	Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan	Jumlah kampung/kelurahan yang mendapatkan energi listrik yang bersumber dari EBT			46	2.000.000.000	48	2.500.000.000	50	2.500.000.000	144	2.500.000.000
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja)					32.595.000.000		33.406.000.000		34.237.000.000		35.090.000.000		35.964.000.000
01.05.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	21.000.000.000	100	21.300.000.000	100	21.600.000.000	100	21.900.000.000	100	22.200.000.000
01.05.02	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	93	11.595.000.000	95	12.106.000.000	96	12.637.000.000	97	13.190.000.000	98	13.764.000.000
	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiran dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Tibumiranmas	66		74		82		90		95	
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)					51.285.000.000		52.561.000.000		53.870.000.000		55.211.000.000		56.585.000.000
01.05.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	23.478.000.000	100	22.148.000.000	100	26.637.000.000	100	28.660.000.000	100	27.519.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	pemerintahan daerah	Daerah Kabupaten/Kota											
01.05.03	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	53	16.807.000.000	62	9.294.000.000	71	18.032.000.000	80	17.611.000.000	85	18.010.000.000
			Persentase penduduk yang mendapatkan edukasi/simulasi kesiapsiagaan bencana	45		55		65		75		80	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		78	82		86		90		95			
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		72	78		84		90		95			
01.05.04	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	60	11.000.000.000	70	21.119.000.000	78	9.201.000.000	86	8.940.000.000	90	11.056.000.000
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada saat kebakaran		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	75		80		85		90		95	
Urusan Sosial					45.633.000.000		46.769.000.000		47.932.000.000		49.126.000.000		50.349.000.000
01.06.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	18.033.600.000	100	18.094.600.000	100	18.194.600.000	100	18.294.600.000	100	18.781.600.000
01.06.02	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang mengakses layanan sosial produktif	46	3.684.000.000	54	3.709.000.000	62	3.735.000.000	70	3.761.000.000	75	3.787.000.000
01.06.04	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	56	13.552.400.000	64	13.583.400.000	72	13.615.400.000	80	14.561.400.000	85	14.946.400.000
01.06.05	Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	26	6.863.000.000	34	7.882.000.000	42	8.001.000.000	50	8.123.000.000	55	8.248.000.000
01.06.06	Meningkatnya penanganan bencana daerah	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	76	3.500.000.000	82	3.500.000.000	88	4.386.000.000	94	4.386.000.000	95	4.586.000.000
Urusan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi					45.633.000.000		46.769.000.000		47.932.000.000		49.126.000.000		50.349.000.000
02.07.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	17.796.870.000	100	18.239.910.000	100	18.693.480.000	100	19.159.140.000	100	19.636.110.000
02.07.03	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi	61	19.165.860.000	69	19.642.980.000	77	20.131.440.000	85	20.632.920.000	90	21.146.580.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
02.07.04	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL/AKAD/AKAN	51	1.368.990.000	59	1.403.070.000	67	1.437.960.000	75	1.473.780.000	80	1.510.470.000
02.07.05	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang memiliki PKB/PP sah	46	5.932.290.000	54	6.079.970.000	62	6.231.160.000	70	6.386.380.000	75	6.545.370.000
03.32.02	Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan	100	684.495.000								
03.32.03	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK transmigran yang mendapatkan pembinaan pasca penempatan	66	684.495.000	74	701.535.000	82	718.980.000	90	736.890.000	95	755.235.000
03.32.04	Meningkatnya Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan transmigrasi yang di kembangkan			55	701.535.000	60	718.980.000	66	736.890.000	70	755.235.000
Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB					27.380.000.000		28.061.000.000		28.760.000.000		29.476.000.000		30.210.000.000
02.08.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	13.109.200.000	100	13.230.200.000	100	13.342.200.000	100	13.452.200.000	100	13.729.200.000
02.08.02	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	56	2.470.000.000	64	2.470.000.000	72	2.470.000.000	80	2.470.000.000	85	2.470.000.000
02.08.03	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	66	880.000.000	74	1.065.000.000	82	1.092.000.000	90	1.119.000.000	95	1.206.000.000
02.08.04	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti layanan/edukasi keluarga berperspektif gender dan hak anak	46	660.000.000	54	672.500.000	62	685.000.000	70	701.500.000	75	750.000.000
02.08.06	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	75	520.000.000	80	533.000.000	84	546.000.000	87	560.000.000	90	574.000.000
02.08.07	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	61	1.150.000.000	69	1.150.000.000	77	1.280.000.000	85	1.350.000.000	90	1.400.000.000
02.14.02	Tekendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total	2,5	2.005.000.000	2,45	2.005.000.000	2,4	2.055.000.000	2,35	2.335.000.000	2,3	2.335.000.000
02.14.03	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta	Program Pembinaan	Persentase Peningkatan Pasangan Usia Subur (PUS)	65	4.710.800.000	70	4.885.300.000	75	5.089.800.000	80	5.282.300.000	85	5.488.800.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Keluarga Berencana (KB)	yang menjadi peserta aktif KB										
02.14.04	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	51	1.875.000.000	59	2.050.000.000	67	2.200.000.000	75	2.206.000.000	80	2.257.000.000
Urusan Ketahanan Pangan					32.986.000.000		33.807.000.000		34.649.000.000		35.511.000.000		36.395.000.000
02.09.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	100	15.511.000.000	100	16.367.874.440	100	16.690.040.900	100	16.533.158.198	100	16.665.040.900
02.09.02	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemandirian dan kemandirian pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian Pangan	Jumlah UMKM Pengolahan Pangan Lokal	50	1.100.000.000	55	1.550.000.000	60	1.448.625.385	65	1.550.000.000	70	1.750.000.000
02.09.03	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari terhadap standar kebutuhan	1	12.675.000.000	1	11.750.767.874	1	12.198.854.011	1	12.985.065.272	1	13.494.724.180
			Persentase Modernisasi Pangan Lokal (%)	14,26		15,75		17,23		18,72		20,21	
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79		81		83		85		87	
02.09.04	Meningkatnya penanganan karawanan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kampung Status Rentan Rawan Pangan	0,1	3.200.000.000	0,18	3.563.325.276	0,26	3.736.479.704	0,34	3.917.776.530	0,42	3.931.014.255
02.09.05	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)	67	500.000.000	73	575.032.410	79	575.000.000	85	525.000.000	90	554.220.665
Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan					85.008.000.000		87.123.000.000		89.292.000.000		91.515.000.000		93.793.000.000
03.27.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu	100	24.238.800.000	100	24.435.254.000	100	24.955.150.500	100	26.509.636.000	100	26.237.019.000
03.27.02	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan	2000	32.220.196.000	3000	33.752.097.000	4000	34.714.995.500	5000	34.865.845.500	6000	36.781.212.000
			Jumlah produksi tanaman hortikultura	14802		17762		20722		23682		26642	
			Jumlah produksi tanaman perkebunan	1090		1090		1100		1110		1120	
03.27.03	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	409	20.722.700.000	613	21.033.615.000	817	21.587.390.000	1021	22.105.054.500	1226	22.590.184.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
03.27.0 5	Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	66	1.400.500.000	74	1.401.500.000	82	1.415.750.000	90	1.415.750.000	95	1.430.500.000
03.27.0 6	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	50	626.000.000	60	626.000.000	70	626.000.000	80	626.000.000	85	626.000.000
03.27.0 7	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan kelompok tani yang Ditingkatkan	56	5.799.804.000	64	5.874.534.000	72	5.992.714.000	80	5.992.714.000	85	6.128.085.000
Urusan Lingkungan Hidup					44.981.000.000		46.101.000.000		47.248.000.000		48.424.000.000		49.630.000.000
02.11.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	12.542.820.000		12.554.320.000		12.555.820.000		12.557.320.000		12.914.320.000
02.11.0 2	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang selesai tepat waktu	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000
02.11.0 3	Menurunnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter baku mutu air dan udara yang memenuhi standar	67	1.043.000.000	73	1.198.000.000	79	1.198.000.000	85	1.198.000.000	90	1.213.000.000
02.11.0 4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase area prioritas konservasi yang mendapat tindakan perlindungan	56	723.080.000	64	825.000.000	72	945.000.000	80	1.025.000.000	85	1.125.000.000
02.11.0 5	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 terkelola sesuai ketentuan	66	250.000.000	74	265.000.000	82	280.000.000	90	300.000.000	95	250.000.000
02.11.0 6	Meningkatnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan	61	672.000.000	69	702.000.000	77	722.000.000	85	752.000.000	90	772.000.000
02.11.0 8	Meningkatnya pengetahuan, kapasitas, dan partisipasi masyarakat, keluarga, sekolah,	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase masyarakat /keluarga /kelompok /komunitas/ lembaga pendidikan yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan, penyuluhan,	100	850.000.000	100	890.000.000	100	890.000.000	100	890.000.000	100	890.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	komunitas, serta lembaga pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Hidup Untuk Masyarakat	atau pembinaan lingkungan hidup dan menerapkan perilaku ramah lingkungan										
02.11.09	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peserta program penghargaan yang mempertahankan atau meningkatkan kinerja lingkungan	50	200.000.000	60	322.180.000	70	322.180.000	80	322.180.000	85	330.410.000
02.11.10	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian pengaduan lingkungan hidup yang tuntas	66	213.000.000	74	213.000.000	82	213.000.000	90	213.000.000	95	213.000.000
02.11.11	Meningkatnya tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,13	28.137.100.000	12,26	28.781.500.000	13,39	29.772.000.000	14,52	30.266.500.000	15,65	31.022.270.000
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) RT)	31,668		33,336		35,004		36,672		38,34	
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					35.203.000.000		36.079.000.000		36.977.000.000		37.897.000.000		38.841.000.000
02.12.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	23.553.000.000	100	24.000.000.000	100	24.200.000.000	100	24.600.000.000	100	24.800.000.000
02.12.02	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	64	4.500.000.000	76	4.700.000.000	84	4.800.000.000	92	5.100.000.000	100	5.500.000.000
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	63		72		81		90		95	
02.12.03	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian Diterbitkan bagi yang Melaporkan	66	4.500.000.000	74	4.679.000.000	82	4.877.000.000	90	5.000.000.000	95	5.291.000.000
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	89		91		93		95		97	
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	76		82		88		94		95	
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	71		79		85		91		95	
02.12.04	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	60	2.000.000.000	70	2.000.000.000	78	2.350.000.000	86	2.397.000.000	90	2.400.000.000
02.12.05	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan/publikasi setiap tahun	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung					71.123.000.000		72.893.000.000		74.707.000.000		76.567.000.000		78.473.000.000
02.13.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	35.123.000.000	100	36.893.000.000	100	38.707.000.000	100	40.567.000.000	100	42.473.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
02.13.0 2	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	70	1.000.000.000	75	1.000.000.000	80	1.000.000.000	85	1.000.000.000	90	1.000.000.000
02.13.0 4	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase realisasi administrasi pemerintahan desa	70	5.000.000.000	75	5.000.000.000	80	5.000.000.000	85	5.000.000.000	90	5.000.000.000
02.13.0 5	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	50	30.000.000.000	55	30.000.000.000	60	30.000.000.000	65	30.000.000.000	70	30.000.000.000
Urusan Perhubungan					133.915.000.001		137.248.000.000		140.736.000.000		144.166.000.605		147.755.000.001
02.15.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	11.364.167.423	100	11.647.009.300	100	11.936.894.645	100	12.234.078.645	100	12.538.644.346
02.15.0 2	Meningkatnya kualitas layanan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	72	17.154.635.178	78	17.581.595.556	84	18.091.188.311	90	18.467.797.745	95	18.927.551.960
			Rasio Kinektivitas Darat	0,72		0,78		0,84		0,9		0,95	
02.15.0 3	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Laut	0,66	21.781.754.522	0,74	22.323.878.913	0,82	22.879.503.551	0,9	23.449.116.397	0,95	24.032.880.106
02.15.0 4	Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Pengendalian KKOP	60	83.614.442.878	70	85.695.516.231	78	87.828.413.493	86	90.015.007.818	90	92.255.923.589
Urusan Komunikasi Dan Informatika					64.858.000.000		66.473.000.000		68.127.000.000		69.823.000.000		71.562.000.000
02.16.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	22.208.000.000	100	22.693.000.000	100	23.217.000.000	100	23.733.000.000	100	24.252.000.000
02.16.0 2	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	72	4.000.000.000	78	4.160.000.000	84	4.370.000.000	90	4.480.000.000	95	4.540.000.000
02.16.0 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi layanan pemerintahan yang berfungsi dengan baik	71	31.600.000.000	79	31.640.000.000	85	31.930.000.000	91	32.120.000.000	95	32.360.000.000
			Cakupan wilayah distrik yang terlayani jaringan telekomunikasi (%)	58,58		60,31		62,03		63,76		65,48	
02.20.0 2	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	75	6.000.000.000	80	6.600.000.000	84	7.500.000.000	87	8.050.000.000	90	8.400.000.000
02.21.0 2	Meningkatnya keamanan siber dan sandi	Program Penyelenggaraan Persandian	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	66	1.050.000.000	74	1.380.000.000	82	1.110.000.000	90	1.440.000.000	95	2.010.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	lingkungan pemerintah daerah	Untuk Pengamanan Informasi											
Urusan Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah					50.848.000.000		52.114.000.000		53.411.000.000		54.740.000.000		56.103.000.000
02.17.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	26.000.000.000	100	26.500.000.000	100	27.000.000.000	100	27.500.000.000	100	28.000.000.000
02.17.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi	5	250.000.000	5	350.000.000	5	450.000.000	5	550.000.000	5	650.000.000
02.17.03	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	56	800.000.000	64	900.000.000	72	1.000.000.000	80	1.100.000.000	85	1.200.000.000
02.17.04	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase koperasi aktif	57	800.000.000	63	900.000.000	69	1.000.000.000	75	1.100.000.000	80	1.200.000.000
02.17.05	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	46	2.000.000.000	54	2.100.000.000	62	2.200.000.000	70	2.300.000.000	75	2.400.000.000
02.17.06	Meningkatnya produktivitas koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	45	5.498.000.000	55	5.598.000.000	65	5.698.000.000	75	5.798.000.000	80	5.898.000.000
02.17.07	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	40	8.000.000.000	50	8.100.000.000	60	8.200.000.000	70	8.300.000.000	75	8.400.000.000
02.17.08	Meningkatnya daya saing UMKM	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor	30	6.000.000.000	40	6.100.000.000	50	6.200.000.000	60	6.300.000.000	70	6.400.000.000
02.17.09	Meningkatnya legalitas koperasi	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Persentase koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam	50	1.500.000.000	55	1.566.000.000	60	1.663.000.000	65	1.792.000.000	70	1.955.000.000
Urusan Penanaman Modal Dan Perijinan (DPMPSTP)					46.276.000.000		47.428.000.000		48.609.000.000		49.819.000.000		51.059.000.000
02.18.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	28.000.000.000	100	28.500.000.000	100	28.700.000.000	100	28.900.000.000	100	29.000.000.000
02.18.02	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap target investasi	85	3.500.000.000	90	3.800.000.000	93	3.809.000.000	96	4.000.000.000	100	4.300.000.000
02.18.03	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	46	4.276.000.000	54	4.576.000.000	62	4.800.000.000	70	5.000.000.000	75	5.300.000.000
02.18.04	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Program Pelayanan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	72	5.000.000.000	78	5.052.000.000	84	5.300.000.000	90	5.500.000.000	95	5.700.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penanaman Modal											
02.18.05	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	60	3.500.000.000	70	3.500.000.000	78	3.800.000.000	86	4.000.000.000	90	4.159.000.000
02.18.06	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	55	2.000.000.000	65	2.000.000.000	73	2.200.000.000	81	2.419.000.000	85	2.600.000.000
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga					53.388.000.000		54.717.000.000		56.079.000.000		57.475.000.000		58.906.000.000
02.19.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	13.473.700.000	100	13.473.700.000	100	13.473.700.000	100	13.473.700.000	100	13.473.700.000
02.19.02	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	25	8.005.000.000	30	8.543.300.000	35	9.100.000.000	35	9.396.000.000	45	10.827.000.000
02.19.03	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang masuk pelatnas	11	28.850.000.000	14	28.850.000.000	17	29.250.000.000	17	30.350.000.000	20	30.350.000.000
02.19.04	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	25	3.059.300.000	25	3.850.000.000	30	4.255.300.000	30	4.255.300.000	35	4.255.300.000
Urusan Pariwisata dan Kebudayaan					57.743.000.000		59.180.000.000		60.654.000.000		62.163.000.000		63.711.000.000
02.19.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	13.143.000.000	100	13.143.000.000	100	13.143.000.000	100	13.143.000.000	100	13.143.000.000
02.22.02	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	36	11.750.000.000	44	11.800.000.000	52	11.800.000.000	52	12.300.000.000	60	12.300.000.000
02.22.03	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	46	1.200.000.000	54	1.200.000.000	62	1.200.000.000	62	1.200.000.000	70	1.200.000.000
02.22.05	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	51	5.900.000.000	59	6.100.000.000	67	6.100.000.000	67	6.100.000.000	75	6.100.000.000
			Persentasi cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	45		55		65		65		75	
03.26.02	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang memiliki sarana prasarana pendukung sesuai standar	46	11.500.000.000	54	12.494.000.000	62	13.968.000.000	62	14.977.000.000	70	15.977.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
03.26.0 3	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipromosikan	58	3.450.000.000	58	3.643.000.000	72	3.643.000.000	72	3.643.000.000	80	4.191.000.000
03.26.0 5	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	45	10.800.000.000	45	10.800.000.000	65	10.800.000.000	65	10.800.000.000	75	10.800.000.000
Urusan Perpustakaan Dan Arsip					42.086.000.000		43.134.000.000		44.207.000.000		45.308.000.000		46.436.000.000
02.23.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	28.000.000.000	100	28.500.000.000	100	29.000.000.000	100	29.500.000.000	100	30.000.000.000
02.23.0 2	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	56	6.000.000.000	64	6.200.000.000	72	6.500.000.000	80	6.700.000.000	85	6.900.000.000
02.24.0 2	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	66	6.000.000.000	74	6.200.000.000	82	6.400.000.000	90	6.700.000.000	95	6.900.000.000
02.24.0 3	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	61	2.086.000.000	69	2.234.000.000	77	2.307.000.000	85	2.408.000.000	90	2.636.000.000
Urusan Perikanan					70.472.000.000		72.226.000.000		74.024.000.000		75.867.000.000		77.755.000.000
03.25.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	15.670.300.000	100	15.670.300.000	100	15.670.300.000	100	15.670.300.000	100	16.320.300.000
03.25.0 3	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	51.498	19.454.200.000	52.270	21.208.200.000	53.054	29.050.000.000	53.850	30.650.000.000	54.658	31.207.200.000
			Persentase jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	66		74		82		90		95	
03.25.0 4	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	237.571	9.550.500.000	238.759	9.550.500.000	239.953	18.506.700.000	242.359	19.249.700.000	243.368	19.930.500.000
			Jumlah Produksi ikan konsumsi (ton/tahun)	36.050		36.130		38.241		39.390		40.574	
			Jumlah Produksi benih ikan (ekor/tahun)	5.756.489		5.785.217		5.814.197		5.843.268		5.853.040	
			Persentase peningkatan retribusi benih ikan	18		22		26		30		35	
03.25.0 6	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi ikan olahan (ton)	700	20.547.000.000	800	20.547.000.000	900	5.547.000.000	1.000	5.047.000.000	1.200	5.047.000.000
			Jumlah pelaku usaha pemasaran/pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (unit/pelaku)	80		95		110		125		140	
03.25.0 7	Meningkatnya kelestarian laut dan	Program Pengawasan Sumber Daya	Persentase usaha budidaya ikan yang memenuhi standar teknis	56	5.250.000.000	64	5.250.000.000	72	5.250.000.000	80	5.250.000.000	85	5.250.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	keanekaragaman hayati	Kelautan dan Perikanan											
Urusan Peternakan Dan Kesehatan Hewan					66.840.000.000		68.504.000.000		70.209.000.000		71.957.000.000		73.748.000.000
03.27.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	24.140.000.000	100	25.804.000.000	100	27.359.000.000	100	28.857.000.000	100	30.398.000.000
03.27.0 2	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase benih, bibit, dan pakan ternak sesuai standar mutu (%)	110	25.400.000.000	115	25.400.000.000	120	25.550.000.000	125	25.650.000.000	130	25.750.000.000
			Jumlah populasi hewan ternak	442.000 ternak		445.000 ternak		447.000 ternak		449.000 ternak		452.000 ternak	
03.27.0 3	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana peternakan yang mendukung produktivitas	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas tampung prasarana peternakan terhadap populasi ternak (%)	56	2.900.000.000	64	2.900.000.000	72	2.900.000.000	80	2.900.000.000	85	2.950.000.000
03.27.0 4	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	70	12.150.000.000	75	12.150.000.000	80	12.150.000.000	85	12.250.000.000	90	12.350.000.000
			Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	50		60		70		80		90	
03.27.0 5	Menurunnya dampak kerugian akibat wabah/penyakit hewan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan kasus kejadian luar biasa (KLB) penyakit hewan	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000
03.27.0 6	Meningkatnya kemudahan dan kepastian berusaha di bidang peternakan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha peternakan yang diproses sesuai standar pelayanan (%)	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000
03.27.0 7	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian peternak	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peternak binaan yang mengadopsi teknologi/inovasi budidaya ternak	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000
Urusan Perindustrian Dan Perdagangan					52.255.000.000		53.555.000.000		54.889.000.000		56.255.000.000		57.656.000.000
03.30.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	15.000.000.000	100	15.500.000.000	100	16.000.000.000	100	16.500.000.000	100	17.000.000.000
03.30.0 3	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	48	9.500.000.000	56	9.600.000.000	64	9.700.000.000	72	9.800.000.000	80	9.900.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
03.30.0 4	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	74	6.500.000.000	78	6.600.000.000	82	6.700.000.000	86	6.800.000.000	90	6.900.000.000
03.30.0 5	Meningkatnya daya saing produk lokal di pasar internasional	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor produk unggulan daerah	230	7.500.000.000	260	7.600.000.000	290	7.700.000.000	320	7.800.000.000	350	7.900.000.000
03.30.0 6	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	58	4.000.000.000	66	4.200.000.000	74	4.300.000.000	82	4.400.000.000	90	4.600.000.000
03.30.0 7	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	38	3.500.000.000	46	3.600.000.000	54	3.700.000.000	62	3.800.000.000	70	3.900.000.000
03.31.0 2	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	68	3.255.000.000	76	3.355.000.000	82	3.489.000.000	88	3.655.000.000	94	3.756.000.000
03.31.0 3	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	61	1.500.000.000	67	1.600.000.000	73	1.700.000.000	79	1.800.000.000	85	1.900.000.000
03.31.0 4	meningkatkan pemanfaatan informasi industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	48	1.500.000.000	56	1.500.000.000	64	1.600.000.000	72	1.700.000.000	80	1.800.000.000
Sekretariat Daerah					128.424.000.000		131.620.000.000		134.897.000.000		138.255.000.000		141.697.000.000
04.01.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	128.424.000.000	100	131.620.000.000	100	134.897.000.000	100	138.255.000.000	100	141.697.000.000
Bagian Tata Pemerintahan					16.949.000.000		17.371.000.000		17.804.000.000		18.247.000.000		18.701.000.000
04.01.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	9.800.000.000	100	9.800.000.000	100	9.800.000.000	100	9.800.000.000	100	9.800.000.000
04.01.0 2	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	66	7.149.000.000	72	7.571.000.000	78	8.004.000.000	84	8.447.000.000	90	8.901.000.000
Bagian Hukum					16.036.000.000		16.435.000.000		16.844.000.000		17.264.000.000		17.694.000.000
04.01.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	4.700.000.000	100	4.750.000.000	100	4.800.000.000	100	4.850.000.000	100	4.900.000.000
04.01.0 2	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan Dan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	62	11.336.000.000	69	11.685.000.000	76	12.044.000.000	83	12.414.000.000	90	12.794.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Kesejahteraan Rakyat			57.704.000.000		59.140.000.000		60.613.000.000		62.122.000.000		63.668.000.000
Bagian Kesejahteraan Rakyat													
04.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	5.600.000.000	100	5.650.000.000	100	5.720.000.000	100	5.820.000.000	100	5.920.000.000
04.01.02	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	64	52.104.000.000	70	53.490.000.000	76	54.893.000.000	82	56.302.000.000	88	57.748.000.000
Bagian Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan													
04.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	5.600.000.000	100	5.690.000.000	100	5.700.000.000	100	5.700.000.000	100	5.800.000.000
04.01.02	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	62	1.330.000.000	69	1.400.000.000	76	1.450.000.000	83	1.529.000.000	90	1.600.000.000
04.01.03	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	58	3.500.000.000	66	3.600.000.000	74	3.806.000.000	82	4.000.000.000	90	4.108.000.000
Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa													
04.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	22.500.000.000	100	23.000.000.000	100	23.500.000.000	100	24.000.000.000	100	24.500.000.000
04.01.03	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	2,5	15.310.000.000	3	15.751.000.000	3,5	16.216.000.000	4	16.704.000.000	4,5	17.218.000.000
Bagian Umum Dan Perlengkapan													
04.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	22.295.000.000	100	22.850.000.000	100	23.419.000.000	100	24.002.000.000	100	24.599.000.000
Bagian Organisasi													
04.01.01	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kematangan Organisasi	2,8	9.127.000.000	3,1	9.354.000.000	3,4	9.587.000.000	3,7	9.825.000.000	4	10.070.000.000
Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol													
04.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	15.646.000.000	100	16.035.000.000	100	16.434.000.000	100	16.843.000.000	100	17.263.000.000
Sekretariat DPRD													
					156.782.000.000		160.684.000.000		164.683.000.000		168.783.000.000		172.986.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
04.02.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	72.690.950.000	100	74.175.950.000	100	75.710.950.000	100	77.510.950.000	100	79.960.950.000
04.02.02	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Ketepatan penataan perda APBD tahun n	75	84.091.050.000	80	86.508.050.000	85	88.972.050.000	90	91.272.050.000	95	93.025.050.000
			Persentase penetapan ranperda tahun n	71		77		83		89		95	
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	58		66		74		82		90	
Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah					73.625.000.000		75.458.000.000		77.336.000.000		79.261.000.000		81.235.000.000
	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	35.635.500.000	100	35.845.500.000	100	36.723.500.000	100	36.915.500.000	100	37.015.500.000
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan program/kegiatan	100	18.200.000.000	100	19.200.000.000	100	20.200.000.000	100	21.658.000.000	100	23.480.000.000
			Persentase laporan hasil evaluasi pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu	80		85		90		95		100	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	80	18.900.000.000	85	19.523.000.000	90	19.523.000.000	95	19.798.000.000	100	19.850.000.000
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	77		83		89		95		100	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang perekonomian	77		83		89		95		100	
	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Program Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	60	579.500.000	66	579.500.000	72	579.500.000	78	579.500.000	84	579.500.000
	Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan negara	Program Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas	55	310.000.000	62	310.000.000	69	310.000.000	76	310.000.000	83	310.000.000
Urusan Penelitian dan Pengembangan					18.645.857.735		19.109.318.418		19.584.579.323		20.071.702.633		20.573.349.069
	Meningkatnya dukungan	Program Penunjang	Persentase laporan keuangan & kinerja yang	100	9.260.500.735	100	9.610.500.418	100	9.610.500.323	100	9.887.884.633	100	10.066.892.069

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	disampaikan tepat waktu (%)										
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang disajikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	74	4.650.000.000	81	4.763.461.000	88	5.238.722.000	95	5.448.461.000	100	5.771.100.000
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan sipervi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		Persentase fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	66		74		82		90		97	
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	60	4.735.357.000	70	4.735.357.000	80	4.735.357.000	90	4.735.357.000	100	4.735.357.000
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	55		65		75		85		95	
	Meningkatnya inovasi daerah yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan		Jumlah inovasi daerah yang diimplementasikan/direplik asi oleh perangkat daerah	9		11		13		15		17	
Urusan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah					1.093.355.000.000		1.120.567.000.000		1.148.459.000.000		1.177.050.000.000		1.206.357.000.000
05.02.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	533.355.000.000	100	559.567.000.000	100	566.459.000.000	100	584.050.000.000	100	602.357.000.000
05.02.02	Meningkatnya tata kelola anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	27	550.000.000.000	29	550.000.000.000	31	570.000.000.000	33	580.000.000.000	35	590.000.000.000
			Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	23		26		29		32		35	
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan		Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	83		86		89		92		95	
			Persentase penurunan SILPA	10		20		30		40		50	

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan		Persentase laporan keuangan tepat waktu	87		89		91		93		95	
05.02.03	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	3	10.000.000.000	4	11.000.000.000	5	12.000.000.000	6	13.000.000.000	7	14.000.000.000
Urusan Pendapatan Daerah					79.329.000.000		81.303.000.000		83.327.000.000		85.401.000.000		87.528.000.000
05.02.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	64.929.000.000	100	64.453.000.000	100	64.227.000.000	100	67.272.750.000	100	71.728.000.000
05.02.02	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan tepat waktu	86	1.500.000.000	89	1.500.000.000	92	1.500.000.000	95	1.500.000.000	98	1.500.000.000
05.02.04	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	7,68	12.900.000.000	7,7	15.350.000.000	7,76	17.600.000.000	7,78	16.628.250.000	8	14.300.000.000
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	66		74		82		90		95	
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	60		70		80		90		100	
Urusan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya					40.905.000.000		41.923.000.000		42.966.000.000		44.036.000.000		45.132.000.000
05.03.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	29.451.600.000		30.184.560.000		30.935.520.000		31.705.920.000		32.495.040.000
05.03.02	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	75	9.817.200.000	80	10.061.520.000	85	10.311.840.000	90	10.568.640.000	95	10.831.680.000
05.04.02	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	43	1.636.200.000	51	1.676.920.000	59	1.718.640.000	67	1.761.440.000	75	1.805.280.000
Urusan Pengawasan (Inspektorat)					53.792.000.000		55.131.000.000		56.503.000.000		57.910.000.000		59.352.000.000
06.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	29.142.000.000	100	30.925.389.800	100	30.903.000.000	100	31.460.000.000	100	31.852.000.000
06.01.02	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh PD	66	9.900.000.000	72	9.955.610.200	78	10.850.000.000	84	11.150.000.000	90	11.450.000.000
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti PD	62		69		76		83		90	

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Evaluasi LAKIP minimal BB	30		45		55		65		80	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	71		77		83		89		95	
06.01.03	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pendampingan, asistensi dan konsultasi yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai prosedur	75	14.750.000.000	80	14.250.000.000	85	14.750.000.000	90	15.300.000.000	95	16.050.000.000
Urusan Kewilayahan													
Distrik Kuala Kencana					21.864.000.000		22.408.000.000		22.966.000.000		23.538.000.000		24.124.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	88	14.100.000.000	91	14.150.000.000	93	14.200.000.000	95	14.490.000.000	97	14.500.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	85	1.340.000.000	88	1.400.000.000	90	1.500.000.000	93	1.500.000.000	95	1.750.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	65	4.974.000.000	70	5.080.000.000	76	5.266.000.000	82	5.398.000.000	88	5.500.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	82	400.000.000	86	450.000.000	89	500.000.000	92	550.000.000	95	600.000.000
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	80	550.000.000	84	728.000.000	87	800.000.000	90	850.000.000	93	924.000.000
07.01.06	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan kampung	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kampung yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	75	500.000.000	80	600.000.000	85	700.000.000	89	750.000.000	93	850.000.000
Distrik Tembaga					16.315.000.000		16.734.000.000		17.163.000.000		17.603.000.000		18.053.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	70	10.000.000.000	74	10.100.000.000	78	10.200.000.000	82	10.300.000.000	86	10.400.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	68	2.500.000.000	72	2.600.000.000	76	2.700.000.000	80	2.800.000.000	84	2.900.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	50	1.700.000.000	56	1.800.000.000	62	1.900.000.000	68	2.000.000.000	74	2.100.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	60	900.000.000	65	1.000.000.000	70	1.100.000.000	75	1.200.000.000	80	1.300.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	65	1.215.000.000	70	1.234.000.000	74	1.263.000.000	78	1.303.000.000	82	1.353.000.000
Distrik Jita					14.156.000.000		14.220.000.000		14.294.000.000		14.378.000.000		14.570.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	45	9.056.000.000	50	9.100.000.000	55	9.150.000.000	60	9.200.000.000	66	9.250.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	40	1.500.000.000	45	1.500.000.000	50	1.500.000.000	55	1.500.000.000	60	1.550.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	52	1.700.000.000	57	1.700.000.000	62	1.700.000.000	67	1.700.000.000	72	1.750.000.000
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	50	800.000.000	55	820.000.000	60	844.000.000	64	878.000.000	68	920.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	55	1.100.000.000	60	1.100.000.000	64	1.100.000.000	68	1.100.000.000	72	1.100.000.000
Distrik Jila					15.450.000.000		15.835.000.000		16.229.000.000		16.633.000.000		17.047.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	40	8.500.000.000	45	8.550.000.000	50	8.600.000.000	55	8.650.000.000	60	8.700.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	38	3.000.000.000	43	3.050.000.000	48	3.100.000.000	53	3.150.000.000	58	3.200.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	52	2.050.000.000	57	2.229.000.000	62	2.399.000.000	67	2.578.000.000	72	2.870.000.000
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	42	800.000.000	47	850.000.000	52	900.000.000	57	950.000.000	62	950.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan	Program Koordinasi Ketentraman	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	48	1.100.000.000	53	1.156.000.000	58	1.230.000.000	63	1.305.000.000	68	1.327.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	tertib di wilayah distrik.	Dan Ketertiban Umum											
Distrik Mimika Tengah					15.784.000.000		16.177.000.000		16.579.000.000		16.992.000.000		17.415.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	60	8.500.000.000	65	9.000.000.000	70	9.100.000.000	75	9.200.000.000	80	9.300.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	55	5.000.000.000	60	5.000.000.000	65	5.000.000.000	70	5.100.000.000	75	5.200.000.000
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	58	1.500.000.000	63	1.177.000.000	68	1.500.000.000	73	1.500.000.000	78	1.600.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	62	784.000.000	66	1.000.000.000	70	979.000.000	74	1.192.000.000	78	1.315.000.000
Distrik Mimika Barat					14.485.000.000		14.871.000.000		15.266.000.000		15.671.000.000		16.086.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	58	10.500.000.000	62	10.600.000.000	66	10.700.000.000	70	10.800.000.000	74	10.900.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	55	1.300.000.000	60	1.400.000.000	64	1.500.000.000	68	1.600.000.000	72	1.700.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	52	983.000.000	57	1.000.000.000	62	1.066.000.000	67	1.100.000.000	72	1.200.000.000
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	55	702.000.000	59	871.000.000	63	900.000.000	67	1.000.000.000	71	1.100.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	60	1.000.000.000	64	1.000.000.000	68	1.100.000.000	72	1.171.000.000	76	1.186.000.000
Distrik Mimika Timur					14.102.000.000		14.527.000.000		14.964.000.000		15.411.000.000		15.869.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	62	10.500.000.000	66	10.600.000.000	70	10.700.000.000	74	10.800.000.000	78	10.900.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	60	1.300.000.000	64	1.400.000.000	68	1.500.000.000	72	1.600.000.000	76	1.700.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	penyelenggaraan pemerintahan												
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	55	600.000.000	60	700.000.000	65	800.000.000	70	900.000.000	75	1.000.000.000
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	60	702.000.000	65	827.000.000	69	864.000.000	73	964.000.000	77	1.000.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	64	1.000.000.000	68	1.000.000.000	72	1.100.000.000	76	1.147.000.000	80	1.269.000.000
Distrik Agimuga					14.690.000.000		15.080.000.000		15.481.000.000		15.891.000.000		16.312.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	42	8.000.000.000	47	8.100.000.000	52	8.200.000.000	57	8.300.000.000	62	8.400.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	40	1.300.000.000	45	1.400.000.000	50	1.500.000.000	55	1.600.000.000	60	1.700.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	38	2.500.000.000	43	2.600.000.000	48	2.700.000.000	53	2.800.000.000	58	2.900.000.000
07.01.04	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	45	1.290.000.000	50	1.290.000.000	55	1.291.000.000	60	1.391.000.000	65	1.462.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	48	1.600.000.000	52	1.690.000.000	56	1.790.000.000	60	1.800.000.000	64	1.850.000.000
Distrik Mimika Baru					47.740.000.000		49.177.000.000		50.650.000.000		52.160.000.000		53.708.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	80	30.000.000.000	83	30.500.000.000	86	31.000.000.000	89	31.500.000.000	92	32.000.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	78	2.800.000.000	81	2.900.000.000	84	3.000.000.000	87	3.100.000.000	90	3.200.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	60	9.500.000.000	65	10.000.000.000	70	10.500.000.000	75	11.000.000.000	80	11.508.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	75	2.300.000.000	78	2.400.000.000	81	2.600.000.000	84	2.800.000.000	87	3.000.000.000
07.01.06	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan kampung	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kampung yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	70	1.570.000.000	74	1.697.000.000	78	1.797.000.000	82	1.897.000.000	86	2.000.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	78	1.570.000.000	82	1.680.000.000	85	1.753.000.000	88	1.863.000.000	91	2.000.000.000
Distrik Mimika Timur Jauh					14.657.000.000		15.022.000.000		15.396.000.000		15.779.000.000		16.172.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	45	8.550.000.000	50	8.650.000.000	55	8.750.000.000	60	8.850.000.000	65	8.950.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	42	1.550.000.000	47	1.650.000.000	52	1.750.000.000	57	1.850.000.000	62	1.950.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	40	1.750.000.000	45	1.800.000.000	50	1.850.000.000	55	1.900.000.000	60	1.950.000.000
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	48	1.307.000.000	52	1.357.000.000	56	1.446.000.000	60	1.546.000.000	64	1.646.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	50	1.500.000.000	55	1.565.000.000	60	1.600.000.000	65	1.633.000.000	70	1.676.000.000
Distrik Mimika Barat Tengah					15.982.000.000		16.379.000.000		16.787.000.000		17.205.000.000		17.633.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	55	9.550.000.000	60	9.600.000.000	65	9.700.000.000	70	9.800.000.000	75	9.900.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	52	1.750.000.000	57	1.800.000.000	62	1.900.000.000	67	1.950.000.000	72	2.000.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	50	1.750.000.000	55	1.800.000.000	60	1.900.000.000	65	1.950.000.000	70	2.000.000.000
07.01.04	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	53	1.432.000.000	58	1.579.000.000	63	1.679.000.000	68	1.779.000.000	73	1.900.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	koordinasi pemerintahan	Pemerintahan Umum											
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	58	1.500.000.000	62	1.600.000.000	66	1.608.000.000	70	1.726.000.000	74	1.833.000.000
Distrik Mimika Barat Jauh					15.223.000.000		15.602.000.000		15.990.000.000		16.389.000.000		16.797.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	42	8.500.000.000	46	8.600.000.000	50	8.700.000.000	54	8.800.000.000	58	8.950.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	40	1.000.000.000	44	1.100.000.000	48	1.200.000.000	52	1.300.000.000	56	1.400.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	38	1.523.000.000	42	1.573.000.000	46	1.653.000.000	50	1.753.000.000	54	1.853.000.000
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	44	1.000.000.000	48	1.050.000.000	52	1.100.000.000	56	1.200.000.000	60	1.258.000.000
07.01.08	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan kampung	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kampung yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	40	1.900.000.000	45	1.929.000.000	50	1.962.000.000	55	1.961.000.000	60	1.961.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	48	1.300.000.000	52	1.350.000.000	56	1.375.000.000	60	1.375.000.000	64	1.375.000.000
Distrik Kwamki Narama					17.494.000.000		17.929.000.000		18.376.000.000		18.833.000.000		19.302.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	60	8.500.000.000	64	8.600.000.000	68	8.700.000.000	72	8.800.000.000	76	8.900.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	58	5.000.000.000	62	5.200.000.000	66	5.300.000.000	70	5.450.000.000	74	5.550.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	55	1.994.000.000	60	2.000.000.000	65	2.200.000.000	70	2.350.000.000	75	2.550.000.000
07.01.04	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	60	1.000.000.000	64	1.050.000.000	68	1.097.000.000	72	1.110.000.000	76	1.152.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
07.01.0 4	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	62	1.000.000.000	66	1.079.000.000	70	1.079.000.000	74	1.123.000.000	78	1.150.000.000
Distrik Amar					13.704.000.000		14.045.000.000		14.395.000.000		14.753.000.000		15.121.000.000
07.01.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	42	5.200.000.000	46	5.300.000.000	50	5.400.000.000	54	5.450.000.000	58	5.550.000.000
07.01.0 2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	40	1.304.000.000	44	1.404.000.000	48	1.504.000.000	52	1.554.000.000	56	1.654.000.000
07.01.0 3	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	72	4.500.000.000	76	4.600.000.000	80	4.700.000.000	84	4.849.000.000	88	4.900.000.000
07.01.0 5	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	78	900.000.000	81	941.000.000	84	991.000.000	87	1.000.000.000	90	1.050.000.000
07.01.0 6	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan kampung	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kampung yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	60	900.000.000	65	900.000.000	70	900.000.000	75	950.000.000	80	1.000.000.000
07.01.0 4	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	46	900.000.000	50	900.000.000	54	900.000.000	58	950.000.000	62	967.000.000
Distrik Alama					14.344.000.000		14.701.000.000		15.067.000.000		15.442.000.000		15.827.000.000
07.01.0 1	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	40	6.700.000.000	45	6.800.000.000	50	6.900.000.000	55	7.000.000.000	60	7.100.000.000
07.01.0 2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	59	900.000.000	63	950.000.000	67	1.000.000.000	71	1.050.000.000	75	1.100.000.000
07.01.0 3	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	72	3.850.000.000	76	3.900.000.000	80	3.950.000.000	84	4.000.000.000	88	4.100.000.000
07.01.0 4	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	45	994.000.000	50	1.050.000.000	55	1.100.000.000	60	1.150.000.000	65	1.250.000.000
07.01.0 5	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase kampung yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	43	1.000.000.000	48	1.051.000.000	53	1.117.000.000	58	1.157.000.000	63	1.177.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	pemerintahan kampung	Pemerintahan Desa											
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	47	900.000.000	52	950.000.000	57	1.000.000.000	62	1.085.000.000	67	1.100.000.000
Distrik Wania					24.092.000.000		24.692.000.000		25.306.000.000		25.936.000.000		26.582.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	85	10.500.000.000	88	10.500.000.000	91	10.700.000.000	94	10.822.000.000	97	10.950.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	83	6.000.000.000	86	6.300.000.000	89	6.500.000.000	92	6.700.000.000	95	6.900.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	72	5.000.000.000	76	5.214.000.000	80	5.314.000.000	84	5.514.000.000	88	5.737.000.000
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	78	592.000.000	81	600.000.000	84	620.000.000	87	650.000.000	90	670.000.000
07.01.06	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan kampung	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kampung yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	60	1.100.000.000	65	1.178.000.000	70	1.272.000.000	75	1.300.000.000	80	1.350.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	64	900.000.000	68	900.000.000	72	900.000.000	76	950.000.000	80	975.000.000
Distrik Iwaka					15.935.000.000		16.332.000.000		16.738.000.000		17.155.000.000		17.582.000.000
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	62	7.191.100.000	66	7.295.250.000	70	7.578.760.000	74	7.577.050.000	78	7.647.900.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	59	3.893.900.000	63	4.100.000.000	67	4.100.000.000	71	4.310.000.000	75	4.420.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	57	3.400.000.000	62	3.276.750.000	67	3.300.000.000	72	3.300.000.000	77	3.400.000.000
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	59	350.000.000	63	450.000.000	67	500.000.000	71	600.000.000	75	700.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
07.01.06	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan kampung	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kampung yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	60	200.000.000	65	310.000.000	70	359.240.000	75	467.950.000	80	514.100.000
07.01.04	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	64	900.000.000	68	900.000.000	72	900.000.000	76	900.000.000	80	900.000.000
Distrik Hoya					13.033.998.764		13.259.999.582		13.410.999.677		13.705.996.762		13.824.996.930
07.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	40	5.659.000.000	44	5.800.000.000	48	5.845.000.000	52	5.993.000.000	56	6.044.000.000
07.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (%)	38	2.218.000.000	42	2.218.000.000	46	2.218.000.000	50	2.218.000.000	54	2.218.000.000
07.01.03	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa (BUMKam, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda) yang aktif menjalankan kegiatan	57	3.477.998.764	62	3.520.999.582	67	3.584.999.677	72	3.687.996.762	77	3.709.996.930
07.01.05	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, serta koordinasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik	42	600.000.000	46	615.000.000	50	630.000.000	54	645.000.000	58	662.000.000
07.01.04	Meningkatnya kondisi aman dan tertib di wilayah distrik.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani.	44	1.079.000.000	48	1.106.000.000	52	1.133.000.000	56	1.162.000.000	60	1.191.000.000
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik					72.125.000.500		73.920.000.000		75.761.000.000		77.647.000.000		79.582.000.000
08.01.01	Meningkatnya dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan & kinerja yang disampaikan tepat waktu (%)	100	17.185.000.500	100	17.613.000.000	100	18.051.000.000	100	18.501.000.000	100	18.962.000.000
08.01.02	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	65	6.700.000.000	70	6.867.000.000	75	7.038.000.000	80	7.213.000.000	85	7.393.000.000
08.01.03	Meningkatnya etika dan budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	60	11.140.000.000	65	11.417.000.000	70	11.702.000.000	75	11.993.000.000	80	12.292.000.000
08.01.04	Meningkatnya ketertiban	Program Pemberdayaan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	55	33.500.000.000	60	34.334.000.000	65	35.189.000.000	70	36.065.000.000	75	36.963.000.000

Kode	Outcome	Program	Indikator	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	organisasi kemasyarakatan	Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											
08.01.05	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	60	1.100.000.000	65	1.127.000.000	70	1.155.000.000	75	1.184.000.000	80	1.214.000.000
08.01.06	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	70	2.500.000.000	75	2.562.000.000	80	2.626.000.000	85	2.691.000.000	90	2.758.000.000

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada subbab ini memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada. Tabel Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 68 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mimika 2025-2030

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,515	78,18	78,845	79,51	80,175	80,84	
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen (%)	70,215	70,49	70,765	71,04	71,315	71,59	
3	Persentase industri kreatif terhadap PDRB	Persen (%)	1,89	2,01	2,13	2,25	2,37	2,49	
4	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen (%)	19,8	20,574	21,348	22,122	22,896	23,67	
5	Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	68,88	71,10	73,33	75,55	77,78	80	
6	Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan	Persen (%)	66	68	70	72	74	76	
7	Tingkat kepatuhan aparatur terhadap standar operasional prosedur (SOP)	Persen (%)	58	61	64	67	70	73	
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	40,79	44,84	48,89	52,94	56,99	61	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase Unit Layanan yang Memiliki dan Menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Persen (%)	70	80	90	100	100	100	
10	SAKIP	Nilai	58,35 (CC)	60,72 (B)	63,09 (B)	65,46 (B)	67,83 (B)	70,2 (BB)	
11	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
12	Cakupan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM (%)	Persen (%)	35	37,21	39,42	41,63	43,84	45,5	
13	Peringkat Indeks Inovasi Daerah	Angka	394	371	348	325	302	279	
14	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	5,7	5,76	5,82	5,88	5,94	6	
15	Indeks ekonomi Hijau	Indeks	77,87	78,44	79,02	79,59	80,17	80,74	
16	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Rp (Juta)	95.194.934,70	99.859.486,50	104.802.531,10	110.042.657,70	115.599.811,90	121.495.402,30	
17	Kontribusi sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian terhadap total PDRB	Persen (%)	1,45	1,85	2,24	2,64	3,03	3,43	
18	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non	Persen (%)	0,28	0,336	0,392	0,448	0,504	0,56	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pertanian (% total penduduk)								
19	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (% total penduduk)	Persen (%)	0,11	0,136	0,162	0,188	0,214	0,24	
20	PDRB per kapita	Rupiah/orang/tahun (Juta)	467.980	490.911	515.211	540.971	568.290	597.273	
21	SPBE	Indeks	2	2,40	2,80	3,20	3,60	4	
22	Indeks Transformasi Digital	Indeks	28	29,56	31,13	32,69	34,26	35,82	
23	Persentase pemenuhan fasilitas pendukung Smart City (%)	Persen (%)	40,94	42,99	45,04	47,08	49,13	51,18	
24	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks	61	63	65	67	69	71	
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,49 (C)	76,82 (B)	78,15 (B)	79,48 (B)	80,81 (B)	82,14 (B)	
26	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,79 (C)	2,93 (C)	3,08 (B)	3,22 (B)	3,37 (B)	3,51 (B)	
27	Tingkat Kepercayaan Publik	Nilai	60	64	68	72	76	80	
28	Indeks Kesehatan	Indeks	82,17	82,63	83,1	83,57	84,03	84,5	
29	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	Persen (%)	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,3	74,58	74,86	75,14	75,42	75,7	
31	Persentase PMKS yang tertangani	Persen (%)	45	50	55	60	65	70	
32	Indeks Konektivitas	Indeks	0,4	0,44	0,48	0,52	0,56	0,6	
33	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	56	57	58	59	60	61	
34	Presentase jalan dalam kondisi mantap (%)	Persen (%)	37,53	39,23	40,93	42,64	44,34	46,04	
35	Cakupan kampung yang berlistrik (%)	Persen (%)	55,41	56,28	57,15	58,03	58,90	59,77	
36	Persentase kepemilikan rumah layak huni (%)	Persen (%)	74,2	74,72	75,25	75,77	76,30	76,82	
37	Indeks Pembangunan Masyarakat	Indeks	3	3,052	3,104	3,156	3,208	3,26	
38	Indeks Pembangunan hukum	Indeks	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	0,32	
39	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Persen (%)	40,94	42,99	45,04	47,08	49,13	51,18	
40	Indeks Pendidikan	Indeks	75,3	76,2	77	77,9	78,8	79,7	
41	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
42	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,2	14,28	14,36	14,44	14,52	14,6	
43	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	4,85	4,9	4,95	5	5,05	5,1	
44	Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio	2,26	2,312	2,364	2,416	2,468	2,52	
45	Indeks Gini	Indeks	0,32	0,317	0,313	0,31	0,306	0,303	
46	Indeks Ketimpangan Wilayah Williamson (indeks)	Indeks	1,5	1,386	1,272	1,158	1,044	0,93	
47	Proporsi Kota Timika terhadap PDRB Provinsi Papua Tengah (%)	Persen (%)	5,12	5,536	5,952	6,368	6,784	7,2	
48	Tingkat Inflasi (%)	Persen (%)	4,27	4,134	3,998	3,862	3,726	3,59	
49	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp miliar)	SBM/Rp miliar	83,12	81,818	80,516	79,214	77,912	76,61	
50	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	13,466	12,752	12,038	11,324	10,61	9,896	
51	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	6,425	6,15	5,875	5,6	5,325	5,05	

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Jika IKU menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka IKD menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. IKD mencakup lima aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, serta aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan mencakup kelima aspek tersebut, IKD memberikan gambaran utuh tentang kondisi pembangunan daerah sekaligus menjadi alat evaluasi dan pengendalian pembangunan yang berkesinambungan dari tahun 2025 hingga 2030, serta menjadi pijakan bagi periode kepemimpinan berikutnya. Tabel Indikator Kinerja Daerah disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 69 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Mimika 2025-2030

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Aspek Geografi dan Demografi								
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	37,53	39,23	40,93	42,64	44,34	46,04	
2	Cakupan kampung berlistrik	%	55,41	56,28	57,15	58,03	58,9	59,77	
3	Persentase kepemilikan rumah layak huni	%	74,2	74,72	75,25	75,77	76,3	76,82	
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,515	78,18	78,845	79,51	80,175	80,84	
5	Indeks Kesehatan	Indeks	82,17	82,63	83,1	83,57	84,03	84,5	
6	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	%	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,3	74,58	74,86	75,14	75,42	75,7	
8	Persentase PMKS yang tertangani	%	45	50	55	60	65	70	
9	Indeks Pendidikan	Indeks	75,3	76,2	77	77,9	78,8	79,7	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,2	14,28	14,36	14,44	14,52	14,6	
12	Tingkat Kemiskinan	%	13,466	12,752	12,038	11,324	10,61	9,896	
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,425	6,15	5,875	5,6	5,325	5,05	
	Aspek Daya Saing Daerah								
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,215	70,49	70,765	71,04	71,315	71,59	
15	Persentase industri kreatif terhadap PDRB	%	1,89	2,01	2,13	2,25	2,37	2,49	
16	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	19,8	20,574	21,348	22,122	22,896	23,67	
17	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	5,7	5,76	5,82	5,88	5,94	6	
18	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	77,87	78,44	79,02	79,59	80,17	80,74	
19	PDRB ADHK	Rp Juta	95.194.934,70	99.859.486,50	104.802.531,10	110.042.657,70	115.599.811,90	121.495.402,30	
20	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,45	1,85	2,24	2,64	3,03	3,43	
21	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (% penduduk)	%	0,28	0,336	0,392	0,448	0,504	0,56	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (% penduduk)	%	0,11	0,136	0,162	0,188	0,214	0,24	
23	PDRB per kapita	Rp/orang /tahun	467.980	490.911	515.211	540.971	568.290	597.273	
24	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,85	4,9	4,95	5	5,05	5,1	
25	ICOR	Rasio	2,26	2,312	2,364	2,416	2,468	2,52	
26	Indeks Gini	Indeks	0,32	0,317	0,313	0,31	0,306	0,303	
27	Indeks Ketimpangan Wilayah Williamson	Indeks	1,5	1,386	1,272	1,158	1,044	0,93	
28	Proporsi Kota Timika terhadap PDRB Provinsi	%	5,12	5,536	5,952	6,368	6,784	7,2	
29	Tingkat Inflasi	%	4,27	4,134	3,998	3,862	3,726	3,59	
30	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Miliar	83,12	81,818	80,516	79,214	77,912	76,61	
Aspek Pelayanan Umum									
31	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	40,79	44,84	48,89	52,94	56,99	61	
32	SPBE	Indeks	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	
33	Persentase fasilitas pendukung Smart City	%	40,94	42,99	45,04	47,08	49,13	51,18	
34	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks	61	63	65	67	69	71	
35	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,49 (C)	76,82 (B)	78,15 (B)	79,48 (B)	80,81 (B)	82,14 (B)	
36	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,79 (C)	2,93 (C)	3,08 (B)	3,22 (B)	3,37 (B)	3,51 (B)	
37	Indeks Konektivitas	Indeks	0,4	0,44	0,48	0,52	0,56	0,6	
38	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	56	57	58	59	60	61	
39	Indeks Pembangunan Masyarakat	Indeks	3	3,052	3,104	3,156	3,208	3,26	
40	Proporsi penduduk merasa aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	40,94	42,99	45,04	47,08	49,13	51,18	
Standar Pelayanan Minimal (SPM)									
Urusan Pendidikan									
41	APK PAUD	Persen (%)	55,23	62,44	69,64	76,85	84,05	91,25	
42	APK SD/MI	Persen (%)	98,20	98,35	98,57	98,89	99,38	100	
43	APK SMP/MTs	Persen (%)	75,49	79,33	85,18	88,02	90,87	93,72	
44	APK SMA/SMK	Persen (%)	62,63	65,80	68,97	70,14	75,31	80,48	
45	APM PAUD	Persen (%)	55,56	60,61	65,66	70,71	75,77	80,84	
46	APM SD/MI	Persen (%)	85,26	87,01	89,76	91,51	94,27	96,02	
47	APM SMP/MTs	Persen (%)	44,97	49,06	53,14	57,23	61,32	65,41	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
48	APM SMA/SMK	Persen (%)	38,12	41,58	45,05	48,51	51,98	55,46	
49	APS PAUD	Persen (%)	58,22	65,82	73,41	81,01	88,60	96,2	
50	APS SD/MI	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	
51	APS SMP/MTs	Persen (%)	75,49	85,33	95,18	105,02	114,87	115,87	
52	APS SMA/SMK	Persen (%)	62,63	70,80	78,97	87,14	95,31	100	
53	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen (%)	112,69	112,92	113,14	113,37	113,59	113,81	
54	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen (%)	114,45	114,68	114,91	115,13	115,36	115,59	
55	Prosentase Angka Putus Sekolah PAUD/TK	Persen (%)	0	0	0	0	0	0	
56	Prosentase Angka Putus Sekolah SD	Persen (%)	1,06	1,04	1,02	0,99	0,97	0,95	
57	Prosentase Angka Putus Sekolah SMP	Persen (%)	0,56	0,55	0,54	0,52	0,51	0,5	
58	Prosentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Persen (%)	0,67	0,65	0,64	0,63	0,61	0,6	
59	Angka Kelulusan SD/MI	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	
60	Angka Kelulusan SMP/MTS	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	
61	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	
62	Persentase Sekolah dalam kondisi Baik PAUD/TK	Persen (%)	78,65	79,43	80,21	80,98	81,76	82,55	
63	Persentase Sekolah dalam kondisi Baik SD	Persen (%)	98,02	98,21	98,41	98,60	98,8	99	
64	Persentase Sekolah dalam kondisi Baik SMP	Persen (%)	98,50	98,97	99,27	99,78	100	100	
65	Persentase Sekolah dalam kondisi Baik SMA/SMK	Persen (%)	74,03	77,55	81,08	84,60	88,13	91,65	
66	Presentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprass PAUD/TK	Persen (%)	9,84	11,13	12,41	13,70	14,98	16,25	
67	Presentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprass SD	Persen (%)	3,84	4,34	4,84	5,34	5,85	6,35	
68	Presentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprass SMP	Persen (%)	10,9	12,32	13,75	15,17	16,59	18,01	
69	Presentase Sekolah yang Memenuhi Standar Saprass SMA/SMK	Persen (%)	74,03	77,56	81,08	84,61	88,14	91,67	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
70	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi A	Persen (%)	3,88	4,24	4,59	4,94	5.30	5,67	
71	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi B	Persen (%)	42,82	46,72	50,61	54.50	58.40	62,3	
72	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi C	Persen (%)	32,12	35,04	37,96	40,88	43.80	46,72	
73	Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi A	Persen (%)	23,11	25,21	27,31	29,41	31,52	33,62	
74	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi B	Persen (%)	18,33	19,99	21,66	23,32	24,99	26,67	
75	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi C	Persen (%)	15,94	17,39	18,84	20,29	21,74	23,19	
76	Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi A	Persen (%)	34,1	37,2	40,3	43,4	46,5	49,6	
77	Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi B	Persen (%)	26,54	28,96	31,37	33,78	36,2	38,63	
78	Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi C	Persen (%)	20,86	22,75	24,65	26,54	28,44	30,34	
79	Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK Terakreditasi A	Persen (%)	33,46	36,5	39,55	42,59	45,63	42,59	
80	Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK Terakreditasi B	Persen (%)	31,43	34,28	37,14	40	42,86	45,72	
81	Persentase Satuan Pendidikan SMA/SMK Terakreditasi C	Persen (%)	28,81	31,43	34,05	36,67	39,29	41,91	
82	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen (%)	71,92	75	75,5	80	82	85	
83	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen (%)	39,37	40,12	43,35	50	55	60	
84	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen (%)	93,94	95,45	96,5	98,78	100	100	
85	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi	Persen (%)	27,44	30,5	35	36,3	40,5	41,8	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dalam pendidikan kesetaraan (APS)								
86	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Persen (%)	82,36	85,5	87,96	90,2	95	97,24	
87	Iklim keamanan SD	Skor	58,86	60	60,45	63,2	64,28	65,36	
88	Iklim keamanan SMP	Skor	65,56	66	67,23	68	69,3	70,07	
89	Iklim keamanan SMA	Skor	68,12	69	69,5	70,25	70,52	70,79	
90	Iklim keamanan SMK	Skor	60,47	61,85	62	62,35	62,5	62,65	
91	Iklim kebhinekaan SD	Skor	65,78	65,9	66	66,35	68	67,65	
92	Iklim kebinekaan SMP	Skor	68,71	70	72,5	72,85	73	73,15	
93	Iklim kebinekaan SMA	Skor	70,93	71	71,65	72,3	72,59	72,88	
94	Iklim kebinekaan SMK	Skor	66,95	67	67,29	67,85	67,98	68,11	
95	Iklim inklusivitas SD	Skor	53,07	53,75	54,75	55	55,3	55,6	
96	Iklim inklusivitas SMP	Skor	54,71	55	55,65	56	58	60	
97	Iklim inklusivitas SMA	Skor	56,4	57,36	58,36	59,63	60	61,27	
98	Iklim inklusivitas SMK	Skor	51	53	54	56	57	58	
99	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	51,14	55,6	59,6	60	60,12	60,24	
100	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Skor	47,6	50,15	55	55,6	65,7	66,3	
101	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	62,93	65	65,3	68,85	70,35	71,85	
102	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	61,53	63,3	65,13	67	68	70	
103	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	41,03	45	50,2	55	60	65	
104	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	38,78	43,25	45	48,5	50	51,5	
105	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	57,4	58,9	59	60,27	60,3	61,57	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
106	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	55,39	58,3	60,19	63	65	67	
107	Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid PAUD/TK	Rasio	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	
108	Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid SD	Rasio	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	
109	Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid SMP	Rasio	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	
110	Rasio Jumlah Kelas terhadap Jumlah Murid SMA/SMK	Rasio	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	
111	Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa PAUD/TK	Rasio	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	
112	Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa SD	Rasio	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	
113	Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa SMP	Rasio	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	
114	Rasio Jumlah Guru dengan Jumlah Siswa SMA/SMK	Rasio	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	
115	Guru Berkualifikasi PAUD	Persen (%)	70,58	70,72	70,86	71	71,14	71,28	
116	Guru Berkualifikasi SD	Persen (%)	72,52	72,67	72,81	72,96	73,1	73,23	
117	Guru Berkualifikasi SMP	Persen (%)	99,7	99,8	100	100	100	100	
118	Guru Berkualifikasi SMA/SMK	Persen (%)	97,77	98,84	100	100	100	100	
119	Guru Tersertifikasi PAUD	Persen (%)	12,1	13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	
120	Guru Tersertifikasi SD	Persen (%)	22,68	24,74	26,81	28,87	30,93	32,99	
121	Guru Tersertifikasi SMP	Persen (%)	26,85	29,29	31,73	34,17	36,62	39,08	
122	Guru Tersertifikasi SMA/SMK	Persen (%)	20,58	22,45	24,32	26,19	28,07	29,96	
123	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persen (%)	74,02	80	85,3	90,5	95	100	
Urusan Kesehatan									
124	Usia Harapan Hidup	Usia	74,3	74,58	74,86	75,14	75,42	75,7	
125	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Anak per perempuan	2,55	2,5	2,45	2,4	2,35	2,3	
126	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	215	200	185	170	155	140	
127	Jumlah Kematian Balita	Jiwa	42	39	36	33	30	27	
128	Prevalensi Stunting	Persen (%)	28	26	24	22	20	18	
129	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen (%)	63	66	74	82	90	95	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
130	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen (%)	78	81	84	87	90	93	
131	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen (%)	83	86	89	92	94	96	
132	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Persen (%)	86	87	88	89	90	91	
133	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen (%)	42	49	56	63	70	75	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
134	Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses SPAM	Persen (%)	61	67	73	79	85	90	
135	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Human dengan Akses SPALD (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen (%)	33	41	49	57	65	70	
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
136	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen (%)	52	64	76	84	92	100	
137	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan atau direhabilitasi	Persen (%)	52	59	66	73	80	85	
	Urusan Ketentraman, dan Ketertiban Umum								
138	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen (%)	68	76	84	90	95	100	
139	Persentase Penyelenggaraan Tibumiranmas	Persen (%)	58	66	74	82	90	95	
140	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	Persen (%)	44	53	62	71	80	85	
141	Persentase penduduk yang mendapatkan	Persen (%)	35	45	55	65	75	80	

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	edukasi/simulasi kesiapsiagaan bencana								
142	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen (%)	74	78	82	86	90	95	
143	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen (%)	66	72	78	84	90	95	
144	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen (%)	70	75	80	85	90	95	
	Urusan Sosial								
145	Persentase keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang mengakses layanan sosial produktif	Persen (%)	38	46	54	62	70	75	
146	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAFZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen (%)	48	56	64	72	80	85	
147	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen (%)	18	26	34	42	50	55	
148	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen (%)	70	76	82	88	94	95	

BAB V PENUTUP

RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 bukan semata hasil pemikiran praktis, melainkan merupakan buah dari penyelarasan antara analisis teknokratis dengan prinsip-prinsip teoretis pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan teknokrasi, yang menekankan penggunaan keahlian, data, dan analisis ilmiah dalam setiap proses pengambilan keputusan, menjadi fondasi utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Sementara itu, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi pedoman agar setiap langkah pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan generasi yang akan datang.

Dalam konteks tersebut, RPJMD Kabupaten Mimika harus senantiasa selaras dan bersinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik RPJPD Kabupaten Mimika maupun RPJMD Provinsi Papua Tengah yang saat ini tengah disusun secara bersamaan. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan yang terintegrasi antarlevel pemerintahan. Kolaborasi erat antara pemerintah kabupaten, provinsi, serta dukungan dari pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat efektivitas pembangunan dan menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan wilayah.

Lebih jauh, RPJMD Kabupaten Mimika juga dirancang dengan prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang dinamis menuntut adanya ruang untuk penyesuaian dalam implementasi program dan kebijakan. Untuk itu, mekanisme evaluasi dan pengendalian pembangunan secara berkala akan menjadi instrumen penting dalam memastikan RPJMD tetap relevan, responsif, dan efektif menjawab tantangan serta kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, terukur,

partisipatif, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Mimika secara menyeluruh.